



UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih
Berdasarkan Kelembagaan Lokal**

(Studi Deskriptif Paguyuban Tirta Mandiri Desa Dadapan Kabupaten
Lumajang, Propinsi Jawa Timur)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kesejahteraan Sosial (M.Kesos)**

**DIDIT SUSIYANTO
1006744036**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN OTONOMI LOKAL
DEPOK
DESEMBER 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

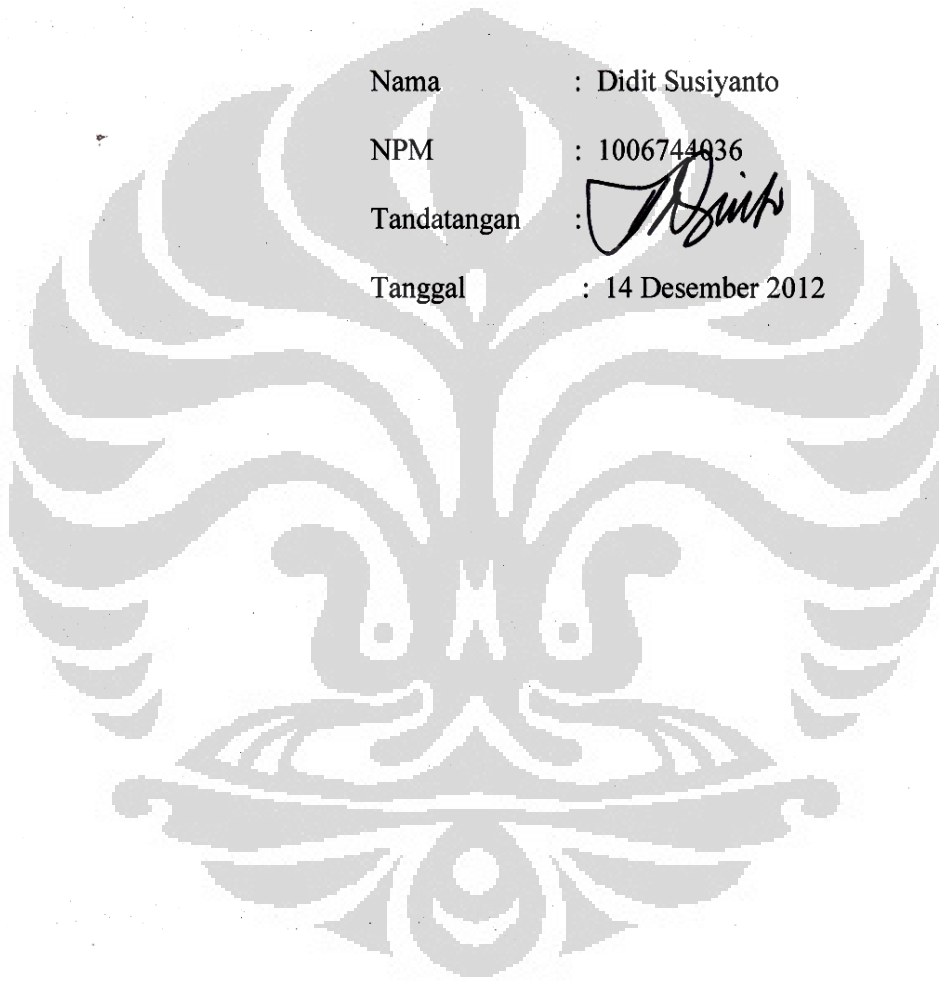
Nama : Didit Susiyanto

NPM : 1006744036

Tandatangan :



Tanggal : 14 Desember 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Didit Susiyanto
NPM : 1006744036
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal (Studi Deskriptif Paguyuban Tirta Mandiri, Desa Dadapan, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kesos) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Agung Pramono Priyo Wibowo, MA (.....)

Penguji : Rissalwan Habdy Lubis, S.Sos, M.Si (.....)

Penguji : Bagus Aryo, Ph.D (.....)

Penguji : Arif Wibowo S.Sos, M.Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Desember 2012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala, atas berkat, rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kesos) Program Kekhususan Pembangunan Sosial dan Otonomi Lokal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Tema yang diangkat pada penulisan tesis ini berkaitan dengan Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal (Studi Deskriptif Paguyuban Tirta Mandiri Desa Dadapan, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur) yang memfokuskan pada potensi lokal di masyarakat khususnya pada kelembagaan pengelola air bersih melalui proses pengembangan masyarakat sehingga terjadi partisipasi yang aktif di kegiatan kelembagaan.

Pada penyusunan tesis ini tidak terlepas oleh bantuan dan kerjasama berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada **Drs. Agung Pramono Priyo Wibowo, MA** yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu sibuknya dalam memberikan bimbingan penulis secara intensif dan sabar sehingga dapat membantu pengembangan kajian kelembagaan lokal pada penulisan tesis ini. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Kasdono, Ibu Sugianti, Kakek dan Nenekku yang tersayang (Alm) Darji dan (Alm) Latri, serta Adek-adekku yang membanggakan Nanta Sigit Ardiansyah dan Aj Rina Nurmalita yang telah membantu dan mendukung secara moral dan material sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Dan juga senantiasa mendoakan penulis sehingga bisa menggapai cita-cita untuk melanjutkan studi di Universitas Indonesia.
2. Bapak Bagus Aryo, Ph.D dan Arif Wibowo, S.Sos, M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

belajar dan mendalami kajian bidang otonomi dan pembangunan lokal di program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial.

3. Seluruh staf pengajar program pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama diperkuliahan sehingga penulis dapat mengerti dan memahami kajian bidang kesejahteraan sosial secara komperhensif. Dan juga staf Kesekretariatan Magister Kesejahteraan Sosial yang telah membantu kelancaran adminstrasi dan mengingatkan penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Seluruh staf *Building Professional Social Work* Indonesia yang telah memberikan kesempatan belajar dan mendukung studi penulis melalui Beasiswa BPSW di Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia.
5. Staf perpustakaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Bappenas yang banyak membantu menyediakan buku-buku untuk menujung penulisan tesis ini.
6. Ibu Indah Amperawati, M.Si selaku Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang yang banyak membantu penulis secara moral dan material sehingga bisa menyelesaikan studi dan tesis ini dengan lancar.
7. Drs. Bambang Sutowo yang banyak membantu penulis selama penelitian dilapangan dan memberikan arahan serta nasihat selama studi di Universitas Indonesia.
8. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS selaku sekretaris Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah bersedia meminjamkan buku-bukunya selama penulisan tesis ini.
9. Teman-teman kuliah angkatan tahun 2010 terutama Mas Murlan, Rustam, Thantowi, Shadeq Muttaqien, Hendri, Andre, Suyatmin, Agung Cahyanto, Didim, Slamet Sutopo, Mbak Nita, Trianita, Yuliati, Dewi Kartika, Dewi, Siska, Mery Sihotang dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah memberikan dukungan, saran dan nasihat sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir dengan baik; *especially to* Bunda Lenni Hasibuan sekeluarga dan *Peergroup*-nya (Dyah Asri Gita P, Shaomi Safitri, Tajoen Nissail H, Tisna

Surya Adi P, Mery Cristina N), atas semua bantuan moril dan materialnya selama ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Kost Pondok Duta Kober khususnya Faisal Efendi, Sholihin Ilham, Ahmad Baehaqi, Ardika Perca, Deri Arfiansyah, Aditio Dwi Laksono, Marno, Rifki Fuadi, Hasan dan Mas Fahri yang banyak memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir; *special thanks to* Ibu Fani sekeluarga yang telah memberikan bantuan selama tinggal di Kost Pondok Duta.
11. Pengurus Paguyuban Tirta Mandiri dan seluruh masyarakat Desa Dadapan yang telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk menjadi informan penulis di tesis ini; *especially to* Bapak Isro'i yang telah banyak membantu selama penulis berada di desa Dadapan. Dan juga staf Puskesmas Gucialit yang membantu menyediakan data pada tesis ini.
12. Pak Dar dan keluarga yang membantu menyiapkan tempat tinggal bagi penulis selama penelitian di Lumajang.
13. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dengan banyaknya kekurangan dan keterbatasan pada diri penulis secara keilmuan dan pengetahuan membuat penelitian ini belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini sehingga bermanfaat bagi pembaca khususnya yang mendalami bidang kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih yang berkaitan dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial.

Depok, 14 Desember 2012

Penulis

Didit Susiyanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

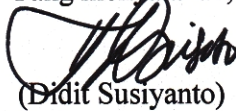
Nama : Didit Susiyanto
NPM : 1006744036
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal (Studi Deskriptif Paguyuban Tirta Mandiri Desa Dadapan, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 14 Desember 2012

Yang menyatakan,


(Didit Susiyanto)

ABSTRAK

Nama : Didit Susiyanto
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal (Studi Deskriptif Paguyuban Tirta Mandiri Desa Dadapan, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur)

Tesis ini membahas tentang Pengembangan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal yang dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri di desa Dadapan, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 23 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala desa, pengelola paguyuban Tirta Mandiri dan anggota paguyuban.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan pengelolaan air bersih yang dikelola kelembagaan lokal melalui bentuk mekanisme keorganisasian sehingga memunculkan partisipasi aktif anggota pada proses pengembangan masyarakat. Keberadaanya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengakses air bersih dan terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

Kata kunci:

Pengelolaan air bersih, kelembagaan lokal, pengembangan masyarakat.

ABSTRACT

Name : Didit Susiyanto
Study Program : Social Welfare Postgraduate Program
Department of Social Welfare Faculty of
Political and Social Sciences
Title : Community Development through Clean Water
Management based Local Institution
(Descriptive study on Paguyuban Tirta Mandiri
Dadapan village, Lumajang regency, Jawa
Timur province)

The thesis discusses about community development through clean water management based local institution done by Tirta Mandiri community in Dadapan village, Lumajang regency, Jawa Timur province. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. While collecting data using in-depth interviews with 23 informants which consists of natural leader dan head of village, managers of Tirta Mandiri and formal members.

The results of this study show that the effectiveness in water clean management by local institution through organized mechanism with the result that active participation of members in processing community development . This benefits the society in accessing clean water and nurturing local values and culture in the society.

Keywords:

Water management, local institution, community development.

DAFTAR ISI

	Halamn
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGATAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Pendekatan Penelitian.....	12
1.5.2 Jenis Penelitian	15
1.5.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
1.5.4 Teknik Pemilihan Informan.....	17
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data	22
1.5.6 Teknik Analisis Data	25
1.5.7 Teknik Keabsahan Data.....	27
1.6 Sistematika Penulisan.....	29
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1 Konsep Kelembagaan Lokal.....	31
2.1.1 Definisi Kelembagaan	31
2.1.2 Perbedaan Kelembagaan Lokal dengan Organisasi.....	39
2.1.3 Interaksi Kelembagaan Lokal dan Organisasi.....	41
2.1.4 Teori Kelembagaan Baru (<i>New Institutionalism</i>).....	46
2.1.5 Pengembangan Kelembagaan Lokal	51
2.1.6 Keuntungan Menggunakan Kelembagaan Lokal	55
2.2 Pengembangan Masyarakat	56
2.2.1 Definisi Pengembangan Masyarakat	56
2.2.2 Prinsip Pengembangan Masyarakat.....	59
2.2.3 Proses Pengembangan Masyarakat.....	60
2.2.4 Pendekatan Pengembangan Masyarakat.....	61
2.2.5 Tahapan Pengembangan Masyarakat.....	63
2.2.6 Peranan Petugas Pengembangan Masyarakat.....	67
2.2.7 Aset Komunitas dalam Pengembangan Masyarakat.....	69

2.3	Pengelolaan Sumber Daya Air	76
2.3.1	Pengelolaan Air Bersih.....	76
2.3.2	Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal.....	79
3.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	84
3.1	Kondisi Umum Desa Dadapan	84
3.1.1	Letak Geografis dan Administratif Pemerintahan	84
3.1.2	Kondisi Demografis.....	86
3.1.3	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	91
3.1.4	Kondisi Air Bersih.....	94
3.1.5	Lembaga Lokal di Desa Dadapan.....	96
3.1.6	Pengaruh Kelembagaan Bagi Kehidupan Masyarakat	100
4.	PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL.....	106
4.1	Mekanisme Pengelolaan Air Bersih Paguyuban Tirta Mandiri ...	106
4.1.1	Pilar Regulatif.....	106
4.1.2	Pilar Normatif.....	112
4.1.3	Pilar Kultural-Kognitif	114
4.2	Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih	118
4.2.1	Tahap Persiapan.....	118
4.2.2	Tahap Pengkajian	121
4.2.3	Tahap Perencanaan Kegiatan.....	123
4.2.4	Tahap Formulasi Rencana Aksi.....	129
4.2.5	Tahap Pelaksanaan	131
4.2.6	Tahap Evaluasi	140
4.2.7	Tahap Terminasi	143
4.3	Manfaat Menggunakan Paguyuban Tirta Mandiri	144
4.3.1	Manfaat Pendidikan.....	145
4.3.2	Manfaat Kesehatan	146
4.3.3	Manfaat Ekonomi	148
4.3.4	Manfaat Sosial Budaya.....	149
5.	PEMBAHASAN	152
5.1	Mekanisme Pengelolaan Air Bersih Paguyuban Tirta Mandiri..	152
5.1.1	Pilar Regulatif.....	152
5.1.2	Pilar Normatif.....	156
5.1.3	Pilar Kultural-Kognitif	158
5.2	Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih	159
5.2.1	Tahap Persiapan.....	161
5.2.2	Tahap Pengkajian	162
5.2.3	Tahap Perencanaan Kegiatan.....	163
5.2.4	Tahap Formulasi Rencana Aksi.....	164
5.2.5	Tahap Pelaksanaan	164

5.2.6 Tahap Evaluasi	169
5.2.7 Tahap Terminasi	171
5.3 Manfaat Menggunakan Paguyuban Tirta Mandiri.....	174
5.3.1 Manfaat Pendidikan	174
5.3.2 Manfaat Kesehatan	175
5.3.3 Manfaat Ekonomi	176
5.3.4 Manfaat Sosial Budaya.....	177
6. KESIMPULAN DAN SARAN	178
6.1 Kesimpulan.....	178
6.2 Saran	182
DAFTAR REFERENSI	184
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Akseibilitas Air Bersih dan Sanitasi	1
Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	17
Tabel 1.3 Kerangka Sampling	20
Tabel 2.1 Perbedaan Kelembagaan Lokal dengan Organisasi	41
Tabel 2.2 Interaksi Kelembagaan Lokal dan Organisasi.....	45
Tabel 2.3 Tiga Pilar Kelembagaan Baru	51
Tabel 3.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	86
Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	90
Tabel 3.3 Inventarisasi Jumlah Kelembagaan di Desa Dadapan.....	101
Tabel 5.1 Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih Di Paguyuban Tirta Mandiri	172

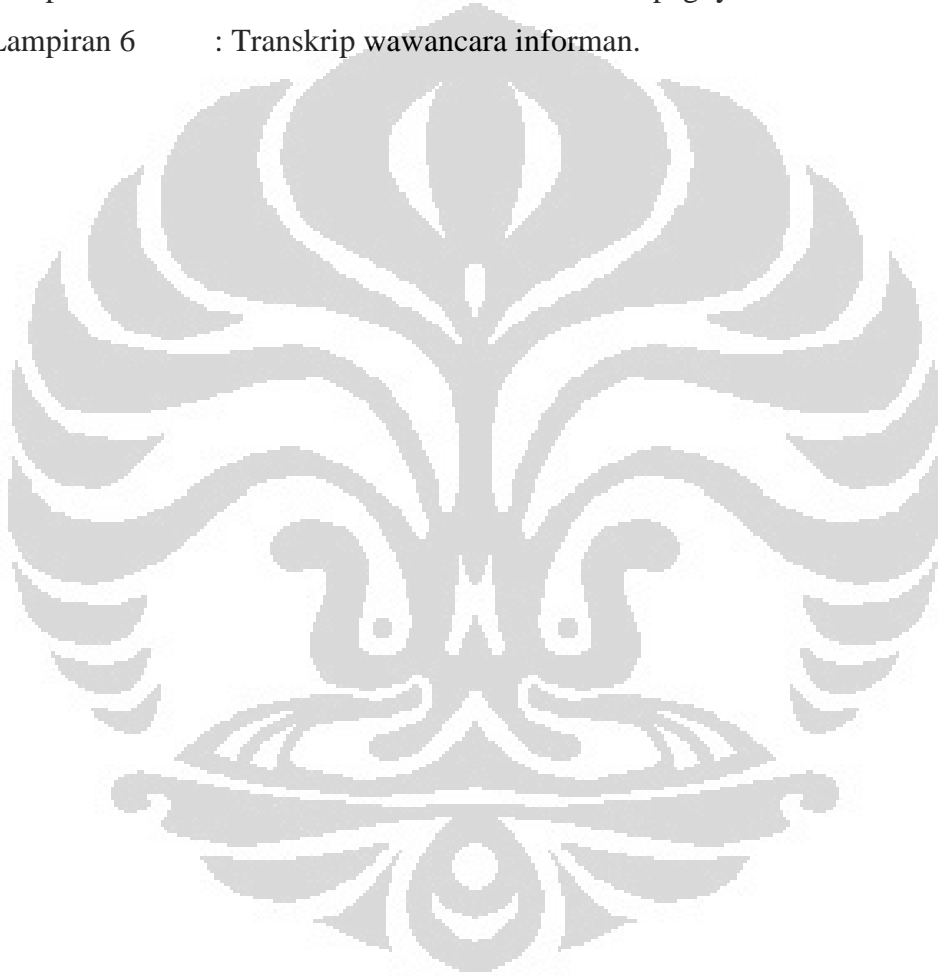


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Proses analisis data..... 26
Gambar 2.1	Skema konsep perspektif kelembagaan 38
Gambar 2.2	Tahapan model intervensi pengembangan masyarakat..... 67
Gambar 2.3	Alur pikir penelitian 83
Gambar 3.1	Kondisi geografis dan topografis desa Dadapan..... 84
Gambar 3.2	Perilaku cuci tangan pakai sabun 88
Gambar 3.3	Pengelolaan sampah sekolah..... 88
Gambar 3.4	Pekerjaan petani tebu desa Dadapan 89
Gambar 3.5	Gotong royong pembangunan masjid desa Dadapan..... 91
Gambar 3.6	Kondisi wilayah desa Dadapan yang tampak bersih dan rapi 92
Gambar 3.7	Kegiatan genduren dan tahlilan masyarakat desa Dadapan 93
Gambar 3.8	Kondisi sungai desa Dadapan 94
Gambar 3.9	Kondisi antrian air bersih di desa Dadapan..... 95
Gambar 3.10	Diagram kelembagaan (<i>Diagram Venn</i>) 104
Gambar 4.1	Kegiatan survey sumber mata air 119
Gambar 4.2	Perencanaan pembangunan hidran umum di lokasi sumber mata air Perang 124
Gambar 4.3	Perencanaan pembangunan HU di Desa Dadapan..... 125
Gambar 4.4	Model Gravitasi Sistem Sekat (Kotak Pembagi Air)..... 127
Gambar 4.5	Proses Pembangunan Hidran Umum 133
Gambar 4.6	Gotong royong penggalian pipa air bersih Tirta Mandiri ... 135
Gambar 4.7	Pemasangan pipa air bersih ke rumah anggota paguyuban. 138
Gambar 4.8	Air Bersih yang telah mengalir ke rumah masyarakat..... 139

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara.
- Lampiran 2 : Data pengguna sarana air bersih Tirta Mandiri 1 dan Tirta Mandiri 2 (Tirta Tri Tunggal).
- Lampiran 3 : Model gravitasi Sistem Sekat.
- Lampiran 4 : Peta pembangunan sarana air bersih Tirta Mandiri.
- Lampiran 5 : Hasil observasi sarana air bersih paguyuban Tirta Mandiri.
- Lampiran 6 : Transkrip wawancara informan.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses layanan air bersih dan sanitasi dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini seperti laporan Badan Pusat Statistik tahun 2009. Pada tahun 2007, rumah tangga miskin yang menikmati sarana air bersih sebesar 48,45 persen dan ditahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 53,36 persen. Sedangkan masyarakat miskin yang belum memiliki fasilitas sanitasi berupa jamban sendiri (menggunakan jamban bersama dan jamban umum) pada tahun 2007 sebesar 59,09 persen dan ditahun 2009 mengalami penurunan sebesar 58,85 persen, seperti yang tertera pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Aksebilitas Air Bersih dan Sanitasi

Karakteristik (Rumah Tangga Miskin)	Perkotaan		Perdesaan		Total (Desa+Kota)	
	2007	2009	2007	2009	2007	2009
Air Bersih	60,85	75,16	40,34	43,57	48,65	53,36
Jamban Bersama	13,71	18,09	8,92	12,53	10,86	14,26
Jamban Umum/ Tidak Ada	37,80	34,02	55,33	49,35	48,23	44,59

Sumber: Badan Pusat Statistika (2009, h. 76)

Sedangkan menurut laporan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2010. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan sebesar 47,71 persen, dengan rincian 49,82 persen di wilayah perkotaan dan 45,72 persendi wilayah perdesaan. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak sebesar 51,19 persen meliputi di wilayah perkotaan 69,51 persen dan di perdesaan sebesar 33,96 persen. (Bappenas, 2010, h. 107).

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan aksibilitas masyarakat terhadap sarana air bersih dan sanitasi setiap tahun. Meskipun terjadi peningkatan, wilayah yang mudah mendapatkan layanan tersebut masih di dominasi wilayah perkotaan. Kondisi ini menjukkanketidakterataan program pembangunan air bersih dan penyehatan lingkungan di Indonesia dan masih terfokus di daerah

perkotaan. Rendahnya akses sarana air bersih dan sanitasi pada masyarakat perdesaan mengindikasikan bahwa masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dan mengalami distorsi pembangunan dalam penyediaan kebutuhan dasar sarana air bersih dan sanitasi. Menurut Midgley (1995, h. 5), bahwa pembangunan yang terdistorsi ini terjadi pada masyarakat dimana pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan sosial.

Ketidakefektifan pembangunan air bersih dan penyehatan lingkungan di wilayah perdesaan dipengaruhi beberapa faktor antara lain seperti rusaknya infrastruktur air bersih, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perawatan sarana air bersih, belum efektifnya organisasi pengelola air bersih dan minimnya pengetahuan dan pola perilaku masyarakat yang kurang sehat seperti buang air besar sembarang tempat, menggunakan air sungai sebagai sarana MCK dan tingginya penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih dan sanitasi. Sedangkan disisi lain untuk mencapai target dari *Millenium Development Goals* (MDGs) di tahun 2015, melalui cakupan layanan air bersih harus mencapai 68,87 persen dan sanitasi dasar sebesar 62,41 persen. (Bappenas, 2010, h. 107).

Sampai saat ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai target MDGs dibidang air bersih dan sanitasi masih dilakukan melalui beberapa kebijakan diantaranya melalui (1) peningkatan cakupan pelayanan air minum; (2) peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak, dan; (3) menyediakan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi yang layak. (Bappenas, 2010, h. 112). Namun untuk dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, masih mengalami kendala dan tantangan hingga saat ini. Menurut Santono (2010, h. 2) terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya peningkatan sarana air bersih dan sanitasi dasar diantaranya: pertama, persoalan infrastruktur, meliputi persoalan bagaimana menjaga dan memperluas jaringan infrastruktur yang telah tersedia. Hal ini tentu saja terkait dengan pembiayaan infrastruktur termasuk tarif dan kecakapan penyedia layanan dalam hal efisiensi dan produktivitas layanan. Kedua, dengan memahami air bersih sebagai kebutuhan dasar persoalan sosial politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan, misalnya tarif yang terjangkau, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga adalah persoalan

lingkungan dan kesehatan publik, dimana konservasi dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyediaan layanan air. Dengan demikian, penyediaan layanan air bersih dan sanitasi yang baik sangat tergantung pada baik tidaknya kebijakan pembiayaan pembangunan, kebijakan sosial dan kebijakan sumber daya alam.

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan untuk mencapai target MDGs tahun 2015 mulai dilakukan secara terpadu. Hal ini seiring dengan disusunnya kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. Kebijakan ini sebagai payung dalam meningkatkan kesadaran pengambil keputusan (*stake holder*) dan masyarakat terkait pentingnya isu-isu air bersih dan sanitasi. Fokus pembangunan mulai ditujukan pada kegiatan berbasis masyarakat, dengan kegiatan pembangunan fisik selalu diimbangi dengan partisipasi masyarakat pada pengelolaan air bersih dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat agar terjamin keberlangsungannya. (Nu'man et al, 2008, h. 2). Implikasi dari dibuatnya program kebijakan nasional di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan, maka di skala kota kecil dan perdesaan mulai di perkenalkan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang guna meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar.

Dalam bidang air bersih, khususnya di wilayah perdesaan, pemerintah membuat kebijakan program air bersih untuk masyarakat yang berpendapatan rendah atau *Water and Sanitation for Low Income Communities II* (WSLIC-2). Menurut laporan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diperkirakan pada akhir tahun 2006 terdapat 2.000 desa yang ditargetkan menerima program sarana air bersih dan penyehatan lingkungan melalui proyek WSLIC-2. Program WSLIC-2 ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan, masyarakat dilibatkan langsung dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan sehingga masyarakat menentukan sendiri pilihan teknologi sarana yang akan dibangun. Program ini bertujuan meningkatkan status kesehatan dengan cara penyediaan air minum dan sanitasi yang aman serta berkesinambungan. Dengan harapan terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih, peningkatan kesehatan dan sanitasi

melalui pelayanan kesehatan dan perubahan perilaku, serta pengelolaan manajemen proyek. (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, 2003, h. 14).

Namun seiring dengan berjalannya program pembangunan di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan melalui program WSLIC-2 terdapat beberapa kendala dan permasalahan sehingga program ini mengalami hambatan sehingga tidak berkesinambungan. Adapun kendala yang dihadapi oleh program WSLIC-2 yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti pengelolaan program. Kedua, pembiayaan infrastruktur keuangan proyek langsung masuk ke rekening masyarakat. Ketiga, kurangnya pemahaman dari pelaksana di daerah terhadap pendekatan *demand driven* berakibat pada relatif lambatnya tanggapan masyarakat terhadap program ini. (Nu'man, Afif, et al, 2008, h. 7).

Program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan sampai saat ini mengalami permasalahan kesinambungan seperti tata kelola organisasi, perawatan sarana dan prasarana air bersih dan upaya konservasi sumber daya air. Meskipun program yang dilakukan menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat serta mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pelibatan program, namun usaha tersebut masih belum maksimal. Menurut Diesendorf and Hulminton (1997), bahwa permasalahan air bersih memiliki dimensi yang beragam tidak hanya dikaitkan dengan *instrumental value* yang dapat dinilainya sebatas produksi, konsumsi dan *supply-chain* distribusinya seperti "barang". Namun air adalah kehidupan dan sumber penghidupan, dimana setiap kehidupan memiliki *intrinsic value* sehingga air lebih dari sekedar sebagai nilai sosial, ekonomi, religius, kultural dan lingkungan. (Samin, 2011, h. 6). Sehingga keberadaan air bagi kehidupan masyarakat sangat bertali-temali dengan institusi sosial, budaya, ekonomi dan ekologis guna menompang kebutuhan masyarakat setiap hari.

Terkait penjelasan diatas, upaya pemerintah untuk meningkatkan akses air bersih di masyarakat mulai membentuk kelembagaan sebagai wadah mengelola air bersih agar masyarakat berpartisipasi aktif di lembaga. Usaha ini juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lumajang dalam membuat kebijakan penyediaan air bersih dengan membentuk organisasi pengelola guna mendorong kesinambungan program di masyarakat. Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Lumajang

tahun 2009 terdapat beberapa organisasi yang dibentuk pemerintah secara formal untuk mengelola program air bersih di masyarakat antara lain WSLIC-2, Himpunan Pengelola Air Minum (HIPPAM) dibawah koordinasi PDAM dan Himpunan Pengelola Air Bersih Kabupaten Lumajang (Tirta Lestari) yang dikoordinasi Bappeda Lumajang. Ketiga organisasi tersebut memberikan layanan air bersih di wilayah perkotaan dan perdesaan dan telah melayani penduduk 19 kecamatan di Kabupaten Lumajang. (Bappeda, 2009, h. 35).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Lumajang dengan membentuk kelembagaan air bersih bertujuan agar program air bersih di masyarakat dapat terkoordinasi oleh lembaga, meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melayani masyarakat dan menjadi wadah bernaungnya masyarakat untuk ikut terlibat aktif pada kegiatan pengelolaan air bersih. Dengan demikian program yang telah dibuat dengan difasilitasi oleh kelembagaan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lumajang bahwa sejak dibentuknya ketiga kelembagaan air bersih di tahun 2001 sampai dengan 2009 tercatat telah mencapai 978.515 jiwa atau sekitar 859.423 kepala keluarga yang sudah terlayani akses air bersih di 19 kecamatan. (Dinas Pekerjaan Umum Lumajang, 2010, h. 34).

Selain pembentukan kelembagaan air bersih oleh pemerintah kabupaten Lumajang, terdapat beberapa kelembagaan lokal yang dibentuk masyarakat secara mandiri guna mengelola air bersih di wilayah yang belum mendapatkan akses air. Menurut data Bappeda kabupaten Lumajang terdapat 25 kelembagaan lokal air bersih yang dibentuk masyarakat dan tersebar di 19 kecamatan. (Bappeda, 2009, h. 40). Kelembagaan lokal ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih di masyarakat yang belum terlayani oleh WSLIC-2, HIPPAM dan Tirta Lestari. Usaha yang telah dirintis masyarakat dengan membentuk kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih memberikan kesempatan yang besar dalam berpartisipasi pada pengelolaan air bersih dengan menggunakan sumber daya lokal sehingga memunculkan keberdayaan dan kemandirian pengelolaannya. Selain itu, proses kegiatan pengembangan masyarakat pada penyediaan air bersih yang dihimpun oleh kelembagaan lokal menjadi faktor pendorong keberlanjutan kegiatan pengelolaan air bersih melalui mekanisme kelembagaan.

Melihat pentingnya peran dan fungsi kelembagaan lokal sebagai media pengembangan masyarakat guna mengelola air bersih dengan pendekatan lokalitas masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kendala yang dihadapi pada pengelolaannya maka fenomena tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih dalam sehingga memunculkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan air bersih serta upaya mengatasi masalah yang dihadapi kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih di masyarakat.

Meskipun sudah ada penelitian yang berkaitan dengan topik kelembagaan dalam sistem pengelolaan program air bersih seperti yang dilakukan oleh Spenyel (1998) mengenai Aspek Kelembagaan Dalam Implementasi Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, dan penelitian Masduqi, Endah dan Soedjono (2008) yang meneliti Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat. Namun penelitian Spenyel hanya melihat dari aspek penguatan pelaksanaan program air bersih dengan membentuk kelembagaan air bersih dibawah koordinasi pemerintah kabupaten, agar target dan realisasi program air bersih di masyarakat dapat tercapai. Sehingga fungsi kelembagaan hanya sebatas memberikan pelayanan saja tanpa ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelembagaan pada pengelola air bersih. Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Masduqi, Endah dan Soedjono yang menunjukkan minimnya keberlanjutan pengelolaan air bersih yang dilakukan kelembagaan air bersih HIPPAM yang ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih di kelembagaan tersebut melalui kelancaran pembayaran pemakai air dan keterlibatan langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelayanan air bersih.

Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada pentingnya potensi dan nilai lokal di masyarakat khususnya pada kelembagaan dalam mekanisme pengelola air bersih melalui proses pengembangan masyarakat sehingga terjadi partisipasi yang aktif masyarakat dalam kegiatan kelembagaan. Kegiatan masyarakat di kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih yang didalamnya meliputi mekanisme pengaturan, pendistribusian, dan kebijakan terkait pengembangan sarana air bersih. Dengan adanya potensi dan nilai lokal yang terlembaga kedalam kelembagaan air bersih maka masyarakat terdorong

untuk berpartisipasi aktif mengingat masyarakat bagian dari sistem sosial di kelembagaan lokal dalam upaya untuk pengelolaan dan pengembangan sarana air bersih, sehingga memunculkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, kelembagaan lokal menciptakan kesadaran bagi anggota masyarakat sebagai upaya penanaman nilai-nilai lokal dan memanfaatkan potensi lokal dalam pengelolaan air bersih sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat. Hal ini karena air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkontribusi meningkatkan kualitas derajat kesehatan sehingga terciptanya kondisi kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya akses sarana air bersih.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal” (Studi Deskriptif Paguyuban Air Bersih Tirta Mandiri Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur).**

1.2 Pokok Permasalahan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang diatas, bahwa air bersih merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Masalah air bersih tidak hanya sebatas pencarian sumber mata air, pendistribusian dan konsumsi air saja. Dibutuhkan perencanaan dalam pemanfaatan air bersih secara bijaksana, dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis, finansial, sosial dan pertimbangan lingkungan. (Prastowo, 2008, h. 239). Sampai saat ini, upaya pengembangan air bersih telah mengarah pada usaha pendayagunaan mata air secara komersial, diantaranya industri air minum dalam kemasan, suplai air bersih untuk perkotaan dan kawasan. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan mata air secara komersial menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan di sekitar sumber mata air, menurunnya debit air, muncul konflik sosial akibat perebutan sumber mata air dan menurunnya kondisi kesehatan masyarakat akibat krisis air bersih.

Keberhasilan pemanfaatan sumber mata air dalam pengelolaannya mensyaratkan upaya konservasi ekosistem mata air melalui keserasian antara pendekatan teknik dan kemasyarakatan. Dengan keserasian ini, maka akan terjalin keharmonisan dalam pengelolaan sumber mata air sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai usaha tersebut tidaklah

mudah, karena dalam pemanfaatan air oleh masyarakat terutama di wilayah pedesaan sering menimbulkan permasalahan diantaranya adalah ketidakefektifan kelembagaan dalam mengelola air bersih. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah tidak berjalannya aktivitas masyarakat di kelembagaan, rusaknya fasilitas air bersih yang dibangun, dan rendahnya keberlanjutan kebijakan program lembaga pada pengembangan air bersih.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Lumajang dengan penyediaan air bersih melalui program WSLIC-2. Penyediaan air bersih oleh program WSLIC-2 dirasakan cukup bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM dan masyarakat yang tidak memiliki mata air bawah tanah. Seperti di daerah kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang dan Kecamatan Ranuyoso. (Dinas Pekerjaan Umum Lumajang, 2010, h. 40). Penyediaan air bersih melalui program WSLIC-2 di kabupaten Lumajang yang dilakukan sejak tahun 2001 sampai dengan akhir 2006 sudah melayani 42.155 jiwa atau sekitar 10.539 kk yang tersebar di tiga kecamatan. (Bappeda, 2009, h. 90). Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Lumajang pada wilayah yang sudah terlayani air bersih melalui program WSLIC-2 dengan membentuk kelembagaan agar proses pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dapat terjaga dan masyarakat berpartisipasi aktif di kelembagaan pada kegiatan pengelolaan air bersih sehingga terjadi keberlanjutan program di masyarakat. Namun sejak diluncurkannya program tersebut selama 5 tahun di wilayah pedesaan terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh kelembagaan program WSLIC-2.

Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang tahun 2009 mencatat bahwa terjadi ketidakefektifan kelembagaan WSLIC-2 di tiga kecamatan (Padang, Ranuyoso, dan Gucialit) yang ditunjukkan dengan tiga indikator yaitu (1) perawatan sarana dan prasarana air bersih; (2) sistem pembiayaan di tingkat masyarakat; (3) konservasi debit sumber mata air yang digunakan. Ketidakefektifan kelembagaan WSLIC-2 yang terjadi di kecamatan Padang terlihat dari belum ada konservasi sumber mata air yang menyebabkan debit air yang digunakan dengan masyarakat penerima layanan tidak seimbang.

Sehingga cakupan layanan air bersih masih terbatas karena sumber mata air yang digunakan untuk melayani masyarakat belum dikembangkan secara signifikan. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kelembagaan WSLIC-2 di kecamatan Ranuyoso yang masih terkendala pada perawatan sarana dan prasarana air bersih. Minimnya monitoring yang dilakukan oleh lembaga terhadap fasilitas yang digunakan menyebabkan terbelakang dan rusaknya fasilitas telah dibangun. Hal ini karena fasilitas WSLIC-2 yang melintasi wilayah di luar kecamatan Ranuyoso yang pada pelaksanaan pembangunannya tidak menjalin kerjasama dengan masyarakat yang daerahnya dilalui fasilitas tersebut, sehingga apabila terjadi kerusakan maka tidak ada kepedulian masyarakat yang memberikan informasi terkait permasalahan di fasilitas yang dibangun. Sedangkan di kecamatan Gucialit permasalahan yang muncul adalah sistem pembiayaan perawatan fasilitas air bersih yang masih mengalami kendala di masyarakat. Hal ini dikarenakan rasa kepedulian terhadap fasilitas air bersih cukup rendah, dan akibatnya banyak warga yang tidak membayar uang perawatan sarana yang telah digunakan di WSLIC-2. Akibatnya pengurus kelembagaan menanggung biaya perawatan dari sebagian warga yang tidak mau membayar uang perawatan. (Dinas Pekerjaan Umum Lumajang, 2010, h. 90-112).

Kondisi tersebut juga dikuatkan oleh hasil laporan penelitian World Bank tahun 2006 pada Program WSLIC-2 di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, bahwa kendala yang dihadapi pembangunan penyediaan air bersih di masyarakat melalui program WSLIC-2 diantaranya seperti mahalnya iuran pemeliharaan sarana air bersih sehingga membebani masyarakat miskin, munculnya konflik dengan desa lain yang memiliki sumber mata air dengan desa penerima program serta kurangnya motivasi bagi pengelola program di tingkat desa untuk mewujudkan kesinambungan lembaga pengelolaan air bersih. Dampak tersebut membuat masyarakat tidak percaya terhadap proyek air bersih dan sanitasi sehingga partisipasi masyarakat menjadi minim dan munculnya kerusakan infrastruktur. (World Bank, 2006, h. 124).

Terkait dengan permasalahan tersebut, upaya masyarakat untuk meningkatkan akses air bersih masih dilakukan dengan membentuk kelembagaan pengelola air bersih di lingkup desa. Salah satu kelembagaan yang mengelola air

bersih di tingkat masyarakat adalah Paguyuban Tirta Mandiri di desa Dadapan Kecamatan Gucialit. Sejak dibentuknya kelembagaan ini di tahun 2005 sampai saat ini, telah memberikan layanan air bersih di masyarakat hingga mencapai 2000 kepala keluarga. Bahkan pengelolaan air bersih yang dilakukan dapat melayani di 4 desa (Gucialit, Kalisemut, Meraan dan Krasak) yang berada di 3 Kecamatan (Gucialit, Kedungjajang, Padang) dan masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan yang dikoordinasi paguyuban Tirta Mandiri (Dinkes Lumajang, 2010, h. 7). Berjalannya pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri sampai saat ini ditunjukkan dengan masih aktifnya anggota yang ikut serta kegiatan rutin paguyuban berupa pembayaran iuran rutin air bersih, terawatnya fasilitas air bersih yang dibangun, pengembangan sumber mata air dan kegiatan konsevasi, serta dibuatnya program kebijakan paguyuban yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya air bagi masyarakat luas. Selain itu, upaya lembaga dalam mendorong masyarakat untuk terlibat pada proses kegiatan penyediaan air bersih memunculkan antusiasme yang tinggi guna mendapatkan akses air bersih. (Dinkes Lumajang, 2010, h. 39-41).

Hal ini menunjukkan kemampuan keorganisasian lembaga lokal Tirta Mandiri dalam mengelola air bersih yang memiliki pendekatan berbeda dengan kelembagaan air yang telah dibentuk pemerintah dan kelembagaan lokal lainnya yang berada di kabupaten Lumajang. Selama ini organisasi air bersih yang telah dibentuk pemerintah mengalami permasalahan dalam kesinambungan program dalam pengelolaannya di masyarakat. Sedangkan lembaga lokal lainnya mengalami permasalahan pada tata kelola kelembagaan yang masih belum tertata rapi dalam memberikan pelayanan air bersih di masyarakat. Kondisi tersebut diperkuat dari hasil laporan Dinas Pekerjaan Umum tahun 2009 yang menunjukkan bahwa 60 % (persen) dari lembaga lokal air bersih atau SPAM Pedesaan yang telah dibentuk masyarakat masih terkendala pada tatakelola administrasi organisasi dan pendanaan, sehingga perencanaan perawatan fasilitas dan anggaran pembiayaan kegiatan pengelolaan air bersih menjadi tidak tersistem dengan efektif. (Dinas Pekerjaan Umum Lumajang, 2010, h. 58).

Berkaitan dengan penyediaan layanan air bersih yang telah dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri di desa Dadapan sangat menarik untuk diteliti lebih

dalam terkait mekanisme pengelolaan air bersih dan upaya lembaga dalam memfasilitasi penyediaan air bersih melalui pengembangan masyarakat sehingga terjadi kemandirian dalam pengelolaannya hingga saat ini, jika dibandingkan dengan lembaga air bersih yang dibentuk pemerintah dan lembaga lokal lainnya yang mengalami hambatan dalam tata kelola kelembagaan sehingga kesinambungan dalam mengelola program air bersih belum berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas makapokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih?
2. Bagaimana proses pengembangan masyarakat yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri dalam penyediaan air bersih?
3. Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan paguyuban Tirta Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan mekanisme yang dijalankan paguyuban air bersih Tirta Mandiri melalui pengelolaan air bersih.
2. Mendiskripsikan proses pengembangan masyarakat yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri dalam penyediaan sarana air bersih.
3. Mendiskripsikan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan paguyuban Tirta Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sivitas akademika dalam pengembangan keilmuan (aspek teoritis) maupun bagi pemangku kebijakan dalam usaha (aspek praktis) untuk peningkatan derajat kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya peminatan pembangunan

sosial dan otonomi lokal dalam mengembangkan kajian teoritis dan bahan mata kuliah perspektif pembangunan lokal dalam membuat kelembagaan di bidang air bersih berdasarkan nilai dan budaya lokal yang ada di masyarakat.

2. Aspek Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu model alternatif kelembagaan lokal sebagai media pemberdayaan dalam pembangunan air bersih di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bahan studi bagi para pemangku kepentingan di bidang pembangunan air bersih dan penyehatan lingkungan seperti Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Non Pemerintah dalam usaha untuk peningkatan akses air bersih bagi masyarakat desa melalui model kelembagaan lokal yang bertumpu pada nilai sosial budaya sehingga memunculkan pendekatan baru dalam upaya pengetasan kemiskinan melalui kebijakan pembangunan sarana air bersih.

1.5 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Dalam ilmu-ilmu sosial pendekatan penelitian dibagi menjadi dua tipe yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Alston and Bowles (1998, h. 7) tipe pendekatan dalam penelitian kuantitatif adalah:

“Type research is based on the idea that there is an objective reality which can be accurately measured, and which operates according to natural laws which can be discovered by rigorous, objective research”. (Jenis penelitian ini didasarkan pada gagasan bahwa ada realitas yang objektif dapat diukur secara akurat, dan beroperasi menurut hukum-hukum alam yang dapat diketahui secara ketat melalui penelitian objektif)

Sedangkan menurut Denzin and Lincoln (2003) pendekatan penelitian kualitatif adalah:

“Qualitative research begin with a self-assessment and reflection about themselves as situation in a sociohistorical context to collect, analyze, and interpret data simultaneously”.(Penelitian kualitatif dimulai dengan penilaian diri dan refleksi tentang diri mereka sendiri sebagai situasi dalam konteks sosiohistoris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara bersamaan). (Neuman, 2006, h. 14)

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, realita di masyarakat tergantung pada bagaimana pengalaman seseorang dan menafsirkan kehidupan, sehingga realitas sosial tidak bisa lepas dari konstruk sosial melalui pengalaman berdasarkan pemahaman realitas dari dalam individu. Dengan demikian, maka realitas sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat digeneralisasikan karena perilaku manusia selalu terikat konteks dan harus diinterpretasikan kasus per kasus. (Moleong, 2010, h. 31). Sehingga penelitian kualitatif dapat dilakukan secara fleksibel melalui wawancara terbuka agar pembicaraan dapat mencakup topik dan perspektif serta makna yang penting bagi orang-orang yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami dan menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian terkait realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini lebih memfokuskan pada deskripsi proses pembentukan dan mekanisme kelembagaan lokal, proses tahapan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh kelembagaan lokal dan serta manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan kelembagaan lokal dalam penyediaan air bersih. Mengacu pada pendekatan kualitatif di atas maka tipe penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah *qualitative case study*. Menurut Merriam (1988, h. 41) bahwa *Qualitative case study* adalah

" can be defined as an intensive, holistic description and analysis of a single entity, phenomenon or social unit. Case studies are particularistic, descriptive and heuristic, and rely heavily on inductive reasoning in handling multiple data sources." (dapat didefinisikan

sebagai intensif, diskriptif yang holistik dan analisis pada entitas tunggal, fenomena atau unit sosial. Studi kasus adalah partikularistik, deskriptif dan heuristik, dan sangat bergantung pada penalaran induktif (menangani berbagai sumber data).

Pada umumnya, studi kasus dapat dihubungkan dengan sebuah lokasi, dimana kasus dalam lokasi tersebut dapat berupa organisasi, sekumpulan orang atau kelompok kerja atau kelompok sosial, komunitas, peristiwa atau proses maupun kampanye. Desain studi kasus yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah studi kasus tunggal untuk eksplorasi yang lebih mendalam tapi spesifik tentang kejadian tertentu dari sebuah fenomena. Dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus kualitatif maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian maka pendekatan penelitian *qualitative case study* ini dapat memberikan diskripsi akurat mengenai mekanisme kelembagaan lokal dalam melakukan proses pengembangan masyarakat melalui pengelolaan air bersih dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada di masyarakat. Dengan demikian, realitas sosial yang ada di masyarakat dapat memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi sehingga kelembagaan lokal yang hadir di masyarakat menjadi jelas makna dari konstruk sosial yang terkandung melalui konteks sosiohistoris. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Moleong (2010, h. 6) bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena yang dialami oleh subyek penelitian misalnya motivasi masyarakat dalam menggunakan kelembagaan lokal sebagai salah satu tindakan dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memahami makna yang mendasari perilaku masyarakat mengenai kelembagaan. Dengan kondisi tersebut, maka pendekatan penelitian *qualitative case study* sangat relevan digunakan dalam pendekatan penelitian ini.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kondisi yang terjadi dilapangan berdasarkan data dan fakta serta

informasi yang memfokuskan pada pengamatan terhadap proses mekanisme yang dijalankan kelembagaan lokal air bersih, pengembangan masyarakat melalui kelembagaan lokal, dan kebermanfaatan kelembagaan lokal bagi masyarakat di desa Dadapan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Mengacu pada kondisi diatas, maka jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Neuman (2006, h. 35), penelitian deskriptif adalah *“present a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship”* (menyajikan suatu gambaran dari suatu keadaan, latar belakang sosial serta hubungan sosial).

Fokus dari penelitian deskriptif lebih menekankan pada gambaran tentang situasi dan fenomena sosial yang ada dilapangan, sehingga kondisi dan latar belakang sosial yang menjadi obyek penelitian dapat disajikan secara sistematis dan faktual menyangkut permasalahan yang terjadi dilapangan. Hal ini seperti yang di jelaskan Rubin and Babie (2008, h. 138) bahwa:

“Qualitative descriptions concerned with conveying a sense of the people being describe, providing rich detail about their environment, interaction, meaning and every day lives”. (Deskripsikualitatif berkaitan dengan penyampaian terhadap individu untuk dijelaskan, memberikan gambaran tentang lingkungan mereka yang lebih detail, interaksi, makna dan kehidupan sehari-hari).

Dengan demikian maka tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mencari tahu secara rinci dan lebih tepat terhadap apa fenomena sosial itu dengan menyajikan laporan berupa data-data untuk memberikan gambaran dalam penelitian.

1.5.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Alasan utama pemilihan desa Dadapan sebagai lokasi dalam penelitian ini karena terdapat kelembagaan lokal bidang air bersih yaitu paguyuban Tirta Mandiri berhasil memberikan kontribusi pada masyarakat Desa Dadapan sebagai wadah untuk menampung dan menangani kebutuhan air bersih dengan menggunakan dana swadaya murni dari masyarakat tanpa bantuan dari pemerintah. Keberhasilan Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih mendorong masyarakat untuk menggunakan kelembagaan tersebut sebagai media pemecahan masalah terkait kondisi air bersih di desa Dadapan. Upaya yang dilakukan oleh kelembagaan Tirta Mandiri melalui kegiatan pengembangan masyarakat dalam pengelolaan air bersih menjadi salah satu modal utama keberhasilan paguyuban Tirta Mandiri. Mengingat sebagian besar masyarakat desa Dadapan mayoritas bermatapencaharian sebagai petani dan berpendapatan rendah, namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat dan antusias warga untuk memperoleh kebutuhan air air bersih.

Meskipun di Kabupaten Lumajang terdapat kelembagaan air bersih di tingkat desa yang dikelola oleh Program WSLIC-2 dan program sistem penyediaan air minum (SPAM). Namun program tersebut masih terkendala dalam manajemen pengelolaan kelembagaan, inovasi infrastruktur dan juga keberlanjutan. Hal ini berbeda dengan kelembagaan air bersih Tirta Mandiri yang lebih baik mekanisme sistem pengelolaannya karena didasari nilai kearifan budaya lokal di masyarakat, sehingga dapat berkembang sampai saat ini. Dalam bidang penerapan tata kelola infrastruktur air, paguyuban Tirta Mandiri telah memunculkan inovasi teknologi baru dalam pengelolaan air, sehingga sangat berbeda dengan pendekatan kedua program diatas. Informasi tentang keberhasilan kelembagaan Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih dijelaskan juga oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Tahun 2010.

Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2012. Waktu yang singkat tersebut tentunya belum mampu mengungkap semua

permasalahan dalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Berdasarkan keterangan diatas makapedoman pada waktu yang tersedia di rencana kegiatan penelitian inisebagai berikut :

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Mar 2012	Apr 2012	Mei 2012	Jun 2012	Jul 2012	Agu 2012	Sep 2012	Okt 2012	Nov 2012	Des 2012
1	Penyusunan Proposal										
2	Bimbingan <i>Reading Course</i>										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan proposal										
5	Penelitian dan penulisan tesis										
6	Masa ujian tesis										
7	Revisi tesis										

1.5.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian merupakan orang dan kelompok yang diwawancarai dan diminta keterangan mengenai informasi-informasi yang terkait dengan kajian yang diteliti. Dengan menggunakan informan maka informasi yang dibutuhkan yang terkait latar belakang, situasi dan kondisi serta partisipasi yang terjadi masyarakat akan mudah untuk diteliti. (Moleong, 2010, h. 140). Terkait penelitian dengan tema pengembangan masyarakat dalam pengelolaan air bersih berbasis kelembagaan lokal di Desa Dadapan, maka informan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa mekanisme paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih, proses dari tahapan pengembangan masyarakat dalam penyediaan sarana air bersih, serta manfaat yang di peroleh masyarakat dengan menggunakan paguyuban Tirta Mandiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis sampling penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* atau *nonrandom sample* karena tidak

semua orang dalam kajian penelitian ini dapat dijadikan sampel. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Alston and Bowles (1998, h. 90) bahwa “*non-probability sampling seeking information in targets subject or cases who typify the issue to be studied*”. (non-probability sampling mencari informasi dalam target yang menjadi subyek atau kasus yang melambangkan masalah yang akan dipelajari).

Adapun teknik penarikan sampling dalam pemilihan informan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* menurut Alston and Bowles (1998, h. 93) adalah “*select sample gives insights into a particular issue related to the study area*”. (pengambilan sampel secara purposif dimana sampel yang dipilih untuk memberikan wawasan ke dalam isu tertentu terkait dengan wilayah yang dikaji).

Sedangkan *snowball sampling* menurut Neuman, (2006, h. 223) adalah “*which reseacher select begins with one case, and then based information about interrelationships from that case, identifies other case, and repeats the process again and again* (yang mana seorang peneliti memilih mulai dengan satu kasus, dan kemudian informasi yang diperoleh saling berhubungan dari kasus dengan mengenali kasus lainnya, dan berulang-ulang pada proses yang terus dan menerus). Terkait pendapat tersebut, Alston and Bowles (1998, h. 93) menjelaskan bahwa *snowball sampling is used when we have no knowledge of sampling frame and limited access to subject who may meet the criteria for our research. (snowball sampling digunakan ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang kerangka sampel dan memiliki akses terbatas terhadap orang-orang yang memenuhi kriteria dalam penelitian kita)*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka informan dipilih berdasarkan *purposive sampling* memiliki kriteria sebagai berikut: (1) orang yang memiliki pengaruh besar di desa dalam memobilisasi warga pada kegiatan penyediaan air bersih dan membantu lembaga pada pengelolaan air bersih yaitu Tokoh Masyarakat; (2) aparatur desa yang memfasilitasi lembaga pada kegiatan pengelolaan air bersih yaitu Kepala Desa; (3) orang yang terlibat aktif dalam kepengurusan Tirta Mandiri di antaranya adalah adalah Ketua, Sekretaris,

Petugas Teknis. Sedangkan informan yang dipilih melalui *snowball sampling* memiliki kriteria antara lain (1) informan yang terlibat langsung pada kegiatan pengembangan masyarakat; (2) informan yang masih aktif di masing-masing kelompok pada kegiatan pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri. Adapun proses penentuan informan melalui teknik *snowball sampling* dari informan pertama hingga terakhir adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus Tirta Mandiri pihak pertama yang terlibat adalah ketua kelompok yang berjumlah 4 orang.
2. Dari wawancara yang dilakukan oleh masing-masing 4 ketua kelompok diperoleh informasi bahwa ada beberapa pihak yang terlibat langsung pada kegiatan pengembangan masyarakat dan informan masih aktif pada pengelolaan air bersih di tiap masing-masing kelompok yaitu 14 orang (anggota) dengan rincian sebagai berikut: (a) 4 orang (anggota) dari ketua kelompok pertama; (b) 3 orang (anggota) dari ketua kelompok kedua; (c) 4 orang (anggota) dari ketua kelompok ketiga; (d) 3 orang (anggota) dari ketua kelompok keempat.
3. Informasi yang sama mengenai pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan pengembangan masyarakat dan aktif pada kegiatan di kelompok serta penerima manfaat dari keberadaan pengelolaan air bersih Tirta Mandiri juga diperoleh dari tokoh masyarakat dan kepala desa setelah dilakukan wawancara.
4. Dari keterangan kedua informan yaitu (kepala desa dan tokoh masyarakat) di konfirmasi ulang kepada pengurus aktif dan dilakukan cek ulang ketika melakukan *group interview* dengan anggota dan 4 ketua kelompok.

Secara lebih jelas mengenai pemilihan informan dan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat dilihat pada kerangka sampling pada tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3 Kerangka Sampling

No	Informasi yang dicari	Sumber Informasi	Informan	Jumlah
1	Mekanisme pengelolaan Tirta Mandiri:			
	1. Pilar Regulatif <ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme Organisasi. <ul style="list-style-type: none"> - Aturan Kepengurusan - Aturan Keanggotaan b. Mekanisme Keuangan. <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk monitoring keuangan organisasi c. Mekanisme Keanggotaan d. Mekanisme Sanksi <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi formal dan informal 2. Pilar Normatif <ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> - Pertanggung jawaban kepengurusan b. Mekanisme Tanggung Jawab Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk kegiatan pemberian fasilitas bagi masyarakat yang tidak mampu 3. Pilar Kultural-Kognitif <ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan terhadap nilai lokal masyarakat di lembaga b. Budaya dan adat istiadat pendukung lembaga. 	Paguyuban Tirta Mandiri	Pengurus Aktif	3 orang
2	Tahapan Pengembangan Masyarakat dalam kegiatan penyediaan air bersih			
	1. Tahap Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pencarian sumber mata air pada warga - Survey pencarian sumber mata air - Identifikasi sumber daya lokal di masyarakat 2. Tahap Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan sumber mata air dan kondisi kewilayahan - Pendataan warga mampu dan kurang mampu dalam pengambilan paket air bersih - Mekanisme pembiayaan paket sarana air bersih pada 	Tokoh Desa Dadapan	Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat	2 orang
	Tahapan Pengembangan Masyarakat dalam kegiatan penyediaan air bersih			
	1. Tahap Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pencarian sumber mata air pada warga - Survey pencarian sumber mata air - Identifikasi sumber daya lokal di masyarakat 2. Tahap Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan sumber mata air dan kondisi kewilayahan - Pendataan warga mampu dan kurang mampu dalam pengambilan paket air bersih - Mekanisme pembiayaan paket sarana air bersih pada 	Anggota Paguyuban Tirta Mandiri	Ketua kelompok dan Anggota	18 Orang
	Tahapan Pengembangan Masyarakat dalam kegiatan penyediaan air bersih			
	- Penentuan peta wilayah penempatan air bersih di masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis sarana air 			

3	<p>bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kelompok unit kerja di masyarakat - Membangun kerjasama dengan pengusaha material dan warga yang berada di sumber mata air wilayahnya dilewati sambungan sarana air <p>4. Tahap Formulasi Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana kerja kelembagaan dan kelompok unit kerja - Mekanisme kredit pembiayaan dan angsuran sarana dan prasarana - Menentukan wilayah pembangunan sarana air dan masyarakat yang mengambil paket air - Mekanisme sistem pembiayaan bagi warga kurang mampu agar memperoleh sarana air bersih <p>5. Tahap Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan sarana air bersih - Melaksanakan rencana kerja kelembagaan dan kelompok unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan <p>6. Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi kinerja dari kelompok unit kerja dan kebijakan kepengurusan terkait layanan air dan promosi sanitasi bagi warga <p>7. Terminasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berakhirnya kegiatan dilapangan <p>Manfaat Menggunakan Tirta Mandiri pada pengelolaan air bersih</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat aspek Pendidikan 2. Manfaat aspek Kesehatan 3. Manfaat aspek Ekonomi 4. Manfaat aspek Sosial Budaya 			
---	--	--	--	--

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab pertanyaan pada penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yaitu: pengumpulan data primer melalui wawancara secara mendalam baik secara individu/perorangan (*Individual In-Depth interview*) maupun kelompok (*Group Interview*) dan observasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan sumber data melalui studi literatur dan dokumentasi.

1. Studi literatur dan dokumentasi

Menurut Alston and Bowles (1998, h. 66), bahwa penggunaan studi literatur bertujuan “*to discover what knowledge is already available about the issue you wish to investigate, to determine how your study will differ from existing work*”. (untuk memperoleh pengetahuan yang sudah ada sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, untuk mengetahui bagaimana penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya). Studi literatur membahas mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan topik penelitian berguna untuk memberikan wawasan dan pemahaman dasar dalam menyusun kerangka pemikiran atau definisi konseptual. Adapun kajian studi literatur guna menunjang penelitian ini meliputi bahan bacaan seperti buku-buku, artikel jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan dokumentasi, digunakan untuk data sekunder guna mendukung dan memperkuat data primer yang didapat dari kegiatan penelitian di lapangan yang meliputi dokumen berasal dari: (1) Paguyuban sarana bersih Tirta Mandiri; (2) Kantor Desa Dadapan; (3) Lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

2. *In-depth interview*

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam atau *In-depth interview* dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami oleh informan tentang proses latar belakang terbentuknya kelembagaan air bersih dan juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan menyangkut mekanisme yang dilakukan

paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih. Melalui wawancara yang ditanyakan oleh peneliti kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau (tahapan pengembangan masyarakat pada penyediaan air bersih), masa sekarang (proses mekanisme pengelolaan kelembagaan) dan juga masa mendatang (manfaat kelembagaan bagi masyarakat). Melalui *Individual In-Depth interview* dengan wawancara terbuka dan tidak berstruktur dapat melacak lebih jauh, mendalam, lengkap dan terperinci terkait kasus yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Informan yang diwawancarai melalui *in-depth interview* yaitu semua pihak yang terlibat pengelolaan air bersih yang dijalankan kelembagaan yaitu pengurus aktif (Ketua, Sekretaris, Petugas Teknis), kepala desa dan tokoh masyarakat.

3. *Group Interview*

Pengumpulan data dari ketua kelompok (4 orang) dan anggota kelompok (14 orang) dilakukan melalui wawancara berkelompok atau *group interview*. Tujuan dilakukan *group interview* untuk memperoleh informasi dan data yang mendalam tentang keterlibatan sasaran kelompok pada kegiatan pengembangan masyarakat dan kebermanfaatannya yang diperoleh menggunakan Tirta Mandiri sebagai media mengelola air bersih di desa Dadapan. Informan dilibatkan dalam diskusi-diskusi kelompok kecil dan peneliti bertindak sebagai moderator. Menurut Krueger (1988, h. 23) bahwa "*group interview need to listen to opinions of other before they form their own personal view points and to promote self-disclosure among participants*". (interview kelompok dibutuhkan untuk mendengarkan pendapat yang lain sebelum mereka membentuk pandangan pribadi dan untuk mempromosikan keterbukaan diri diantara peserta). Dengan menggunakan *group interview* diharapkan dapat mengeksplor topik lebih lanjut sesuai dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data secara kelompok dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pengurus paguyuban dan

disepakati *group interview* dilakukan salah satu rumah anggota yang mendapat giliran kegiatan rutin paguyuban. *Group interview* dilakukan sekali dengan durasi 4 jam yang terbagi dua sesi. Sesi pertama membahas tentang proses tahapan pengembangan masyarakat pada penyediaan air bersih. Sedangkan sesi kedua membahas tentang kebermanfaatan menggunakan kelembagaan Tirta Mandiri. Dalam pelaksanaan *group interview* ini digunakan teknik pemetaan bagan hubungan antar kelembagaan atau Diagram Venn. Menurut Adi (2007, h. 95) teknik Diagram Venn ini mencoba menggambarkan hubungan antar lembaga maupun institusi dalam komunitas sasaran. Melalui teknik ini dapat menggambarkan perasaan di kalangan peserta, kalangan organisasi/institusi dan kelompok setempat. Sedangkan menurut Mikkelsen (2003, h. 93) bahwakegunaan teknik diagram Venn ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok atau lembaga baik internal maupun eksternal dan hubungannya dengan masyarakat atau antar lembaga serta identifikasi interaksi dan hubungan lembaga terhadap permasalahan tertentu. Hasil dari proses *groupdiscuss* dituangkan dalam diagram Venn yang mengilustrasikan kondisi kelembagaan terkait dengan simbol besarnya ukuran lingkaran dan jauh dekatnya jarak antara suatu organisasi dengan lainnya. Besarnya lingkaran pada diagram Venn menunjukkan besarnya pengaruh internal kelembagaan. Sedangkan kedekatan dan jarak antar diagram merefleksikan kedekatan masing-masing organisasi dalam kaitan dengan masalah yang di hadapi masyarakat. Penggunaan diagram venn pada penelitian ini bertujuan (1) untuk mengidentifikasi keberadaan dan peranan kelembagaan di desa Dadapan baik kelembagaan yang dibentuk pemerintah dan non pemerintah serta kelembagaan yang dianggap dari luar masyarakat sendiri; (2) mengidentifikasi interaksi sosial antara kelembagaan di masyarakat sehingga terlihat besar kecilnya pengaruh ke dalam

lembaga dan kedekatan peran dan fungsinya hubungan dengan masyarakat.

4. Observasi

Observasi bertujuan untuk melihat dan mengamati perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Moleong (2010, h. 174) menjelaskan bahwa kegiatan observasi dilakukan melalui pengamatan yang memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan langsung yang diperoleh dari data. Oleh karena itu, observasi pada penelitian ini dilakukan dengan dengan carapengamatan dan penelusuran wilayah atau *transect walk* fasilitas air bersih berupa hidran umum dan saluran pipa air bersih serta sumber mata air. Selain itu, kegiatan observasi juga dilakukan dengan mengamati fenomena sosial dan kehidupan budaya dari segi pandangan hidup di masyarakat tentang kelembagaan lokal.

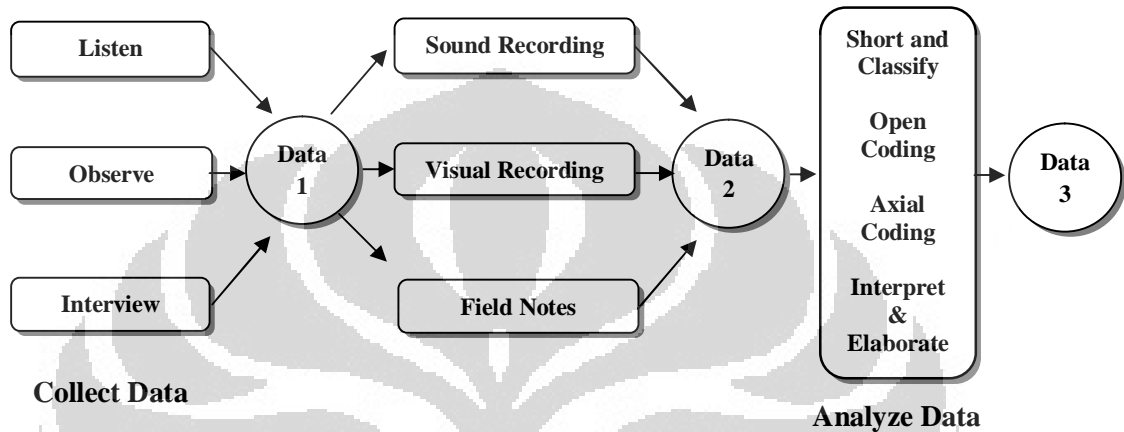
1.5.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis data dalam pendekatan kualitatif menitikberatkan pada analisis induktif, sehingga data dianalisis secara deskriptif dan diilustrasikan dengan contoh-contoh meliputi kutipan-kutipan, rangkuman dari dokumen dan analisis verbal. (Moleong, 2010, h. 36). Dengan demikian, upaya analisis data di penelitian ini dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan mensistesisikannya agar dapat menemukan pola yang dipelajari sehingga dapat memutuskan apa yang akan diceritakan atau dideskripsikan.

Proses kegiatan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dari sumber data berupa *individual in-depth interview, group interview* dengan teknik Diagram Venn, observasi dan serta dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul tersebut dibaca untuk mempelajari, dipilah-pilah baik data verbal maupun non verbal untuk diklasifikasikan berdasarkan kategori data sehingga menemukan pola yang

sesuai dengan tema kajian penelitian ini. Karena data yang diperoleh memiliki sarat makna yang dapat menjelaskan fenomena sosial yang tersembunyi di kehidupan masyarakat.

Secara singkat tahapan-tahapan proses analisis data di gambarkan sebagai melalui skema gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Analisa Data

Sumber: Ellen 1984 (dalam Neuman, 2006, h. 468).

Keterangan: Data 1 adalah data mentah dan pengalaman peneliti, data 2 adalah rekaman data, pengalaman dokumen fisik dan data 3 adalah seleksi data, pemrosesan data dan laporan akhir.

Berdasarkan gambar proses analisa data diatas maka tahap analisa data dalam kegiatan penelitian ini meliputi:

1. Tahap pengorganisasian data. Pada tahap ini data-data yang diperoleh masih berupa data mentah dari kegiatan interview informan yang telah direkam, catatan lapangan hasil observasi dan dokumen yang berasal dari lembaga atau pihak terkait. Setelah itu, data mentah yang diperoleh melalui kegiatan diatas dilakukan pengorganisasian dan diseleksi agar sesuai dengan tujuan dari topik penelitian ini. Hasil pengorganisasian data akan dimasukkan dalam transkrip wawancara setelah terlebih dahulu dilakukan melalui pengkategorisasian data.
2. Tahap pengolahan data. Data yang telah diseleksi akan di diolah dengan dengan cara mereview dan menyatukan serta memformulasikan data sehingga data yang sama dari hasil interview dan data non interview

dapat dikategorisasikan dan dikoding untuk memudahkan informasi dalam proses analisis data.

3. Tahap penafsiran data. Proses penafsiran data dilakukan melalui dengan penyusunan dan pengkategorisasian data yang diperoleh dari pengolahan data, sehingga penyatuan data tersebut dihubungkan dengan pola yang terdapat pada hasil temuan di lapangan yang selanjutnya akan di analisis berdasarkan teori substantif. Akhirnya dari analisa teori yang digunakan akan membangun indentitasnya sendiri dengan mengkaitkan melalui fenomena sosial yang teliti sehingga bermetafora kedalam bahasa disiplin ilmu kesejahteraan sosial.
4. Tahap kesimpulan. Pada tahap akhir ini pengambilan kesimpulan penelitian dilakukan dengan merangkum *point* penting yang terdapat pada temuan lapangan dan pembahasan dengan tujuan untuk mengeneralisasikan kajian penelitian ini. Dengan demikian hasil kesimpulan dapat memberikan gambaran secara komperhensif terhadap tujuan dari penelitian itu sendiri.

1.5.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk meningkatkan kualitas penelitian dibutuhkan proses dan prosedur keabsahan data yang sesuai dengan kaidah penelitian. Keabsahan (*trustworthiness*) dan otentisitas (*authenticity*) data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan penelitian kualitatif. Tanpa data yang valid maka penelitian akan menjadi bias dan hasil tidak sesuai dengan tujuan penelitian ilmiah. Menurut Daymon and Hallowey, (2008, h. 252), teknik untuk menguji otentisitas (*authenticity*) dan keabsahan (*trustworthiness*) data pada penelitian kualitatif meliputi kredibilitas, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

Pada penelitian ini untuk mencapai keabsahan data guna meningkatkan kredibilitas maka peneliti ikut berpartisipasi kedalam kegiatan masyarakat dan lembaga untuk mendapatkan berbagai jenis sumber data dari informan yang berbeda-beda. Sumber data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dan diskusi kelompok dari tokoh masyarakat, pengelola lembaga, dan masyarakat akan dibandingkan (trianggulasi) pada setiap anggota (*member check*) untuk

mengecek balik derajat kepercayaan dan akurasi informasi terhadap dataobservasi dan dokumentasi yang di dapatkan. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Moleong (2010, h. 331) bahwa proses triangulasi dapat dicapai dengan cara (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan; (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan proses *transferability* dilakukan dengan cara mengumpulkan kejadian empiris dengan menyediakan dan memperkaya data deskriptif dengan uraian rinci sesuai karakteristik fokus perhatian dalam kajian penelitian. Melalui penyediaan data deskriptif yang cukup maka akan dipindahkan pada situasi yang lain guna membantu pembaca mengetahui pengetahuan khusus yang diperoleh dari temuan-temuan penelitian .

Data yang didapat melalui proses *transferability* akan diperiksa oleh pihak luar untuk mempelajari bahan yang tersedia. Proses keabsahan data ini disebut *dependability*. Alasan melibatkan pihak luar dalam proses auditing data ini didasari beberapa patokan seperti: (1) lengkap-tidaknya bahan penelitian yang disediakan dan telah digunakan; (2) tuntas-tidaknya data yang disusun sehingga memungkinkan pengecekan silang, pengorganisasian dan pengklasifikasian data agar sesuai dengan instrumen penelitian dan; (3) data dan informasi yang didapat masih berkaitan secara sistematis dengan pendekatan metodologi yang digunakan. Dengan demikian data yang di peroleh dari kegiatan penelitian harus di *review* ulang terkait dengan kegiatan interview, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga desain yang muncul dari data bersamaan dengan dengan kerangka penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai kesimpulan. Melalui proses *dependability* dengan melibatkan pihak luar sebagai auditor penelitian maka data yang diperoleh melalui interview, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi akan dikonfirmasi ulang atau *confirmability* melalui struktur kategori kejelasan, daya penjelasan dan kesesuaian dengan data serta keabsahan data sesuai dengan fokus kajian penelitian sebagai langkah untuk mengambil keputusan tentang keseluruhan kepastian penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun menjadi 6 (enam) bab yang terdiri dari:

Bab I : Bab Pendahuluan.

Memuat latar belakang yang menjadi permasalahan; rumusan masalah; tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis; metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik keabsahan data); sistematika penulisan

Bab II : Bab Tinjauan Pustaka.

Berisi tentang konsep pengembangan masyarakat yang meliputi: definisi pengembangan masyarakat; prinsip pengembangan masyarakat; proses pengembangan masyarakat; pendekatan pengembangan masyarakat; tahapan pengembangan masyarakat; peranan petugas atau *community worker* dan aset komunitas dalam pengembangan masyarakat. Sedangkan konsep kelembagaan meliputi definisi kelembagaan; perbedaan kelembagaan lokal dengan organisasi; interaksi perspektif kelembagaan lokal dan organisasi; teori kelembagaan baru atau *the new institutionalism*; pengembangan kelembagaan lokal; keuntungan menggunakan kelembagaan lokal. Selain itu juga dibahas tentang pengelolaan sumber daya air bersih yang terdiri dari pengelolaan air bersih; pengembangan air bersih berbasis kelembagaan lokal. Pemakaian konsep dan pengertian tersebut untuk memperluas wawasan yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai unit analisis dan untuk memperkuat penelitian.

Bab III : Bab Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Memuat tentang lokasi penelitian yaitu kondisi umum Desa Dadapan yang meliputi kondisi geografi dan administratif pemerintahan, demografis, sosial dan budaya serta air

bersihkelembagaan lokal di desa Dadapan. Dan juga pengaruh kelembagaan bagi kehidupan masyarakat.

Bab IV : Bab Hasil Temuan Lapangan.

Pada bagian ini membahas hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai temuan studi lapangan dan informasi melalui kegiatan wawancara individu dan kelompok, observasi dan dokumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait mekanisme pengelolaan air bersih oleh kelembagaan Tirta Mandiri, pengembangan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan kelembagaan tersebut.

Bab V : Bab Pembahasan.

Merupakan bab yang berisi analisa peneliti yang didapat dari hasil temuan lapangan dengan dihubungkan melalui teori-teori dan skema alur pikir penelitian yang digunakan. Analisa ini dilakukan dengan memfokuskan mekanisme pengelolaan air bersih oleh kelembagaan Tirta Mandiri, tahapan pengembangan masyarakat yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri, dan manfaat yang diperoleh dari keberadaan kelembagaan Tirta Mandiri.

Bab VI : Bab Penutup

Berisi tentang kesimpulan hasil keseluruhan penelitian yang dirangkum secara singkat dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran yang akan diberikan sebagai perbaikan untuk langkah selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bab ini merupakan kumpulan dari beragam teori yang mendukung penelitian dengan cara peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*) dan yang relevan dengan kajian penelitian. Dengan demikian tujuan dari tinjauan pustaka di penelitian ini yaitu untuk membuat landasan pengetahuan penelitian yang sedang dilakukan sehingga dapat mencerminkan pemahaman peneliti tentang teori yang akan digunakan.

Uraian dari tinjauan pustaka di penelitian ini dibagi menjadi dua kerangka pemikiran yaitu Konsep Kelembagaan Lokal dan Konsep Pengembangan Masyarakat. Pembahasan mengenai konsep kelembagaan lokal dimulai dari definisi definisi kelembagaan; perbedaan kelembagaan lokal dengan organisasi; interaksi kelembagaan lokal dan organisasi; teori kelembagaan baru (*the new institutionalism*); pengembangan kelembagaan lokal; keuntungan menggunakan kelembagaan lokal. Sedangkan konsep pengembangan masyarakat terdiri dari pengembangan masyarakat; prinsip pengembangan masyarakat; proses pengembangan masyarakat; pendekatan pengembangan masyarakat; tahapan pengembangan masyarakat; peranan petugas (*community worker*) dan aset komunitas dalam pengembangan masyarakat. Selain itu juga di bahas tentang pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang terdiri dari pengelolaan air bersih dan pengembangan air bersih berbasis kelembagaan. Kedua kerangka konsep diatas akan digunakan sebagai unit analisis pada penelitian ini.

2.1 Konsep Kelembagaan Lokal

2.1.1 Definisi Kelembagaan

Membahas tentang definisi kelembagaan tergolong sangat membingungkan bahkan beberapa ilmuan sosial masih memperdebatkan istilah tersebut. Dalam banyak literatur teoritis, baik berbahasa Inggris maupun Indonesia, istilah “kelembagaan” (*social institution*) selalu disilangkan dengan “organisasi” (*social organization*). Kedua kata ini sering sekali menimbulkan

perdebatan diantara para ahli. Kebingungan dalam pengistilahan kelembagaan juga dijelaskan oleh Norman Uphoff. Menurut Uphoff(1984, h. 15) bahwa

“What constitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist..... The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion”. (Apa yang merupakan sebuah 'institusi' adalah subyek menuai perdebatan terus kalangan ilmuwan sosial. Istilah institusi dan organisasi umumnya digunakan secara bergantian dan ini memberikan makna yang ganda dan kebingungan).

Penjelasan Uphoff diatas mengindikasikan belum terdapat pengakuan umum pada kalangan para sarjana sosial untuk menterjemahkan istilah Inggris *‘social institution’* menjadi kelembagaan bahkan ada yang menterjemahkannya dengan istilah *‘pranata’* dan ada pula yang menggunakan definisi *‘bangunan sosial’*(Soemardjan, Soemardi, 1964, h. 61).Meskipun belum ada definisi yang spesifik mengenai istilah dan terjemahan kelembagaan, namun dapat diyakini bahwa kelembagaan adalah *social form* ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tujuan dari lahirnya kelembagaan memiliki kompleksitas kebutuhan dari kehidupan sosial di masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, (1997, h. 15) kata kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) di dalam masyarakat. Lebih lanjut Koentjaraningrat (1997, h. 16) menjelaskan bahwa suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (*ways*) yang hidup pada suatu kelompok orang, sehingga kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantab, dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditentukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisiensikan kehidupan sosial.

Sedangkan definisi kelembagaan menurut Hendropuspito (1989) merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. (Wibowo, 2011, h. 57).Definisi kelembagaan tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Macmilan sebagaimana yang diuraikan Saharuddin (2001), bahwa kelembagaan merupakan seperangkat

hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang (Wibowo, 2011, h. 55). Sementara itu, Taneko (1993) mendefinisikan kelembagaan sebagai adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi tersebut. (Wibowo, 2011, h. 57). Dengan demikian lahirnya kelembagaan di masyarakat sebagai bentuk aturan (*rule*) yang ada dan mengikat guna untuk memperoleh serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosialnya.

Berdasarkan definisi menurut empat pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku dengan melihat aturan-aturan tersebut. Untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Manusia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menggunakan atau berkelit dari aturan-aturan yang telah di bentuk melalui kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat. Perspektif kelembagaan sebagai aturan (*Regulative Institution*) yang ada dan keuntungan yang diperoleh dari keberadaan kelembagaan tersebut, di pengaruhi oleh perspektif *rational choice theory* dari James S Colemans.

Menurut Colemans (1990) bahwa *rational choice theory* ini menekankan pada tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). (Ritzer, 2008, h. 394). Lebih lanjut, Colemans menjelaskan bahwa terdapat dua unsur utama dalam teori ini yaitu aktor dan sumber daya. Aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui sumber daya yang dikontrol oleh aktor. Dalam ranah makro, perilaku aktor dapat berubah ke sistem sebagai bentuk perilaku kolektif sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingan individu sehingga menyebabkan keseimbangan

kontrol di masyarakat. “Perilaku rasional” ketika upaya untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya yang efektif dengan biaya murah. (Ritzer, 2008, h. 396).

Terdapat tiga kelebihan yang dimiliki oleh *rational choice theory*, untuk memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan yaitu; (1) memiliki kontribusi pada area pengukuran; (2) sebagai pendekatan pertikaian dalam institusi sosial (seperti: dalam hukum, peraturan-peraturan, norma, dan nilai-nilai budaya) dan; (3) memberikan kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan. (Ritzer, 2008, h. 401). Sifat dasar manusia adalah mencari kebahagiaan dan menghindari kesulitan. Sebuah tindakan hanya bisa disebut rasional jika penghargaan yang didapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Menurut Commons (1924) bahwa pendekatan kelembagaan dalam teori pilihan rasional menekankan pada

“Individual choice behavior suggesting that a more appropriate unit of economic analysis was a transaction. Transaction is two more wills giving, taking, persuading, coercing, commanding, obeying, competing, governing the rule of conduct commons alluded are social institution”. (Scoot, 2008, h. 3). (Perilaku pilihan individu menunjukkan bahwa unit yang lebih tepat analisis transaksi ekonomi. Transaksi adalah dua kehendak lebih memberi, mengambil, membujuk, memaksa, memerintah, mematuhi, bersaing, memerintah aturan etik bersama disinggung dalam institusi sosial).

Sehingga *rational choice theory* menurut Commons (1950) memandang kelembagaan sebagai *“institution rule were necessary to define the limits within which individuals and firms could pursue their objectives”*. (Scoot, 2008, h. 3). (aturan kelembagaan yang diperlukan untuk menentukan batas-batas dimana individu dan perusahaan dapat mencapai tujuan mereka). Corak kelembagaan dalam perspektif ini lebih mengarah pada aturan atau *rule* yang telah dibuat masyarakat untuk mencapai tujuan sering disebut ***Regulative Institution***.

Sedangkan definisi kelembagaan dari perspektif sosiologi-antropologi lebih menekankan norma-norma yang hidup dan disepakati di tengah masyarakat. Konsep ini seperti yang dijelaskan oleh Durkheim (1912) bahwa *“social institution is symbolic systems- system of knowledge, belief, and moral authority from product of joint activity and association”*. (Scoot, 2008, h. 12).

(kelembagaan sosial adalah simbol sistem-sistem pengetahuan, keyakinan dan otoritas moral dari hasil kegiatan bersamadan asosiasi). Pandangan Durkheim dalam melihat kelembagaan merupakan hasil dari proses interaksi dalam sistem simbol, dimana sistem kepercayaan dan gambaran bersama atau *collective representation* serta pengetahuan memiliki moral dan spiritual sehingga sistem tersebut merupakan hasil karakter dari interaksi manusia yang dialami oleh individu sebagai tujuan hidup dan hasilnya kumpulan dari sistem tersebut mengalami kristalisasi dan membentuk kelembagaan. Definisi kelembagaan menurut Uphoff (1986, h. 9) adalah "*complexes of norm and behaviour that persist over time serving collectively valued purposes*" (serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang bernilai kolektif/bersama). Sedangkan Parsons (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai "*system of norms that regulate the relations of individuals to each other and that define "what the relations of individuals ought to be"*". (Scoot, 1995, h. 12). (Sistem norma yang mengatur hubungan individu satu sama lain yang mendefinisikan seperti apa hubungan individu seharusnya). Parson berusaha untuk membangun cara pandang yang multidimensi terhadap aksi sosial dari konsep kelembagaan dengan menitikberatkan pada pola budaya, menekankan kontrol yang diberikan oleh nilai lebih dari kondisi.

Berdasarkan definisi kelembagaan menurut Durkheim, Uphoff dan Parsons di atas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan muncul adanya perilaku manusia baik secara individu atau sebagai kelompok ditentukan oleh norma yang hidup di masyarakat bersangkutan, sehingga manusia adalah aktor yang patuh terhadap norma. Corak kelembagaan dalam perspektif sosiologi-antropologi ini sering disebut *Normative Institution*. Karena kelembagaan merupakan bagian sistem norma yang terdapat di masyarakat. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh DiMaggio and Powell (1991) bahwa perangkat dari kelembagaan normatif untuk "*examining the interplay of the instrumental and the normative in social action*". (Scoot, 2008, h. 15). (memeriksa interaksi dari instrumental dan normatif dalam tindakan sosial). Sehingga norma yang terdapat di masyarakat diinternalisasi elemen dari sistem kepribadian, orientasi nilai dan objek orientasi yang ada di luar individu untuk mengatur kehidupan di masyarakat.

Perspektif sosiologi pengetahuan mencoba memberikan definisi kelembagaan sebagai bagian dari pengetahuan yang dimiliki individu dan masyarakat serta budaya. Pandangan ini melihat manusia sebagai makhluk yang aktif. Sehingga pandangan manusia terhadap semua pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya kelembagaan sebagai hasil realitas sosial yang diciptakan. Dengan demikian realitas sosial merupakan konstruksi manusia dan hasil dari interaksi manusia. (Scoot, 1995, h. 13). Menurut Berger and Luckmann (1967) kelembagaan adalah “*product of social interaction emphasized the creation of shared knowledge and belief system rather than the production of rule and norm*”. (Scoot, 2008, h. 16). (produk dari interaksi sosial menekankan penciptaan pengetahuan bersama dan sistem kepercayaan lebih dari produksi aturan dan norma). Sedangkan Smith (2005, h. 29) menjelaskan kelembagaan sebagai “*reorganize the social relation of knowledge of social so people can take that knowledge up as an extension of our ordinary knowledge of local actualities of our life*”. (menata kembali hubungan sosial dalam pengetahuan sosial sehingga orang dapat mengambil bahwa pengetahuan itu sebagai perpanjangan dari pengetahuan bias kita aktualisasikan di tingkat lokal dari kehidupan kita).

Pandangan Smith melihat kehidupan sosial di kelembagaan untuk memperbesar ruang lingkup apa yang menjadi terlihat dari situs (kultural), pemetaan hubungan yang menghubungkan satu situs lokal lainnya. Dengan demikian, dimensi kultur dari kelembagaan mendorong sekaligus memberikan batasan terhadap tindakan sosial individu. Sehingga makna dan isi kelembagaan menjembatani pendekatan makro, struktural, dan mikro. (Scoot, 1995, h. 40). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Zucker (1991) bahwa pendekatan mikro dasar kelembagaan “*stressed the power of cognitive belief to anchor behaviour, social knowledge, once institutionalized exists as fact, as part of objective reality and can be transmitted directly on that basis*”. (Scoot, 2008, h. 43). (menekankan kekuatan keyakinan kognitif (pengetahuan) untuk jangkar perilaku, pengetahuan sosial, begitu dilembagakan ada sebagai fakta, sebagai bagian dari realitas obyektif dan dapat ditularkan secara langsung atas dasar itu). Lebih lanjut Zucker (1977) melihat kelembagaan dengan pendekatan kultur dan *cognition* guna untuk mengukur level kelembagaan dan *nature of institution*

dan pentingnya peran budaya ketekunan atau *cultural persistence* (Syahyuti, 2010, h. 3)

Berdasarkan pendapat Berger and Luckmann, Smith serta Zucker dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan hasil dari proses budaya (kultur) dan pengetahuan (kognitif), sehingga manusia memaknai segala hal disepertinya termasuk norma dan regulasi. Namun manusia tidak langsung patuh sepenuhnya karena memaknai lagi norma dan aturan yang ada, lalu memilih sikap dan peraturannya sendiri karena manusia adalah aktor yang aktif. Corak kelembagaan dalam perspektif sosiologi pengetahuan ini sering disebut *Social Institution* dengan menggunakan padangan kultural-kognitif.

Dalam konteks kelembagaan, pemahaman terminologi “lokal” diinterpretasikan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan kondisi setempat. Terminologi “lokal” merujuk pada kesatuan warga atau komunitas yang memiliki budaya (*culture*), aturan (*rule*) serta sanksi yang ditaati dan dijunjung tinggi. Pada warga lokal atau komunitas terdapat otonomi sebagai pengakuan hak warga serta adanya kewajiban (Wibowo, 2011, h. 127).

Dengan demikian definisi kelembagaan lokal dapat dirumuskan sebagai kelembagaan yang berisi nilai-nilai lokal berupa norma, regulasi, dan kultural-kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, dan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor. Fungsi kelembagaan lokal adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun kelembagaan pun dapat berubah. Kelembagaan lokal memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Berbagai norma yang hidup di masyarakat lokal termasuk norma-norma pasar beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk bertindak sebagaimana ia memahaminya (kultural-kognitif). Kelembagaan lokal tidak hanya berisi batasan-batasan, namun juga menyediakan berbagai kriteria sehingga individu dapat memanfaatkan apa yang masyarakat sukai.

Untuk mempermudah memahami konsep kelembagaan maka penulis membuat skema konsep kelembagaan lokal (*local institution*) dari tiga perspektif pada gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1 Skema Konsep Perspektif Kelembagaan Lokal

Perspektif : Rational Choice Theory

Hendropuspito (Wibowo, 2011, h. 57). “Suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar”.

Saharuddin (Wibowo, 2011, h. 55). “seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang “.

Taneko (Wibowo, 2011, h. 57)

“kelembagaan sebagai adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi tersebut”.

Inti: kelembagaan untuk mengatur perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga manusia berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan aturan

Regulative Institution (Pilar Regulatif)

Perspektif : Sosiologi-Antropologi

Durkheim (Scoot, 2008, h. 12)

“social institution is symbolic systems - system of knowladge, belief, and moral authority from product of joint activity and association”.

Uphoff (1986, h. 9)

“Institution is complexes of norm and behaviour that persist over time serving collectively valued purposes”

Persons (Scoot, 1995, h. 12)

“Institution is a system of norms that regulate the relations of individuals to each other and that define “what the relations of individuals ought to be”.

Inti: kelembagaan muncul adanya perilaku manusia baik secara individu atau sebagai kelompok ditentukan oleh norma yang hidup di masyarakat bersangkutan, sehingga manusia adalah aktor yang patuh terhadap norma

Normative Institution (Pilar Normatif)

Perspektif : Sosiologi Pengetahuan

Berger and Luckmann (Scoot, 2008, h. 16) *Institution is product of social interaction emphasized the creation of shared knowladge and belief system rather than the production of rule and norm.*

Smith (2005, h. 29)

“reorganize the social relation of knowledge of social so people can take that knowledge up as an extension of our ordinary knowledge of local actualities of our life

Zucker (Scoot, 2008, h. 43)

“stressed the power of cognitive belief to anchor behaviour, social knowladge, once institutionalized exists as fact, as part of objective reality and can be transmitted directly on that basis”.

Inti: kelembagaan hasil dari proses kultur dan pengetahuan (kognitif), sehingga manusia memaknai segala hal disepertarnya termasuk norma dan regulasi. Manusia tidak langsung patuh sepenuhnya karena memaknai lagi norma dan aturan yang ada, lalu memilih sikap dan peraturannya sendiri karena manusia adalah aktor yang aktif.

Social Institution (Pilar Kultural-Kognitif)

Sumber: Diolah kembali

Universitas Indonesia

2.1.2 Perbedaan Kelembagaan Lokal dengan Organisasi.

Penggunaan istilah "*institution*" pada literatur berbahasa Inggris, ataupun istilah "lembaga" dan "kelembagaan" dalam literatur berbahasa Indonesia cenderung tidak konsisten dan tidak memperoleh pengertian yang sama antar ahli. Selain itu, penggunaan konsep ini seringkali bercampur dengan konsep "*organization*". Pada bagian ini akan ditekankan perbedaan antara kelembagaan lokal dengan organisasi.

Menurut Uphoff (1986, h. 8) bahwa "*Organizations are structures of recognised and accepted roles. Institution are complexes of norms and behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposes*" (Organisasi adalah struktur yang mengakui dan menerima adanya aturan. Kelembagaan adalah kompleks norma-norma dan perilaku yang bertahap dari waktu ke waktu dengan tujuan bernilai kolektif (sosial) atau nilai bertujuan nilai sosial). Dari penjelasan Uphoff di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi lebih bergerak pada bidang formal yang lebih modern sedangkan kelembagaan lebih pada informal dan tradisional dimana norma dan aturan menjadi pedoman menjalankan kelembagaan untuk tujuan bersama.

Sedangkan menurut Wibowo (2011, h.61), bahwa organisasi merupakan serangkaian kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan kelembagaan lokal tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorisasikan sebagai suatu lembaga. Penjelasan Wibowo tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi lebih menitik beratkan fungsi dan peran yang berkaitan dengan kepentingan atau pelayanan warga, sedangkan kelembagaan lokal lebih mengarah pada aspek suatu norma dan perilaku bersama.

Perbedaan antara kelembagaan lokal dengan organisasi yang cukup tegas dijelaskan oleh Syahyuti. Menurut Syahyuti (2007, para. 7-8) bahwa kelembagaan lokal adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan lokal dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (*non formal institution*), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (*formal institution*). Sedangkan lembaga atau dapat juga disebut organisasi,

adalah bentuk kelembagaan yang formal, dengan ciri memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus.

Ada empat cara untuk membedakan kelembagaan lokal dengan organisasi menurut Syahyuti (2010, h. 34), adapun empat komponen pembedanya yaitu:

1. Kelembagaan lokal cenderung tradisional sedangkan organisasi cenderung modern;
2. Kelembagaan lokal berasal dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas;
3. Kelembagaan lokal dan organisasi berada dalam satu kontinum di mana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga dan;
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan lokal. Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan lokal. Secara sederhana kelembagaan lokal dapat diartikan sebagai aturan main (*rule of the game*). Sedangkan Susanto melihat perbedaan kelembagaan dari segi komponen dan sifatnya. Menurut Susanto (2006, h. 115) bahwa perbedaan kelembagaan lokal dengan organisasi dapat dianalogikan dengan sebuah komputer yang memiliki dua komponen utama yaitu piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*). Lebih lanjut Susanto (2006, h. 115) menjelaskan bahwa organisasi merupakan *hardwere*-nya dan kelembagaan menjadi *software*-nya. Berdasarkan sifatnya kelembagaan dibagi menjadi dua yaitu kelembagaan formal dan informal. Sedangkan berdasarkan mekanisme pembentukan, kelembagaan (organisasi) pada masa orde baru diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan sejenisnya. Sementara itu, kelembagaan lokal pada masa sekarang lebih merujuk pada aturan main seperti adat istiadat dan kebiasaan.

Untuk mempermudah memahami perbedaan antara kelembagaan lokal dengan organisasi secara komperhensif dari beberapa ahli sebagaimana yang di kemukakan diatas, maka dirangkum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Kelembagaan Lokal dengan Organisasi

No	Pendapat Ahli	Kelembagaan Lokal	Organisasi
1	Uphoff (1986, h. 8)	<i>Complexes of norms and behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposed</i> (Lembagayangkompleksnorma-normadan perilaku yangbertahandari waktu ke waktu dengan tujuan bernilaikolektif(sosial) atau senilaibertujuan nilai sosial).	<i>Structures of recognised and accepted roles</i> (struktur yang mengakui dan menerima adanya aturan).
	Kesimpulan	Bercorak tradisional (Norma, Perilaku kolektif dan sangsi sosial)	Bersifat Modern (Struktur kerja sesuai aturan formal)
2	Wibowo (2011, h. 60-61),	Kelembagaan tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorisasikan sebagai suatu lembaga.	Serangkaian kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan.
	Kesimpulan	Mengarah pada aspek norma dan perilaku bersama.	Fungsi dan peran berkaitan dengan kepentingan atau layanan masyarakat.
3	Syahyuti (2007, par. 7-8)	Sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (<i>non formal institution</i>), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (<i>formal institution</i>).	Bentuk kelembagaan yang formal, dengan ciri memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus.
4	Susanto (2010, h. 115)	Kelembagaan menjadi <i>software</i> merujuk pada aturan main seperti adat istiadat dan kebiasaan.	Organisasi merupakan <i>hardware</i> diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan sejenisnya

Sumber: Diolah Kembali

2.1.3 Interaksi Kelembagaan Lokal Dan Organisasi

Keberadaan organisasi saling berkaitan dan berinteraksi dengan teori kelembagaan lokal. Menurut Selznick (1948) “*organizations created as instrumental mechanisms to achieve specific goal to a variable extent and over time are transformed into institutions*”. (Scoot, 2008, h. 21). (Organisasi diciptakan sebagai mekanisme instrumental untuk mencapai tujuan tertentu untuk sebagian variabel dan dari waktu ke waktu diubah menjadi lembaga). Lebih lanjut Selznick (1948) menjelaskan bahwa dampak tujuan dari aksi sosial dalam

lingkungan organisasi (struktur berdasarkan tindakan rasional, mekanisme dan alat dalam membuat tujuan yang spesifik, karakteristik sosial anggota di sistem organisasi) merupakan bagian dari peraturan yang telah disepakati, sehingga lingkungan organisasi tersebut ditransformasikan pada kelembagaan melalui penanaman nilai (*infused with value*). Proses transformasi nilai organisasi melalui kelembagaan lokal berpengaruh pada karakteristik struktur sehingga memiliki identitas yang berbeda. (Scoot, 2008, h. 22). Dengan demikian, keberadaan organisasi sebagai kendaraan untuk mewujudkan nilai dan tujuan dalam mengembangkan teknologi sedangkan kelembagaan lokal menjadi struktur kekuatan manusia yang berkomitmen terhadap beberapa nilai, dengan menekankan pemeliharaan nilai untuk melindungi kekuatan di masyarakat. Sehingga subyek pelebagaan lebih mengarah pada menyebarkan tujuan dalam memperbaiki kelemahan teknologi dari organisasi.

Pendapat Selznick dipengaruhi oleh pendekatan Merton bahwa model dari prosesberjalannya kelembagaan lokal berada dalam organisasi birokrasi yang dikendalikan sesuai perintah, sebaliknya Selznick menfokuskan pada proses dalam bagian organisasi yang dikhususkan pada seperangkat nilai yang disepakatikarena organisasialadalah (1) sistem sosial; (2) tujuan atau prosedur dan cenderung untuk mencapaistatus mapan serta; (3) nilaidiresapi terlembakan. Sehingga ketiga lingkungan di organisasi tersebut dapat menjadi lembaga melalui proses pelebagaan (*institutionalized*). Proses pelebagaan organisasi dilakukan dengan penanaman nilai melalui berbagai persyaratan. Melalui penanaman nilai maka memperoleh identitas struktur karakter yang berbeda dengan lainnya sehingga menyimpan nilai-nilai yang unik. Struktur dan tujuan organisasi yang ditransformasikan ke dalam kelembagaan dengan waktu yang relatif lama akan memunculkan komitmen dari anggota untuk berpartisipasi sehingga memunculkan kekuatan yang mengikat lingkungan dimana organisasi itu berada. Dengan demikian, struktur yang memiliki kekuatan menjadi komitmen nilai yang akan melindungi setiap kegiatan organisasi. Melalui proses kekuatan dalam organisasi akan mengidentifikasi cara memegang kekuasaan dan mampu melestarikan kekuasaan tersebut untuk mengikat anggota dan mencapai tujuan yang di harapkan. (Scoot, 2008, h, 23).

Berbeda dengan pandangan Mayer and Rowan (1977) bahwa kelembagaan lokal sebagai aturan budaya yang kompleks diformulasikan untuk membangun sebuah organisasi. (Scoot, 2008, h. 43). Lebih lanjut Mayer and Rowan (1977) menjelaskan bahwa hal yang sangat penting dalam kepercayaan adalah rasionalisasi yang diformulasikan pada adat istiadat yang secara khusus dibuat untuk menghasilkan aturan guna mencapai obyek yang spesifik. Alat rasionalisasi terdiri dari profesi, hukum formal yang berupaya mendukung pengembangan anggota dan berbagai tipe organisasi. Semakin tingginya bentuk perilaku rasional yang kompleks akan menghasilkan aturan budaya yang menjadi penyedia tempat dari nilai yang dikonstruksi. (Scoot, h. 2008, h. 43). Sehingga pendekatan Mayer and Rowan (1977) lebih melihat “*the impact on organizational forms of change in the wider intitutional environment*”. (dampak dari perubahan bentuk organisasi kedalam lingkungan kelembagaan yang lebih luas).(Scoot, h. 2008, h. 44).

Menurut Scoot, (2008, h. viii) bahwa proses kelembagaan lokal memiliki kaitan dengan struktur organisasi dan perilaku sebagai konsep yang sangat berguna untuk meletakkan lokus proses kelembagaan yang paling baik untuk membentuk organisasi. Organisasi merupakan arena sosial dimana tindakan rasional berlangsung. Perilaku dalam organisasi pasti rasional, karena pilihan-pilihan dibatasi dan dipandu oleh aturan-aturan. Adanya organisasi akan mempercepat tercapainya kesetabilan tindakan. Hal ini merupakan jiwa dasar dari pelebagaan (*institutionalized*). Nee (2005) melihat interaksi kelembagaan dan organisasi dari sudut pandang lingkungan dimana lingkungan kelembagaan dikristalisasi pada organisasi. (Syahyuti, 2010, h. 8)

Sedangkan Wibowo (2011, h. 72-77) menjelaskan bahwa sebuah organisasi dapat menjadi lembaga melalui proses pelebagaan jika terdapat beberapa persyaratan. Adapun syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya norma yang dihayati masyarakat sebagai anggota.

Sebagain besar warga sistem sosial menerima norma tersebut. Norma-norma tersebut telah dijiwai sebagian besar dari warga-warga sistem sosial tersebut, sehingga norma tersebut bersanksi.

2. Organisasi memberikan keuntungan bagi anggotannya.

Kelembagaan masyarakat yang merupakan teknologi (teknologi material dan organisatoris) memiliki peranan yang besar dalam mengatur keserasian hidup manusia dengan jalan memenuhi kebutuhan. Dengan kebutuhan yang begitu banyak sehingga masyarakat mengembangkan usahanya disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Keberadaan usaha masyarakat tidak meninggalkan lembaga sebagai pemberi dan penyedia kebutuhan yang telah ditetapkan.

3. Adanya stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara mengutamakan akuntabilitas, adanya partisipasi dari seluruh anggota dalam pengambilan keputusan, perencanaan serta evaluasi kegiatan, didukung oleh konsensus atau kesepakatan bersama serta adanya sangsi sosial.

Dari ketiga syarat diatas, maka proses pelebagaan pada organisasi dapat dicapai namun waktu yang dibutuhkan cukup lama hingga aturan dan tata cara menyalurkan serta memperoleh layanan dari organisasi itu diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama (kolektif). Meskipun proses pelebagaan membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pelebagaan (*institutionalized*). Adapun faktor-faktor keberhasilan tersebut menurut Wibowo (2011, h. 116-118) yaitu:

1. Frekuensi interaksi yang tinggi, diantara pihak-pihak di dalam suatu warga diperlukan sebagai sarana untuk mendiskusikan, menilai atau mengevaluasi kemapanan dan kecocokan setiap norma dan perilaku baru yang diperkenalkan.
2. Koordinasi interaksi (kerjasama yang baik), diantara unsur-unsur di dalam warga diperlukan sebagai sarana untuk menerapkan atau mengucicobakan penerapan norma-norma dan perilaku yang diperkenalkan. Kerjasama yang baik antar pihak juga diperlukan dalam mengevaluasi kemapanan dan kecocokan norma dan perilaku baru itu.
3. Terdapat masalah bersama yang mendesak, sehingga diperlukannya pola dan aturan kerjasama baru. Tanpa adanya masalah mendesak tidak mungkin ada alasan yang cukup untuk mengembangkan dan memperkenalkan norma dan perilaku baru di dalam warga. Disinilah

pentingnya dari upaya peningkatan kesadaran sebagai bagian penting dari upaya pengorganisasian dan pengembangan kelembagaan.

4. Terdapat dasar-dasar persamaan pola kebudayaan asal diantara para anggota warga akan sangat menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan mereka secara keseluruhan terhadap norma dan perilaku tertentu yang diperkenalkan. Latar belakang budaya seseorang akan sangat menentukan cara pandang terhadap suatu perilaku dan norma tertentu.
5. Tersediannya tokoh-tokoh pemimpin yang memenuhi syarat sangat menentukan keberhasilan proses pelebagaan. Hal ini mudah dipahami karena para pemimpin pada umumnya adalah sumber inspirasi atas norma dan perilaku baru yang diperlukan. Para pemimpin juga menjadi acuan seluruh anggota komunitas tentang penataan terhadap norma dan perilaku sehari-hari.

Untuk mempermudah memahami interaksi interaksi kelembagaan lokal dan organisasisecara komperhensifdari beberapa ahli sebagaimana yang di kemukakan diatas, maka dirangkum dalam tabel2.2 dibawah ini:

Tabel. 2.2 Interaksi Kelembagaan Lokal Dan Organisasi

No	Nama Pakar	Konsep interaksi kelembagaan lokal dengan organisasi
1	Parson (1960) (Scoot, 2008, h. 24)	Sistem nilai dari organisasi dengan menghubungkan dengan pola utama kelembagaan. Penginternalisasian norma dan sistem norma dari kelembagaan menjadi obyek organisasi.
2	Selznick (1948) (Scoot, 2008, h. 21)	<i>“Organizations created as instrumental mechanisms to achieve specific goal to a variable extent and over time are transformed into institutions”</i> . (Organisasideciptakan sebagaimekanismeinstrumental untukmencapai tujuanertentuuntuk sebagianvariabel dandari waktu ke waktudiubah menjadilembaga).
3	Wibowo (2011, h. 72-77).	(a) Adanya norma yang dihayati masyarakat sebagai anggota; (b) Organisasi memberikan keuntungan bagi anggotannya; (c) Adanya stabilitas dan kapabilitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
4	Nee (2005) (Syahyuti, 2010, h. 8)	Lingkungan kelembagaan dikristalisasi pada organisasi.
5	Mayer and Rowan	<i>The impact on organizational forms of change in the wider</i>

Tabel. 2.2: Lanjutan

(Scoot, h. 2008, h. 44).	institutional environment. (Dampak dari perubahan bentuk organisasi kedalam lingkungan kelembagaan yang lebih luas).
--------------------------	--

Sumber: Diolah Kembali

2.1.4 Teori Kelembagaan Baru (*New Institutionalism*)

Interaksi antara Kelembagaan lokal dan Organisasi melahirkan sintesa Teori Kelembagaan Baru. Menurut Scott (2008: 45) bahwa teori kelembagaan baru (*neoinstitutional theory*) menekankan tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari organisasi. Pendekatan kelembagaan ini menekankan pada konsep kerangka kognitif dari pada normatif dan lebih memfokuskan pada dampak sistem kekuatan budaya yang berhubungan dengan lingkungan organisasi dibanding proses internal organisasi. Sedangkan pandangan lain mengenai konsep kelembagaan baru dijelaskan Nee and Ingram (2001, h. 20) yang melihat sebuah integrasi dari sekumpulan relasi-relasi sosial dan lembaga-lembaga sebagai pedoman yang lalu menjadi pengatur dalam kondisi elemen-elemen formal dari struktur kelembagaan dan organisasi sosial nonformal dari jaringan dan norma-norma memfasilitasi, memotivasi, dan menentukan perilaku ekonomi anggota masyarakat.

Menurut DiMaggio and Powell (1991) keberadaan kelembagaan lokal bergabung dengan lingkungan yang ada disekitarnya melalui tiga mekanisme penting yaitu aturan yang memaksa (*coersive*), proses untuk meniru tindakan (*mimetic*) dan norma yang ada di lingkungan (*normative*) dimana kelembagaan memberikan dampak penyebaran tiga mekanisme pada bidang organisasi. (Scoot, 2008, h. 43).

Gagasan diatas berkontribusi besar pada munculnya paham kelembagaan baru (*New Institutionalism*) di bidang ilmu sosial dengan memberikan penambahan pada pengaruh dari pengetahuan, dimana individu bertindak karena persepsinya terhadap dunia sosial. Akar teori kelembagaan baru berasal dari teori kognitif, teori kultural, dan fenomenologi serta etnometodologi. (Scoot, 2008, h. 45). Berdasarkan gagasan tersebut, maka Scoot (2008, h. 48) merumuskan kelembagaan sebagai “*are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide*

stability and meaning to social life". (terdiri dari elemen aturan, norma dan budaya-pengetahuan yang bersama-sama dengan menghubungkan kegiatan dan sumber daya, memelihara stabilitas dan memaknai kehidupan sosial). Lebih lanjut Scoot (2008, h. 49) menjelaskan bahwa ketiga elemen tersebut merupakan pusat lahirnya struktur kelembagaan, pedoman perilaku meskipun pedoman tersebut dapat berubah secara elastis, mencakup hubungan perilaku serta sumber daya materi dari aspek kehidupan sosial melalui kegiatan produksi dan reproduksi sumber daya agar dapat berkesinambungan.

Aturan (*rule*), norma (*norm*) dan pemaknaan (*meaning*) muncul dari proses interaksi sehingga proses tersebut dijaga dan dimodifikasi oleh perilaku manusia. Sedangkan sistem makna (*meaning system*) berhubungan dengan perilaku manusia. Sehingga lembaga tidak hanya diwakili oleh kegiatan administrasi dan obyek fisik. Namun lembaga menggambarkan secara terus menerus yang dibawa ke kehidupan pada perilaku manusia yang sebenarnya. Dan yang penting lagi bahwa sumber daya materi merupakan gabungan dari materi dan manusia, dalam konsepsi struktur sosial untuk memperhitungkan kekuasaan yang tidak seimbang dibutuhkan dukungan kekuatan sanksi agar aturan dan norma dapat berjalan secara efektif. Kekuasaan tersebut digunakan untuk meligitimasi hak atas akses sumber daya sesuai dengan yang telah ditentukan. (Scoot, 2008, h. 49).

Dengan demikian menurut Scoot (2008, h. 50) bahwa keberadaan kelembagaan baru menekankan pada layanan untuk (1) mengontrol kapasitas masyarakat dan membatasi perilaku; (2) memberlakukan batasan dengan definisi legal, moral dan batas-batas budaya; (3) berangkat dari yang sah dari kegiatan tidak sah; (4) mendukung dan mendorong kegiatan dan aktor; (5) memberikan pedoman dan sumber daya untuk mengambil tindakan serta larangan dan batasan kegiatan.

Konsep dari keberadaan kelembagaan baru di atas didukung oleh tiga pilar yang mencakup Pilar *Regulative*, *Normative* dan *Cultural-Cognitive*.

1. Pilar Regulatif

Aspek regulatif dalam kelembagaan lebih menitikberatkan pada pembatasan atau larangan melalui pembuatan aturan terhadap perilaku manusia. Menurut Scoot (2008, h. 52) bahwa secara khusus gabungan dari

pilar regulatif harus dihormati dalam proses pembuatan aturan, tata aturan, monitoring dan kegiatan sanksi. Konsep dalam proses pembuatan aturan dengan melibatkan kemampuan untuk menetapkan peraturan, memeriksa kesesuaian lainnya dan bila perlu, memanipulasi penghargaan, sanksi dan hukuman, dalam upaya untuk mempengaruhi perilaku ke depan. Proses ini melalui penyebaran informasi, mekanisme informal yang melibatkan kebiasaan di masyarakat seperti memermalukan atau pengucilan kegiatan, atau mungkin sangat formal dan ditugaskan untuk aktor khusus seperti polisi dan pengadilan.

Walaupun konsep regulatif menekankan pada bentuk represi dan batasan atau larangan, dimungkinkan jenis regulasi dari tindakan sosial dan tindakan yang meliputi sanksi, kekuatan khusus dapat menguntungkan beberapa jenis aktor. Namun disadari bahwa kelembagaan dapat memberikan batasan sekaligus kesempatan terhadap aktor. Aktor yang berada dalam konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan. Aktor dapat menggunakan hak dengan melegitimasi aturan yang memaksa dengan kerangka normatif. Pilar regulatif dan normatif saling mendukung dan membatasi dalam menggunakan kekuasaan aktor dan kedua pilar tersebut saling menguatkan. (Scoot, 2008, h. 54)

Dengan demikian menurut Scoot (2008, h. 54) bahwa pilar regulatif merupakan *“a stable system of rules, whether formal or informal, backed by surveillance and sanctioning power that is accompanied by feelings of fears/guilty or innocence/ incorruptibility is one prevailing view of institution”* (sistem aturan yang stabil, apakah kekuasaan formal atau informal, yang didukung oleh pengawasan dan sanksi yang disertai dengan perasaan takut/bersalah atau tidak bersalah/tidak korup adalah salah satu pandangan yang berlaku dilembaga).

2. Pilar Normatif

Menurut Scoot (2008, 55) bahwa pilar normatif menitikberatkan pada aturan normatif yang memberikan ketentuan atau petunjuk, mengevaluasi, kewajiban ke dalam dimensi kehidupan sosial. Sistem normatif terdiri dari nilai dan norma. Lebih lanjut Scoot (2008, h. 55)

menjelaskan bahwa nilai adalah konsep bersama-sama disukai atau diinginkan dengan konstruksi dan melalui struktur yang sudah ada atau perilaku dapat dibandingkan dan dinilai. Sedangkan norma menetapkan apa harus dilakukan, mereka menentukan cara yang sah untuk mencapai tujuan untuk dihargai. Tujuan jangka lama atau tujuan jangka pendek (misalnya memenangkan permainan, membuat keuntungan). Tetapi juga menunjukkan cara yang tepat untuk mengejar mereka (misalnya peraturan menentukan bagaimana permainan ini untuk dimainkan, cara pandang praktik bisnis yang adil).

Beberapa nilai dan norma digunakan pada semua anggota agar memunculkan kebersamaan, sedangkan lainnya berlaku bagi jenis aktor yang dipilih atau yang memiliki kedudukan. Konsep ini disebut peran dimana peran itu sendiri merupakan kesesuaian tujuan dan kegiatan untuk individu tertentu atau posisi sosial tertentu. Aktor menjadi pedoman bagaimana seharusnya berperilaku. Sistem normatif biasanya sebagai penetapan kendala pada perilaku sosial dan begitu yang masyarakat lakukan. Pada waktu yang sama norma bersifat membatasi (*constraint*) sekaligus mendorong (*empower*) aktor. Kompleks norma pada hakekatnya menjelaskan apa kewajiban bagi aktor sesuai dengan mandat. (Scoot, 2008, 55).

Dengan demikian konsep kelembagaan normatif memberikan kontribusi pada lembaga yang lebih menekankan pengaruh untuk menstabilkan kepercayaan sosial dan norma-norma yang baik diinternalisasikan dan diberlakukan pada anggota masyarakat. Hal ini seperti penjelasan Parson bahwa “*shared norms and values were regarded as the primary basis of stable social order*” (Scoot, 2008, h. 56) (norma dan nilai bersama dianggap sebagai dasar utama dari tatanan sosial yang stabil).

3. Pilar Kultural-Kognitif

Pendekatan kultural-kognitif memfokuskan pada konsep bersama yang merupakan sifat dari realitas sosial melalui sebuah kerangka dari makna (*meaning*) yang dibuat. Para pakar kelembagaan menganggap bahwa

dimensi kognitif dari keberadaan manusia adalah mediasi antara stimulus dari dunia eksternal dan respon dari organisme individu yang diperoleh melalui penginternalisasian kumpulan simbol dari gambaran dunia. (Scoot, 2008, h. 57). Sehingga fokus dalam kultural-kognitif adalah pada bagaimana kehidupan sosial menggunakan kerangka makna dan bagaimana makna-makna diproduksi dan direproduksi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Scoot (2008, h. 59) *A cultural-cognitive conception of institution stresses the central role played by the socially mediated construction of common framework of meaning* (konsepsi budaya-kognitif dari lembaga menekankan peran sentral yang dimainkan oleh konstruksi sosial dimediasi kerangka umum makna).

Menurut Scoot (2008, h. 58) bahwa konteks kelembagaan kultural-kognitif memperhatikan proses sedimentasi dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif melalui proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal. Bagaimana memperlakukan kategori kultural sebagai batasan kognitif untuk kepentingan sosial melalui pendefinisian, pengklasifikasian, mengeluarkan pendapat dan negosiasi serta memperjuangkan kepentingan lembaga. Kultural menyediakan bentuk berfikir, perasaan dan bertindak, serta kerangka mental individu. Kultural sesungguhnya menunjukkan gambaran keseluruhan dari konsepsi situasi yang dibagikan untuk kebersamaan individu seperti bentuk simbol kolektif sebuah bendera dan berlakunya ideologi politik yang disukai atau sistem ekonomi.

Elemen kultural memiliki tingkatan dari kelembagaan, dimana element tersebut membentuk jaringan pada elemen lainnya yang terkandung dalam kegiatan rutin dari organisasi. Elemen kelembagaan kultural-kognitif melekat pada bentuk kultural seperti pemeliharaan bentuk budaya agar menjadi pedoman masyarakat, penguatan ritual dan penjelasan simbol dalam realitas kehidupan yang biasanya digunakan sebagai pemikiran yang terdapat dalam kebudayaan di masyarakat. (Scoot, 2008, h. 59).

Dengan demikian maka dimensi pada pilar kelembagaan ini dinyatakan dalam perasaan mulai dari efek positif dari kepastian keyakinan. Aktor menyesuaikan dengan kepercayaan budaya yang berlaku memungkinkan menjadi bagian dan penghubung. Sedangkan aktor yang bertentangan dianggap tidak mengerti dan yang paling buruk aktor itu mengalami gangguan mental.

Berdasarkan penjelasan ketiga pilar diatas, maka dapat diidentifikasi komponen pembentuk atau pendukung lembaga seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Tiga Pilar Kelembagaan Baru

	<i>Regulative</i>	<i>Normative</i>	<i>Cultural-Cognitive</i>
Dasar Kepatuhan	Kelayakan	Kewajiban Sosial	Diterima begitu saja Pemahaman Bersama
Dasar Aturan	Aturan regulatif	Harapan yang mengikat	Skema Konstitutif
Mekanisme	Paksaan	Normatif	Peniruan
Logika	Peran	Kepatutan	Ortodok
Indikator	Aturan Hukum Sanksi	Pengesahan Akreditasi	Keyakinan Umum Tindakan logika bersama
Dampak	Rasa Takut dan bersalah/berdosa	Rasa Malu/Kehormatan	Kebingungan
Dasar Legitimasi	Sangsi hukum	Diatur secara moral	Dipahami/dimengerti Dikenali Didukung Budaya

Sumber: Scoot (2008, h. 51)

2.1.5 Pengembangan Kelembagaan Lokal

Ide dasar dari perspektif pengembangan kelembagaan lokal adalah menciptakan atau menghidupkan suatu lembaga yang berfungsi untuk mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan inovasi. (Wibowo, 2011, h. 125). Hal ini dilakukan karena kelembagaan berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan di pedesaan, khususnya menekankan pada perbaikan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Proses dan mekanisme intervensi kelembagaan tersebut menjadi bagian penting yang mendorong munculnya perspektif pengembangan kelembagaan. Strategi tentang pengembangan kelembagaan

lokal menurut Esman and Uphoff (1984) memfokuskan pada perubahan dan rekayasa organisasional melalui (1) pendekatan proses belajar (*Learning process approach*); (2) pendekatan peningkatan kinerja (*Performance improvement approach*) dan (3) pendekatan peningkatan-kapasitas pembangunan perdesaan (*The rural development capacity-building approach*). (Wibowo, 2011, h. 159).

Lebih lanjut Esman and Uphoff (1984) sebagaimana yang dijelaskan oleh Wibowo (2011, h. 160-178) bahwa:

1. Pendekatan proses belajar (*Learning process approach*)

Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Proyek-proyek pembangunan yang selama ini dilakukan oleh lembaga donor lebih mendikte masyarakat melalui pembuatan kerangka program (*blueprint*) pada intervensi pembangunan tanpa melihat kebutuhan dan pengetahuan dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga program yang dilakukan tidak merangsang proses pembangunan yang berkelanjutan. Melalui proses pendekatan belajar, masyarakat diberikan wewenang oleh lembaga sehingga mereka mampu mengendalikan kehidupannya sendiri melalui pengembangan kelembagaan. (Wibowo, 2011, h. 160). Keefektifan dalam pengembangan kelembagaan lokal menurut Korten (1980) dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai sumber dari luar (*external resources*) dengan pengetahuan kebutuhan lokal (*local needs and knowledge*) guna untuk memecahkan masalah pembangunan secara timbal balik. Sehingga pemecahan masalah yang muncul diharapkan dapat sistematis dari suatu proses bersama antara spesifikasi masalah, perumusan strategi, tindakan analisis terhadap pengalaman dan umpan balik terhadap usaha-usaha spesifik ulang. (Wibowo, 2011, h. 160).

Sedangkan dalam proses implementasi pendekatan proses belajar menurut Wibowo (2011, h. 160) membutuhkan prasyarat sebagai berikut:

- a. Membutuhkan satu organisasi yang terbuka terhadap usaha-usaha eksperimentasi.
- b. Mau mengakui serta belajar dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan.

- c. Berorientasi kepada partisipasi klien dalam pekerjaan-pekerjaan organisasi.
- d. Memiliki akses terhadap pelajaran-pelajaran untuk mempelajari dan menyempurnakan tindakan secara terus menerus.

Dengan demikian menurut Wibowo (2011, h. 162) maka langkah pengembangan kelembagaan dimulai dengan membuat formasi satu koalisi diantara aktor yang berkepentingan dengan menerobos garis wewenang organisasi formal dan memudahkan proses yang menghambat struktur formal. Koalisi ini dioperasikan melalui penetapan kelompok kerja yang terdiri atas anggota-anggota organisasi (pelaksana) dan para penyedia sumber daya atau pengetahuan dari luar. Kelompok ini bekerja bersama memprakarsai dan mengelola proses belajar yang mengarah kepada pengembangan masyarakat.

Kelompok koalisi yang membuat satu laboratorium dimana eksperimentasi dan diujicoba organisasi harus berlangsung untuk mengembangkan satu model operasi yang baru dan berfokus pada klien. Laboratorium tersebut melayani sebagaimana layaknya sebuah lingkungan yang sengaja dipelihara dan dilindungi dalam organisasi yang memiliki kebebasan, sehingga laboratorium yang dikelola oleh kelompok memberikan dua manfaat yang diperoleh yaitu: (1) penyedia pelayanan atau jasa yang aktif dalam jangka waktu pendek, dan; (2) kapasitas pemecahan masalah yang berkelanjutan dalam jangka panjang. (Wibowo, 2011, h. 162).

2. Pendekatan peningkatan kinerja

Fokus pendekatan ini dalam pengembangan kelembagaan adalah menegakkan perubahan dalam pengembangan organisasi yang menghasilkan peningkatan kinerja melalui pemenuhan fungsi-fungsi standar tertentu. (Wibowo, 2011, h. 169). Adapun fungsi tersebut antara lain:

- a. Manajemen umum yang mencakup tujuan yang jelas dan terarah, kesepakatan mengenai strategi dan cara mencapai tujuan, persetujuan dan penggambaran peran serta tanggung jawab, penerapan insentif dan sanksi pada perilaku serta tindakan, mekanisme respon balik, pedoman dan adaptasi. Inti dari fungsi manajemen adalah melakukan

tindakan yang dirancang untuk memperkuat target kemampuan organisasi agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut.

- b. Menciptakan dukungan anggota dan menilai perubahan-perubahan yang dibawa dengan tujuan agar organisasi mampu mengatur dirinya sendiri untuk tampil lebih baik melalui pembangunan hubungan dengan lingkungan yang akan mempertahankannya pada kinerja tinggi sepanjang waktu.
- c. Pemanfaatan model tim yang peka terhadap struktur sosial organisasi melalui pelatihan anggota, dimana pembentukan keterampilan staf disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek organisasi dan prioritas untuk membantu organisasi memperkuat kemampuan dalam rangka memenuhi fungsi-fungsi manajemen.

Pendekatan manajemen kinerja menggunakan teknik perencanaan dan manajemen yang relatif mudah disesuaikan dengan lembaga donor dan prosedur-prosedur organisasi di sektor publik.

3. Pendekatan peningkatan-kapasitas pembangunan perdesaan

Pendekatan ini menekankan pada perubahan organisasional pada model peningkatan performa dan keyakinan pada pendekatan proses pembelajaran yang berpusat pada rakyat. Tujuan dari pendekatan ini lebih menyarankan pada pencapaian yang melampaui batas sasaran organisasi untuk menciptakan hubungan vertikal dengan aktor pembuat kebijakan bersama dengan peningkatan organisasi. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan perlunya memahami masyarakat menjadi sasaran intervensi pengembangan masyarakat baik secara peningkatan kemampuan masyarakat untuk menentukan dan mengatur pembangunan maupun struktur sosio-kultural yang mempengaruhi masyarakat dapatkan. (Wibowo, 2011, h. 178).

Menurut Honandle (1981) sebagaimana yang dijelaskan Wibowo (2011, h. 180-183) bahwa terdapat dua faktor dalam pembangunan-kapasitas untuk pengembangan kelembagaan lokal. Adapun kedua faktor tersebut adalah faktor proses (*process factors*) yang terdiri lima elemen diantaranya:

- a. Pembagian resiko antara klien dengan penyedia layanan.
- b. Pelibatan aktor dengan berbagai level.

- c. Menunjukkan keberhasilan atau manfaat teknologi baru atau perilaku pada pendahulunya.
- d. Menggabungkan gaya penerapan dan tindakan bersama.
- e. Menekankan pada pembelajaran.

Faktor proses berfungsi untuk merancang intervensi pengembangan kelembagaan melalui tahapan perancangan proyek, jumlah riil bantuan jangka pendek, kepercayaan pada kekuatan kerja kontemporer, melaksanakan pelatihan yang berorientasi praktek bagi staf proyek dan pemanfaat, dan mekanisme pembelajaran organisasi, perancangan kembali proyek berkala.

Sedangkan faktor struktur (*structural factor*) terdiri dari dua elemen yaitu:

- a. Insentif yang pantas.
- b. Menggunakan sumber daya yang ada.

Dua faktor struktural merupakan elemen kunci dalam lingkup intervensi pengembangan kelembagaan. Elemen insentif menggabungkan upaya yang dilaksanakan melalui ketersediaan barang dan jasa untuk mencari pengaruh desakan struktural terhadap keefektifan. Sehingga pengembangan kelembagaan harus melihat diluar batas-batas proyek dan mengadopsi fokus tingkat-program.

2.1.6 Keuntungan Menggunakan Kelembagaan Lokal

Menurut Esman and Uphoff (1984) sebagaimana yang diuraikan oleh Wibowo (2011, h. 133-134) bahwa beberapa efisiensi yang akan didapat jika memanfaatkan peran kelembagaan lokal dalam pembangunan yaitu:

1. Lembaga lokal dapat meningkatkan efisiensi pembangunan karena kelembagaan dapat membantu menyediakan informasi yang akurat dan representatif (*accurate and representatif information*) tentang kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat serta umpan balik terhadap inisiatif dan pelayanan pemerintah.
2. Lembaga lokal dapat memfasilitasi kemampuan adaptasi program-program pembangunan (*adaptation of program*) terhadap variasi lingkungan fisik dan sosial yang beragam dan dengan demikian membantu meningkatkan efisiensi program.

3. Lembaga lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi program melalui kemampuan mengembangkan komunikasi kelompok (*group communication*).
4. Lembaga lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi program melalui sumber daya (*resource mobilization*) melalui kegiatan gotong royong.
5. Melalui lembaga lokal, pengetahuan lokal (*technical knowledge*) yang didapat dari pengalaman kolektif yang panjang dapat diolah dan dimanfaatkan bagi efisiensi dan keberhasilan pembangunan.
6. Pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas dan layanan (*utilization and maintenance*) pada umumnya juga dapat dilakukan dengan baik melalui keterlibatan lembaga lokal.
7. Melalui lembaga lokal dapat dikembangkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan program yang melibatkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.

Dengan demikian, keberadaan lembaga lokal dapat membuat kegiatan komunikasi lebih efektif karena kekuatan-kekuatan yang ada di masing-masing individu dihimpun untuk menghadapi tekanan dan permasalahan dalam kehidupan. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing anggota akan menjadi sesuatu yang efektif untuk digunakan dalam penentuan sikap dan pengambilan keputusan dalam penanganan masalah atau kegiatan pembangunan.

2.2 Pengembangan Masyarakat

2.2.1 Definisi Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) dibutuhkan sebagai upaya untuk mensejahterakan dan mewujudkan kemandirian masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapan pengembangan masyarakat. Masyarakat menjadi aktor utama dalam proses kegiatan pengembangan masyarakat dengan membangkitkan potensi masyarakat dan sumber daya yang ada dalam komunitas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh beberapa pakar mengenai definisi dari pengembangan masyarakat sebagai berikut:

Menurut Brokensha and Hodge (1969) "*Community development is a movement designed to promote better living for whole community with the active participation and on the initiative of the community*". (Adi, 2008, h. 205).

(pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat). Dengan kata lain pengembangan masyarakat merupakan usaha masyarakat melalui aktivitas yang mandiri melalui bentuk partisipasi yang sadar dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Pengembangan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya yang pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada masyarakat.

Sedangkan Alfitri (2011, h. 31) mendefinikan pengembangan masyarakat sebagai proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa aktivitas pengembangan masyarakat dilakukan berlangsung secara terus menerus sampai akhirnya masyarakat bisa mandiri tanpa terjadi ketergantungan dengan pihak luar. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan, sehingga kegiatan tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang dan tidak berhenti pada waktu dan kondisi tertentu.

Berbeda dengan definisi Zubaedi (2007, h. 18) yang melihat pengembangan masyarakat sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki pilihan nyata menyangkut masa depannya. Definisi tersebut menekankan pada kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain pendekatan pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Zubaedi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan masyarakat sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Zubaedi, 2007, h. 19).

Selain sebagai sebuah metode dalam pemberdayaan masyarakat, Carry (1970) mendefinisi pengembangan masyarakat sebagai program yang mencakup, (1) perencanaan; (2) memberikan dukungan untuk dapat menolong dirinya sendiri; (3) bantuan teknik mencakup tenaga pelaksana, peralatan, dan bantuan bahan makanan; (4) keahlian khusus yang diintegrasikan untuk membantu komunitas; (5) program dilaksanakan berdasarkan batasan wilayah atau area geografis. (Hasim dan Remiswal, 2009, h. 49). Lebih lanjut Carry (1970) menjelaskan bahwa pelaksanaan program pengembangan masyarakat pada umumnya menunjukkan bahwa program bersifat umum membutuhkan peningkatan penggunaan pelaksanaan khusus yang profesional dengan diorganisasikan berdasarkan tujuan tertentu dalam cakupan pelaksanaannya sehingga program dapat memberi motivasi dan kerjasama pada seluruh komunitas agar dapat mempelajari diri dan menemukan masalahnya. (Hasim dan Remiswal, 2009, h. 50).

Model pengembangan masyarakat mensyaratkan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Strategi dasar pengembangan masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat yaitu dengan mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. (Hikmat, 2006, h. 67). Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam pengembangan itulah yang menjadi tujuan utama proses perubahan. Bila warga masyarakat penuh dengan kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif berarti tanda-tanda perubahan pun sudah tercapai.

Sebagaimana diketahui, bahwa perubahan dalam proses pengembangan masyarakat merupakan sinergi dari perubahan spontan dan perubahan terencana menuju kondisi kehidupan yang diharapkan. Dilihat dari proses perubahan maka yang direncanakan adalah tindakan untuk membangun aspek manusia termasuk proses interaksi dengan sistem sosial di masyarakat. (Soetomo, 2009, h. 255). Menurut Wibowo (2011, h. 132) bahwa keberadaan sistem sosial di masyarakat menjadi sumber dalam proses pengembangan masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat untuk memecahkan masalah cukup efektif jika dimobilisasi dalam

suatu bentuk kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rubin (1992) bahwa pendekatan pengembangan masyarakat lebih berdaya jika diorganisasikan atau dilembagakan melalui kegiatan kolektif yang dapat mengontrol pengambilan keputusan, proyek, program, dan kebijakan. (Wibowo, 2011, h. 132)

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar di atas yang menjadi landasan konsep tentang pengembangan masyarakat, maka fokus pengembangan masyarakat dalam penelitian ini adalah proses perubahan melalui kegiatan intervensi yang dilakukan oleh aktor dalam sistem sosial melalui kelembagaan lokal untuk mendorong individu dan kelompok serta komunitas dalam meningkatkan kapasitas berupa pengembangan wawasan, pengetahuan untuk merespon dinamika lingkungannya, peningkatan akses informasi dan peningkatan akses dalam proses pengambilan keputusan guna terwujudnya kemandirian.

2.2.2 Prinsip Pengembangan Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat membutuhkan partisipasi aktif agar proses kegiatannya dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan masyarakat. Menurut Ife (2008, h. 208) bahwa prinsip dasar pengembangan masyarakat berasal dari kearifan 'bawah ketimbang dari 'atas'. Dalam hal ini, kearifan bawah berasal dari masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan sehingga memunculkan kesadaran kritis melalui proses konsentisasi (*conscientization process*). Proses konsentisasi merupakan proses pemberdayaan kolektif untuk melalui kesadaran berpolitik. (Hikmat, 2006, h. 42). Sehingga komponen hakiki pengembangan masyarakat bukan hanya mengakui kearifan kaum tertindas dan hak mereka untuk mendefinisikan kebutuhan dan aspirasi dengan cara mereka, tetapi juga memfasilitasi pengekspresian kearifan tersebut dalam lingkup masyarakat yang lebih luas sebagai kontribusi yang hakiki pada kesejahteraan umat manusia. (Ife, 2008, h. 211). Dengan demikian, pengembangan masyarakat harus memasukkan strategi-strategi peningkatan kesadaran kritis agar individu dan kelompok mampu mengambil tindakan sendiri dalam termasuk didalamnya proses pemecahan masalah untuk kemudian membentuk partisipasi yang aktif dan masyarakat sebagai subyek bukan obyek.

Sedangkan menurut Dunham (1958) yang dikutip oleh Adi (2008, h 219-220) bahwa pengembangan masyarakat hendaknya mengarah pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut di mana pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya untuk aspek kesehatan, rekreasi ataupun kesejahteraan dalam arti sempit.
2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, dimana tidak hanya menekankan pada pendekatan multiprofesi, tetapi juga multi lapisan (*multivocational*), karena di sini diperlukan adanya keterlibatan layanan yang subprofesional, selain layanan profesional.
3. Kebutuhan adanya *community worker* yang serba bisa (*multipurpose*) pada wilayah pedesaan, di mana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, para petugas haruslah benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun membawa teknologi baru ke masyarakat sasaran.
5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan bersama masyarakat dan bukan untuk sekedar masyarakat.

2.2.3 Proses Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat pada dasarnya sebagai proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Kondisi kehidupan yang lebih baik tersebut secara konkret sering disebut juga dengan peningkatan taraf hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai peningkatan taraf hidup melalui proses pengembangan masyarakat, maka memerlukan peningkatan kesadaran dengan membuka peluang-peluang untuk

bertindak, kerjasama dan konsensus di masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ife (2008, h. 365) bahwa proses pengembangan masyarakat perlu mengupayakan pembentukan cara berfikir yang menghargai saling interaksi di antara masyarakat, menghargai kualitas pengalaman kolektif, dan memaksimalkan potensi mereka dan mencapai kemanusiaan mereka secara utuh melalui pengalaman proses masyarakat.

Dengan demikian Ife (2008, h. 366) menyimpulkan bahwa pengembangan masyarakat melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk saling bekerja, mengembangkan struktur yang berarti individu-individu menjadi lebih tergantung satu sama lain untuk mencapai segala sesuatu, dan mencari cara-cara yang memberi pengaruh kepada setiap orang dan dihargai oleh orang lain.

2.2.4 Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Pendekatan dalam pengembangan masyarakat sangat diperlukan dalam proses intervensi sosial terkait kegiatan dengan keberdayaan masyarakat. Menurut Battern (1967) bahwa pendekatan pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu: pendekatan Direktif (Instruktif) dan pendekatan Nondirektif (partisipatif). (Adi, 2008, h. 226). Lebih lanjut Batter (1967) menjelaskan bahwa:

1. Pendekatan Direktif (Instruktif)

Pendekatan direktif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa *community worker* tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Peran *community worker* bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya lebih banyak berasal dari *community worker* karena dia yang menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut.

Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan *community worker*. Dalam praktiknya *community worker* memang mungkin menanyakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau cara apa yang perlu dilakukan untuk menangani suatu masalah, tetapi jawabannya yang muncul dari suatu masyarakat selalu dikukur dari segi 'baik' dan 'buruk' menurut *community*

worker. Dengan pendekatan ini, memang banyak hasil yang telah diperoleh, tetapi hasil yang didapat lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan sering kali bersifat pencapaian secara fisik. (Adi, 2008, h. 227-229).

2. Pendekatan Nondirektif (Partisipatif)

Pendekatan nondirektif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, *community worker* tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang 'baik atau 'buruk' bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat sendiri. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tujuan dari pendekatan non direktif dalam upaya mengembangkan masyarakat adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya (masyarakat tersebut) melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka. Sementara *community worker* lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. (Adi, 2008, h. 229-231).

Peran *community worker* di sini berubah menjadi katalisator, yaitu: (1) pemercepat perubahan (*enabler*) yang membantu mempercepat terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat dengan merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk mentukan langkah sendiri (*self determination*) dan memampukan menolong dirinya sendiri; (2) memberikan informasi jika dibutuhkan, tentang pengalaman kelompok lain dalam mengorganisasikan diri untuk menghadapi hal yang serupa; (3) membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi secara sistematis tentang hakikat dan penyebab dari masalah, serta menelusuri keuntungan dan kerugian dari setiap usulan yang terkait dengan upaya memecahkan masalah yang mereka hadapi, dan; (4) menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk membantu (baik bantuan teknis ataupun materil) mengatasi masalah yang sedang dihadapi mereka,

sebagai tambahan dari sumber yang memang sudah dimiliki masyarakat. (Adi, 2008, h. 235).

Untuk kegiatan pengembangan masyarakat melalui pendekatan nondirektif, dibutuhkan adanya keinginan warga untuk bertindak (*self-direct action*). Terkait dengan pendekatan nondirektif pada kegiatan pengembangan masyarakat maka pentingnya menumbuhkan *self-direct action*. Menurut Batten (1967) yang dikutip oleh Adi (233- 234) bahwa beberapa prasyarat menumbuhkan *self-direct action* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sejumlah orang yang tidak puas terhadap keadaan mereka dan sepakat tentang apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan khusus mereka.
2. Orang-orang ini menyadari bahwa kebutuhan tersebut hanya akan terpenuhi bila mereka mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri.
3. Mereka memiliki, atau dapat dihubungkan dengan sumber daya yang memadai dan memenuhi kebutuhan tersebut hal ini termasuk:
 - a. Mempunyai cukup pengetahuan yang dapat membantu mereka mengambil keputusan yang bijaksana mengenai apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara yang terbaik untuk mencapainya.
 - b. Mempunyai sumber daya yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan peralatan untuk melakukan tindakan; dan
 - c. Mempunyai inisiatif (baik intrinsik maupun ekstrinsik) yang memadai guna menyatukan mereka dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan.

2.2.5 Tahapan Pengembangan Masyarakat

Strategi intervensi dalam pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan oleh beberapa organisasi pelayanan masyarakat atau kelembagaan lokal memiliki beberapa tahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi. Menurut Adi (2008, h. 244-258) bahwa tahapan pengembangan masyarakat meliputi (1) tahap persiapan (*engagement*); (2) tahap pengkajian (*assessment*); (3) tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*); (4) tahap formulasi rencana aksi

(*formulation action plan*); (5) tahap pelaksanaan kegiatan (*implementation*); (6) tahap evaluasi (*evaluation*); (7) tahap terminasi (*termination*).

Lebih lanjut Adi (2008, h. 244-258) menjelaskan ketujuh tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tahap persiapan (*engagement*)

Pada tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Persiapan petugas

Petugas dalam hal ini yaitu tenaga *community worker* yang menjadi prasyarat suksesnya suatu kegiatan pengembangan masyarakat dengan pendekatan nondirektif. Penyiapan petugas ini terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat.

- b. Persiapan lapangan

Kegiatan persiapan lapangan yang dilakukan oleh *community worker* pada awalnya dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan dengan cara formal untuk mendapatkan perizinan maupun melalui cara informal dengan menjalin kontak dengan tokoh informal agar hubungan dapat terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik pada tahap awal biasanya akan mempengaruhi keterlibatan pada fase berikutnya.

2. Tahap pengkajian (*Assessment*)

Proses *Assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah seperti kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Pengkajian (*assessment*) yang dilakukan pada suatu komunitas dapat dilakukan secara individual (*individual assessment*) melalui tokoh masyarakat tertentu, tetapi dapat juga dilakukan secara berkelompok (*group assessment*). Dalam proses *assessment* ini, dikenal pula konsep 'kebutuhan normatif' (*normative needs*), yaitu kebutuhan berdasarkan standar norma yang berlaku. Petugas sebagai pelaku

perubahan berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien.

3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*Planning*)

Pada tahap ini pelaku perubahan (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. *Community worker* bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu.

4. Tahap formulasi rencana aksi (*Formulation action plan*)

Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini biasanya dilakukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga *community worker* sebagai fasilitator membantu masyarakat untuk menentukan program mana yang akan mereka prioritaskan terlebih dahulu. Dalam tahap ini diharapkan *community worker* dan masyarakat dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

5. Tahap pelaksanaan kegiatan (*Implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga. Pertentangan kelompok juga menghambat pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Dalam upaya melaksanakan program pengembangan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

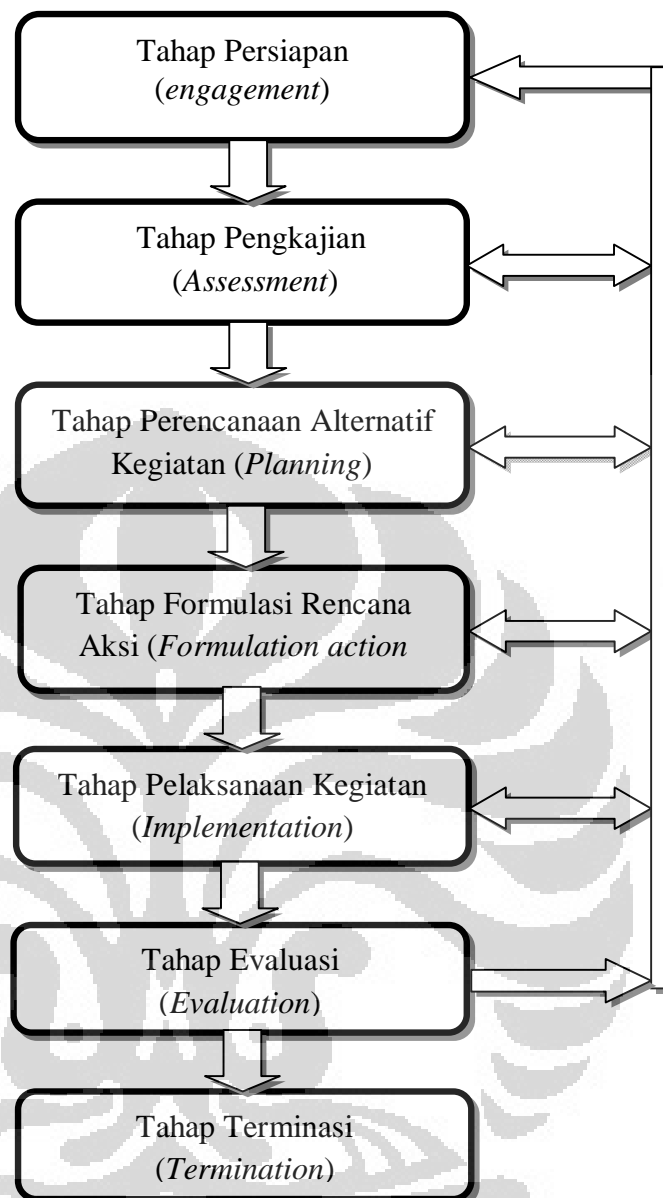
6. Tahap evaluasi (*Evaluation*)

Pada tahap evaluasi, proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaliknya dilakukan dengan melibatkan warga karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi sendiri dilakukan pada input, proses (pemantauan atau *monitoring*) dan juga pada hasil.

7. Tahap terminasi (*Termination*)

Pada tahap ini merupakan tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap 'mandiri', tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut. Meskipun kegiatan pengembangan masyarakat sudah selesai, tidak jarang *community worker* tetap melakukan kontak meskipun tidak selalu rutin dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Menurut Adi (2008, h. 257) bahwa ketujuh tahapan diatas merupakan tahapan siklikal (*cyclical*) yang dapat berputar seperti siklus yang berputar seperti spiral (bukan siklus sirkular yang searah) guna mencapai perubahan yang lebih baik. Karena keluwesa itulah, dalam tahapan pengembangan masyarakat yang bersifat siklikal, sehingga bila digambarkan secara sederhana bentuk tahapan yang bersifat siklikal akan seperti skema gambar 2.2 dibawah ini:



Gambar 2.2 Tahapan Model Intervensi Pengembangan Masyarakat

Sumber: Adi (2008, h. 258)

2.2.6 Peranan Petugas (*Community Worker*) Pengembangan Masyarakat

Berbagai peranan pelaku perubahan sebagai pemberdaya pada kegiatan pengembangan masyarakat dalam proses intervensi komunitas menurut Spergel (1975) dan Zastrow (1986) yang dikutip oleh Adi (2008, h. 141) sekurang-kurangnya ada tujuh peran yang dapat dikembangkan oleh *community worker* pada kegiatan pengembangan masyarakat. Lebih lanjut Adi (2008, h. 141-145) menjelaskan peran *community worker* dalam pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemercepat perubahan (*Enabler*)

Peran *enabler* yang dilakukan oleh *community worker* membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah mereka; dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Dasar filosofi dari peran ini adalah *help people to help themselves*. Adapun empat fungsi utama yang dilakukan oleh *community worker* sebagai *enabler* antara lain:

- a. Membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka.
- b. Membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat.
- c. Mengembangkan relasi interpersonal yang baik.
- d. Memfasilitasi perencanaan yang efektif.

2. Perantara (*Broker*)

Peran seorang perantara dalam intervensi komunitas terkait dengan kegiatan pengembangan masyarakat yaitu dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community service*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran sebagai perantara, yang merupakan peran mediasi, dalam konteks pengembangan masyarakat juga diikuti dengan perlunya keterlibatan klien dalam kegiatan penghubungan ini.

3. Pendidik (*Educator*)

Peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. Disamping itu, *community worker* mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Aspek lain yang terkait dengan peran sebagai pendidik adalah keharusan *community worker* untuk selalu belajar dan tidak hanya puas terhadap topik yang akan dibicarakan, sehingga *community worker* dapat menyampaikan padangan yang *up to*

date dan bisa menjawab tantangan ataupun masalah yang muncul pada waktu itu.

4. Tenaga ahli (*Expert*)

Peran sebagai tenaga ahli, *community worker* diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Seorang *expert* harus sadar bahwa usulan dan saran yang ia berikan bukanlah mutlak harus dijalankan klien mereka (masyarakat ataupun organisasi), tetapi usulan dan saran tersebut lebih merupakan gagasan sebagai bahan pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran ini terkait erat dengan perencanaan sosial yang intinya terkait dengan model intervensi pendekatan pengembangan layanan masyarakat (*community services approach*).

2.2.7 Aset Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat yang dilakukan melalui kelembagaan di tingkat masyarakat lokal selain dikaitkan dengan kebutuhan, harus juga dikaitkan dengan potensi masyarakat. (Adi, 2008, h. 285). Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi berupa sumber (*resources*) yang dapat dimanfaatkan. Namun seberapa jauh potensi dan kemungkinan sumber daya secara aktual dan efektif dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat akan sangat ditentukan oleh sikap dan tanggapan masyarakat. (Soetomo, 2009, h. 179). Dengan demikian salah satu aspek dari pengembangan masyarakat adalah meningkatkan sikap dan tanggapan masyarakat terhadap sumber daya pembangunan yang tersedia sehingga sumber daya tersebut mempunyai daya guna dalam kehidupan.

Menurut Green and Haines (2002) sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi (2007, h. 35) bahwa aset yang menjadi sumber daya dan potensi bagi masyarakat terkait dengan upaya pengembangan masyarakat terdiri dari enam aset yaitu (1) modal fisik (*physical capital*); (2) modal finansial (*financial capital*); (3) modal lingkungan (*environmental capital*); (4) modal teknologi (*technological capital*); (5) modal manusia (*human capital*); (6) modal sosial (*social capital*). Keenam modal tersebut merupakan aset yang melekat dalam setiap masyarakat, yang kadang kala dapat menjadi kelebihan suatu masyarakat. Lebih lanjut Adi

(2007, h. 36-63) menjelaskan keenam aset komunitas dalam pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Modal fisik (*physical capital*)

Modal fisik merupakan modal dasar yang terdapat dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat yang hidup secara tradisional maupun masyarakat modern. Menurut Green and Haines (2002) bahwa modal fisik dikategorisasikan menjadi dua kelompok yaitu bangunan dan infrastruktur. (Adi 2007, h. 36). Bangunan dan infrastruktur disini merupakan aset yang penting dalam masyarakat, bahkan keberadaan bangunan dan infrastruktur yang memadai dalam suatu komunitas sering kali digunakan sebagai indikator berkembang atau tidaknya suatu komunitas. Penempatan modal fisik sebagai indikator pembangunan dapat dilihat pada laporan *Human Development Index* (HDI) yang mencatumkan tentang angka populasi yang dapat mengakses sanitasi yang telah ditingkatkan secara berkesinambungan (dalam persen) dan angka populasi yang dapat mengakses sarana air bersih yang telah ditingkatkan secara berkesinambungan (dalam persen).

Keberadaan modal fisik yang memadai juga akan membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ataupun kualitas kehidupan. Tanpa modal fisik yang memadai masyarakat akan semakin sulit untuk mengatasi masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu, perubahan pada modal fisik acap kali digunakan sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan perubahan selanjutnya.

2. Modal finansial (*financial capital*)

Modal finansial (keuangan) yang dimiliki ataupun dapat diakses oleh komunitas. Modal finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut. Terkait dengan proses pengembangan masyarakat, seorang *community worker* harus berusaha mengidentifikasi bagaimana modal keuangan dari komunitas sasaran sebelum merancang program yang akan ditawarkan kembali ke masyarakat karena modal yang sudah dimiliki serta modal yang mungkin

akan didapat bila dijalankan suatu program, akan dapat menjadi salah satu kunci ketika program sedang berjalan. Tanpa cakupan modal keuangan, laju jalannya suatu program dapat terhambat.

3. Modal lingkungan (*environmental capital*)

Kegiatan perencanaan partisipatif pada pengembangan masyarakat membutuhkan dukungan modal lingkungan agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Modal lingkungan dapat berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian lingkungan dan juga kenyamanan hidup. Menurut Soetomo (2009, h. 191) modal lingkungan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan berwawasan lingkungan. Dimana strategi pembangunan tersebut unsur-unsur pelestarian lingkungan dimasukkan dalam memperhitungkan kelayakan suatu program pembangunan maupun dalam perencanaan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pencapaian pembangunan dan untuk dapat memperhitungkan sebelumnya pengaruh aktivitas pembangunan pada sumber daya dan proses-proses alam lingkungan yang lebih luas.

Dengan demikian, dalam setiap proses pembangunan, terutama yang menyangkut mobilisasi sumber daya alam, sejauh mungkin diperhitungkan aspek konservasi atau pencagaran. Konservasi di sini dimaksudkan sebagai penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencapai kualitas hidup tertinggi bagi manusia. (Soetomo, 2009, h. 192). Dari hal tersebut, sekurang-kurangnya dapat terlihat aset lingkungan (dalam hal ini lahan hijau melalui kegiatan konservasi) yang dimiliki masyarakat dapat berfungsi untuk memperbaiki derajat kesehatan (terutama penyakit yang terkait dengan rendahnya konservasi yang berdampak pada kebersihan udara). (Adi, 2007, h. 48).

4. Modal teknologi (*technological capital*)

Modal teknologi yang dimaksud di sini terkait dengan ketersediaan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekedar teknologi digital yang canggih, akan tetapi belum tentu

bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu pemilihan teknologi yang lebih tepat guna menjadi lebih prioritas. Menurut Kamaludin (1983) teknologi tepat guna dapat dirumuskan menjadi dua hal. Pertama, bagaimana teknologi dikembangkan dan dikendalikan untuk menunjung kesejahteraan hidup manusia. Kedua, bagaimana teknologi itu digunakan dalam penggalian dan pengembangan kekayaan lama yang membawa manfaat bagi manusia secara terus menerus dengan mengamankan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. (Soetomo, 2009, h. 212).

Dalam proses pengembangan masyarakat yang menggunakan pendekatan teknokratik, sebagai bentuk teknologi dan juga keterampilan (*skill*) serta cara kerja baru seringkali merupakan input yang dimasukkan kedalam kehidupan masyarakat melalui melalui bentuk program pembangunan. Proses memaksukkan unsur-unsur baru untuk merangsang terjadinya pembaharuan dalam masyarakat dilakukan melalui proses inovasi pembangunan. (Soetomo, 2009, h. 213). Proses perubahan dan pembaharuan menurut Rogers (1995, h. 4) dilakukan melalui tiga langkah yaitu invensi, difusi dan konsekuensi. Invensi adalah suatu proses bagaimana ide baru diciptakan dan dikembangkan. Difusi adalah proses ide baru dikomunikasikan atau disebarluaskan ke dalam suatu sistem sosial. Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat diterima atau ditolaknya ide baru oleh masyarakat.

Dari uraian diatas, Soetomo (2009, h. 214-215) menyimpulkan bahwa teknologi, keterampilan (*skill*) dan kerja baru merupakan ide baru yang diperkenalkan ke dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu. Sebagai sesuatu yang diperkenalkan dan ditawarkan kepada masyarakat menghasilkan dua alternatif yaitu ide baru tersebut diterima (diadopsi) oleh masyarakat atau ditolak. Agar menghasilkan pembaruan sebagaimana yang diharapkan, khususnya dalam rangka peningkatan respon masyarakat guna memanfaatkan sumber daya alam, maka alternatif yang diharapkan adalah ide baru tersebut dapat diterima atau diadopsi. Agar ide baru yang diperkenalkan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk diterima di masyarakat, dalam memilih jenis ide baru tersebut diharapkan

mempertingbangan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor supaya ide baru dapat diadopsi oleh masyarakat menurut Rogers (1995, h. 23) meliputi lima faktor yaitu faktor keuntungan relatif, komtabilitas, kompleksitas, triabilitas dan observabilitas.

5. Modal manusia (*human capital*)

Modal manusia berbicara mengenai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Unsur manusia menjadi modal dasar bagi pembangunan suatu negara. Disinilah letak modal manusia memainkan peranan penting dalam suatu proses pembangunan. Menurut Soetomo (2009, h. 193) dalam pendekatan pengembangan masyarakat, sumber daya manusia tidak hanya dilihat perannya dari aspek ekonomi sebagai faktor produksi sehingga menjadi menjadi sebuah obyek. Namun dalam proses perubahan yang terjadi faktor manusia menjadi aktor utama, sehingga sesungguhnya juga merupakan subyek pembangunan. Pendekatan pengembangan masyarakat melalui proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk unsur manusia di dalamnya. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pengembangan masyarakat dapat dilihat dalam keterlibatannya berupa bentuk partisipasi atau sekedar mobilisasi.

Terkait dengan upaya menyiapkan manusia yang berdaya dan berkemampuan untuk mengendalikan teknologi yang ada unsur pendidikan memainkan peranan penting dalam menyiapkan modal manusia yang ada di suatu komunitas. (Adi, 2007, h. 53). Dengan demikian, menurut Soetomo (2009, h. 195) bahwa identifikasi sumber daya manusia dalam suatu masyarakat perlu memperhatikan aspek-aspek kuantitas, kualitas dan kemampuan aktualisasi diri. Identifikasi sumber daya manusia ini sangat penting karena dengan demikian, akan diketahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Lebih lanjut informasi tentang potensi sumber daya manusia akan menjadi bahan yang sangat menentukan perencanaan dan kebijakan pembangunan, yang

dirumuskan. Agar memperoleh gambaran yang utuh tentang potensi yang dimiliki itulah perlu dilihat keseluruhan aspeknya.

6. Modal sosial (*social capital*)

Modal sosial bernilai penting dalam suatu proses pengembangan masyarakat. Karena dengan adanya modal sosial dalam masyarakat yang menjadi perekat antar kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Yang di maksud modal sosial disini menurut Adi (2007, h. 58) adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Norma dan aturan yang ada juga mengatur perilaku individu baik dalam perilaku ke dalam (internal kelompok) maupun perilaku keluar (eksternal, hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain). Sedangkan kepercayaan (*trust*) menurut Fukuyama (2002) adalah manifestasi sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan modal sosial dengan melalui hubungan sosial dalam masyarakat, mengembangkan norma-norma saling tolong menolong pada kelompok dan akan terbentuk secara lebih cepat, dan kelompok yang terbentuk itu mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien. (Soetomo, 2009, h. 203).

Unsur lain dalam modal sosial adalah *reciprocal* atau timbal balik. Menurut Hasbullah (2006, h. 10) unsur *reciprocal* atau timbal balik terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan yang muncul dalam proses interaksi sosial. Pada masyarakat yang memiliki *reciprocal* besar, kemiskinan lebih memungkinkan untuk lebih mudah diatasi begitu juga dengan masalah sosial lainnya akan dapat diminimalkan. Keuntungan lain, masyarakat akan lebih mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial serta fisik masyarakat yang mengagumkan. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki *reciprocal* yang kuat mempunyai ciri sebagai masyarakat yang

terbuka, kemungkinan dampak positif yang lebih luas akan dapat direalisasikan. (Hasbullah, 2006, h. 11)

Jaringan dalam modal sosial melalui interaksi sosial lebih memungkinkan meluasnya lingkup kepercayaan (*trust*) dan lingkup hubungan timbal balik (*reciprocal*) serta solidaritas. (Soetomo, 2009, h. 204). Dengan kemampuan masyarakat atau kelompok membangun jaringan maka rasa saling percaya dan solidaritas tidak hanya berlaku dalam kelompok asalnya, tetapi dapat dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas. Dengan demikian, kerjasama atau tindakan bersama saling menguntungkan juga akan semakin bervariasi, baik jenisnya maupun pihak yang terlibat. Sebagaimana yang dijelaskan Hasbullah (2006, h. 11) bahwa jaringan hubungan sosial biasanya diwarnai oleh suatu tipologi yang khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok pada kelompok sosial yang biasanya membentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun-temurun (*repeated social experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesi yang tinggi.

Untuk melihat aktualisasi ketiga unsur modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), hubungan timbal balik (*reciprocal*) dan jaringan dalam kehidupan bersama dapat digunakan konsep modal sosial menurut pandangan Uphoff. Menurut Uphoff seperti yang dijelaskan oleh Dasgupta dan Serageldin (2000) bahwa modal sosial dapat dilihat dalam dua kategori yaitu fenomena struktural dan kognitif. (Soetomo, 2009, h. 207). Kategori struktural merupakan modal sosial yang terikat dengan bentuk organisasi sosial khususnya peranan, aturan, *precedent*, dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas bagi kerjasama dalam tindakan bersama yang saling menguntungkan. Sedangkan modal sosial dalam kategori kognitif diderivasi dari proses mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi khususnya norma, nilai, sikap, kepercayaan yang memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kerjasama, khususnya dalam bentuk tindakan bersama yang saling menguntungkan.

Untuk keperluan proses pengembangan masyarakat, aktualisasi modal sosial baik dalam fenomena struktural maupun kognitif itulah yang perlu digali dari dalam kehidupan masyarakat, untuk selanjutnya dikembangkan dan dimanfaatkan dalam usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Menurut Soetomo (2009, h. 208) bahwa unsur-unsur tersebut banyak dijumpai dalam berbagai dimensi kehidupan, diantaranya adalah kehidupan beragama, kehidupan masyarakat lokal tradisional dan dalam bentuk nilai-nilai serta pranata yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yang teraktualisasi dalam bentuk semangat solidaritas, toleransi, empati dan filantropi.

Dalam pelaksanaan perencanaan partisipatoris, pengenalan terhadap modal sosial biasanya akan mempermudah agen perubahan untuk melakukan program pengembangan masyarakat. Disamping itu, agen perubah (fasilitator ataupun *community worker*) harus pula dapat mengadaptasi modal sosial yang ada, sehingga agen perubah dapat diterima oleh warga masyarakat dimana mereka akan melakukan perubahan. (Adi, 2007, h. 63).

2.3 Pengelolaan Sumber Daya Air

Air adalah sumber penghidupan, begitu pentingnya peran air, organisme hidup tidak dapat lepas dari air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian pula kebutuhan akan air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga dasar. Ketersediaan air bersih menjadi langka saat ini karena disebabkan oleh tercemarnya sumber-sumber air, penggunaan air sungai dan hujan, serta sumur-sumur yang dibuat seadanya tanpa pelindung. (Samin, 2011, h. 55). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan akses air bersih yang layak dari segi kualitas dan kuantitas. Menurut Susilastuti (2011, h. 21) bahwa air bersih adalah air langsung dapat diminum dengan syarat air tersebut aman (sehat) dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau dengan rasa yang segar.

2.3.1 Pengelolaan Air Bersih

Akses terhadap air bersih adalah hak asasi manusia (hak tertinggi dalam hukum), karena air merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia, sehingga

membutuhkan perlindungan kepada setiap masyarakat atas akses untuk mendapatkan air bersih yang layak. Pengelolaan air bersih menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan pendistribusian air di masyarakat agar ketersediaan air dapat dinikmati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi penggunaan air perlu mendapatkan prioritas masyarakat dan instansi yang berkepentingan dalam sistem pengelolaannya.

Menurut Helmi (2002) bahwa pengelolaan sumber daya air bersih yang terpadu mencakup dua variabel yaitu; keterpaduan pada sistem alam (*natural system*), dan keterpaduan pada sistem manusia (*human system*) termasuk sistem penyelenggaraan (*institution*) pengelolaan air. Pada variabel sistem alam terdapat enam aspek keterpaduan yaitu; (1) keterpaduan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan air antara daerah hulu dan hilir; (2) keterpaduan antara pengelolaan kuantitas dan kualitas; (3) keterpaduan antara pengelolaan air permukaan dan air tanah; (4) keterpaduan antara penggunaan lahan (*land use*) dan pengelolaan air (berkaitan dengan siklus hidrologi); (5) keterpaduan antara pengelolaan air yang digunakan untuk evapotranspirasi dan air yang mengalir; (6) keterpaduan antara pengelolaan air tawar dengan pengelolaan daerah pantai. Sedangkan komponen sistem manusia antara lain yaitu: (1) keterpaduan antar sektor dalam pembuatan kebijakan nasional; (2) keterpaduan semua *stake holders* dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; (4) keterpaduan diantara pengelola air bersih dan air bah. (Susilastuti, 2011, h. 21-22).

Sedangkan dari sudut pandang Sanim (2011, h. 56) bahwa pengelolaan sumber daya air bersih harus memperhatikan sifat air sebagai *common property*, dimana air tidak dapat diprivatisasi karena sifatnya sebagai sumberdaya milik bersama. Artinya prinsip-prinsip *water right* harus melibatkan tata kelembagaan sebagai penunjang di masyarakat agar dalam pengelolaannya terdapat pengaturan tentang konservasi, proteksi dan pemanfaatan air dalam pengelolaan sumberdaya air bersih.

Pengelolaan sumber daya air berpengaruh terhadap ketersediaan air. Ketersediaan air ditentukan pula oleh perhatian atau perilaku masyarakat terhadap air sebagai komponen dari *stake holder*. Oleh sebab itu, interaksi manusia dengan

lingkungan adalah sebagaimana interaksi manusia dengan sistem sosialnya berupa kelembagaan yang mendorong berperilaku sehat individu melalui penyediaan sarana air bersih. Jika lingkungan itu sehat maka berdampak pada peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat. Perilaku yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air bersih diantaranya adalah perilaku ekonomis (*economically*), perilaku efisien (*efficiency*), perilaku hemat (*thrifty*), perilaku bersih (*sanitation*) dan perilaku sehat (*hygien*). (Susilastuti, 2011, h. 26). Dengan demikian, maka terdapat hubungan timbal balik antara perilaku manusia dengan kualitas air karena setiap aksi yang berbeda menghasilkan akibat dan konsekuensi yang berbeda pula. (Marrack, 1981, h. 193).

Untuk meningkatkan kualitas air bersih dan mengurangi pencemaran limbah pada air, diperlukan perilaku yang mendukung terhadap upaya peningkatan kualitas air bersih. Menurut Azwar (1983), bahwa perilaku sehat (*hygien*) mengarah pada aktivitas manusia berperilaku sehat, sedangkan perilaku bersih (*sanitation*) menitikberatkan pada pengawasan faktor-faktor lingkungan untuk membentuk kesehatan lingkungan. (Susilastuti, 2011, h. 25). Dengan demikian, perilaku sehat (*hygien behavior*) tidak dapat dipisahkan dari perilaku bersih (*sanitation behavior*) dan perilaku bersih berkaitan perilaku minum air yang direbus, cuci tangan sebelum makan dan pengelolaan sarana buangan limbah rumah tangga. Kegiatan-kegiatan yang mencakup upaya dalam mencegah dan mengendalikan lingkungan agar tidak mengganggu kesehatan disebut sanitasi.

Sanitasi menurut Susilastuti (2011, h. 26), merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Usaha yang berkaitan dengan sanitasi dilakukan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan meliputi penyehatan, pengamanan dan pengendalian. Siswanto, Kasjono, dan Mantariputra, (2010, h.115)

Sanitasi sangat terkait dengan faktor lingkungan yang salah satu komponennya adalah penyediaan air bersih. Air bersih merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia sehingga apabila air tidak diperhatikandapat mengganggu kesehatan manusia. Penurunan kualitas air bersih dapat menyebabkan penurunan kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui menurunnya kesehatan lingkungan. Dengan demikian hubungan air bersih dengan kesehatan adalah kompleks karena banyak penyakit yang sumber utamanya air (*water born disease*), sehingga untuk mengukur derajat kesehatan yang berkaitandengan air dilakukan melalui penilaian terhadap ada tidaknya penyakit diare karena diare yang berkaitan dengan penyediaan air, perilaku sehat dan perilaku bersih.

Berkaitan dengan pengelolaan air bersih dan penyediaan sarana sanitasi di masyarakat maka perlu adanya wadah yang dapat mengatur kegiatannya dilapangan. Untuk mengatur hal tersebut, maka pendekatan kelembagaan pada pengelolaan air bersih sangat dibutuhkan untuk mewadahi kegiatan di tingkat masyarakat. Melalui kelembagaan yang mengelola air bersih diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya melalui bentuk kegiatan yang telah ditetapkan secara bersama. Oleh karena itu, melihat pentingnya pengelolaan air bersih di masyarakat, maka pendekatan lebih penting dalam menangani masalah rendahnya akses air bersih pada penelitian ini dengan melihat terbentuknya kelembagaan pada pengelolaan air, mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaa air bersihnya, tahapan pengembangan masyarakat pada kegiatan penyediaan air bersih sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat, dan manfaat yang diperoleh pada pengelolaa air bersih dengan pendekatan kelembagaan lokal. Dengan demikian maka keberadaan kelembagaan lokal dapat menjadi sebuah model pendekatan pada pengelolaan air bersih dengan berbasikan masyarakat sebagai bentuk partisipasi langsung di tingkat masyarakat lokal.

2.3.2 Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal

Ketersediaan air bersih adalah jumlah air bersih yang layak, yang dapat memenuhi segala kegiatan manusia yaitu melalui suplai air yang terbaharui. Untuk memenuhi ketersediaan air bersih tersebut diperlukan kebijakan dan strategi dalam pengembangan sumberdaya air melalui kelembagaan yang diprakarsai masyarakat lokal. Menurut Samin (2011, h. 145-156) terdapat beberapa faktor penyebab diperlukannya kebijakan dalam pengembangan sumber daya air bersih antara lain:

1. Perubahan lingkungan strategi internal yang mencakup reformasi, demokratisasi menuju masyarakat madani (*civil society*), otonomi daerah, *good governance*, hak asasi manusia.
2. Keterbatasan kemampuan negara (pemerintah) dalam manajemen sumberdaya air, khususnya yang menyangkut kemampuan pendanaan dalam pelaksanaan konservasi dan penyediaan air bersih.
3. Berkurangnya ketersediaan air bersih (*water supply*) karena penurunan kapasitas dan kualitas air di satu sisi, dan meningkatnya kebutuhan air (*water demand*) disebabkan kenaikan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi.
4. Kerugian dan kerusakan luar biasa yang diakibatkan oleh kekeringan (menimbulkan kelangkaan air) dan kelebihan air (menimbulkan banjir, tanah longsor, dan erosi).
5. Perumusan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam manajemen sumber daya air biasa-biasa saja. Padahal permasalahan yang dihadapi berulang kali secara sistemik, berdampak negatif sangat luas terhadap kesejahteraan (*human well being*) menyangkut keamanan dan kestabilan nasional.
6. Efisiensi pemakaian air yang masih rendah. Sebagai, contoh untuk sektor pertanian pemakai air sekitar 60 persen, sektor air bersih sekitar 65 persen dan pemakaian industri sekitar 70 persen.

Untuk menjawab faktor permasalahan diatas supaya dapat mewujudkan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih, maka membutuhkan peran dari kelembagaan lokal dalam penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih di masyarakat berkontribusi meningkatkan derajat kesehatan untuk mencapai kesejahteraan. Nilai-nilai lokal masyarakat yang di institusionalisasikan pada kelembagaan berupa norma, regulasi, dan kultural-kognitif menjadi pedoman kelembagaan lokal dalam mengelola sumber daya air bersih berdasarkan atas kearifan dan potensi lokal masyarakat. Untuk itu, pemanfaatan kelembagaan lokal dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan sosial akibat rendahnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Bila dikaitkan dengan pengelolaan air bersih berbasis komunitas sebagaimana yang dikemukakan Adi (2002, h. 154), maka keberadaan anggota masyarakat secara bersama-sama menanggulangi permasalahan melalui kelembagaan lokal memiliki tujuan mengembangkan kemandirian dan, pada dasarnya, memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis pertetanggaan (*neighbourhood*) meskipun bukan secara eksklusif. Dasar sebuah kelembagaan lokal dibentuk karena adanya konsensus masyarakat bersama aktor yang berada di kelembagaan. Konsensus tersebut sebagai upaya untuk mengikat setiap anggota masyarakat guna menghimpun aset komunitas untuk mendapatkan sumber daya berupa air bersih. Tanpa adanya konsensus di masyarakat, pendistribusian sumber daya air tidak akan berjalan efektif. (Wibowo, 2011, h. 136).

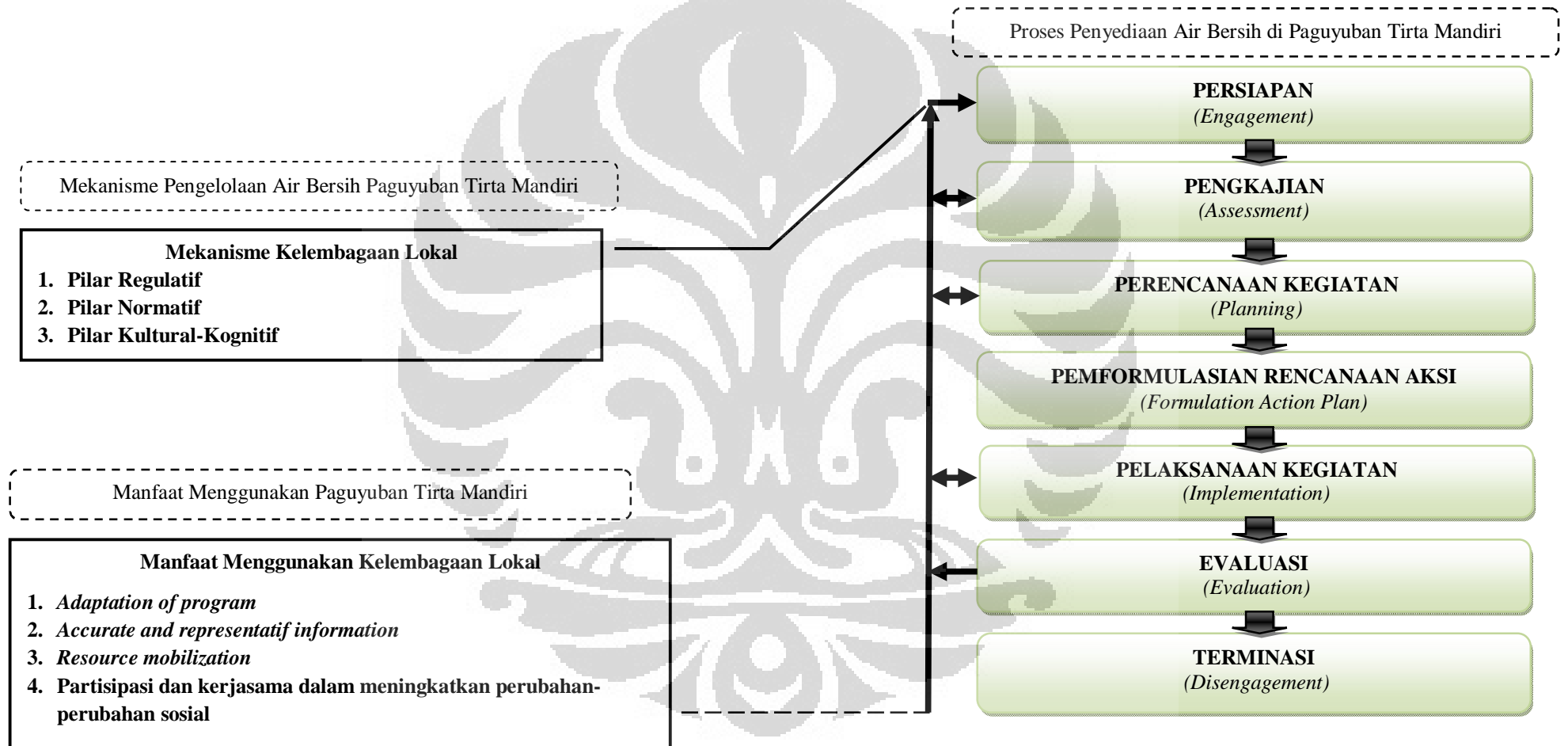
Dengan demikian, pengelolaan sarana air bersih melalui kelembagaan lokal berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi) manusia guna meningkatkan derajat kesejahteraan sosial. Khususnya untuk mencapai standar kehidupan yang layak terkait terpenuhinya air bersih dan kesempatan sosial untuk memperoleh sarana sanitasi dasar demi peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Sehingga, ketika kebutuhan manusia untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi dapat terpenuhi dan apabila kesempatan sosial untuk dapat mengakses air bersih dan sanitasi dapat dimaksimalkan melalui kebijakan pembangunan kesehatan dan layanan institusi atau kelembagaan lokal, maka usaha untuk mencapai kualitas hidup dan aspek kesehatan akan menjadi lebih baik, sehingga kondisi tersebut berkontribusi bagi pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain itu, jika air bersih dan sanitasi ditinjau disiplin ilmu kesejahteraan sosial, maka kajian keilmuan ini dapat mengembangkan kerangka pemikiran dan metodologi berupa intervensi sosial (pengembangan masyarakat) untuk meningkatkan kualitas hidup (terpenuhinya standar air bersih dan sanitasi yang layak) masyarakat dengan mengelola masalah sosial akibat rendahnya kesehatan lingkungan dan minimnya kesadaran masyarakat sehingga memunculkan solusi untuk pemenuhan kebutuhan hidup (pelayanan air bersih dan sanitasi) dan pemaksimalan partisipasi anggota masyarakat agar dapat berkembang.

Untuk mengelola air bersih dan penyediaan sarana sanitasi dasar melalui kelembagaan lokal membutuhkan pendekatan intervensi komunitas di masyarakat melalui bentuk pengembangan masyarakat, sehingga individu dan kelompok dapat berpartisipasi melalui kelembagaan untuk memperoleh akses air bersih guna menunjang kebutuhan kehidupan sehari-hari demi terwujudnya derajat kesehatan yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat guna mewujudkan kondisi yang sejahtera, maka pendekatan pengembangan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Berdasarkan diuraikan yang dilakukan secara menyeluruh dan terperinci sesuai dengan kerangka pemikiran diatas untuk menganalisa data penelitian. Maka penelitian ini akan menguraikan secara singkat pengembangan masyarakat melalui kelembagaan lokal padagambaran alur pikir penelitian seperti yang tertera pada gambar 2.3 berikut:

Gambar. 2.3 ALUR PIKIR PENELITIAN Pengembangan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih Berbasis Kelembagaan Lokal



BAB 3

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Kondisi Umum Desa Dadapan

3.1.1 Letak Geografis dan Administratif Pemerintahan

Desa Dadapan merupakan salah satu dari sembilan desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur. Secara letak geografis, desa Dadapan berada wilayah ujung selatan Kecamatan Gucialit. Adapun batas wilayah desa Dadapan di sebelah barat berbatasan dengan desa Gucialit, di sebelah utara berbatasan dengan wilayah perkebunan teh PTPN XII dan desa Kertowono, di sebelah timur berbatasan dengan desa Tunjung dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Kalisemut Kecamatan Padang. Jarak antara desa Dadapan dengan pusat pemerintahan kecamatan sejauh 10 KM dengan waktu tempuh 30 menit menggunakan kendaraan bermotor, sementara jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten sejauh 17 KM dengan waktu tempuh 1 jam dan jarak dengan ibu kota propinsi (Surabaya) sejauh 187 KM dengan jarak tempuh 5 jam.

Berdasarkan kondisi topografinya, sebagian besar bentuk wilayah desa Dadapan berupa perbukitan gunung dan terletak di ketinggian antara 560 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 18 sampai dengan 25 derajat celcius. Wilayah di desa Dadapan (lihat gambar 3.1) sebagian besar adalah tanah kering

berbentuk tanah pekarangan seluas 308 hektar, tanah tegal/kebun seluas 33 hektar dan ladang/tanah huma seluas 275 hektar. Selain bertanah kering, wilayah desa Dadapan merupakan tanah hutan berupa hutan konservasi seluas 28,5



Gambar 3.1 : Kondisi Geografis dan Topografis Desa Dadapan
Sumber : Dokumentasi Penelitian

hektar dan hutan sejenis seluas 28 hektar dengan komoditas tanaman hutan berupa

pohon Sengon(*Albazia Falcataria*),Jati(*Tectona Grandis*)dan Mahoni(*Swietenia Mahagoni Jacq*).

Kondisidesa Dadapan sama halnya dengan desa-desa diwilayah Kecamatan Gucialit yang berbukit dan begunung berupa tanah pekarangan, dan ladang.Meskipun desa Dadapan berada di wilayah dataran tinggi yang seakan menyimpan sumber air melimpah, namun kondisi air di sungai sebagai fasilitas irigasi pertanian belum mampu mengairi persawahan. Sehingga pertaniannya masih mengandalkan sawah tadah hujan. Komoditas utama pertanian di desa Dadapan adalah pertanian tanaman keras seperti Tebu, Singkong, Jagung dan Kopi yang sedikit membutuhkan air.

Sedangkan secara administratif pemerintahan, desa Dadapan terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Karang Mulyo, Karang Rejo dan Karang Sejati. Masing-masing dusun terdiri dari 3 RW dan 6 RT atau 7 RT. Jadi total RT di desa Dadapan berjumlah 20 RT. Pusat desa Dadapan terletak di Dusun Karang Rejo RW I. Balai Desa sebagaikantor administratif pemerintahan berada di dusun Karang Rejo. Begitu juga dengan fasilitas umum seperti Poliklinik Desa, Sekolah, dan Posyadu berada di dusun tersebut. Kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan sekretaris desa beserta perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan guna memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Setiap dusun di desa Dadapan dikepalai oleh kepala dusun yang bertugas membantu kepala desa guna memperlancar koordinasi dengan perangkat desa lainnya. Meskipun pusat pemerintahan terletak di Dusun Karang Rejo, program kegiatan desa juga dilaksanakan di kedua dusun lainnya seperti di dusun Karang Mulyo berupa kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PKK. Sedangkan di dusun Karang Sejati meliputi kegiatan bersih desa, pengajian umum dan sunatan massal, dan penyuluhan kesehatan lingkungan (cuci tangan pakai sabun, pengolahan limbah cair dan padat) serta kegiatan penyuluhan di bidang pertanian.

Luasnya wilayah desa Dadapan yang mencapai 672,5 hektar dengan topografi desa yang berbukit dan bergunung tidak menghambat aparat pemerintah desa untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat melalui program desa. Terwujudnya koordinasi baik antara Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat serta dukungan organisasi sosial desa menjadi faktor pendorong

berjalannya berbagai program yang berada di masing-masing dusun di desa Dadapan. Keberhasilan program desa dan kuatnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadikan desa Dadapan sebagai salah satu percontohan Desa Siaga melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas) bersama Desa Kenongo di Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

3.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data Monografi desa Dadapan tahun 2011 bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa Dadapan sebanyak 1.208 KK dengan total jumlah penduduk sebesar 4.128 jiwa yang terdiri dari 1.991 laki-laki dan 2.137 perempuan yang tersebar di tiga dusun yaitu dusun Karang Rejo sebesar 1.443 jiwa, dusun Karang Sejati sebesar 1.634 jiwa dan dusun Karang Mulyo sebesar 1.049 jiwa. Adapun komposisi penduduk dari segi umur di desa Dadapan yaitu antara usia 0-24 tahun sebanyak 1.304 orang, berusia antara 25-55 tahun sebanyak 1.883 orang, dan sisanya berusia 56 tahun keatas sebanyak 950 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa Dadapan merupakan usia produktif dan masuk dalam usia angkatan kerja yaitu umur 25 tahun. Besarnya usia produktif warga desa berkontribusi besar dalam kemajuan pembangunan desa melalui pembinaan di bidang kewirausahaan dan pertanian untuk menciptakan komoditas produk unggulan desa Dadapan.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek pendidikan, maka komposisi tingkat pendidikan masyarakat di desa Dadapan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Komposisi penduduk berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi Sederajat (S1)	6 orang
2	Tamat Akademi/Sederajat (D3)	4 orang
3	Tamat SMA/Sederajat	560 orang
4	Tamat SMP/Sederajat	985 orang
5	Tamat SD/Sederajat	1.386 orang
6	Tidak Tamat Sekolah	840 orang
7	Belum Sekolah	269 orang
8	Buta Huruf	78 orang
Total		4.128 orang

Sumber: Monografi Desa Dadapan tahun 2011

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Dadapan dapat mengakses layanan pendidikan meskipun hanya sampai lulus di tingkat sekolah dasar (SD). Namun akses masyarakat terhadap layanan pendidikan mulai mengalami peningkatan ke jenjang sekolah menengah sejak awal tahun 2007 hingga saat ini. Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum tahun 2007 disebabkan karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, budaya masyarakat dan sarana prasarana pendidikan. Dari sisi perekonomian, masyarakat Dadapan sebagian besar hanya bekerja sebagai buruhtani yang hanya berpendapatan 20.000/hari dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga ketika lulus dari sekolah dasar, anak-anak di desa Dadapan ikut membantu orang tuanya bertani di ladang dan menjadi buruh tani untuk menopang perekonomian keluarga. Kondisi tersebut yang membentuk pola pikir masyarakat bahwa pendidikan belum menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Para orang tua lebih memprioritaskan anaknya untuk menjadi petani dan membantu keluarga dengan bekerja di sektor pertanian. Disisi lain keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di desa Dadapan menjadi faktor pendorong rendahnya masyarakat untuk melanjutkan pendidikan menengah.

Namun dengan adanya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan melalui program kejar paket A (untuk SMA) dan B (untuk SMP), komposisi masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan di tingkat sekolah menengah mulai mengalami peningkatan pada tahun 2011. Program tersebut cukup membantu peserta didik di desa Dadapan yang ingin bersekolah tanpa harus pergi ke sekolah SMP di Kecamatan Gucialityang berjarak 7 KM dari desa Dadapan. Dengan demikian keberadaan program tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak membebani orang tua siswa dengan tingginya biaya pendidikan. Sehingga kesadaran masyarakat pada pendidikan mulai meningkat meskipun hanya mengikuti program kejar paket. Kondisi tersebut berkontribusi pada tingginya indeks pendidikan masyarakat desa Dadapan dalam memperoleh layanan sarana pendidikan di wilayah kecamatan Gucialit.

Fasilitas pendidikan yang berada di desa Dadapan terdiri dari sekolah dasar, sekolah dasar islam (Madrasah Ibtidaiyah), dan Taman Anak-Anak(TK) serta pendidikan anak usia dini (PAUD). Dari beberapa fasilitas pendidikan dasar tersebut cukup mudah untuk diakses warga desa Dadapan karena jaraknya tidak terlalu jauh. Meskipun fasilitas sekolah hanya di jenjang pendidikan dasar, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup besar. Institusi pendidikan di wilayah desa Dadapan tidak sebatas memberikan pelajaran umum saja tetapi juga menyangkut mata pelajaran bidang kesehatan yang berkaitan praktek perilaku hidup sehat seperti cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan sampah di sekolah.

Kedua gambar di samping menunjukkan aktivitas siswa dan siswi sekolah dasar yang melakukan praktek perilaku sehat dan pengelolaan limbah yang menjadi

salah satu bagian dari mata pelajaran di setiap sekolah masing-masing. Hal ini yang menjadi bagian penting bagi masyarakat desa Dadapan khususnya generasi muda untuk membentuk kesadaran terhadap pentingnya kesehatan sebagai bagian dari pendidikan di sekolah. Bahkan terpeliharanya perilaku tersebut tidak hanya dukungan dari pihak institusi pendidikan saja. Namun juga peran aparatur pemerintah desa dalam usahapembinaan hubungan kemitraandengan pihaksekolah



Gambar3.2 : Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun
Sumber : Dokumentasi Penelitian



Gambar3.3 : Pengelolaan Sampah Sekolah
Sumber : Dokumentasi Penelitian

dan juga lembaga lokal membantu menyediakan sarana air bersih di setiap sekolah. Kondisi ini yang menjadi faktor pendorong masyarakat untuk antusias menyekolahkan putra dan putrinya. Dengan harapan pendidikan yang diperoleh di sekolah dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat di masyarakat.

Besarnya komposisi penduduk yang mayoritas lulus di jenjang pendidikan dasar berpengaruh terhadap jenis pekerjaan sehari-hari. Masyarakat desa Dadapan mayoritas bekerja sebagai petanidan buruh tani. Komoditas utama pertanian di desa Dadapan adalah pertanian Tebu. Hampir 40% wilayah desa Dadapan merupakan ladang Tebu. Disaat musim panen Tebu tiba, setiap harimasyarakat menghabiskan waktunya untuk bekerja menjadi menebang Tebu. Kondisi tersebut seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Petani tebu dan buruh penebang tebu memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut. Meskipun pendapatanya tidak terlalu besar, dari hasil pekerjaan ini, buruh penebang tebu bisa memberikan nafkah bagi keluarganya dan mampu



Gambar3.4 : Pekerjaan Petani Tebu Desa Dadapan
Sumber : Dokumentasi Penelitian

menyekolahkan putra-putrinya. Pekerjaan sebagai penebang tebu membutuhkan berminggu-minggu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini mengingat luasnya areal pertanian tebu di desa Dadapan yang hampir 200 hektar. Meskipun demikian, penghasilan dari pekerjaan ini dapat digunakan untuk membeli hewan ternak berupa sapi dan kambing sebagai investasi jangka panjang. Disaat pekerjaan sebagai penebang tebu telah habis, hewan ternak dapat di jual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga pekerja bisa memanfaatkan daun tebu (gambar 3.4) yang telah ditebang sebagai pakan ternak. Kondisi ini cukup

membantu perkembangan ternak warga jika musim kemarau tiba karena sulitnya mencari rumput yang layak bagi perkembangan ternak di desa Dadapan.

Selain sebagai petani, warga juga memiliki beragam jenis pekerjaan. Adapun jenis pekerjaan masyarakat desa Dadapan secara terperinci tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.261 orang
2	Pengusaha Sedang/Besar	4 orang
3	Pengrajin/Industri Kecil	13 orang
4	Buruh	146 orang
5	Pedagang	34 orang
6	Montir	15 orang
7	PNS	11 orang
	Total	1.484 orang

Sumber: Data Monografi Desa Dadapan Tahun 2009

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Selain pertanian Tebu, komoditas unggulan kedua di desa Dadapan adalah Kopi, Pohon Sengon (*Albazia Falcataria*) dan Pisang. Sebagian masyarakat bertani Palawija dengan memanfaatkan pekarangan/ladang dan halaman rumahnya untuk ditanami komoditas tersebut. Pendapatan masyarakat dari kegiatan sektor agribisnis ini cukup memberikan keuntungan yang tersendiri disaat belum tibanya panen Tebu. Produk dari hasil pisang diolah menjadi kripik pisang dan dijual di desa-desa wilayah Kecamatan Gucialit dan Kota Lumajang. Sedangkan hasil kebun kopi di jual dalam bentuk kopi kering dan bubuk kopi di beberapa toko desa Dadapan. Untuk hasil tanaman pohon Sengon di jual pada pabrik pembuat kayu lapis (*triplek*) dan pengrajin mebel. Kondisi ini yang memberikan pendapatan lebih pada masyarakat.

Disektor peternakan, desa Dadapan masuk dalam kategori desa yang menghasilkan ternak yang melimpah di wilayah kecamatan Gucialit. Hampir setiap rumah memilikisapi, kambing dan sebagian ayam petelur. Meningkatnya populasi hewan peternakan di pengaruhi oleh berbagai program dari pemerintah

Kabupaten Lumajang. Sehingga potensi yang ada di wilayah tersebut dapat dikembangkan sebagai produk unggulan setelah bidang pertanian. Selain itu, faktor budaya masyarakat yang sebagian bersuku Madura Pandhalungan juga berkontribusi meningkatnya hasil peternakan di desa Dadapan. Beternak Sapi dan Kambing tidak hanya investasi di bidang ekonomi semata tetapi juga simbol/status kemapanan dan kekayaan sebuah keluarga.

3.1.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Penduduk desa Dadapan terdiri dari dua suku yaitu suku Jawa dan suku Madura (Madura Pandhalungan). Sebagian besar penduduk bersuku Jawa bertempat tinggal di dusun Karang Rejo dan Karang Sejati. Sedangkan suku Madura berada di dusun Karang Mulyo dan sebagian di dusun Karang Sejati. Meskipun berbeda suku, masyarakat hidup dengan rukun. Kerukunan masyarakat



Gambar3.5 : Gotong Royong Pembangunan Masjid Desa Dadapan
Sumber : Dokumentasi Penelitian

dua suku tersebut tercermin dalam kegiatan pembangunan tempat ibadah (Masjid dan Musholah) yang dilakukan secara bergotong royong. Selain itu, kegiatan gotong royong juga dilakukan masyarakat dalam pembangunan sarana umum seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan bahkan pembangunan rumah milik warga. Kuatnya solidaritas sosial masyarakat desa Dadapan dalam pembangunan sarana peribadatan dan sarana umum menjadi ciri khas budaya masyarakat setempat. Bahkan jika ada kegiatan yang menyangkut pembangunan sarana umum seluruh warga akan tergerak untuk terlibat dalam kegiatan tersebut meskipun tidak memperoleh undangan bahkan uang.

Salah satu kegiatan yang memperlihatkan kuatnya nilai sosial masyarakat yang terpelihara sampai saat ini adalah kerja bakti rutin pada bulan-bulan tertentu. Pada kegiatan tersebut, seluruh warga ikut serta dalam membersihkan bahu jalan

dan perbaikan parit/selokan umum. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan fasilitas umum dan mencegah banjir. Kegiatan ini juga digunakan sebagai media sosialisasi seluruh warga desa Dadapan untuk meningkatkan keakraban antar warga dusun disaat kesibukan kerja yang cukup padat. Maka tidak heran ketika memasuki desa Dadapan yang terlihat pemandangan lingkungan desa yang tampak bersih, rapi dan indah seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar3.6 : Kondisi wilayah Desa Dadapan yang tampak bersih dan rapi
 Sumber : Dokumentasi Penelitian

Bahkan di awal tahun 2012, tradisi gotong royong ini menjadi modal penting bagi pembangunan infrastruktur seperti jembatan guna mempermudah akses warga ke wilayah desa lainnya.

Mayoritas masyarakat desa Dadapan beragama Islam dan sebagian kecil melakukan kebiasaan tradisi kuno. Menurut keterangan dari kepala desa Dadapan, masyarakat yang masih menganut tradisi kuno leluhur biasanya membuat sesaji yang diletakkan di tempat yang keramat yang berada di desa itu. Hal ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada leluhur desa (dayang desa) telah dibukannya wilayah hutan sebagai cikal bakal lahirnya desa Dadapan. Disamping

itu kegiatan keagamaan lainnya juga dilaksanakan oleh warga seperti pengajian rutin.

Setiap minggunya di desa Dadapan dilakukan kegiatan pengajian khusus wanita (majelis taklim) yang dirangkai dengan kegiatan arisan mingguan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh warga desa yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan pengajian tidak hanya menyangkut ritual keagamaan saja tetapi juga kegiatan sosialisasi di bidang kesehatan masyarakat. Salah satunya kegiatan pengajian majelis taklim yang diselenggarakan di dusun Karang Rejo RW I yang digunakan sebagai media sosialisasi berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan keluarga. Para kader Posyandu dan kader Paguyuban Tirta Mandiri yang ikut dalam pengajian tersebut menyampaikan tentang pentingnya menjaga perilaku kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun, BAB di jamban dan memasak air minum sebelum di konsumsi serta menimbangkan bayi di Posyadu. Kegiatan sosialisasi ini cukup efektif guna mencegah munculnya penyakit yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan penyakit lainnya.



Gambar 3.7 : Kegiatan *Genduren* dan *Tahlilan* Masyarakat Dadapan
Sumber : Dokumentasi Penelitian

Sedangkan kegiatan pengajian untuk pria atau sering disebut *Rukeman*, biasanya dilakukan setiap hari-hari tertentu seperti hari *Jumat Legi* (dalam perhitungan neptu Jawa) atau di hari sesuai kesepakatan warga.

Kegiatan ini meliputi tahlilan (pembacaan ayat-ayat Al-Quran), iuran ke lembaga kematian (Rukem) dan Arisan. Jika terdapat anggota keluarga atau kerabat yang meninggal maka kegiatan ritual *Slametan* atau *Genduren* dilakukan untuk mendoakan arwah meninggal dengan membaca surah Yasin dan Tahlil.

Siklus tradisi *Slametan* kematian ini dilakukan selama tujuh hari berturut-turut setelah meninggal, kemudian di hari ke-empat puluh, hari ke-seratus, satu

tahun, dua tahun dan hari ke-seribu atau sering di sebut *Nyewu*. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan masyarakat desa kepada kerabat atau keluarga yang meninggal. Ritual *Slametan* inididak hanya dibebankan kepada keluarga yang meninggal tetapi dipikul secara bergotong royong antar tetangga mulai dari memasak makanan untuk hidangan *Slametandan* kegiatan lainnya. Tradisi dan budaya *Slametan*ini masih bertahan hingga saat ini.

3.1.4 Kondisi Air Bersih

Sebelum tahun 2000 cakupan air bersih pada masyarakat Dadapan masih cukup minim. Rendahnya akses air bersih tersebut tidak dapat terlepas dari beberapa faktor antara lain faktor topografi wilayah dan minimnya sarana air bersih yang dapat di jangkau warga. Faktor wilayah topografi yang berbukit dan bergunung mempengaruhi tingkat ketersediaan air bagi masyarakat. Untuk mendapatkan kebutuhan

kebutuhan air bersih sehari-hari, masyarakat Dadapan menggunakan sarana sumur yang kedalamanya mencapai 13 meter. Selain fasilitas sumur, warga juga memperoleh air bersih di sungai. Di desa Dadapan terdapatdua sungai sebagai penompang kebutuhan air bersih.



Gambar3.8 : Kondisi sungai di Desa Dadapan
Sumber : Dokumentasi Paguyuban Tirta Mandiri

Namun keberadaan sungai tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika musim kemarau tiba, kedua sungai mulai mengering. Kondisi tersebut seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Meskipun kondisi air sungai yang mulai kering, masyarakat tetap menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar mendapatkan air yang cukup bersih dan jernih, sebagian besar warga

membuat lubang serapan untuk alat penyaring kotoran di sekitar genangan air. Sehingga air yang didapat menjadi lebih bersih.

Selain sungai sebagai sarana untuk mendapatkan akses air, masyarakat juga memanfaatkan sarana air bersih dari program WSLIC-2 yang sumber mata airnya terletak di Kecamatan Senduro. Fasilitas air bersih berupa hidran umum WSLIC-2 hanya dapat diakses di tempat umum saja seperti kantor balai desa, dan pinggir jalan. Fasilitas air bersih dari program WSLIC-2 tidak menggunakan sistem sambungan rumah dimana air bisa masuk ke rumah masing-masing rumah warga. Sehingga untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan kaki menuju hidran umum yang telah disediakan. Menurut keterangan dari pengelola WSLIC-2 desa Dadapan, hidran umum yang berada di desa Dadapan berjumlah 13 buah yang tersebar di 2 dusun. Pada saat mengalami kerusakan di hidran umum, sebagian besar warga mencari air bersih di sumber sekitar wilayah desa Dadapan



Gambar3.9 : Kondisi antrian air bersih di Desa Dadapan
Sumber : Dokumentasi Paguyuban Tirta Mandiri

bahkan di luar Kecamatan Gucialit. Kendala lain dari fasilitas air bersih WSLIC-2 ini ketika musim kemarau tiba. Masyarakat akan antri untuk mendapatkan air bersih di hidran umum dengan membawa puluhan bahkan ratusan jerigen air. Kondisi tersebut seperti yang

terlihat pada gambar di bawah ini:

Kondisi antrian air bersih ini yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Rendahnya debit air dan rusaknya beberapa pipa air menjadi faktor pendukung tingginya tingkat antrian warga. Bahkan warga rela meninggalkan pekerjaannya demi mencari air bersih ke beberapa sumber mata air di wilayah Kecamatan Gucialit. Selain itu, usaha warga untuk mendapatkan air bersih dengan

cara menyewa mobil *pick-up* untuk membeli air bersih di wilayah kecamatan Padang.

Permasalahan air bersih yang terjadi di desa Dadapan menjadi permasalahan utama warga. Selain berpengaruh pada faktor ekonomi akibat tingginya biaya untuk memperoleh air bersih. Konflik juga sering muncul pada warga disaat antri untuk mendapatkan air bersih seperti percekocokan antara pengantri dan perebutan dalam pembangian wilayah antrian air dalam tingkat dusun. Hal ini karena fasilitas air bersih belum mampu memenuhi seluruh warga yang memperoleh air bersih. Konflik tersebut hanya bersifat individual semata tanpa diikuti oleh kelompok masyarakat.

3.1.5 Lembaga Lokal di Desa Dadapan

Desa Dadapan merupakan desa yang cukup dinamis perkembangan masyarakatnya. Kondisi ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan lembaga lokal di desa Dadapan sebagai wadah bernaungnya masyarakat sangat berperang penting. Karena menyakut pemenuhan kebutuhan, penanaman nilai-nilai lokal, wadah bersosialisasi dan juga bernaungnya gagasan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh elemen. Berdasarkan bentuknya, lembaga lokal di desa Dadapan terdiri dari dua yaitu lembaga formal dan non formal. Adapun lembaga formal di desa Dadapan meliputi:

1. Lembaga Pemerintah (lembaga formal)

Lembaga pemerintahan merupakan lembaga formal di desa Dadapan. lembaga formal ini meliputi Pemerintahan Desa Dadapan, LKMD, BPD, Lembaga Program GerbangMas, PKK, Sanitarian Kecamatan, Polindes (Posyandu), WSLIC-2 dan himpunan kelompok air bersih Tirta Lestari. Lembaga ini lebih memfokuskan pada pemberian pelayanan umum dan juga pelayanan khusus di masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat lembaga. Dengan hadirnya lembaga formal ini diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Jika dilihat dari bidang garapannya, lembaga formal ini di dibagi menjadi dua bagian. Pertama, lembaga formal yang memberikan pelayanan di bidang

administrasi menyangkut program-program kerja yang bersifat umum. Sedangkan kedua lembaga formal yang bergerak di bidang pelayanan khusus menyangkut program kesehatan dan lingkungan hidup. Lembaga ini lebih bersifat lintas sektor dan menjalankan program sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Untuk lembaga formal seperti Pemerintahan Desa, LKMD, BPD, PKK, dan Polindes lebih menfokuskan pada pelayanan di bidang administrasi dan program umum di desa Dadapan. Hubungan antara kelima lembaga formal tersebut lebih mengarah pada hubungan koordinatif satu sektor. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan program dibantu oleh LKMD sebagai lembaga pengkaji kebijakan program yang telah dibuat aparat desa. LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu kepala desa. Sedangkan lembaga PKK merupakan bagian teknis LKMD yang programnya lebih spesifik di bidang pemberdayaan pada ibu rumah tangga. Pada kegiatan PKK juga menjalin koordinasi melalui Polindes (Poliklinik Desa) yang membantu melakukan sosialisasi pada ibu rumah tangga mengenai penggunaan alat kontrasepsi, penimbangan bayi dan balita dan pemberian asupan makanan sehat balita. Untuk tugas BPD lebih memantau program kerja pemerintah desa dan juga menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun dalam prakteknya di desa Dadapan, kerja BPD berhubungan langsung dengan LKMD. Sehingga LKMD sebagai wadah aspirasi yang kedudukannya cukup strategis di masyarakat Dadapan. Karena di LKMD terdapat beberapa perwakilan dari pemerintah desa, PKK, Polindes, BPD dan Tokoh Masyarakat.

Sedangkan untuk lembaga formal lainnya bergerak di bidang pelayanan khusus dan lintas sektor. Lembaga ini meliputi Lembaga Program GerbangMas, Sanitarian Kecamatan, WSLIC-2 dan Tirta Lestari. Lembaga ini dibentuk di desa Dadapan untuk memberikan layanan di bidang kesehatan dan lingkungan. Keberadaan lembaga ini berkoordinasi dengan instansi pemerintah kabupaten Lumajang. Untuk GerbangMas menjalin koordinasi dengan Tim Gerbangmas Kabupaten. Adapun program di GerbangMas desa Dadapan, meliputi bantuan jamban bergulir, pemeriksaan jentik nyamuk berkala, Posyandu, dan PAUD. Program tersebut berhubungan langsung dengan petugas Sanitarian Kecamatan

yang bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan lingkungan di desa Dadapan. Petugas Sanitarian yang di bawah koordinasi Puskesmas Gucialit bertugas melakukan sosialisasi dan mempengaruhi warga untuk menggunakan jamban ketika BAB. Dan juga melakukan kampanye pada warga terkait program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Kampanye STBM tersebut, mulai dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan WSLIC-2 sebagai lembaga yang berperan strategi dalam menyediakan air di desa. Tujuannya agar masyarakat menggunakan jamban ketika BAB karena fasilitas air sudah tersedia di WSLIC-2. Sebagai lembaga program air bersih, WSLIC-2 juga menjalin kerjasama dengan Tirta Lestari sebagai lembaga air bersih di tingkat kabupaten untuk membantu melakukan sosialisasi pada masyarakat desa Dadapan. Meskipun lembaga tersebut berkoordinasi lintas sektor tetapi usaha yang dilakukan cukup membantu masyarakat desa Dadapan.

2. Lembaga NonPemerintah (Non Formal)

Di desa Dadapan, Lembaga non formal cukup banyak dan beragam. Namun apabila di tinjau dalam aspek peran dan fungsinya, lembaga non formal desa Dadapan terbagi menjadi tiga yaitu Lembaga Kematian (Rukun Kematian), Lembaga Keagamaan (Pengajian Muslimat dan Istigosah) dan Lembaga Air Bersih (Paguyuban Tirta Mandiri).

a. Rukun Kematian (Rukem)

Rukun kematian atau sering di sebut Rukem merupakan lembaga non formal yang mengurus acara kematian. Rukem berperan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk tradisi pada acara *Tahlilan* dalam siklus kematian. Fasilitas yang harus disediakan di Rukem meliputi peralatan memasak dan makan-minum, serta fasilitas lain yang dibutuhkan untuk memakamkan jenazah. Kegiatan Rukem dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya hari kamis malam. Dan acara tersebut berbentuk pengajian yasin, iuran rutin untuk perawatan dan pembembeli peralatan upacara kematian. Jika ada warga desa Dadapan yang meninggal, keberadaan Rukem sangat dibutuhkan untuk menyediakan kain kafan untuk jenazah, *Pendus* (alat angkut jenazah), payung dan alat-alat makan-minum untuk acara *Tahlilan* pada tradisi *Slametan*, serta kebutuhan lain yang diperlukan. Setiap dusun di desa Dadapan memiliki Rukem sendiri. Apabila ada warga yang

meninggal di Dusun Karang Rejo, maka yang bertugas untuk menyediakan fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab Rukem Dusun Karang Rejo. Dan begitu dengan dusun lainnya di desa Dadapan.

b. Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan ini meliputi kegiatan Muslimat (pengajian rutin ibu-ibu) dan Istigosah (pengajian akbar). Keberadaan lembaga keagamaan ini cukup berperan penting meningkatkan spiritualitas masyarakat Dadapan. Untuk kegiatan Muslimat dilakukan secara bergantian di rumah warga. Acara di kegiatan itu meliputi pengajian, iuran rutin dan arisan anggota. Menurut keterangan kepala desa Dadapan, kegiatan Muslimat ini cukup membantu menyadarkan masyarakat terkait dengan pola perilaku sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Di kegiatan Muslimat tidak hanya sebatas ritual keagamaan semata tetapi juga sosialisasi terkait kesehatan warga yang dilakukan oleh istri kepala desa sebagai ketua PKK. Dengan demikian, keberadaan lembaga keagamaan ini cukup membantu program-program desa agar diketahui dan didukung seluruh warga Dadapan.

c. Paguyuban Tirta Mandiri

Keberadaan lembaga air bersih Tirta Mandiri di desa Dadapan menjadi salah satu lembaga lokal yang masih bertahan sampai sekarang. Adanya Tirta Mandiri cukup memberikan warna bagi kehidupan warga desa yang dulunya kesulitan akses terhadap air bersih. Meskipun keberadaannya belum mencapai satu dekade, tetapi manfaatnya dari layanan yang telah diberikan cukup besar dirasakan masyarakat. Pada perkembangannya, paguyuban Tirta Mandiri mengalami pengembangan pada pelaksanaannya di lapangan. Pengembangan itu terkait sistem dan mekanisme organisasi, sarana dan prasarana serta keanggotaan paguyuban. Sehingga kemajuan yang telah dicapai paguyuban Tirta Mandiri menjadi salah satu lembaga lokal yang cukup menonjol peranya di desa Dadapan. Bahkan keberadaannya pun menggugah pengetahuan dan semangat warga untuk ikut terlibat pada kegiatan di dalamnya.

Di desa Dadapan, paguyuban Tirta Mandiri tidak asing telinga masyarakat. Bahkan keberhasilannya pun telah dinikmati oleh warga desa tetangga dan desa di kecamatan lain.

Paguyuban ini terdiri dari beberapa badan diantaranya Pembina, Penasihat dan Pengurus Harian. Hubungan antar badan dan pengurus harian merupakan hubungan koordinasi dan saling mengawasi. Pembina diberikan tugas untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kerja pengurus Tirta Mandiri terkait pengelolaan organisasi dan air bersih di masyarakat. Penasihat diberikan tugas untuk mendukung dan membantu memberikan masukan pada kegiatan organisasi. Untuk pengurus harian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sie Kesehatan dan Sie Teknis.

Sampai saat ini pemanfaat air bersih sekaligus anggota Tirta Mandiri di desa Dadapan berjumlah 303 KK atau kurang lebih 3.657 jiwa yang tersebar di tiga dusun (lihat lampiran 2). Sedangkan anggota Tirta Mandiri di luar desa Dadapan yang telah berjumlah 759 KK atau lebih kurang lebih 7.000 jiwa. Dalam menjalankan kegiatan pengembangan dan pengelolaan air bersih Tirta Mandiri dikelola secara profesional dan terpisah dari pemerintah daerah. Setiap anggota mempunyai hak untuk memberikan masukan kepada pengurus demi kemajuan dan kelancaran air bersih. Dan juga anggota berkewajiban memberikan pengawasan terhadap kinerja pengurus, memberikan masukan pengembangan paguyuban dan pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan strategis Tirta Mandiri. Jika sarana air bersih dalam kondisi yang sangat kritis dan perlu adanya pembenahan sedangkan kondisi keuangan tidak mencukupi untuk mendanai maka semua anggota siap memberikan dana pembenahan dengan besaran sesuai dengan hasil rapat anggota.

3.1.6 Pengaruh Kelembagaan Bagi Kehidupan Masyarakat

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh keberadaan dari kelembagaan di desa Dadapan sehingga keberadaannya dapat memenuhi kebutuhan dan berperan pada penyelesaian masalah di desa Dadapan serta seberapa besar pengaruhnya di masyarakat, maka perlu diidentifikasi melalui wawancara kelompok atau diskusi di masyarakat Dadapan.

Penggunaan diskusi kelompok dilakukan untuk mengidentifikasi kelembagaan di desa Dadapan melalui proses

1. Inventarisasi kelembagaan yang berada desa Dadapan yang memiliki pengaruh di masyarakat Dadapan.

2. Identifikasihubungan dan interaksi sosialantar kelembagaan tersebut dengan masyarakat dan fungsi kelembagaan dalam menghadapi permasalahan yang ada di desa

Dari proses wawancara kelompok yang telah dilakukan di masyarakat, maka inventarisasi kelembagaan lokal yang diketahui masyarakat di desa Dadapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Inventarisasi Jumlah Kelembagaan di Desa Dadapan

No	Nama Lembaga	Karakteristik Lembaga			Besarnya Pengaruh
		Status	Jumlah	Kelompok	
1	Badan Perwakilan Desa	Formal	1	1	▲▲▲
2	GerbangMas	Formal	1	4	▲▲▲
3	LKMD	Formal	1	1	▲▲▲▲
4	Muslimat	Non Formal	1	2	▲▲▲▲
5	Pemerintah Desa	Formal	1	1	▲▲▲▲▲ ▲
6	PKK	Formal	1	1	▲▲
7	Paguyuban Tirta Mandiri	Non Formal	1	1	▲▲▲▲▲ ▲▲
8	Polindes/Posyandu	Formal	1	1	▲▲▲
9	Rukun Kematian	Non Formal	1	3	▲▲▲▲
10	Sanitarian Kecamatan (Puskesmas)	Formal	1	-	▲▲
11	Tirta Lestari.	Formal	1	1	▲▲
12	WSLIC-2	Formal	1	2	▲▲▲

Sumber: Hasil Wawancara Kelompok.

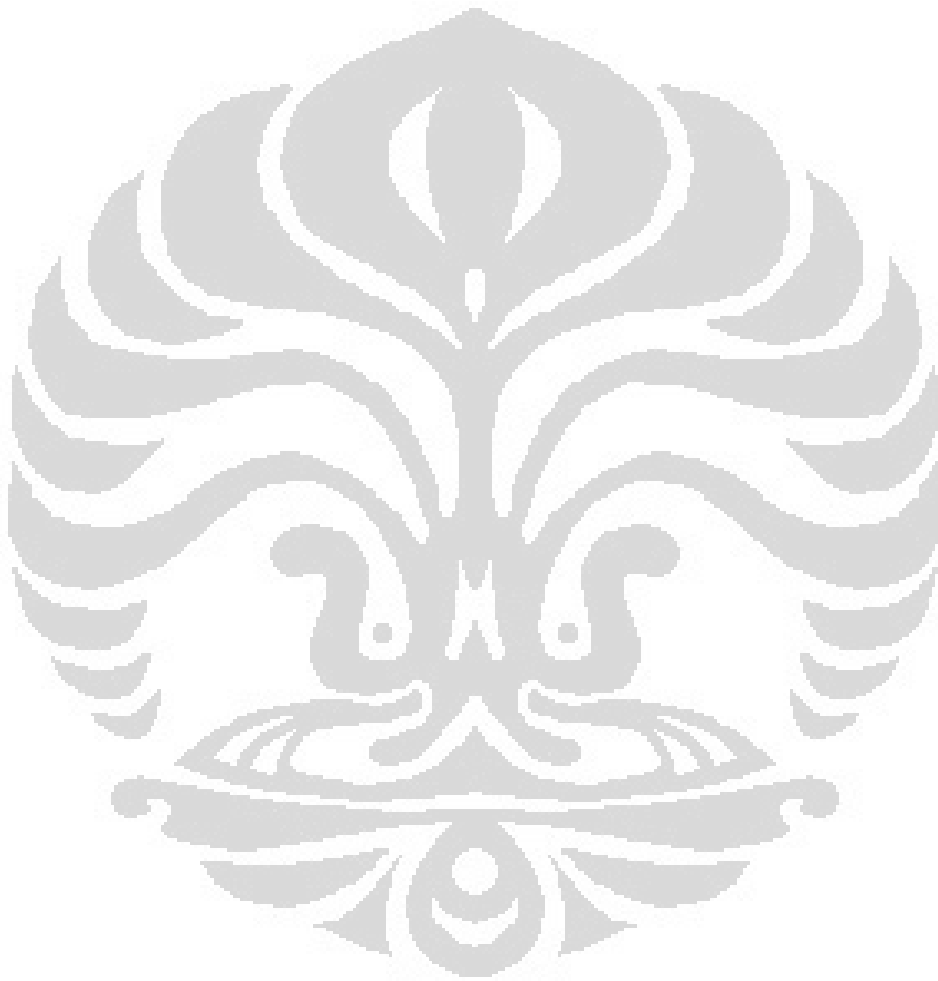
Keterangan: ▲ (*lambang Segitiga*). Banyaknya lambang segitiga menunjukkan besarnya pengaruh kelembagaan di kehidupan masyarakat.

Melalui diskusi kelompok dapat menginventarisir karakteristik dari jumlah kelembagaan yang ada di desa Dadapan dan besarnya pengaruh kelembagaan bagi kehidupan masyarakat. Besarnya pengaruh kelembagaan di desa Dadapan menunjukkan kuatnya peran terdapat kelembagaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Untuk memperjelas hasil dari proses

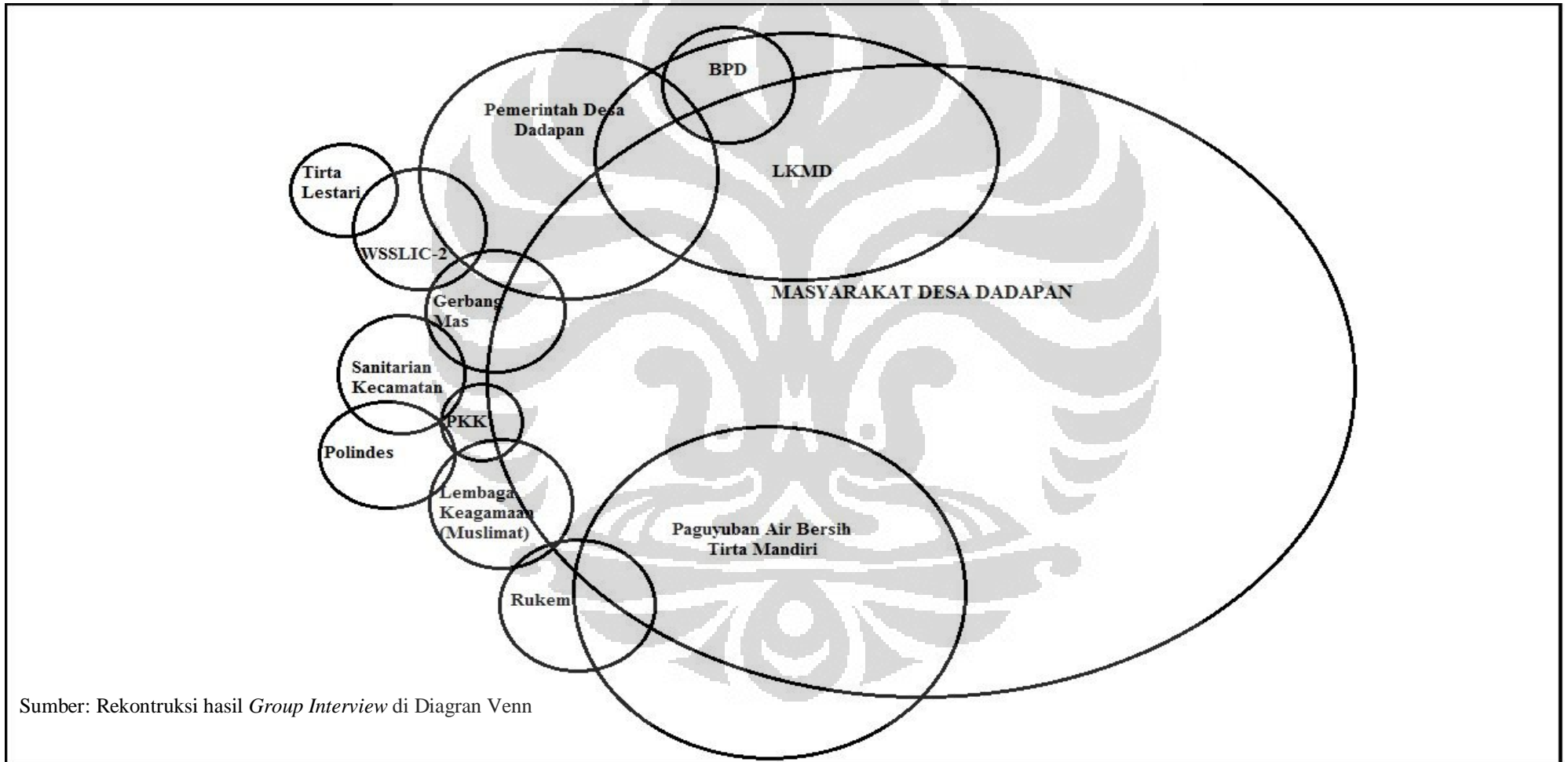
diskusi kelompok dalam menginventaris jumlah kelembagaan dan karakteristiknya serta pengaruhnya di desa Dadapan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kelembagaan yang besar pengaruhnya di kehidupan masyarakat dan berperan dalam menjaga keselarasan di desa Dadapan adalah Paguyuban Tirta Mandiri, LKMD, Pemerintah Desa, Rukun Kematian dan kelembagaan agama (Muslimat).
2. Sebagai besar kelembagaan yang memiliki peran yang kuat di kehidupan masyarakat lebih didominasi oleh kelembagaan yang masih menunjung nilai-nilai lokal sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Meskipun status kelembagaan bentuknya formal jika kelembagaan tersebut dapat beradaptasi dengan budaya dan tradisi masyarakat, maka masyarakat lebih menggunakan media lembaga tersebut.
3. Kelembagaan formal yang cukup berperan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dibidang kesehatan pada pelaksanaannya dilapangan masih menjalin kerjasama dengan kelembagaan non formal untuk menjalankan program yang buat adalah Kelembagaan Program GerbangMas, Polindes atau Posyandu dan Pemerintah Desa.
4. Mayoritas kelembagaan di desa Dadapan yang telah dibentuk berfungsi ganda. Pertama, kelembagaan berfungsi media untuk memenuhi kebutuhan umum warga seperti kesehatan, air bersih, administrasi kependudukan dan perekonomian. Kedua, kelembagaan berfungsi sebagai media dalam mengatur kehidupan yang terkait dengan perilaku indivusi, norma, adat-sitiadat dan budaya serta nilai-nilai agama. Keterpaduan fungsi kelembagaan tersebut yang cukup menonjol terlihat di Paguyuban Tirta Mandiri.
5. Basis kelembagaan yang terdapat di desa Dadapan lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat desa Dadapan sendiri. Meskipun ada kelembagaan di desa Dadapan yang menjalin kerjasama dengan organisasi luar pada upaya menciptakan silaturahmi antar warga desa.

Dari lima kesimpulan diatas setelah dilakukan proses inventarisasi dan identifikasi, maka akan dituangkan kedalam gambar diagram Venn untuk mengetahui kondisi kelembagaan terkait simbol besarnya ukuran lingkaran yang menunjukkan besarnya pengaruh internal kelembagaan. Dan juga jauh dekatnya jarak antara satu kelembagaan dengan yang lainnya untuk merefleksikan kedekatan masing-masing organisasi dalam kaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat Dadapan.



Gambar 3.10DIAGRAM KELEMBAGAAN (*DIAGRAM VENN*)
Desa Dadapan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang



Analisa Hasil Diagram Venn

Berdasarkan diagram Venn atau diagram hubungan kelembagaan di gambar 3.10 menunjukkan bahwa:

1. Keberadaan dari paguyuban Tirta Mandiri di desa Dadapan memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya lingkaran yang tergambar didiagram Venn.
2. Aktivitas di kelembagaan yang terdapat di paguyuban Tirta Mandiri tidak lepas dari keberadaan rukem (rukun kematian) di masyarakat. Karena pengelolaan air bersih masih terkait dengan kegiatan upacara adat-istiadat dan nilai-nilai lokal yang juga ada di kegiatan Rukem seperti penyediaan air pada acara Tahlilan dan Selamatan.
3. Aktor di yang terdapat di Tirta Mandiri yaitu Sanitarian paguyuban merupakan anggota dari kelembagaan agama seperti Musimat dan PKK sehingga kedua kelembagaan tersebut menjalin hubungan dengan paguyuban dalam upaya mempromosikan program-program paguyuban seperti program Jamban Sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Peran kedua kelembagaan tersebut menjadi katalisator dari Tirta Mandiri
4. Pemerintahan desa sebagai kelembagaan formal juga menjangkit kegiatan masyarakat dengan menjalin dukungan bersama Tirta Lestari, Sanitarian Kecamatan dan Gerbangmas untuk memberikan layanan di bidang kesehatan dan admistrasi kependudukan sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah kabupaten. Namun pada pelaksanaan dilapangan, aktor yang ada Tirta Mandiri menjadi pelaksana yang dapat berkerjasama dengan program pemerintah. Sehingga Tirta Mandiri menjadi faktor *enabling* program akan tetapi keberadaanya terpisah dengan pemerintah desa dan kabupaten.

BAB 4

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL

Pada bab temuan lapangan ini menggambarkan tentang mekanisme pengelolaan air bersih di jalankan paguyuban Tirta Mandiri, proses pengembangan masyarakat dalam penyediaan air bersih yang difasilitasi oleh Tirta Mandiri dan manfaat yang diperoleh masyarakat terkait keberadaan Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih.

4.1 Mekanisme Pengelolaan Air Bersih Paguyuban Tirta Mandiri

4.1.1 Pilar Regulatif

a. Mekanisme Organisasi

Dalam menjalankan roda organisasi untuk mengelolan air bersih di tingkat masyarakat, paguyuban Tirta Mandiri memiliki struktur kepengurusan sebagai bagian mekanisme kerja lembaga. Tujuan dibentuknya kepengurusan agar dapat mempermudah pembagian kerja dalam mengelola paguyuban sehingga dapat berjalan lancar. Pada perkembangannya, kepengurusan Tirta Mandiri secara formal adalah pengurus harian. Pengurus harian ini yang menjadi bagian sentral menjalankan roda organisasi dan mekanisme kebijakan di paguyuban Tirta Mandiri.

Pengurus harian Tirta Mandiri terdiri dari ketua, sekretaris, dan bagian teknis serta sub bagian lain yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini seperti penuturan ketua paguyuban bahwa: “Waktu itu pengurus dipilih oleh anggota, semua dikumpulkan dan membahas siapa yang pantas jadi ketua, sekretaris dan teknisi”. (YNT, 16/06/2012). Kepengurusan di paguyuban Tirta Mandiri dipilih melalui rapat anggota dan atas persetujuan seluruh anggota. Sehingga anggota tidak diperkenankan menunjuk langsung dirinya untuk menjadi pengurus paguyuban. Dibutuhkan mekanisme rapat anggota untuk memilih calon ketua, sekretaris, dan teknisi yang nantinya dapat memberikan arahan dan wawasan pada kebijakan paguyuban. Pada prakteknya dilapangan, kepengurusan di Tirta Mandiri tidak hanya terdiri atas tiga struktur saja, tetapi adapenambahan

pengurus yang bertugas membantu kegiatan program paguyuban di lapangan. Seperti yang di uraikan sekretaris paguyuban, bahwa: “Kalau dalam kepengurusan Tirta Mandiri itu terbagi atas beberapa bagian. Ada ketua, sekretaris dan teknisi serta dibantu seksi-seksi lainnya seperti kesehatan dan pembenahan”. (ISR, 28/11/2011)

Dalam menjalankan mekanisme roda organisasi di paguyuban Tirta Mandiri. Pengurus harian berperan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apabila terjadi kerusakan dan pembenahan sarana maka dilakukan melalui mekanisme rapat pengurus dan anggota. Pada rapat pengurus, posisi ketua menjadi bagian yang cukup penting untuk memberikan informasi kepada anggota terkait perkembangan yang terjadi di paguyuban. Seperti penjelasan dari ketua paguyuban bahwa: “Ketua itu hanya memberikan wawasan saja, kalau ada kendala kan ketua yang menyarankan perbaikan. Tanpa persetujuan anggota pemilihan pengurus tidak sah, karena yang punya kuasa itu anggota”. (YNT, 16/06/2012).

Ketua paguyuban memberikan pemahaman kepada anggota terkait dengan dinamika yang terjadi di paguyuban seperti memberikan laporan keadaan sarana air bersih dengan jumlah permasalahan yang dihadapi anggota ataupun pihak lain yang berkaitan dengan sarana air bersih untuk memperoleh bantuan teknis, pemecahan masalah dan pengembangan sarana air bersih. Selain itu, tanggung jawab ketua paguyuban antara lain (1) pembahasan dan menetapkan pengajuan anggota baru; (2) mengendalikan kegiatan dan membina kelompok-kelompok kecil; (3) melaksanakan perjanjian dengan pihak lain terkait dengan pengadaan air bersih; (4) bertanggung jawab untuk melaporkan keadaan keuangan paguyuban secara periodik. Meskipun kedudukan ketua berada di posisi atas, tetapi arahan yang diberikan tidak harus di patuhi langsung oleh anggota. Karena keputusan tertinggi berada di rapat anggota. Begitu juga dengan pengurus lainnya memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing. Kondisi ini seperti penjelasan dari sekretaris bahwa:

“Sekretaris ya masalah administrasi saja, dan pembukuan itu....Ada seksi kesehatan yang bertugas untuk jamban murah dan promosi kesehatan berupa kebersihan. Kalau seksi teknis ada dua seperti pak Winoto dan seksi teknis

di bawah pak Winoto. Kalau ada kerusakan ya bagian teknis. Kalau ada kerusakan besar baru kita dan anggota yang langsung terjun sesuai dengan hasil rapat anggota”. (ISR, 28/11/2011)

Sekretaris paguyuban bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi umum terkait dengan kegiatan oprasional seperti pembukuan keuangan, meneliti berkas-berkas paguyuban dan membahas permohonan pengajuan anggota baru dengan berbagai pertimbangan dari seluruh anggota. Pada prakteknya dilapangan peran sekretaris lebih dominan dibanding bendahara. Karena kegiatan administrasi telah mencakup segala administrasi keuangan paguyuban. Sedangkan untuk petugas teknis bertanggung jawab untuk mengatur kelancaran dan pemeriksaan sarana air bersih. Dan juga melakukan perencanaan pengembangan sarana air bersih. Seperti yang diungkapkan oleh petugas teknis bahwa:

“Sebagai teknisi itu, pertama, untuk mengadakan perencanaan itu cukup sulit karena jangkauannya jauh. Sebelum direncanakan yaitu harus cari sumber dulu. Setelah menemukan sumber, nanti saya konsultasi dengan desa setempat yang memiliki sumber, lha itu saya yang mengurus”. (YNT, 15/06/2012)

Keberadaan petugas teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak dilakukan sendiri karena dibantu oleh petugas pembenahan. Posisi petugas pembenahan dibawah komando petugas teknis. Sehingga petugas pembenahan bertanggung jawab di lapangan untuk melakukan pembenahan dan mengendalikan keamanan sarana air bersih milik paguyuban Tirta Mandiri.

b. Mekanisme Keanggotaan

Untuk menjalankan kegiatan pengelolaan air bersih, keberadaan anggota dalam paguyuban sangat penting. Karena anggota sebagai pendukung kegiatan yang ada di paguyuban. Dan juga keputusan terkait kebijakan paguyuban dimusyawarahkan melalui anggota. Sistem keanggotaan di Tirta Mandiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seperti penjelasan ketua paguyuban bahwa:

“Untuk Tirta Mandiri pengembangan sarana air pada tahap 1, anggotanya memang saya batasi karena takut airnya ngk cukup di distribusikan

sedangkan untuk masyarakat yang minta air di tiap anggota ya tidak dibatasi. Sekarang saya mampu ambil air tetapi tetangga saya ngak mampu ambil air. Yaa tetangga harus bantu gotong royong itu, sewaktu-waktu butuh air kan tetangga tidak malu. Setelah kita berhasil mulai masyarakat minta untuk dialiri air rumahnya dan ikut keanggotaan, baru dikembangkan ke Tirta Mandiri 2. Untuk pengembangan air memang Tirta Mandiri 1 tidak ada pengembangan karena sumber mata airnya sudah cukup. Jika mengembangkan lagi butuh sumber lain untuk mengaliri ke warga biar airnya cukup. Kalau ambil dari Tirta Mandiri 1 kan tidak cukup”. (YNT, 16/06/2012)

Hal ini juga sama seperti penjelasan dari petugas teknis bahwa:

“Kalau ada masyarakat yang ingin ikut ya untuk Tirta Mandiri pertama itu tidak bisa, karena terbatas. Nanti tahap ke dua baru dikembangkan ke Tirta Mandiri 2 karena stok debit air cukup banyak”. (WNT, 15/06/2012)

Pada awalnya sistem keanggotaan di Tirta Mandiri dibatasi atau tertutup khusus pada pengembangan tahap pertama. Kondisi ini terkait belum seimbang debit air yang tersedia dengan jumlah masyarakat yang memanfaatkan air tersebut. Melalui kebijakan itu diharapkan air yang mengalir ke rumah anggota menjadi besar dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika di tinjau secara sistem keanggotaan formal (*members*), jumlah anggota yang ikut pada pengembangan tahap pertama sebanyak 60 KK (lihat lampiran 2: data pengguna sarana air bersih Tirta Mandiri desa Dadapan). Setelah menuai keberhasilan maka pengurus mengembangkan lagi dan anggotanya mengalami penambahan 60 orang (lihat lampiran 2 data pengguna air bersih Tirta Mandiri 2 atau Tirta Tritunggal). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem keanggotaannya adalah terbuka untuk masyarakat umum. Seluruh warga bisa menjadi anggota di Tirta Mandiri jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus sesuai dengan hasil musyawarah anggota.

c. Mekanisme Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan air bersih. Paguyuban Tirta Mandiri memiliki mekanisme pembiayaan untuk memperbaiki sarana dan

prasarana agar terjaga kesinambungannya. Untuk itu mekanisme pengelolaan keuangan dilakukan dengan acara pertemuan bulanan atau rapat bulanan anggota. Seperti penjelasan petugas teknis bahwa: “*Teng Tirta Mandiri niku wonten pertemuan kegiatanepun damel bulanan kaleh arisan.* (Terj: Di Tirta Mandiri itu ada pertemuan, kegiatannya bulanan (iuran bulanan) dan arisan”. (WNT, 28/11/2011).

Pertemuan bulanan atau rapat bulanan adalah kegiatan rutin paguyuban yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali. Kegiatan pertemuan bulanan ini masih berlanjut sampai sekarang. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan secara bergantian di rumah anggota Tirta Mandiri. Hal ini seperti penjelasan dari sekretaris paguyuban bahwa: “Kalau pertemuan bergantian tergantung siapa yang dapat arisan nanti”.(ISR, 28/11/2011). Kegiatan pertemuan ini dilakukan secara bergiliran di rumah anggota yang mendapatkan arisan bulanan. Untuk menentukan rumah siapa yang akan dijadikan pertemuan bulanan bergantung pada undian hasil arisan bulanan anggota. Pada acara pertemuan bulanan paguyuban membahas tentang perkembangan air bersih dan pembayaran iuran bulanan rutin dari setiap anggota yang ikut mengambil air di paguyuban Tirta Mandiri. Kegiatan pertemuan dilakukan pada hari-hari tertentu dalam satu bulan. Hal ini seperti penjelasan ketua paguyuban, bahwa:

“Untuk pertemuan itu setiap *jumat legi* bentuknya yasinan, bulanan dan arisan. Nah dengan adanya arisan kan masyarakat bisa semangat datang ke pertemuan. Nah untuk kontribusi bulanan itu sebesar 10 ribu.” (YNT, 16/06/2012).

Mekanisme keuangan Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih diperoleh dari iuran anggota yang ikut pada pertemuan bulanan sebesar Rp. 10.000. Iuran rutin ini digunakan untuk perbaikan dan perawatan sarana air bersih. Seperti penjelasan sekretaris paguyuban bahwa: “Untuk iuran perbulan 10.000 jadi uang itu nanti di buat menggaji bagian teknis untuk membenahi kerusakan”. (ISR, 28/11/2011). Kondisi senada, juga disampaikan oleh petugas teknis tentang kegunaan dari iuran pada pertemuan bulanan Tirta Mandiri yang bertujuan: “Untuk uang perawatan untuk kebutuhan pipa, *shock*, *lem*, tenaga

teknis yang memperbaiki. Untuk petugas teknis juga ada di desa Dadapan dan di desa Kertowono”. (WNT, 15/06/2012).

Setelah selesai acara pembayaran iuran bulanan, dilanjutkan dengan kegiatan arisan. Kegiatan arisan ini sebagai pelengkap dari acara pertemuan bulanan paguyuban. Keberadaannya cukup penting untuk memotivasi anggota agar tetap hadir dalam kegiatan pertemuan bulanan. Hal ini seperti penjelasan dari anggota bahwa: “Sekalian bayar arisan 10.000 buat penyemangat saja dalam acara rutinan itu. Ada juga yang bayar untuk kas itu 10.000”. (RHT, 05/07/2012).

Dengan adanya arisan bulanan, banyak anggota yang hadir dalam pertemuan. Selain itu, arisan juga menjadi tabungan bagi anggota yang di kemudian hari uang dari kegiatan ini dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Arisan juga bertujuan untuk menjaga kerukunan antar anggota. Jika seorang anggota yang memperoleh arisan, maka orang tersebut harus mengundang seluruh anggota untuk hadir di rumahnya. Dan juga menyiapkan makanan (kue-kue) dan minuman untuk dihidangkan pada seluruh anggota yang hadir di rumahnya. Kegiatan arisan ini merupakan bagian dari acara pertemuan bulanan paguyuban dan sifatnya wajib untuk ikuti oleh seluruh anggota

d. Mekanisme Sanksi

Peraturan di paguyuban Tirta Mandiri memunculkan sanksi bagi anggota dan pengurus yang melanggar aturan tersebut. Sanksi diberikan bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan pertemuan bulanan yang sifatnya wajib. Karena pertemuan bulanan merupakan aturan tetap paguyuban dan apabila ada yang melanggar diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini seperti penjelasan sekretaris paguyuban bahwa:

“Semua anggota harus ikut kumpul kalau ada acara rutinan. Kalau ada yang nitip untuk arisan jika anggota tidak masuk ya di tulis tidak hadir. Dan kalau mau nitip pada kelompok yang dekat untuk iuran ya pasti ditolak. Jadi tidak boleh nitip dan harus hadir. Kalau ngk hadir dalam pertemuan itu tapi ikut minum meskipun dia bayar ya pasti sungkan, apalagi kalau ada arisan tidak hadir pas orang itu dapat arisan di rumahnya yang hadir pasti sedikit. Jadi dia mikir jadi dia ngk diorbankan, jadi kalau

di desa lebih baik ngak punya uang dari pada ngk diorangkan”. (ISR, 28/11/2012)

Bagi anggota yang tidak hadir pada acara ini akan mendapatkan sanksi formal dari paguyuban semisal tidak diperbolehkannya membayar dan menitipkan uang arisan dan uang bulanan air meskipun ketua kelompoknya datang. Sedangkan sanksi non formal berupa rendahnya penghargaan anggota dan masyarakat dengan tidak dihargainya orang tersebut di paguyuban maupun di masyarakat ketika ada kegiatan. Sanksi sosial dan moral bagi anggota yang telah melanggar kesepakatan tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan kepala desa bahwa:

“Apalagi kalau ada warga (anggota) yang *medit* (pelit) dan tak mau berbagi sama air, pasti dia akan diasingkan, bisa saja tersisih dan tak diorangkan. Kalau di desa lebih baik orang ngak punya uang dari pada menjadi warga yang tidak diorangkan. Kalau tidak diorangkan kan bisa-bisa kalau ada apa-apa, semisal meninggal siapa yang mau membantu mengubur dan datang ke *Slametan*. Namanya sudah ngak diorangkan berarti dia bukan orang di mata masyarakat ya”. (HRD, 14/06/2012)

Adanya sanksi ini tidak saja mengikat anggota paguyuban Tirta Mandiri, tetapi juga berdampak bagi masyarakat yang berada di desa Dadapan. Seperti penjelasan dari tokoh masyarakat bahwa: “Sanksi ya kalau ngak ikut ya sungkan, di ajak ngak mau dan ngak bantu, kalau mau ambil air ya sungkan sendiri nanti”. (LKM, 20/06/2012). Meskipun sanksi tersebut tidak mengikat, namun keberadaannya cukup memberikan pengaruh bagi anggota paguyuban dan masyarakat yang melanggar.

4.1.2 Pilar Normatif

a. Mekanisme Evaluasi

Pengambilan keputusan dilakukan dalam dua bentuk yaitu musyawarah anggota dan musyawarah khusus. Musyawarah anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, sehingga forum ini terkait kebijakan dan program yang akan dilakukan paguyuban. Hal ini seperti penjelasan petugas teknis bahwa:

“Ya di musyawarahkan sama anggota, semisale kalau ada perbaikan, anggota baru yang masuk dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau tanpa rapat musyawarah, pengurus ngak memiliki hak. Karena musyawarah itu rapat tertinggi di paguyuban”. (WNT, 15/06/2012)

Pada musyawarah anggota ini, anggota juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan masukan kepada pengurus terkait kebijakan dan program yang dibuat. Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus tidak mendapat dukungan dari setengah anggota yang hadir, maka kebijakan tidak akan dilaksanakan. Hal ini mengingat kekuasaan dan keputusan tertinggi berada di musyawarah anggota. Tanpa persetujuan anggota pengurus tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. Kondisi senada juga diungkapkan oleh ketua paguyuban bahwa:

“Pengambilan keputusan harus musyawarah. Kalau tidak musyawarah, saya sebagai ketua ngak bisa membuat kebijakan karena semua itu atas keputusan rapat anggota dan anggota yang memiliki wewenang, kekuasaan di anggota”. (YNT, 16/06/2012)

Sedangkan musyawarah khusus merupakan forum penyelesaian terhadap penyelewengan atau hal-hal yang merugikan paguyuban. Bahkan keputusan di forum musyawarah khusus ini bisa memberhentikan pengurus jika terjadi penyelewengan tanggung jawab terkait paguyuban seperti penuturan sekretaris paguyuban bahwa:

“Di rapat musyawarah juga bisa memberhentikan pengurus. Seperti kemarin ada pengurus tiba-tiba jual air 1 paket ke orang tanpa mengetahui pengurus lain dan anggota. ya pasti dirapatkan dulu. Maksudnya jual air itu apa, kok tiba-tiba di jual. Kalau tetap *ngeyel* (ngotot) ya kita keluarkan karena tidak sesuai dengan prinsip Tirta Mandiri”. (ISR, 10/06/2012)

Kedua forum ini merupakan pengambilan keputusan tertinggi terkait mekanisme kerja di paguyuban. Tanpa adanya musyawarah anggota dan khusus dipastikan paguyuban tidak akan bertahan hingga saat ini. Karena di forum itulah seluruh anggota dan pengurus harus patuh terhadap keputusan yang telah dibuat bersama dan memiliki sanksi yang kuat untuk mengatur dan melaksanakan tanggung jawab dan peran yang telah diberikan pada masing-masing anggota di Tirta Mandiri.

b. Mekanisme Tanggung Jawab Sosial

Kebijakan pengurus Tirta Mandiri dalam upaya pemberian akses air bersih kepada warga yang tidak mampu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan pembangunan fasilitas umum air bersih bagi warga. Kebijakan tersebut berbentuk pembangunan fasilitas hidran umum untuk masyarakat yang tidak mampu dan mekanisme pembiayaan kelompok. Hal ini seperti penjelasan ketua paguyuban bahwa: “Untuk urunan 1 paket 3.500.000 jadi kalau masyarakat ngk mampu bayar segitu ya harus dibagi 6 orang jadi beban itu agak ringan jadi kita ngak mempersulit anggota”. (YNT,16/06/2012). Melalui mekanisme pembiayaan kelompok, dapat meringankan beban masyarakat. Sehingga warga yang ekonominya rendah bisa menikmati akses air bersih dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan demikian, pengurus memberikan keleluasaan bagi warga yang ikut untuk bergabung dengan warga lain agar biaya dapat ditanggung bersama. Senada dengan pernyataan dari tenaga teknis bahwa: “Untuk warga yang tidak mampu, nanti saya beri aturan jangan ambil 1 paket, jadi 1 paket bisa digunakan 4 KK. Nanti setelah nyampe masyarakat dipecah menjadi 4 rumah”. (WNT, 15/06/2012).

Sedangkan untuk warga yang secara keuangan tidak mampu untuk membayar air bersih. Pengurus tidak memaksa masyarakat untuk mengambil air di Tirta Mandiri. Namun ada kebijakan sistem pembiayaan yang secara khusus diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu. Seperti penjelasan sekretaris bahwa:

“Kalau yang butuh air kita siapkan HU umum yang bisa di ambil airnya sama masyarakat. Kalau ada masyarakat tidak ikut atau ambil paket Tirta Mandiri, ya masyarakat membantu gotong royong. Untuk sosial juga kita membangun tempat wudhu di Musholah dan di pinggir jalan agar mudah di ambil warga yang tidak mampu”. (ISR, 28/11/2011)

4.1.3 Pilar Kultural-Kognitif

a. Pengetahuan Nilai Lokal Masyarakat

Untuk mempermudah dalam pengelolaan air bersih, tokoh masyarakat mulai menanamkan nilai lokal yang terdapat di desa Dadapan kedalam paguyuban kegiatan Tirta Mandiri. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat bahwa:

“Ya seperti kompak dan semangat dalam bergotong royong dan persatuan antar warga itu kuncinya agar berhasil. Bahkan untuk masyarakat desa Dadapan sangat semangat sekali dalam mendapatkan air, sehingga tetangga yang tidak mengambil air dan rumahnya berdekatan dengan pengguna air bersih Tirta Mandiri ikut terlibat gotong royong penggalian pipa”. (LKM, 20/06/2012)

Melalui pelembagaan nilai-nilai lokal pada paguyuban Tirta Mandiri inilah tujuan lembaga yang akan hendak dicapai menjadi semakin terarah. Terbentuknya paguyuban Tirta Mandiri ini bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih khususnya seluruh warga desa Dadapan dan desa lainnya yang belum mendapatkan layanan air bersih. Seperti penjelasan dari ketua paguyuban bahwa: “Ya.. biar mudah ambil air dan juga air di masyarakat dapat tercukupi, pokoknya saling berbagai sama tetangga gitu”. (YNT, 16/06/2012). Keberadaan paguyuban ini cukup membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga Dadapan. Bahkan masyarakat yang tidak tergabung dengan paguyuban bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Kesadaran anggota Tirta Mandiri untuk membantu tetangga yang belum mendapatkan akses air bersih menjadi tanggung jawab bersama. Dan anggota dilarang untuk menarik iuran bagi masyarakat yang mengambil air di rumah anggota. Selain itu, keberadaan Tirta Mandiri telah membantu menyelesaikan permasalahan antrian air di tempat umum. Penjelasan ini seperti yang di sampaikan oleh sekretaris bahwa: “Ya.. paling tidak itu ngak susah ambil air, jadi tidak perlu antri-antri ke HU WSLIC-2 atau ke desa lainnya. Jadi kalau ada acara atau kegiatan rumah tangga mudah untuk mendapatkan air, jadi bisa tenang sekarang”. (ISR, 10/06/2012).

Dengan demikian, keberadaan Tirta Mandiri memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat di desa Dadapan terkait penyediaan akses

sarana air bersih. Pada pengembangan organisasi paguyuban masih mempertahankan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya. Sehingga nilai lokal tersebut meminimalisir kebijakan yang mengkomersialisasikan air bersih. Selain itu, lahirnya paguyuban Tirta Mandiri menjadi inovasi bagi perkembangan kelembagaan air bersih di tingkat desa dengan berprinsip pada nilai lokal masyarakat Dadapan.

b. Budaya Masyarakat

Budaya dan adat istiadat menjadi bagian dari prinsip dan dasar di paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih pada masyarakat. Dengan demikian prinsip dan nilai dasar Tirta Mandiri berakar dari budaya gotong royong dan kerjasama antar masyarakat. Melalui prinsip tersebut pengelolaan organisasi dapat berjalan sesuai dengan program dan juga peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat di desa Dadapan. Hal ini seperti penjelasan ketua paguyuban, bahwa:

“Diawali semangat kerjasama dan juga tanpa pamrih Tirta Mandiri itu, walaupun capek ya tetap berjalan. Jadi di Tirta Mandiri itu air adalah kekeluargaan, bukan dijadikan bisnis, kalau dibuat bisnis malah memunculkan konflik antar warga. Anggota juga tidak begitu suka dengan sistem bisnis air gitu”. (YNT, 16/06/2012)

Prinsip kekeluargaan dan kerjasama dalam pengelolaan air menjadi pedoman dalam menyusun aturan di Tirta Mandiri. Keberadaan air bersih merupakan bentuk ikatan sosial antar warga masyarakat. Bahkan keberadaannya pun lebih penting dibanding nilai ekonomi di masyarakat. Sehingga prinsip ini dijadikan pedoman pada penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelembagaan. Menyatunya prinsip lokal (nilai dan budaya) dengan aturan di paguyuban menjadi cermin dalam bertindak dan berperilaku seluruh anggota. Dan juga dalam mekanisme kerja paguyuban. Tujuannya agar anggota dan pengurus patuh terhadap aturan dan tata tertib yang telah disepakati bersama. Dengan demikian keberadaan prinsip diatas memberikan konsekuensi bagi anggota Tirta Mandiri apabila dipatuhi dan dilanggar. Hal ini seperti penjelasan petugas teknis bahwa:

“Prinsip Tirta Mandiri mempunyai perasaan bahwa dia merasa bisa amal baik, bagi orang yang nggak mampu dan nggak punya biaya bisa ambil air dari Tirta Mandiri *niku kuncine* (itu kuncinya). ”*Nggadah tuyo mboten saget diampungi, niku untuk pemikiran Tirta Mandiri mboten teng niku. Nek kulo wonten anggota seng nggadah pemikiran niku. Anggota niku kulo pedhalaken. Misale, Awakmu ndak usah njupuk ben dijupuk wong sadar ae, ngantos ngoten kulo. Artine opo masalahe, jenenge banyu, kapan meneh awakmu seng iso ngekei, kate ngekei wong dak duwe iso kapan meneh, kate ono Slametan sek mbeleh sapi. Jenenge banyu kan amal jariah nang tonggo.*” (Terj: Punya air tidak mau berbagi, untuk pemikiran Tirta Mandiri tidak seperti itu. Kalau kita punya anggota yang punya pemikiran untuk tidak mau berbagi air. Anggota yang seperti itu kita keluarkan. Misalnya kita berkata sama anggota “kamu jangan mengambil air (di Tirta Mandiri) biar diambil orang yang sadar saja”. Artinya kenapa masalahnya saya bilang begitu, namanya air, kapan lagi kita memberi, mau memberi orang miskin bisa kapan lagi, mau ada Selamatan masih memotong Sapi (biaya lebih besar) Namanya air itu kan amal Jariah ke tetangga”. (WNT, 28/11/2011)

Prinsip ini menjadi pedoman dasar bagi seluruh anggota dan pengurus dalam menjalankan kegiatan paguyuban. Dalam kegiatan gotong royong penggalian pipa dan pembangunan HU Tirta Mandiri, anggota tidak diwajibkan untuk mengajak tetangga karena tanggung jawab ada pada anggota. Namun sebaliknya, besarnya antusias warga yang ikut dalam gotong royong penggalian pipa semakin banyak. Bahkan jika ada warga yang tidak di ajak dan tidak diberitahu menjadi marah. Seperti penjelasan ketua paguyuban bahwa:

“Kalau untuk kerja bakti di Tirta Mandiri lebih mewajibkan pada anggota saja, tetapi dalam pelaksanaannya banyak warga yang ikut membantu menggali pipa. Bahkan kalau tidak diberitahu warga/tetangga itu marah, jadi disana untuk kerja bakti memang tidak menuntut orang lain agar ikut”. (YNT, 16/06/2012).

Penjelasan ketua paguyuban diatas, memberikan gambaran bahwa kesadaran bekerjasama dan keinginan untuk berbagi antar masyarakat sangat besar. Sehingga membuka pemikiran warga untuk saling mendukung agar dalam pelaksanaan kegiatan menjadi cepat terselesaikan.

Dengan demikian, budaya menjadi pendorong di paguyuban Tirta Mandiri dalam mengelola air bersih karena melalui elemen budaya dapat memunculkan prinsip-prinsip di paguyuban, sehingga menjadi perekat anggota dan masyarakat. Dengan melalui wadah kelembagaan lokal masyarakat ikut terlibat dan menjadi bagian dari ikatan sosial di paguyuban Tirta Mandiri.

4.2 Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih

Setelah adanya mekanisme yang dijalankan paguyuban Tirta Mandiri. Upaya pengembangan sarana air bersih melalui swadaya masyarakat dilakukan dengan melibatkan pihak yang ada di desa Dadapan. Kegiatan ini sebagai bagian dari usaha paguyuban untuk melakukan pengembangan masyarakat melalui penyediaan air bersih. Adapun tahapan pengembangan masyarakat untuk melakukan swadaya sarana air bersih pada paguyuban Tirta Mandiri terdiri dari lima tahap di antaranya sebagai berikut:

4.2.1 Tahap Persiapan

Pada tahapan ini pengurus paguyuban Tirta Mandiri memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan ada kegiatan swadaya air bersih di desa Dadapan. Hal ini seperti penjelasan anggota bahwa:

“Saya membantu pak Winoto dan Yanto melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat di desa Dadapan. Datang ke desa untuk mempengaruhi warga yang butuh air. Untuk pembiayaan di pikul bersama. Setelah sosialisasi pada masyarakat yang membutuhkan air bersih baru melakukan tindakan berikutnya”. (MSM, 05/07/2012)

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menghimbau warga bahwa kegiatan penyediaan air bersih dilakukan secara swadaya dan gotong royong masyarakat. Di kegiatan itu membahas mekanisme mengalirkan sumber mata air ke desa Dadapan dengan jarak yang cukup jauh. Kegiatan ini tidak hanya di informasikan

di tempat umum saja tetapi juga mendatangi langsung ke rumah-rumah warga. Seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa: “Yaa ada yang langsung *dor to dor* ke rumah-rumah warga untuk menjajaki mau apa tidak kalau mencari air bersih. Baru setelah itu orang-orang itu lihat sumbernya dulu”. (APH, 05/07/2012). Setelah disepakati oleh warga yang telah ikut dan terdaftar pada paguyuban. Kegiatan berikutnya yaitu melakukan pencarian terhadap sumber mata air yang akan di ambil. Kegiatan pencarian sumber tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat Dadapan. Tetapi hanya melibatkan pengurus dan ketua kelompok kecil yang melihat kondisi dan letak sumber yang akan dibangun. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Sebelum kita ngomong dulu di masyarakat terlebih dulu kita mencari sumber air. Yang mencari sumber saya sama pak Winoto. Baru kalau sudah ketemu kita memberi tahu pada masyarakat. Kalau melibatkan warga ke sumber itu warga tidak mau, baru kalau ada warga yang punya minat kita ajak”. (MNL, 05/07/2012)

Kegiatan pencarian sumber mata air bertujuan untuk mengkaji besarnya debit air dengan komposisi warga yang mendapat air, letak sumber air, model teknologi pendistribusian air dan menjalin hubungan dengan masyarakat yang tinggal di dekat sumber.



Gambar 4.1 : Kegiatan survey sumber mata air
Sumber : Dokumentasi Lembaga Paguyuban Tirta Mandiri

Untuk kegiatan survey ini, sumber mata air yang dikembangkan dan diambil meliputi dua wilayah sumber mata air antara lain sumber Perang desa Kertowono dan sumber Cempoko di kabupaten Probolinggo. Seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa:

“Cari sumber, setelah tahu sumber, baru di ajak warga. Di perbatasan hutan Lumajang dan hutan Probolinggo untuk pengembangan kedua, kalau pertama di Kertowono. Kalau dengan kata-kata masyarakat itu banyak ngak di percaya. Baru kalau tahu sumbernya masyarakat mau ikut”. (APH, 05/07/2012)

Setelah memperoleh sumber dan mengkaji kelayakan sumber yang akan diambil. Pengurus akan mengajak seluruh anggota yang tergabung di Tirta Mandiri untuk bersama-sama melihat air ke wilayah sumber. Dengan mengajak anggota ke lokasi bertujuan untuk meyakinkan bahwa sumber akan dikembangkan cukup layak dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada seluruh anggota.

Pada tahap persiapan ini, pengurus juga mengidentifikasi sumber daya lokal yang dapat memberikan kontribusi di pelaksanaan swadaya air. Sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk tahapan persiapan ini antara lain modal fisik dan modal sosial. Modal fisik ini merujuk pada kondisi wilayah yang akan dijadikan acuan bagi penerapan model teknologi pendistribusian air bersih dari sumber mata air ke desa Dadapan. Seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa: “Wilayah Gucialit kan pegunungan jadi dengan kondisi itu mudah untuk menyalurkan air dari sumber pakai model gravitasi”. (RDN, 05/07/2012). Lokasi sumber mata air yang berada di dataran tinggi, mempengaruhi jenis teknologi yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari sumber ke rumah penduduk di desa Dadapan. Model gravitasi ini prinsip kerjanya dengan memanfaatkan sumber air yang berada di atas lereng untuk dialirkan ke wilayah dataran rendah dengan mengalirkan air melalui pipa ke Hidran Umum. Namun model gravitasi yang digunakan di paguyuban lebih mengarah pada tipe *gravitasi seket*. Model *gravitasi seket* ini merupakan inovasi baru dan belum ada pengembangan tipe ini di bidang penyediaan sarana air bersih di Indonesia. Untuk modal sosial lebih

menekankan adanya kerjasama antar masyarakat dan pihak-pihak luar dalam kegiatan penyediaan air bersih. Seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa: “Jiwa gotong royong masih tinggi, persaudaraanya juga masih kental dan mudah diajak kalau ada kegiatan desa. bahkan swadaya murni air itu ya kegiatan gotong royong dan kerja bakti seluruh warga. (WIT, 05/07/2012).

Kegiatan bekerja sama dengan seluruh masyarakat melalui kegiatan gotong royong dalam penyediaan sarana air bersih memberikan nilai tambah untuk mengurangi biaya kerja pada kegiatan paguyuban. Selain itu, kerjasama juga dibangun dengan pihak luar yang berperan penting dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua paguyuban bahwa:

“Untuk desa Dadapan kan tidak punya sumber mata air yang punya itu kan masyarakat desa lain jadi Tirta Mandiri punya kebijakan pada masyarakat yang punya sumber, dari sumber desa Kertowono. Misalnya masyarakat Kertowono, kan masalahnya butuh air jadi kita perbaiki dulu air masyarakat disana pipanya dan dengan pemberian pemberian HU, setelah itu sisanya kita ambil dan dialirkan ke desa Dadapan. Sehingga keamananya juga dibantu masyarakat Kertowono”.(YNT, 16/06/2012).

4.3.2 Tahap Pengkajian

Pada tahap ini, pengurus mulai melakukan pengkajian terhadap kelayakan terhadap sumber mata air. Kelayakan ini mencakup banyaknya jumlah sumber mata air yang tersedia dan besarnya pipa untuk mengalirkan ke hidran umum yang akan dibangun. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Waktu pencarian sumber pada pengembangan Tirta Mandiri 1 itu di Desa Kertowono tepatnya di wilayah dusun Perang. Di sana ada sekitar 6 sumber yang kita namai dengan sumber Masdi, sumber Saterun, sumber Perang, sumber Ripah, dan 2 sumber lainnya. Kalau dilihat debit airnya keenam cukup besar untuk memenuhi wargaya cukup untuk ukuran 3 atau 4 dim pipa besarnya airnya”. (MNL, 05/07/2012)

Dari keenam sumber mata air yang berada di desa Kertowono. Debit air yang dikeluarkan cukup banyak dan dapat memenuhi warga yang ikut tergabung di Tirta Mandiri. Bahkan untuk mendistribusikannya dibutuhkan ukuran pipa yang

cukup besar agar air yang diperoleh warga menjadi lebih banyak. Kelayakan sumber keenam sumber mata air ini juga di ungkapkan oleh anggota paguyuban bahwa: “Sumbernya cukup layak untuk diambil karena airnya besar, ya mungkin yang jadi masalah itu kondisi wilayahnya yang diatas bukit dan hutan jadi butuh itung-itungan yang bagus.” (NIM, 05/07/2012). Begitu juga dengan pengkajian terhadap kelayakan sumber mata air pada pengembangan kedua. Sumber air di tahap pengembangan kedua cukup besar mengingat sumber tersebut merupakan sumber satu-satunya di desa Cempoko yang berada di hutan wilayah kabupaten Probolinggo. Sehingga masyarakat setempat enggan untuk mengambil sumber itu disebabkan sulitnya lokasi sumber. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:

“Tokoh masyarakat *seng* (yang) membantu mencarikan air bersama *kulo niku enggeh* (saya itu ya) pak Lukman. Mulai *mendet sumber teng* (mulai mengambil ke) Probolinggo untuk pengembangan kedua. *Sumbere niku cukup ageng* (sumbernya itu cukup besar). Tapi *wilayahe seng rade susah masalahe hutan* (wilayahnya agak susah karena hutan)”. (AWI, 05/07/2012)

Setelah pengurus dan anggota beserta warga melakukan pengkajian terhadap sumber mata air. Kegiatan selajutnya dengan melakukan pendataan terhadap warga yang akan ikut untuk swadaya air bersih yang dikelola paguyuban Tirta Mandiri. Seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa:

“Strateginya kita ambil dari pihak keluarga dulu biar mudah kekerabatanya, kita mulai ambil 24 paket biar rata pembangian air di desa Dadapan. Kendalanya Dari 24 orang yang mendukung, diantara 24 orang yaa masih ragu karena tidak akan nyampek, karena melihat kondisi jauh sekitar 15 KM”. (APH, 05/07/2012)

Untuk mensukseskan kegiatan swadaya air, strategi yang dilakukan oleh pengurus dengan memobilisasi di tingkat anggota keluarga. Hal ini dilandasi oleh kesamaan kekerabatan yang mudah untuk diajak kerjasama. Selain itu, dengan memobilisasi anggota keluarga maka akan memicu orang lain untuk ikut pada kegiatan tersebut. Hal ini senada seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Pak Parman Partim itu ketua pertama Tirta Mandiri sama pak Yanto dan pak Winoto itu yang *dor to dor* kerumah saudaranya dulu siapa yang mau diajak mendatangkan air bersih dengan iuran kemungkinan nanti di musyawarahkan kisarnya 3 juta, ada yang menolak ada yang menerima. Akhirnya terkumpul 24 orang”. (STL, 05/07/2012)

Dari beberapa anggota keluarga yang ikut di kegiatan swadaya air tersebut memicu masyarakat lain untuk ikut di dalamnya dan terkumpul 24 orang. Setelah melakukan pendataan warga, pengurus mulai menganggarkan besarnya biaya yang akan digunakan pada kegiatan swadaya ini. Seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa: “Dulu itu kan kita kumpul di rumah pak Yanto untuk pertemuan iuranya 2.500.000/paket kemudian setelah pelaksanaan kita kumpul karena kekurangan dana, dan sepakat kita menambah dana”. (STL, 05/07/2012)

Untuk swadaya pada tahap pertama pengembangan sarana air bersih, anggaran biaya swadayanya per paket sebesar 2.500.000 per paket atau per orang. Namun dalam perkembangannya mengalami peningkatan sebesar 3.500.000 per orang. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa: “Akhirnya urunan 3.500.000 tapi belum nyampek sini, akhirnya urunan lagi biar nyampek. Tapi kalau urunan tetapnya ya 3.500.000 itu, kalau ada urunan lagi itu untuk perbaikan saja”. (SMO, 05/07/2012).

4.2.3 Tahap Perencanaan Kegiatan

Pada tahapan ini dimulai dengan perencanaan untuk menentukan peta wilayah pembangunan sarana air bersih. Perencanaan kegiatan yang dibuat pengurus meliputi penentuan wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan hidran umum dan jumlah hidran umum yang akan dibangun. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:

“Untuk pertama, kita merencanakan bangun HU utama di wilayah sumber Perang dan Probolinggo. Setelah itu rencana berikutnya baru kita bangun HU lagi yang nanti sekiranya penempatan HU itu tepat berada di wilayah yang akan di aliri air. Jadi gak di bangun tiap kilometer HU tapi kalau ada wilayah yang menggunakan air itu ya kita bangun biar hemat biayanya.

Semisal di wilayah wilayah Kertowono ada 4 HU dirumah pak Sugiyo, Patmo, Sukri sama Wage. (MSM, 05/07/2012).

Perencanaan untuk membangun sarana air bersih di Tirta Mandiri dilakukan dengan membangun hidran umum di wilayah sumber mata air. Tujuan dibangunnya hidran umum agar pasokan air yang akan dialirkan ke desa Dadapan dapat diatur volume distribusinya. Dengan merencanakan pembangunan di lokasi sumber mata air akan mempermudah pembagiannya ketika air mengalami kenaikan volume di sumber dan penurunan debit air. Dengan demikian, air yang disalurkan ke rumah penduduk menjadi lebih merata dan adil. Setelah persiapan pembangunan hidran di wilayah sumber mata air.



Gambar diatas menunjukkan lokasi dimana hidran induk di sumber mata air Perang akan dibangun. Perencanaan pembangunan ini membutuhkan kecermatan untuk menentukan seberapa besar hidran yang akan dibangun. Mengingat besarnya debit air yang tersedia di sumber mata air. Dan juga pengurus khususnya tenaga teknismencanakan perbandingan besarnya debit air dari sumber yang keluar. Sehingga air yang berada di hidran induk tekanannya tidak terlalu besar, yang berakibat rusaknya fasilitas pipa karena tekanan air yang besar.

Perencanaan berikutnya dengan mengidentifikasi lokasi pembangunan hidran umum di masyarakat. Pengurus merencanakan pembangunan hidran umum

hanya di lokasi-lokasi tertentu mengingat tingkat kedekatan masyarakat untuk mengambil air melalui hidran umum. Di lokasi sumber mata air tepatnya desa Kertowono, hidran umum yang dibangun berjumlah 4 hidran. Dengan alasan pembangunan hidran di wilayah tersebut, agar mudah untuk mengkoordinasi apabila terjadi kerusakan dan penyumbatan air di pipa. Sedangkan perencanaan pembangunan hidran umum di wilayah desa Dadapan sebanyak 8 hidran umum yang tersebar di dua dusun. Seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Dari jeding induk di Desa itu di sudah di bagi menjadi 2, jadi di tata dulu untuk dibagi jadi 4 kelompok dan otomatis bercabang menjadi 2 wilayah pedukukuan, di dusun Karang Sejati meliputi RW IX, VII, IX, VIII. Kalau di dusun Karang Rejo RW III. Tujuannya agar rata air itu”. (SLT, 05/07/2012)

Pembangunan hidran umum di masyarakat terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah yang akan direncanakan dalam penempatan hidran meliputi dua dusun yaitu dusun Karang Rejo dan Karang Sejati. Perencanaan ini bertujuan untuk mempermudah pembangian air di kedua wilayah tersebut. Mengingat mayoritas anggota paguyuban Tirta Mandiri yang melakukan swadaya air bersih bertempat tinggal di kedua dusun itu.



Gambar 4.3 : Perencanaan pembangunan HU di Desa Dadapan
Sumber : Dokumentasi Lembaga Paguyuban Tirta Mandiri

Gambar diatas menunjukkan pengurus (ketua paguyuban) sedang melakukan perencanaan pembangunan HU di desa Dadapan tepatnya di dusun Karang Rejo. Perencanaan pembangunan hidran inilah yang akan menyalurkan air ke dua wilayah dusun dan membaginya ke beberapa lokasi di setiap RW pada masing-masing dusun.

Setelah melakukan perencanaan peta wilayah pembangunan sarana air. Proses selanjutnya yaitu merencanakan pemilihan jenis sarana air bersih. Pada kegiatan penyediaan sarana air bersih, pemilihan jenis sarana air cukup menentukan ketepatan dan keberhasilan pada pendistribusian air dari sumber ke desa Dadapan. Pemilihan jenis sarana air bersih juga ditentukan oleh faktor tata ruang atau wilayah dimana sistem air bersih akan dibangun. Menurut penjelasan anggota paguyuban bahwa pemilihan jenis sarana air bersih yang digunakan melalui model gravitasi.

“Jenis sarana yang di pakai itu ya model Gravitasi karena wilayahnya kan tinggi jadi cocok, kalau memakai sistem stok kran malah airnya ngak bisa adil. Kalau untuk pipa ya memang tidak pipa yang bagus karena terkendala biaya”. (NIM, 05/07/2012)

Model gravitasi ini dipilih jenis sarana yang digunakan untuk penyediaan air bersih dipengaruhi oleh faktor wilayah sumber mata air yang letaknya di dataran tinggi. Gravitasi adalah sebuah gaya yang dapat menarik semua benda ke permukaan bumi. Gaya tarik ini yang membuat semua benda jatuh ketempat yang lebih rendah. Sehingga dengan gravitasi, air dapat mengalir dari dalam bak (hidran umum) dengan berat jenisnya melalui pipa-pipa sampai ke kran-kran yang berada di level terendah dari level air pada titik awal. Pada perencanaan dilapangan air yang terletak di dataran tinggi (hidran induk di sumber mata air Perang dan Probolinggo) akan di alirkan melalui pipa menuju dataran rendah yang ditampung melalui bak penampungan (hidran umum) dengan memanfaatkan kemiringan kontur wilayah. Sehingga air dari hidran umum dapat di salurkan di setiap masing-masing rumah anggota. (lihat lampiran 3: model gravitasi sistem sekat). Namun jenis pemilihan sarana model gravitasi mengalami inovasi baru yang dikembangkan oleh pengurus Tirta Mandiri dengan menggunakan model *Sistem Seket*. Hal ini seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa:

“Untuk sistem seket *niku* (itu), dibentuk paket *teng* (di) induk sumber, semisal dalam 1 induk *pinten* (berapa) paket atau 1 paket induk digunakan 5 konsumen. Dari induk 1 ke induk 2, semisale 24 paket, *seng wonten* (yang ada) induk 1 *niku ngedalekan* (itu mengeluarkan) 5 paket, dan induk 2 *ngedalaken* (mengeluarkan) 19 paket, *la nek wonten induk maleh nggeh di bagi maleh, sisae pinten* (nah kalau ada induk lagi ya dibagi lagi, sisanya berapa). *Lha nek ngukur* (ya kalau mengukur) dari induk 1 dan 2 *semisale* (misal) induk pertama 1 jam 1 liter di induk 2 ya harus sama”. (APH, 05/07/2012)

Sistem seket ini merupakan sistem pembangian air di dalam hidran umum yang terlebih dahulu dibuat kotak pembagi. Kotak pembagi (seket) inilah yang akan mengatur distribusi volume air di masyarakat.



Gambar 4.4 : Model Gravitasi Sistem Sekat (Kotak Pembagi Air)
Sumber : Dokumentasi Lembaga Paguyuban Tirta Mandiri

Gambar diatas menunjukkan *sistem seket* yang berada di hidran umum. Kotak pembagi ini bertujuan untuk membagi air dalam sistem pembangian HU agar setara debit air yang masuk ke di setiap rumah. Meskipun jarak antara hidran umum dengan rumah masyarakat sangat jauh tetapi debit air yang mengalir volumenya sama dengan tempat tinggal masyarakat yang dekat dengan hidran umum. Penggunaan sistem ini mengacu pada ketidak efektifan perencanaan model gravitasi sistem *stok kran* yang dibuat oleh WSLIC-2 yang telah dilakukan di desa Dadapan. Dengan pengalaman dan penyesuaian terhadap topografi wilayah desa

Universitas Indonesia

Dadapan, maka kebijakan pengurus bersama masyarakat merencanakan jenis sarana yang dipilih dengan menggunakan model gravitasi *Sistem Sekat*.

Pada proses berikutnya, pengurus bersama masyarakat merencanakan pembentukan kelompok kecil. Kelompok ini dibentuk untuk menjalin koordinasi dengan pengurus dan mempercepat pemberian informasi pada anggota saat pelaksanaan swadaya air bersih akan dilakukan. Kelompok ini berasal dari anggota paguyuban yang tersebar pada dua dusun di desa Dadapan. Dan setiap kelompok mengkoordinasi antara 10 sampai dengan 15 anggota. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Pembentukan kelompok itu tujuannya biar mudah koordinasi kalau sudah mulai kerja. Sebenarnya kan ada 4 kelompok berada yang Karang Sejati 3 kelompok dan 1 kelompok di Karang Rejo atau 4 kelompok jadi total tersebar di 4 RW”. (MNL, 05/07/2012)

Kelompok inilah yang akan mengkoordinasi anggotanya dan memobilisasi anggota yang ikut kerja bakti pada kegiatan swadaya air bersih di Tirta Mandiri. Disamping itu, pembentukan kelompok kecil ini membantu tugas pengurus khususnya ketua paguyuban pada perencanaan wilayah pembangunan hidran umum di desa Dadapan. Dengan harapan seluruh anggota kelompok patuh terhadap kebijakan yang telah direncanakan yang dikoordinasi ketua kelompok masing-masing. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Biar ditunjuk sebagai ketua kelompok itu intinya agar bisa mengkoordinir anggota, untuk pekerjaan semua sama-sama. Ketua kelompok di gunakan sebagai koordinator, sebagai ketua kelompok harus berwibawa dan tua biar anggotanya nurut”. (STL, 05/07/2012)

Melalui pembentukan kelompok kecil dibawah koordinasi pengurus Tirta Mandiri diharapkan pelaksanaan kegiatan swadaya air dapat terkendali dengan lancar dan tersistem sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat paguyuban. Agar anggota dapat menjalankan tugasnya maka ketua kelompok harus memiliki mempunyai *leadership* yang bagus dan juga dituang dengan nilai kharismatik sebagai tokoh masyarakat di kelompok masing-masing.

Perencanaan kegiatan swadaya air Tirta Mandiri juga dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang wilayahnya dialiri pipa air bersih. Penjalinan kerjasama ini dengan tujuan agar kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan konflik dengan pemilik wilayah memiliki sumber air dan daerahnya melewati pipa air bersih. Sehingga pada kegiatan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pengurus bersama anggota. Seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Apabila pipa kita melewati kebun teh PTPN XII, ya kita harus kerjasama sama mandor sana untuk menggali pipa, dan juga kita ambil dari sumber milik PTPN XII agar dapat diambil sumbernya ya kita harus memenuhi airnya dulu untuk nyemprot air. Kita siapkan untuk jedingan untuk ngairin air. (SLT, 05/07/2012)

Penjalinan kerjasama ini juga bertujuan untuk membangun silaturahmi pengurus dan anggota paguyuban dengan masyarakat dan instransi yang diajak bekerja sama. Dengan seperti itu, pihak yang telah diajak kersama dapat membantu untuk mengawasi jika terjadi kendala ketika terjadi kerusakan sarana air bersih. Penjalinan kerjasama juga dilakukan dengan pengusaha material yang menyediakan bahan-bahan material untuk pembangunan sarana air bersih. Hal ini seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa:

Untuk materialnya, ya harus ngutang pada toko material, kalau yang belum lunas ya harus dilunasi, untuk Tirta Mandiri 2 itu tahun 2009. Untuk pengembangan berikutnya itu Tirta Mandiri 3 dan pengembangan ini masih belum selesai”. (APH, 05/07/2012)

Perencanaan kerjasama dengan toko bangunan ini dimaksudkan untuk membantu memberi keringanan biaya material jika terjadi kekurangan dana yang berasal dari anggota. Sehingga ketika pelaksanaan bahan material yang dibutuhkan dapat diperoleh meskipun dengan mekanime angusuran atau kredit.

4.2.4 Tahap Formulasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini, pengurus mulai melakukan rencana aksi kerjadengan menyusun formulasi kerja kelembagaan dankelompok unit kerja. Formulasi rencana kerja paguyuban disini berupa rencana jadwal agenda kerja pada

kegiatan gotong royong dan swadaya air bersih di masyarakat. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa: "Pertama kita buat jadwal kerja dulu, kira-kira dengan jarak 24 KM dibutuhkan berapa hari kalau kerja bakti. (SLI, 05/07/2012). Pembuatan jadwal agenda kerja ini untuk mempermudah dalam kegiatan kerjabakti penggalian pipa dan pembangunan hidran umum. Dengan dibuatnya agenda tersebut maka kegiatan dilapangan dapat terarah dan terencana dengan baik. Hal ini mengingat kondisi wilayah yang dialiri pipa air bersih cukup jauh dengan tingginya tingkat kesulitan pada pembangunan hidran umum. Untuk pembuatan agenda rencana kerja bakti gotong royong dilakukan secara bergiliran antar kelompok. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa, "Jadi untuk kerja kita bagi 60 orang semisal di sini untuk kelompok RT berapa, besoknya RT sini. Jadi sebelum air masuk, kita sudah menggali pipa dan menyiapkan semua". (MNL, 05/07/2012).

Rencana agenda pada kerja gotong royong masyarakat juga dilakukan secara periodik dengan jadwal yang telah direncanakan oleh pengurus bersama ketua kelompok. Dengan demikian, rencana tersebut dapat menjadi tolok ukur kelancaran dan keberhasilan kegiatan yang telah dibuat. Hal senada seperti yang diungkapkan ketua kelompok bahwa: "Biasanya sih ya mbuat agenda harian, besok harus selesai memasang apa, dan berapa orang yang bagian ini, untuk bagian itu siapa saja". (MSM, 05/07/2012).

Kegiatan rencana aksi berikutnya dilakukan melalui mekanisme kredit pembiayaan dan angsuran sarana dan prasarana yang akan dibuat. Mekanisme ini meliputi rencana biaya yang akan dilakukan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan sarana air bersih. Seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa: "Kalau untuk pembiayaan ya harus lunas semua, biar nanti kerjanya mudah ya kalau ada yang utang itu sich biasa, tapi di usahakan agar lunas semua". (APH, 05/07/2012). Masyarakat yang ikut diharuskan untuk sebisa mungkin membayar lunas. Mengingat biaya yang dihimpun dari warga dibutuhkan pada saat pembelian kebutuhan sarana air bersih. Dengan kondisi masyarakat yang secara ekonomi minim, maka perencanaan biayapun dapat dilakukan dengan membagi biaya 1 paket air dengan dipikul bersama-sama oleh 3 kepala keluarga. Sehingga masyarakat yang tidak mampu bisa ikut dan memperoleh air bersih

melalui paguyuban Tirta Mandiri. Hal ini senada dengan penjelasan anggota bahwa:“Jika ada yang ngak mampu mengambil 1 paket harus di kroyok 2 atau 4 KK, jadi lebih kecil bebannya”. (MRT, 05/07/2012). Dengan mekanisme pembiayaan model diatas, dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta di Tirta Mandiri. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati keberadaan swadaya air bersih yang digagas oleh Tirta Mandiri. Formulasi rencana aksi berikutnya yaitu dengan merencanakan penentuan wilayah pembangunan sarana air dan masyarakat yang mengambil paket air.Seperti penjelasan ketua kelompok

“Wilayah yang dialiri kan di dusun Karang Sejati, RW IX, VII, IX, VIII. kalau Karang Rejo RW III. Dari pengelompokkan ketua unit seperti di wilayah Mistono atau RW VIII ini di bangun 1 HU ini dipecah lagi menjadi 6 paket atau sesuai dengan jumlah anggota, jadi masyarakat yang mengambil di RW tersebut sudah menyediakan pipa dan pembangunan HU kecil untuk dialirkan ke rumah-rumah anggota. Nanti akan mempermudah anggota untuk mengambil air”. (SLT, 05/07/2012)

Formulasi rencana aksi pada penentuan wilayah pembangunan sarana air ini berfungsi untuk mengetahui persiapan anggota pada kegiatan penyambungan sarana pipa air yang di salurkan ke rumah masyarakat. Jadi formulasi rencana ini juga cukup membantu jika terjadi permasalahan di setiap anggota. Ketika air telah berada di hidran umum, maka anggota sudah siap untuk menyambungkan pipa agar air dapat didistribusikan ke rumah masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok lainnya bahwa:“Intinya itu ya warga yang mengambil paket harus siap nyediakan pipa di masing-masing rumah dan di sambungkan dengan HU. ketika air itu masuk ke HU jadi mengalir semua ke rumah-rumah. (STL, 05/07/2012).

4.2.5 Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan ini, kegiatan yang dilakukan pengurus dan anggota paguyuban Tirta Mandiri lebih memfokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana air bersih dari wilayah sumber mata air ke desa Dadapan. Kegiatan pembangunan ini mengacu pada hasil perencanaan yang telah dibuat dan

disepakati bersama oleh pengurus dan anggota paguyuban Tirta Mandiri. Di tahap pelaksanaan ini, pembangunan sarana dan prasarana air dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan Hidran Induk dan Hidran Umum

Pada awalnya, pembangunan sarana yang dilakukan oleh pengurus Tirta Mandiri adalah membangun Hidran induk yang berlokasi di wilayah sumber perang Desa Kertowono kecamatan Gucialit. Pembangunan hidran induk ini dilakukan untuk mensuplai air dari sumber mata air ke hidran umum. Pembangunan hidran induk ini dilakukan oleh pengurus paguyuban yaitu petugas teknis beserta anggota. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa: "Untuk pembangunannya bagian teknis ya seperti pak Winoto yang tahu modelnya seperti apa, karena kami juga ikut membantu dalam pembawaan bahan materail". (NIM, 05/07/2012).

Petugas teknis berperan sangat sentral dalam pembangunan hidran induk. Karena terkait dengan pembangian *sistem seket* yang kemudian akan dibagi lagi kedalam bentuk paket air. Jika terdapat kesalahan pembangunan hidran induk, maka berdampak tidak meratanya debit air yang akan didistribusikan ke masyarakat. Sehingga untuk membangunnya harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun hidran tersebut memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hidran umum. Hal ini seperti yang diungkapkan bendahara paguyuban bahwa: "Untuk 1 hidran induk dibutuhkan waktu 5 atau 6 hari membangunnya karena hidran itu yang jadi pembaginya sebelum masuk ke hidran umum". (APH, 05/07/2012)

Di hidran induk inilah yang nanti air akan dibagi dan distribusikan ke seluruh hidran umum. Sehingga hidran induk menjadi alat penampung air pertama dari sumber sekaligus distributor air kepada hidran umum. Karena memiliki peran yang besar dalam penyediaan air bersih maka pembangunannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan pembangunan hidran umum terbagi menjadi 2 wilayah yaitu pembangunan HU di desa Kertowono dan desa Dadapan. Hidran Umum di desa Kertowono berjumlah 4 buah dan di desa Dadapan berjumlah 9 buah (lampiran 4). Pembangunan hidran umum di

wilayah desa Kertowono sebagai penghubung untuk mengalirkan air bersih dari sumber mata air menuju desa Dadapan. Pembangunan Hidran umum di desa Dadapan terbagi menjadi 2 wilayah yaitu di dusun Karang Rejo RW III dan Karang Sejati meliputi RW IX, VII, IX, VIII.



Gambar 4.5 : Proses Pembangunan Hidran Umum
Sumber : Dokumentasi Lembaga Paguyuban Tirta Mandiri

Gambar 4.5 menunjukkan aktivitas pembangunan hidran umum yang dilakukan oleh petugas teknis bersama salah satu anggota paguyuban. Anggota yang ditunjuk untuk membantu tenaga teknis merupakan anggota yang memiliki keahlian dibidang pertukangan (bangunan). Sedangkan anggota yang tidak memiliki keahlian di bidang pertukangan diberikan tugas untuk membantu membawa bahan material yang dibutuhkan pembangunan hidran umum. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Untuk pembangunan Hidran umum memang kerja bakti. Berjalan untuk membangun HU itu dilakukan selama 4 jam sambil membawa bahan material seperti semen, batu bata, kapur ke wilayah pembangunan HU di wilayah desa Tengger dan Perang”. (MNL, 05/07/2012)

Jika lokasi hidran umum jaraknya jauh dari desa Dadapan maka anggota beserta pengurus membawa bahan material tersebut ke lokasi pembangunan HU. Dan kegiatannya pun dilakukan secara bergotong royong. Apabila lokasi pembangunan HU berada di wilayah desa Dadapan maka pengurus menjalin

kerjasama dengan pemilik wilayah yang akan dilakukan pembangunan hidran umum. Bentuk kerjasama dilakukan dengan cara meminta izin untuk membangun HU di wilayah atau tanah yang ditempati masyarakat. Dan juga meminta izin penitipan bahan material jika rumah warga dekat dengan pembangunan HU.

b. Gotong Royong Penggalian Pipa Air Bersih

Setelah selesai pembangunan hidran induk dan hidran umum. Pengurus paguyuban memobilisasi anggota untuk melakukan penggalian distribusi pipa air. Kegiatan penggalian pipa air dengan sistem gotong royong ini bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran. Tahap pertama penggalian pipa dilakukan di wilayah hidran induk menuju hidran umum di desa Kertowono. Begitu juga penggalian pipa tahap kedua di wilayah desa Cempoko kabupaten Probolinggo. Penggalian pipa ini tidak hanya melibatkan pengurus dan anggota. Tetapi juga masyarakat di desa Cempoko dan desa Kertowono khususnya dusun Perang yang wilayahnya dialiri jalur pipa air bersih. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Untuk wilayah sumber mata air yang menggali juga kerjasama sama masyarakat di sekitar sumber Perang dan Probolinggo karena kita kan menjalin hubungan dengan memperbaiki dahulu pipa masyarakat yang sana, jadi mungkin mereka membantu untuk penggalian di wilayah mereka saja”. (STL, 05/07/2012)

Strategi pengurus dengan menjalin kerjasama antar pihak cukup efektif untuk mempercepat kegiatan penggalian pipa. Selain itu, jika ada kerusakan pada hidran umum dan pipa air bersih, warga yang wilayahnya dilintasi sarana air Tirta Mandiri bisa memberi tahu kepada pengurus. Kegiatan gotong royong penggalian pipa air bersih dilakukan secara bersamaan dengan perbaikan pipa milik warga di dua desa tersebut. Sehingga warga juga ikut terlibat untuk menggali pipa milik Tirta Mandiri sekaligus milik masyarakat di desa Kertowono dan Cempoko.

Sedangkan untuk penggalian pipa di wilayah desa Dadapan, seluruh anggota paguyuban ikut terlibat di kegiatan tersebut. Penggalian pipa pertama

dilakukan di dusun Karang Sejati sampai di RW IX. Di tempat ini terdapat HU induk yang akan mendistribusikan air ke dusun Karang Rejo dan di beberapa RW di Karang Sejati. Sehingga aliran pipa yang digali mengikuti letak HU yang telah dibangun sebelumnya. Dari penggalian di RW IX, pengurus dan anggota melanjutkan penggalian pipa ke dusun Karang Rejo RW III dan dusun Karang Sejati RW VII dan RW VIII. Kegiatan gotong royong ini menimbulkan antusiasme bagi anggota dan pengurus karena didorong keinginan untuk segera mengalirkan air bersih dari hidran umum melalui pipa ke setiap rumah. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat yang tidak terlibat di swadaya air ikut membantu untuk menggali pipa bersama pengurus dan anggota. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh anggota paguyuban bahwa:

“Masyarakat dalam pembangunan air bersih ya ikut ikut sendiri, yang punya paket juga ngk ngundang tetangga tapi tetangga ikut. Itulah kekompakan warga bahkan ratusan bahkan ribuan yang ikut. Untuk sistem kerja bhakti itu tidak sistem giliran tapi semua jadi satu biar cepat”. (SGR, 05/07/2012)

Kegiatan gotong royong seluruh warga desa Dadapan dalam menggali pipa air bersih menjadi modal utama kesuksesan kegiatan swadaya air Tirta Mandiri. Tanpa adanya kegiatan gotong royong dipastikan penggalian pipa membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, apabila kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan jasa kuli atau buruh, dipastikan iuran yang



Gambar 4.6 : Gotong royong penggalian pipa air bersih Tirta Mandiri
Sumber : Dokumentasi Lembaga Paguyuban Tirta Mandiri

Penggalian pipa yang dilakukan oleh masyarakat dengan gotong royong tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena masyarakat yang ikut mencapai puluhan bahkan ratusan orang. Mayoritas masyarakat yang ikut kerja bakti harus rela meninggalkan pekerjaannya. Kondisi ini dilatarbelakangi keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh akses air bersih yang mudah dijangkau. Untuk mempercepat agar air bisa masuk ke desa Dadapan, maka penggalian pipa secara terus menerus selama satu bulan hingga menjelang bulan puasa. Bahkan kegiatan penggalian pipa dilakukan malam hari supaya cepat selesai. Seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa: “Jadi kerja baktinya itu siang malam, yang kerja bakti itu sekitar 64 orang, bahkan waktu hari puasa malamnya kita tidak tarawih”. (APH, 05/07/2012).

Tingginya antusiasme masyarakat desa Dadapan dalam gotong royong swadaya air bersih mengindikasikan suatu sikap kemandirian dan kerukunan antar warga yang ikut di paguyuban Tirta Mandiri dan masyarakat umum. Dengan kerjasama yang telah dibangun oleh pengurus dan anggota bersama masyarakat, kegiatan penggalian pipa dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan agenda formulasi rencana aksi yang telah ditetapkan di paguyuban Tirta Mandiri.

c. Pembangunan Unit Hidran kelompok

Setelah melakukan proses kegiatan gotong royong penggalian pipa. Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat adalah membangun unit hidran kelompok yang akan mengalirkan air dari hidran umum ke unit hidran kelompok melalui pipa ke rumah masing-masing warga. Fungsi hidran ini sebagai tempat penampungan air yang membagi air ke rumah-rumah warga sesuai dengan sistem paket yang telah ditentukan. Pembangunan unit hidran ini dibawah koordinasi ketua kelompok. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa: “Untuk pembangunan unit hidran air yang ngaliri ke kelompok ya di buat bersama-sama tapi ketua kelompok yang mengkomandoi anggota kalau di kelompoknya mau di bangun HU”. (SLT, 05/07/2012). Ketua

kelompok memiliki wewenang untuk mengusulkan kepada pengurus paguyuban jika ada anggota yang menginginkan pembangunan unit hidran. Pembangunan ini didasari oleh permasalahan letak wilayah rumah anggota yang berjauhan dengan anggota lainnya. Hal ini bertujuan agar air yang terdistribusi ke rumah yang jaraknya jauh dapat lancar dan merata. Sehingga masyarakat yang tergabung di swadaya air bersih ini dapat mudah mengakses air bersih dirumahnya. Mekanisme pembangunan unit hidran kelompok terbagi menjadi 2 bentuk. Setiap satu kelompok, jumlah anggotanya harus genap karena mempermudah pembangunan unit hidran. Hal ini seperti penjelasan anggota bahwa: “Kalau semisal 1 kelompok ada 6 paket ya kita bangun untuk unit Hu-nya sekitar 2 HU di lokasi kita, tujuannya agar air yang masuk ke dari HU umum ke HU unit bisa merata dan mengurangi pipa”. (NIM, 05/07/2012).

Dengan pembangunan unit hidran kelompok dapat meminimalisir besarnya anggaran untuk pembelian pipa serta mempermudah pemantauan jika terjadi kerusakan. Apabila debit air yang mengalir ke salah satu rumah warga volumenya kecil, sedangkan di rumah yang lainnya besar, dapat dipastikan kerusakan terjadi di unit hidran kelompok. Karena pembagian distribusi air ke masing-masing rumah masyarakat terjadi di unit hidran kelompok.

d. Pemasangan Pipa Distribusi ke Rumah Masyarakat

Setelah melalui ketiga proses diatas, tahap terakhir kegiatan swadaya air Tirta Mandiri yaitu pengurus mulai melakukan pemasangan pipa distribusi air ke masing-masing rumah masyarakat. Kegiatan pemasangan pipa air ke rumah warga ini dilakukan secara bergotong royong antara pengurus paguyuban, ketua kelompok dan anggota. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Pemasangan pipanya kalau di HU ya itu tugas bagian teknis karena kita minim pengetahuan. Kalau dari HU ke rumah, itu sudah tanggung jawab kelompok dan anggota. Semisale, kalau air itu nanti tiba di HU umum jam 6 malam. Jam 4 atau 5 sore kita sudah memasang pipa dan mengalinya untuk di alirkan ke rumah-rumah”. (MSM, 05/07/2012)

Pemasangan pipa ini dilakukan melalui perencanaan yang matang oleh petugas teknis terkait model pemasangan pipa dari HU umum ke unit hidran kelompok sampai menuju ke rumah masyarakat. Petugas teknis berperan untuk memfasilitasi anggota tentang metode pemasangan pipa di setiap kelompok. Jika terjadi kesalahan pemasangan sehingga menyebabkan air tidak merata di masyarakat, maka petugas teknis membantu anggota untuk membenahi kerusakan dan kesalahan di lokasi. Pada pelaksanaannya dilapangan pemasangan pipa ini disesuaikan dengan jadwal perencanaan paguyuban seperti pemasangan pipa harus dilakukan 2 atau 3 jam sebelum air masuk ke hidran umum dan unit hidran. Agar kegiatan tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Anggota kelompok bersama masyarakat (tetangga yang rumahnya dekat anggota) ikut membantu agar pelaksanaannya cepat selesai.

Seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:

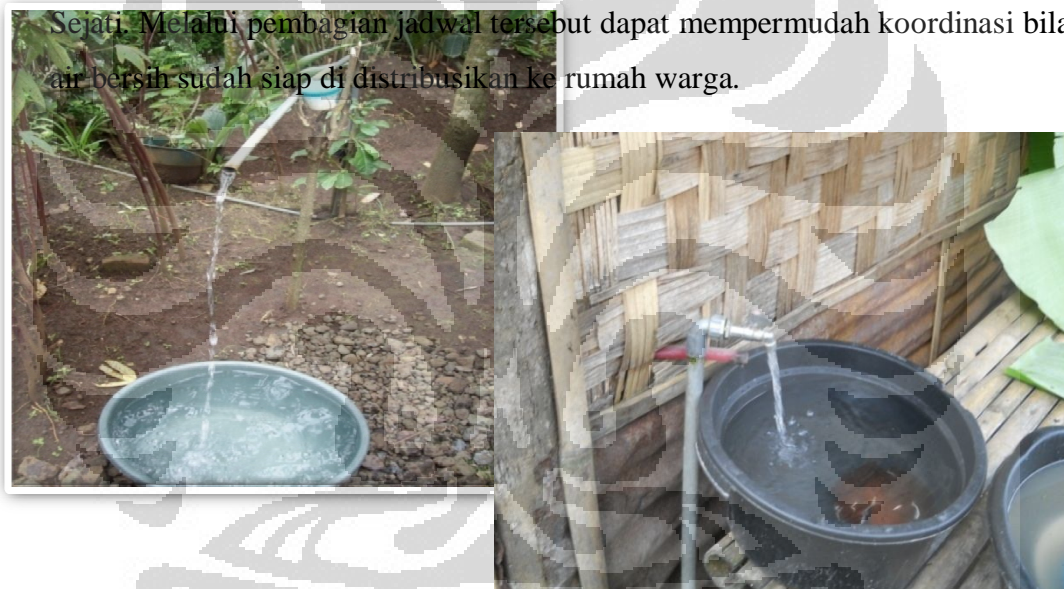
“Masalah penggalian pipa kerumah anggotaniku(itu) kerjasama *kaleh* (dengan)*tetangga* (tetangga). *Lha nek di buruhaken malah tambah kathah biayae* (kalau menggunakan kuli akan menambah biaya yang. *Nek mboten kerjasama kaleh tetangga malah milliaran.* (kalau tidak kerjaama dengan tetangga habisnya bisa milyaran”.(RHT, 05/07/2012).



Melalui bentuk kerjasama dengan tetangga, kegiatan pemasangan pipa dapat dilakukan secara tepat. Sehingga biaya yang dikeluarkan anggota dapat dikurangi.

Gambar 4.7 : Pemasangan pipa air bersih ke rumah anggota paguyuban
Sumber : Dokumentasi Lembaga Paguyuban Tirta Mandiri

Gambar diatas menunjukkan antusiasme warga dalam pemasangan pipa air bersih menuju rumah masyarakat. Pada kegiatan pemasangan pipa ini dibutuhkan waktu 1 minggu untuk sampai ke masing-masing rumah anggota. Kegiatan pemasangan pipa pun harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan paguyuban Tirta Mandiri. Pada pelaksanaannya pemasangan pipa dilakukan di wilayah dusun Karang Rejo RW III. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut terdapat satu kelompok yang lokasinya jauh dari kelompok lain yang bertempat tinggal di dusun Karang Sejati. Setelah pelaksanaannya selesai, jadwal pemasangan pipa di seluruh kelompok yang berada di Karang Sejati. Melalui pembagian jadwal tersebut dapat mempermudah koordinasi bila air bersih sudah siap di distribusikan ke rumah warga.



Gambar 4.8 : Air Bersih yang telah mengalir ke rumah masyarakat
Sumber : Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.8 menunjukkan air bersih sudah mengalir ke rumah masing-masing warga setelah dilakukan pemasangan pipa. Sistem air bersih di paguyuban Tirta Mandiri ini menggunakan sistem sambungan rumah atau sering di sebut sistem SR. Di sistem ini air langsung mengalir ke rumah warga melalui pipa yang telah dipasang sebelumnya. Sehingga masyarakat tidak lagi mengambil air di Hidran Umum seperti layaknya program WSLIC-2 dan program air bersih lainnya yang pernah dilakukan di desa Dadapan. Dengan menggunakan sistem SR, masyarakat lebih mudah mendapatkan air bersih untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Untuk air yang dikeluarkan dari hidran umum ke rumah warga memiliki debit air yang sama meskipun jarak antar rumah cukup berjauhan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa rumah yang jaraknya dekat dengan HU dengan rumah yang jaraknya jauh, debit air yang dikeluarkan memiliki volume yang sama yaitu untuk mengisi satu timba ukuran 5 Kg dibutuhkan waktu 2 menit antara rumah yang dekat dengan HU dengan rumah warga yang jaraknya jauh dengan HU.

4.2.6 Tahap Evaluasi

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam menyelesaikan kegiatan di lapangan. Dengan adanya evaluasi masyarakat akan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kegiatan berikutnya untuk meningkatkan kinerja. Evaluasi juga penting untuk melihat sejauh mana pencapaian kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pada tahap evaluasi ini akan menguraikan pencapaian kegiatan swadaya yang telah dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri

Pendekatan model evaluasi yang dikembangkan oleh paguyuban Tirta Mandiri bersifat sederhana dengan melibatkan seluruh anggota paguyuban sebanyak-banyaknya melalui musyawarah anggota dan diskusi setelah pelaksanaan swadaya. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan secara langsung dari anggota. Hal ini seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa:

“Kalau mengevaluasi kegiatan swadaya ini ya mungkin cuma pencapaian yang telah dilakukan selama kegiatan itu. Seperti selama pelaksanaan di lapangan seberapa efektif kerja dari pengurus untuk membangun jumlah fasilitas sarana air dengan target yang telah disepakati bersama waktu musyawarah. Untuk airnya apa sudah bisa lancar atau tidak. Untuk kelompok apa sudah menjalankan kerjanya dengan baik seperti kalau ada kerusakan apa sudah dibenahi”. (APH, 05/07/2012)

Kegiatan evaluasi yang dilakukan di oleh pengurus paguyuban meliputi tiga tahap. Tahap pertama, dengan mengevaluasi sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun. Sarana dan prasarana air bersih sangat penting dalam menjebatani air yang akan di distribusikan ke masyarakat Dadapan. Tanpa adanya prasarana

tersebut dipastikan swadaya air bersih yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri tidak akan berhasil. Untuk itu keberadaan pembangunan sarana dan prasarana menjadi kunci awal melihat keefektifan dari kegiatan evaluasi swadaya air air bersih. Menurut anggota paguyuban bahwa pembangunan sarana air bersih yang dilakukan oleh pengurus selama pelaksanaan cukup efektif karena sesuai dengan target yang telah dimusyawarahkan bersama. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Untuk pembangunan sarana air seperti HU, Pipa distribusi air dan sarana lain yang dibutuhkan itu *wes sesuai kalaeh* (sudah sesuai dengan) perencanaan *seng diputusaken* (yang diputusakan). Semisale pembangunan HU *niku nggeh sesuai perencanaan kaleh jadwale* (itu ya sesuai perencanaan sama jadwalnya). Cuma *seng dereng cocok niku nggeh* (yang belum sesuai itu ya) kualitas pipa, *masalahe pun kwalitase mboten* (masalahnya kan kualitasnya tidak) kualitas pipa air bersih, *dados* (jadi) sering meletus. Tapi untuk pipanapun *sampun cekap kok*”(untuk pipanya itu sudah cukup). (MNL, 05/07/2012)

Dari penjelasan ketua kelompok diatas menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana air bersih oleh pengurus sudah sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan bersama anggota. Sehingga pembangunan yang dilakukan selama pelaksanaan swadaya sudah efektif. Sedangkan untuk sarana pipa sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mengalirkan air bersih. Namun permasalahannya terletak pada kualitas pipa yang tidak standar air bersih sehingga sering terjadi kerusakan. Meskipun demikian perbaikan pipa terus dilakukan seiring dengan terjadinya kerusakan sarana tersebut di masyarakat.

Untuk tahap kedua, evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat kelancaran debit air yang mengalir di masing-masing rumah warga. Kelancaran air sangat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat yang telah menggunakan jasa Tirta Mandiri melalui swadaya air. Berdasarkan penjelasan masyarakat pengguna air bersih paguyuban Tirta Mandiri, bahwa masyarakat cukup puas dengan besarnya debit air yang masuk ke rumah warga. Hal ini seperti penuturan anggota paguyuban bahwa:

“Kalau dilihat dari sisi air. Airnya itu ya lancar jarang ada masalah, kadang airnya itu besar banget kadang sampai bak air dirumah saya itu meluber kemana-mana. Kadang tetangga yang belum punya air saya suruh ambil takutnya banjirin rumah saya”. (RHT, 05/07/2012)

Tingkat kelancaran dan besarnya debit air cukup mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam swadaya air bersih. Dengan volume air bersih yang lancar dan debitnya besar maka masyarakat tidak lagi dihadapi dengan lamanya antrian menunggu air. Bahkan dengan debit yang besar anggota bisa mengajak warga yang belum memiliki sarana air bersih untuk mengambil air dirumahnya.

Sedangkan tahap ketiga, evaluasi dilakukan dengan melihat efektivitas kinerja dari pengurus paguyuban dan ketua kelompok. Menilai kinerja dibidang keorganisasian ini sangat penting karena terkait dengan tugas pokok dan fungsi seorang pengurus. Tanpa adanya penilaian terhadap kinerja pengurus dipastikan pengelolaan paguyuban menjadi tidak profesional dan produktif dalam mengambil kebijakan di paguyuban. Untuk pengelolaan paguyuban kinerja pengurus Tirta Mandiri cukup efektif jika dilihat dari kinerja yang telah diciptakan selama mengelola air bersih di desa Dadapan. Hal ini seperti penjalasan anggota paguyuban bahwa:

“Untuk pengelolaan air oleh pengurus itu menurut saya sudah efektif buktinya kalau ada kerusakan langsung diperbaiki. Kalau ada informasi mengenai masalah di paguyuban kita dikasih tahu dan diajak musyawarah bareng bareng. Kalau ada kerusakan berat kita gotong royong bareng-bareng memperbaiki. Kalau di kelompok ya sama kalau ada kerusakan di HU atau pipa pecah, pasti ketua kelompok memberi tahu dan langsung kerja. Menurut saya selama ini ya cukup efektif mengelolanya”. (AWI, 05/07/2012)

Menilai keefektifan pengurus dalam mengelola paguyuban merupakan bagian dari modernisasi organisasi. Hal ini terkait dengan pengembangan kebijakan strategis organisasi untuk menentukan arah kebijakan kedepan. Tanpa adanya evaluasi terhadap pengurus dapat berdampak pada performa organisasi dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat yang tergabung didalamnya.

Kegiatan evaluasi kegiatan swadaya air paguyuban Tirta Mandiri ini, pada pelaksanaan awal dilakukan setelah kegiatan dilapangan selesai. Tepatnya satu minggu setelah kegiatan swadaya air bersih. Namun seiring dengan hasil keputusan rapat anggota bulanan maka evaluasi tahap berikutnya dilakukan pada satu bulan sekali. Karena mengingat permasalahan yang terjadi tidak sebesar pada pelaksanaan awal. Sehingga pengurus paguyuban memutuskan untuk evaluasi kinerja dilakukan pada saat pertemuan anggota setiap bulan. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Evaluasinya itu dulu ya 1 minggu setelah pelaksanaan kayak apa air sudah bisa mengalir atau belum ditiap-tiap rumah. Kira-kira airnya sudah bisa mencukupi anggota itu saja. Intinya itu apakah ada kesesuai pencapaian sesuai dengan target yang jadi keputusan bersama. Tapi kalau sekarang evaluasinya 1 bulan sekali biasanya membahas tentang apa ada kerusakan sarana dalam 1 bulan ini dan penyumbatan saluran pipa air di tiap HU”. (STL, 05/07/2012).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan swadaya air bersih ini telah berjalan efektif meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan dilapangan. Meskipun demikian kendala tersebut dapat direspon secara cepat oleh pengurus paguyuban sebagai pengelola sarana air bersih. Kebijakan pengurus dalam menentukan arah pada permasalahan di paguyuban telah memunculkan kesadaran anggota untuk menyelesaikan kendala pada pengelolaan air bersih secara bersama-sama. Dengan demikian ada tanggung jawab seluruh anggota beserta pengurus untuk merawat dan mengembangkan sarana yang telah dibentuk secara bersama-sama.

4.2.7 Tahap Terminasi

Terminasi pada dasarnya adalah penghentian kegiatan yang menyangkut pelaksanaan program yang telah dilakukan di masyarakat. Penghentian kegiatan tersebut yang terkait dengan berakhirnya jadwalprogram dan pendanaan yang telah selesai pada program yang di buat. Namun pada dasarnya terminasi adalah penghentian kegiatan formal antara *community worker* dengan masyarakat penerima program. Terkait dengan penyediaan air bersih di masyarakat Dadapan yang difasilitasi oleh paguyuban Tirta Mandiri, maka tahap terminasi dilakukan

pada saat berakhirnya kegiatan pembangunan fasilitas air bersih. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ketua kelompok bahwa:

“Kegiatan ngelola air ya masih berjalan tetapi kalau untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air itu dihentikan 3 hari setelah pelaksanaan karena dari musyawarah anggota kalau air sudah masuk ke masing-masing ke rumah penduduk”. (SLT, 05/07/2012).

Berdasarkan keterangan diatas, kegiatan terminasi yang dilakukan oleh pengurus paguyuban Tirta Mandiri hanya sebatas penghentian pelaksanaan pembangunan fasilitas air bersih. Keputusan untuk menghentikan kegiatan di lapangan dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat terkait ada tidaknya kendala pendistribusian air bersih dan lengkapnya fasilitas pendukung yang berfungsi dengan baik. Penghentian kegiatan lapangan terlebih dahulu dikomunikasikan melalui anggota dengan media musyawarah. Dari hasil musyawarah terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka pengurus mulai menghentikan secara bertahap dengan rentan waktu 3 hari setelah kegiatan. Untuk mempermudah kontrol terkait fasilitas air bersih, maka dari hasil musyawarah antara pengurus dan anggota memutuskan untuk tetap dikontrol fasilitas yang telah dibangun kedalam mekanisme di paguyuban Tirta Mandiri agar dapat diketahui oleh seluruh anggota. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:

“Sebenarnya dalam pelaksanaannya pengurus tidak langsung menghentikan kegiatan tetapi menghentikan kegiatan di lapangan karena pembangunan sarana sudah tidak ada lagi kendala. Nah dari itu kita sudah selesai kegiatannya dan dialihkan lewat kegiatan di paguyuban”. (RHT,05/07/2012)

4.3 Manfaat Menggunakan Paguyuban Tirta Mandiri

Keberadaan paguyuban Tirta Mandiri menjadi bagi kehidupan masyarakat desa Dadapan yang telah berjasa memfasilitasi penyediaan dan pengelolaan air dengan swadaya murni. Keberadaannya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terkait sulitnya mendapatkan akses air bersih yang mudah terjangkau dan bisa dinikmati oleh lapisan kehidupan di masyarakat desa Dadapan. Terkait dengan keberadaan paguyuban Tirta Mandiri tersebut,

masyarakat mulai merasakan manfaatnya hingga saat ini. Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya Tirta Mandiri yang telah memfasilitasi dalam penyediaan dan pengelola air bersih adalah sebagai berikut.

4.3.1 Manfaat di bidang Pendidikan

Keberadaan paguyuban Tirta Mandiri yang telah berjasa dalam memfasilitasi swadaya air bersih dan memberikan pengaruh besar bagi masyarakat Dadapan. Dalam hal ini, masyarakat yang terlibat sebagai anggota paguyuban dan masyarakat umum yang telah memberikan kontribusi bagi kelancaran swadaya air bersih. Paguyuban Tirta Mandiri telah memberikan pengetahuan bagi masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran bahwa dengan adanya air dapat berdampak bagi peningkatan pendidikan warga. Berbagai macam bentuk informasi yang berada di paguyuban telah menjadi sarana meningkatkan pengetahuan terkait mekanisme pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kebijakan program paguyuban. Hal ini seperti penjelasan ketua kelompok bahwa:

“Kalau di Tirta Mandiri kan kita banyak dapat informasi yaa intinya paguyuban ini mendidik warga lah bagaimana cara rapat, mengelolanya jadi pengetahuan kita bisa bertambah banyak. Terus lagi dengan adanya air, ibu-ibu berkumpul untuk membuat TK dan dananya dari sisa iuran bulanan air bersih ini. Dulu sebelum ada air bersih tiap pagi sampai siang biasanya ibu-ibu ya mencari air jadi ngak sampai mikir pendidikan anak-anaknya”. (MSM, 05/07/2012)

Pengetahuan yang didapat masyarakat khususnya anggota terkait dengan cara mengelola kelembagaan modern yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan atas hasil musyawarah antar anggota seperti tata cara rapat, admisnistrasi paguyuban dan membuat perencanaan program kedepan. Namun pengetahuan yang telah terbentuk di paguyuban tersebut tidak meninggalkan nilai budaya lokal yang terdapat di desa Dadapan. Bahkan keberadaan paguyuban telah memunculkan kesadaran bagi warga khususnya para ibu rumah tangga untuk menyisahkan uang hasil iuran untuk membuat program pendidikan bagi anak usia balita (TK). Kondisi ini menggugah pemikiran warga Dadapan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap air bersih maka kebutuhan pendidikan

pada anak perlu mendapatkan perhatian sebagai konsekuensi logis terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar warga. Selain itu, keberadaannya paguyuban menjadi bagi yang penting untuk membangkitkan kembali program pemerintah yang belum efektif di bidang pendidikan lainnya dan juga meningkatkan kesadaran untuk merawat sarana yang telah dibangun paguyuban. Seperti penjelasan bendahara paguyuban bahwa:

“Adanya kesadaran untuk merawat sarana dan prasarana yang sudah dibangun. Jadi rasa pemilikannya itu tinggi sekali terhadap sarana milik Tirta Mandiri. Ada juga program PAUD ya kita aktifkan lagi lewat kader dan pengurus Tirta Mandiri, jadi program yang dari pemerintah itu berhenti kita bangun lagi lewat kelompok-kelompok di paguyuban”. (APH, 05/07/2012)

Paguyuban Tirta Mandiri juga mampu mengadaptasi terhadap program-program pemerintah seperti PAUD yang belum efektif di masyarakat. Proses adaptasi yang dilakukan dengan merevitalisasi sistem organisasi PAUD melalui pemberian peran bagi pengurus dan kader paguyuban untuk mengembangkan sinkronisasi program paguyuban seperti memasukkan kurikulum kesehatan terkait cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah aktivitas di kelas. Selain itu, untuk memperkuat keberadaan paguyuban di lembaga pendidikan tersebut, salah satu pengurus diberikan tugas untuk menjadi *mentor* atau guru di PAUD yang bertugas mendidik anak-anak di tempat tersebut. Dengan demikian nilai-nilai yang berada di paguyuban dapat diinstitutionalisasi ke lembaga pendidikan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

4.3.2 Manfaat di bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan pilar terpenting bagi masyarakat umum tidak terkecuali masyarakat desa Dadapan. Untuk mewujudkan kondisi yang sehat perlu dibangunnya sarana dan prasarana penunjangnya. Terkait dengan paguyuban Tirta Mandiri, keberadaannya cukup besar dalam memberikan kontribusi di bidang kesehatan khususnya pelayanan terhadap akses sarana air bersih dan sanitasi. Bahkan perannya pun menjadi penguat bagi program pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:

“Kalau ada Tirta Mandiri kan pemerintah bisa mendompleng programnya lewat program Tirta Mandiri. Jadi program pemerintah dapat diterima di masyarakat. Contohnya program STBM, Puskesmas Gucialit kerjasama sama pengurus untuk melaksanakan program itu jadi hasilnya ya disini sudah masyarakat bebas penyakit seperti diare, gudiken, muntaber akibat BAB sembarangan karena sudah ada jamban sehat Tirta Mandiri dan mudahnya mendapatkan air untuk cuci tangan setelah BAB”. (AWI, 05/07/2012)

Upaya pemerintah untuk melaksanakan program kesehatan di desa Dadapan tidak langsung dijalankan begitu saja. Namun pemerintah khususnya pihak Puskesmas, membangun kerja sama dengan pengurus Tirta Mandiri untuk mendukung pelaksanaannya dilapangan. Pihak Puskesmas Gucialit memantau kegiatan program sampai sejauhmana pelaksanaannya. Sedangkan jajaran pengurus dan kader membuat perencanaan paguyuban yang nantinya dipadukan dengan program Puskesmas. Setelah diterapkan di masyarakat desa Dadapan, pengurus beserta pegawai Puskesmas ikut terjun untuk mensosialisasikan tujuan dari program yang akan dilakukan di desa Dadapan. Seperti pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Puskesmas Gucialit di desa Dadapan. Pengurus Tirta Mandiri membuat program Jamban Sehat bagi masyarakat yang membutuhkan jamban. Promosi program STBM oleh Puskesmas tidak akan bisa dilaksanakan di masyarakat tanpa ada dukungan dari lembaga lokal yang ada di desa Dadapan sebagai katalisator program kesehatan. Sehingga keberadaanya sangat penting sebagai *entry point* diterimanya sebuah program pada komunitas desa Dadapan. Bidang air bersih, paguyuban Tirta Mandiri yang telah berjasa dalam penyediaan air bersih ke rumah-rumah warga, membuat masyarakat mulai merubah perilaku sehat dengan adanya air bersih. Seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:“Sekarang kita tambah sehat, karena bisa mandi teratur. Kita bisa mandi di rumah sekarang di banding di sungai, biasanya mandi 1 kali sehari sekarang bisa 3 kali sehari”. (SGR, 05/07/2012). Melalui penyediaan air bersih serta promosi kesehatan, masyarakat mulai tergugah pikiranya dengan berperilaku sehat. Tercapaianya kondisi yang kesehatan di masyarakat, dapat dilakukan

melalui kerjasama antara sektor sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan terkait terwujudnya kondisi yang sehat.

4.3.3 Manfaat di bidang Ekonomi

Selain keberadaan paguyuban Tirta Mandiri berkontribusi bagi upaya terciptanya kesehatan masyarakat desa Dadapan, manfaat secara ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan paguyuban tersebut. Kegiatan swadaya air yang membutuhkan biaya yang besar dapat ditekan melalui keberadaan paguyuban. Sehingga kebijakan pengurus pada kegiatan swadaya bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan ketua kelompok bahwa:

“Kalau swadaya air melalui Tirta Mandiri kan enak, jadi bisa di gotong bareng-bareng dananya. Kalau ada warga yang tidak mampu bisa diajak kerja bakti, trus airnya kita bisa berbagai. Coba kalau ngak ada paguyuban kan orang ngambil air seenaknya sendiri jadi kayak individualis. Nah keberadaan swadaya lewat Tirta Mandiri ini dulu sebelum ada air, kalau disini tebang tebu sudah habis, biasanya kan masyarakat kerja ingin kerja di Surabaya dan Pasuruan, waktu itu orang-orang disini ngak berani disana karena takut keluarganya kekurangan air. Mau tidak mau, kerja tidak kerja masyarakat harus di desa. tetapi sekarang masyarakat bebas keluar desa untuk mencari pekerjaan”. (SLT, 05/07/2012)

Sistem pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme gotong royong bersama memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat memperoleh air bersih yang layak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, manfaatnya dengan keberadaan air yang langsung bisa digunakan untuk kegiatan usaha dibidang peternakan dan perikanan di desa Dadapan. Sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan lebih dari usaha tersebut. Kondisi ini juga didukung dengan penggunaan sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan dari kegiatan penyediaan air bersih. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh anggota paguyuban bahwa:

“Dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada di desa Dadapan kan kegiatan swadaya air bersih lewat Tirta Mandiri kan lebih efisien. Jadi

biayanya ngak terlalu banyak. Sangking mudahnya untuk ikut paguyuban saya ambil air lagi di pengembangan kedua untuk usaha peternakan ayam petelor juga”. (WIT,05/07/2012)

Penjelasan senada mengenai manfaat dari keberadaan air bersih yang digagas oleh paguyuban Tirta Mandiri seperti yang diungkapkan oleh bendahara paguyuban bahwa, “Ya untuk kolam ikan biar ada pendapatan”. (APH, 05/07/2012). Dengan demikian manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa Dadapan dengan munculnya paguyuban Tirta Mandiri sangat membantu dan berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi desa Dadapan.

4.3.4 Manfaat di bidang Sosial Budaya

Di bidang sosial budaya, paguyuban Tirta Mandiri telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat Dadapan. Keberadaannya berkontribusi mendukung budaya dan adat istiadat di desa Dadapan. Bahkan peranannya menjadi sentral ketika ada acara adat. Dan juga masyarakat yang kurang mampu membutuhkan keberadaan air bersih guna memenuhi kebutuhan acara tersebut. Sehingga seluruh anggota dan pengurus saling membantu masyarakat yang membutuhkan, untuk mengalirkan air bersih demi memenuhi kebutuhan acara adat. Seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:

“Rasa kebersamaanya itu sangat tinggi bahkan kalau ada acara adat pasti Tirta Mandiri dilibatkan didalamnya contohnya Ada acara tahlilan dan slametan kan mudah ambil airnya dan tidak bingung jadi bisa untuk masak dan minum tamu. Tirta Mandiri sendiri tidak memungut biaya kalau ada orang meninggal bagi yang ngak punya air. ya itu tugas paguyuban untuk memberikan air bagi warga yang meninggal” (MRT,05/07/2012)

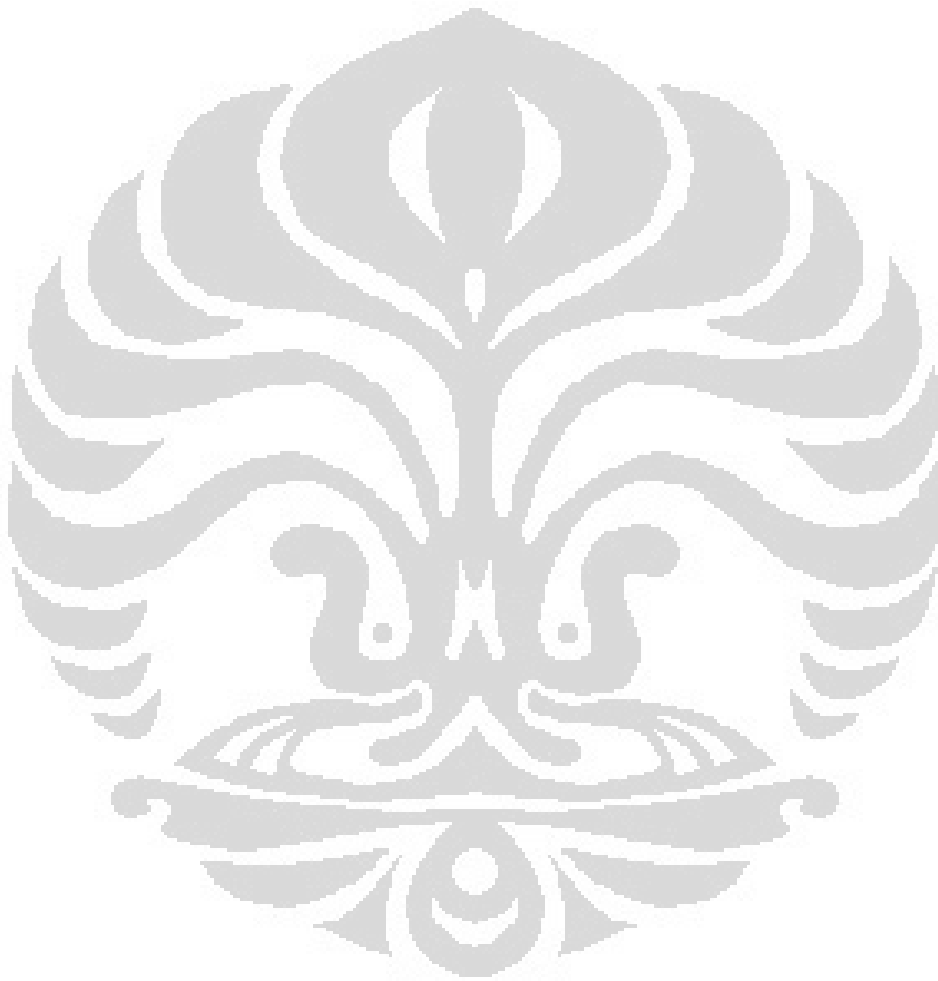
Di lain sisi, paguyuban Tirta Mandiri menjadi salah satu wadah pendorong pelestarian nilai-nilai lokal yang ada di desa Dadapan. Meskipun nilai lokal tersebut telah menjadi budaya masyarakat, tetapi untuk merekatkan nilai tersebut pada kegiatan sosial memerlukan dorongan agar masyarakat masih tetap menggunakannya sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Hal ini seperti penjelasan anggota paguyuban bahwa:

“Semakin pekanya masyarakat pada nilai-nilai lokal di desa, karena keberadaan Tirta Mandiri membuat warga memahami norma dan aturan yang ada di desa contohnya kalau ada orang bangun rumah kan butuh air jadi orang yang *Soyo* itu tidak angkut-angkut air lagi wes, airnya sudah ada. Jadi banyak warga yang ikut *Soyo*. Kalau dulu itu agak susah karena orang mikir sendiri-sendiri. Kalau semisal dia mau *Soyo*, mikir apa dirumah ada air, jadi males mau bantu untuk *Soyo* itu, lah wong mikir cuma gimana ambil airnya”. (RHT, 05/07/2012)

Nilai lokal yang berupa kebersamaan dan gotong royong serta norma di masyarakat masih tetap dijalankan khususnya kegiatan membangun rumah. Kegiatan *Soyo* atau gotong royong membangun rumah warga menjadi nilai lokal yang masih bertahan, bahkan kegiatannya selalu di dukung oleh paguyuban Tirta Mandiri dalam menyediakan air untuk kegiatan pembangunan rumah tersebut. Sehingga warga yang ikut di kegiatan *Soyo* menjadi semakin atusias karena tidak memikirkan air yang akan digunakan membangun rumah dan juga warga tidak khawatir terhadap kondisi air bersih di rumah masing-masing. Dengan demikian, dukungan Tirta Mandiri berkontribusi besar untuk merekatkan solidaritas antar warga dan juga memicu untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai aturan sosial di masyarakat.

Manfaat menggunakan kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih di desa Dadapan memberikan ruang yang lebih luas pada upaya keberlanjutan kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan untuk mengupayakan agar terjadi keberlanjutan dan kebijakan baru yang dilakukan oleh pengurus berupa kegiatan peternakan kambing dan domba yang dikelola oleh Tirta Mandiri untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Keberlanjutan ini sebagai upaya meningkatkan cakupan bidang kerja selain pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Dipilihannya pengembangan peternakan oleh pengurus melihat dari besarnya potensi sumber daya lokal berupa melimpahnya rumput untuk pakan ternak, ketersediaan air bersih dan budaya masyarakat nilai ternak sebagai simbol status sosial menjadi pendorong dikembangkannya potensi lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan. Selain di bidang peternakan, anggota paguyuban juga

melakukan pembibitan pohon Sengon atau Albasia untuk dijual ke sekitar wilayah Kabupaten Lumajang sebagai komoditas unggulan yang difasilitasi paguyuban Tirta Mandiri sebagai media promosi penjualan di masyarakat. Kebijakan pengurus dalam upaya meningkatkan keberlanjutan melalui peningkatan perekonomian anggota pada kegiatan peternakan dan budidaya pohon yang bernilai ekonomis menjadi rencana kebijakan di kepengurusan periode berikutnya.



BAB 5

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab lima ini merupakan bab yang membahas hasil dari penelitian yang menjelaskan dan menganalisa penelitian terhadap dua data yang telah digambarkan di Bab 3 dan Bab 4. Proses analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tertera di Bab 1 dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan di Bab 2. Melalui pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran yang terarah dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

5.1 Mekanisme Pengelolaan Air Bersih Paguyuban Tirta Mandiri

5.1.1 Pilar Regulatif

Aspek regulatif dalam kelembagaan menfokuskan pada pembatasan atau larangan melalui pembuatan aturankelembagaan terkait perilaku manusia yang menjalani aktivitas di organisasi tersebut. Menurut Scoot bahwa secara khusus gabungan dari pilar regulatif harus dihormati dalam proses pembuatan aturan, tata aturan, monitoring dan kegiatan sanksi (Bab 2, h. 47). Aturan mekanisme pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri diawali dari pembuatanstruktur kepengurusan. Terbentuknya struktur pengurus mempermudah pembagian tugas dan peran dalam menjalankan kebijakan organisasi sesuai dengan tujuan dari misi dan visi organisasi.

Dari konsep Scoot yang telah dijelaskan terkait proses pembuatan aturan pada kelembagaan dalam membentuk struktur memiliki kesamaan dengan kondisi dilapangan. Struktur kepengurusan Tirta Mandiri terdiri atas ketua, sekretaris dan tenaga teknis. Namun dalam membentuk struktur tersebut ada mekanisme yang dilakukan agar dapat memenuhi aturan yang telah ditetapkan yaitu mekanisme pemilihan kepengurusan melalui jalan musyawarah pada anggota (Bab 4, h. 106). Selain itu juga pembuatan aturan juga berdampak pada sistem keanggotaan di Tirta Mandiri. Masyarakat yang tergabung dengan sistem keanggotaan di lembaga harus memenuhi tata aturan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan aturan Tirta Mandiri. Sehingga sistem keanggotaan di Tirta Mandiri menggunakan sistem anggota terbuka bagi masyarakat namun untuk menjadi anggota formal

harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berada di peraturan. Selain itu juga, banyak warga yang menjadi anggota non formal (*follower*) di Tirta Mandiri atas kerjasamanya dalam kegiatan penyediaan air bersih di desa Dadapan (Bab 4, h. 109).

Pembuatan aturan pada pelaksanaan pemilihan pengurus melalui rapat anggota memunculkan tata aturan baru dalam memberikan peran dan tanggung jawab pada pengurus yang telah terpilih. Berkaitan dengan peran dan tanggung jawab tersebut, Commons (Bab 2, h. 34) menjelaskan bahwa "*institution rule were necessary to define the limits within which individuals and firms could pursue their objectives*".(aturan kelembagaan yang diperlukan untuk menentukan batas-batas dimana individu dan perusahaan dapat mencapai tujuan mereka). Pemberian tata aturan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab pada pengurus di Tirta Mandiri bertujuan untuk membedakan peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing pengurus di Tirta Mandiri seperti ketua mengontrol perkembangan lembaga, sekretaris berperan di bidang administrasi dan petugas teknis bertanggung jawab terhadap pengendalian fasilitas air bersih lembaga. (Bab 4, h. 107-108). Dengan demikian penjelasan Commons dengan kondisi di paguyuban Tirta Mandiri memiliki kesamaan yaitu adanya tata aturan di Tirta Mandiri dapat menentukan batas dari setiap individu yang menjadi pengurus dan anggota untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai tujuan yang diharapkan dari Tirta Mandiri yaitu kepengurusan yang dapat mengelola air bersih sesuai dengan peran dan bertanggung jawab sehingga dalam pengelolaan air bersih dapat dinikmati oleh anggota secara khusus dan masyarakat secara umum sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan lokal yang menjadi bagian dari sistem sosial di masyarakat Dadapan.

Mekanisme keuangan di sebuah kelembagaan menjadi bagian yang sangat sentral dalam menjalankan roda organisasi guna mendukung aktivitas yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Scoot menjelaskan bahwa pembuatan peraturan dan tata aturan kelembagaan membutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan (Bab 2, h. 48). Pembuatan tata aturan lembaga guna menjaga kesinambungan pada perawatan fasilitas air bersih yang telah dibangun dilakukan

melalui mekanisme keuangan. Tata aturan keuangan di Tirta Mandiri pelaksanaannya bertumpu pada iuran anggota sebesar Rp. 10.000 per orang (Bab 4, h. 110). Kegiatan iuran tersebut menjadi monitorong terhadap aktivitas anggota di lembaga dalam menjaga keberlangsungan fasilitas yang dibangun dengan menggunakan kontribusi keuangan yang mereka berikan. Selain itu, pengurus juga dapat mengelola keuangan lembaga agar bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas air bersih sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan konsep Scoot dengan temuan yang ada dilapangan memiliki kesamaan yaitu pembuatan tata aturan keuangan di kelembagaan dapat menjadi kontrol terkait manajemen tata kelola organisasi dalam menjaga aset yang menjadi pendukung keberadaan lembaga sampai sekarang dan juga pada pelaksanaannya menjadi kontrol dari tanggung jawab yang diemban oleh pengurus dalam menjalankan tugas dalam mengelola air bersih di Tirta Mandiri.

Namun ada keunikan dalam mekanisme keuangan yang ada di paguyuban Tirta Mandiri yaitu menggabungkan kegiatan pembayaran iuran bulanan dengan kegiatan arisan dan spritual. Menurut Durkheim bahwa kelembagaan merupakan hasil dari proses interaksi dalam sistem simbol, dimana sistem kepercayaan dan gambaran bersama atau *collective representation* serta pengetahuan memilikimoral dan spiritual sehingga sistem tersebut merupakan hasil karakterdariinteraksi manusiayangdialami olehindividu sebagai tujuan hidup dan hasilnya kumpulan dari sistem tersebut mengalami kristalisasi danmembentuk kelembagaan (Bab 2, h. 35). Kegiatan spiritual dalam mekanisme pembayaran iuran keuangan dan sistem arisan untuk menentukan anggota yang mendapat giliran kegiatan pertemuan bulanan di Tirta Mandiri menjadi komponen yang membantu untuk mengefektifkan kegiatan pembayaran iuran bulanan. Hal ini dikarenakan kedua kegiatan tersebut memunculkan rasa antusiasme anggota untuk ikut hadir dalam rapat karena harus membayar arisan yang berfungsi sebagai tabungan anggota. Sehingga berdampak pada kelancaran pembayaran iuran bulananair bersih pada kegiatan rapat anggota yang dilakukan pada satu bulan sekali (Bab 4, h. 111).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembayaran iuran bulanan sebagai bentuk mekanisme keuangan di Tirta Mandiri dilakukan dengan

memadukan sistem simbol di masyarakat. Sistem simbol tersebut berupa kegiatan arisan sebagai bentuk penyemangat anggota untuk hadir di pertemuan bulanan tersebut simbol ikatan moral sesama anggota dalam menjaga solidaritas. Selain itu, simbol kepercayaan pada kegiatan spiritual di pertemuan bulanan sebagai ciri khas karakter dari individu dalam menjaga nilai keharmonisan. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak hanya sebatas pembayaran iuran bulanan dalam bentuk uang, namun lebih jauh lagi dari kebersamaan tersebut dapat mengontrol kegiatan di lembaga.

Dari kegiatan tersebut dapat dievaluasi kedalam bentuk sanksi di lembaga apabila ada anggota dan pengurus yang menyimpangan dan tidak sesuai dengan sistem peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Scoot pembuatan aturan dengan melibatkan kemampuan untuk menetapkan peraturan, sanksi dan hukuman, dalam upaya untuk mempengaruhi perilaku ke depan. (Bab 2, h. 48). Pemberian sanksi atau hukuman bagi anggota dan pengurus yang melanggar merupakan bentuk tata aturan yang telah terdapat di Tirta Mandiri. Sanksi yang terdapat di paguyuban Tirta Mandiri memberikan efek jera bagi anggota dan pengurus yang melanggar aturan tata tertib, semisal apabila tidak hadir dalam kegiatan rutin maka sanksi yang didapat berupa tidak diperbolehkannya membayar iuran bulanan air dan arisan. Jika ketidakhadiran anggota secara berturut-turut maka akan diberhentikan dari keanggotaan Tirta Mandiri karena keberadaan rapat bulanan anggota merupakan kegiatan wajib anggota. Selain itu, sanksi juga berdampak pada anggota jika telah diberhentikan karena akan diasingkan di masyarakat sebagai simbol individu yang tidak taat terhadap tata aturan di kelembagaan sebagai bagian dari sistem sosial di desa Dadapan (Bab 4, h. 112).

Berdasarkan konsep Scoot terkait dengan mekanisme sanksi yang terdapat di paguyuban Tirta Mandiri dapat disimpulkan bahwa, pembuatan peraturan pada kegiatan kelembagaan melalui bentuk sanksi dapat mempengaruhi perilaku anggota ke depan untuk memberikan efek jera pada tindakan individu yang melanggar aturan. Upaya untuk mempengaruhi perilaku dalam bentuk sanksi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu peraturan formal berupa dikeluarkannya individu sebagai anggota Tirta Mandiri dan aturan non formal berbantuan

rendahnya apresiasi individu di masyarakat. Hukuman ini yang menjadi batasan dan pendorong bagi individu untuk bertindak dalam menjalankan mekanisme pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri. Sehingga kegiatan pengelolaan air bersih di Tirta Mandiri dapat berjalan dengan lancar akibat dampak peraturan yang telah dibuat memiliki hukuman bagi anggota yang melanggar. Dengan demikian kegiatan pengelolaan air bersih dapat dihargai oleh seluruh anggota dan pengurus dalam mewujudkan kesinambungan kegiatan di internal lembaga.

5.1.2 Pilar Normatif

Aspek normatif di kelembagaan memfokuskan pada kewajiban atau mandat kelembagaan dalam menjalankan kegiatan di masyarakat sesuai dengan norma yang ada dan norma tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kegiatan di kelembagaan. Menurut Scoot (2008, 55) bahwa pilar normatif menitikberatkan pada aturan normatif yang memberikan ketentuan atau petunjuk, mengevaluasi, kewajiban kedalam dimensi kehidupan sosial (Bab 2, h. 48). Norma bisa dijadikan petunjuk di kelembagaan dalam mengevaluasi kinerja pengurus dalam menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan hal tersebut elemen normatif di paguyuban Tirta Mandiri berupa pedoman evaluasi lembaga terkait kebijakan yang akan dibuat berdasarkan bentuk musyawarah. Sebagai bentuk kewajiban didalam kepengurusan, kegiatan evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu musyawarah anggota dan musyawarah khusus (Bab 2, h. 113). Kedua forum ini merupakan bentuk keputusan tertinggi sebagai petunjuk bagi pengurus dan anggota pada kegiatan pengelolaan air bersih.

Dari konsep yang dikemukakan oleh Scoot dengan di Tirta Mandiri dapat disimpulkan bahwa pilar normatif yang berupa ketentuan evaluasi terhadap lembaga dilakukan dalam bentuk musyawarah sebagai petunjuk dalam membuat kebijakan. Namun musyawarah yang dibuat harus mengikuti pedoman di Tirta Mandiri dengan tujuan untuk menstabilkan kepercayaan sosial dan norma-norma yang baik diinternalisasikan dan diberlakukan pada anggota. Adanya musyawarah di Tirta Mandiri dapat dijadikan pedoman evaluasi untuk memberikan masukan dan kritikan kepada kinerja pengurus dan juga sanksi yang bersumber dari norma. Sehingga tujuan yang diharapkan dapat memunculkan

kepercayaan sosial antara anggota. Pada waktu yang sama norma bersifat membatasi anggota dan pengurus agar tidak keluar dari pedoman yang telah ditetapkan sekaligus mendorong pengurus untuk menstabilkan kepercayaan pada anggota terkait peran dan tanggung jawab yang diembannya.

Selain itu pilar normatif juga berdampak memunculkan tanggung jawab sosial pada pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri. Tanggung jawab sosial disini merupakan bentuk kepekaan lembaga guna mewujudkan kebersamaan dalam pengelolaan air bersih melalui partisipasi masyarakat dengan pembangunan fasilitas sarana umum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang membutuhkan sarana air bersih (Bab 4, h. 114). Menurut DiMaggio and Powel bahwa perangkat normatif bertujuan untuk *“examining the interplay of the instrumental and the normative in social action”* (Bab 2, h. 35) (memeriksa interaksi dari instrumental dan normatif dalam tindak sosial).

Keberadaan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pengelolaan air bersih di Tirta Mandiri melalui proses interaksi pada kegiatannya dilapangan dibutuhkan penghargaan pada kerjasama yang telah dilakukan bersama. Selain itu juga mekanisme tanggung jawab sosial di internal lembaga juga dilakukan melalui mekanisme pembiayaan kelompok untuk memperingan anggota yang secara ekonomi tidak mampu. Hal ini mengingat kegiatan pengelolaan air tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi saja tetapi juga kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pilar normatif dapat mendorong lembaga untuk memberikan kewajibanya di masyarakat atas keberadaan usaha yang dilakukan untuk guna menentukan cara pengelolaan air bersih yang adil dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sehingga norma yang terdapat di masyarakat diinternalisasi elemen dari sistem kepribadian bahwa air merupakan simbol ikatan sosial, orientasi nilai pada pemberian kewajiban sosial lembaga pada masyarakat dan objek orientasi yang ada di luar individu untuk mengatur kehidupan di masyarakat agar dalam pengelolaan air memiliki orientasi dimasa yang akan datang.

5.1.3 Pilar Kultural-Kognitif

Aspek kultural-kognitif pada kelembagaan menekankan pada pada konsepsibersama terkait sifat dari realitas sosial yang ada di masyarakat melalui kerangka makna yang dibuat bersama kedalam bentuk lembaga. Realitas sosial yang muncul di masyarakat dalam bentuk budaya menjadi bagian dari realitas sosial sebagai mediasi pengetahuan individu yang tergabung di lembaga dari dunia eksternal yang terdapat di kehidupan masyarakat. Sehingga memunculkan respon dari individu dalam menginternalisasi kumpulan simbol di masyarakat sebagai dari gambaran dunia sosial di kehidupan masyarakat. Menurut Scoot bahwa fokus kultural-kognitif di kelembagaan adalah pada bagaimana kehidupan sosial menggunakan kerangka makna dan bagaimana makna-makna diproduksi dan direproduksi (Bab 2, h. 50).

Dalam menjalankan pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri, aktor di masyarakat dan lembaga menjalin kerjasama dengan menggunakan nilai lokal untuk memberikan pemahaman anggota terkait tujuan yang dicapai lembaga dengan menggunakan nilai lokal sebagai penguat di masyarakat dan memunculkan respon pada anggota yang terlibat di internal lembaga. Pengetahuan terkait nilai lokal berupa kebersamaan dan kekompakan diantara anggota dan pengurus akan memberikan penguatan identitas di Tirta Mandiri. Identitas tersebut memunculkan pemahaman bahwa air bersih merupakan bagian dari ikatan sosial pada pengelolaannya. Sehingga kebijakan yang dibuat pengurus terkait pengelolaan air bersih lebih mengarah pada nilai sebuah simbol air dalam bentuk solidaritas sosial sehingga pendayagunaan sumber air tidak memfokuskan pada komersialisasi air bersih di masyarakat. Namun dalam pengelolaan air bersih di Tirta Mandiri lebih memfokuskan pada pengelolaan secara bersama dengan asas kekeluargaan (Bab 4, h. 115). Pengetahuan terkait nilai lokal dalam bentuk air bersih menjadi ciri khas pengelolaan yang bersumber pada gambaran dunia sosial dengan menggunakan kearifan lokal yang berada di desa Dadapan (Bab 3, h. 93).

Dari penjelasan diatas jika dilihat dari konsep Scoot dapat disimpulkan bahwa realitas sosial yang didalamnya berisi nilai lokal di masyarakat diproduksi

kedalam bentuk kelembagaan sehingga menjadi pedoman dalam pengelolaan air bersih. Pedoman yang dihasilkan melalui penginternalisasian nilai di lembaga dapat membentuk mekanisme kebijakan untuk memberikan pelayanan bagi anggota dalam memperoleh air bersih serta membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat secara informal tetapi pengetahuan individu menjadi bagian dari paguyuban Tirta Mandiri menjadi kuat. Pemaknaan simbol air yang diproduksi dari nilai lokal membentuk ikatan sosial menjadi ciri khas dari mekanisme yang ada di paguyuban Tirta Mandiri.

Dilain sisi budaya di masyarakat berupa adat-istiadat menjadi pendorong dan penguat kegiatan pengelolaan air bersih di Tirta Mandiri. Menurut Scoot elemen kelembagaan kultural-kognitif melekat pada bentuk kultural seperti pemeliharaan bentuk budaya agar menjadi pedoman masyarakat, penguatan ritual dan penjelasan simbol dalam realitas kehidupan yang biasanya digunakan sebagai pemikiran yang terdapat dalam kebudayaan di masyarakat (Bab 2, h. 50).

Budaya gotong royong dalam pengelolaan sekaligus penyediaan air bersih di Tirta Mandiri menjadi simbol yang berada di kelembagaan. Pada kegiatannya, budaya menjadi pendorong lembaga untuk mempercepat kebijakan program yang akan dibuat. Selain itu juga budaya menjadi media untuk menangani terjadinya konflik antar pengurus dengan anggota. Sehingga budaya dapat dijadikan aturan dan pedoman di paguyuban sebagai bentuk cermin dalam bertindak dan berperilaku seluruh anggota (Bab 4, h. 117).

Dari penjelasan Scoot terkait pelekatan kultural di lembaga memiliki kesamaan dengan mekanisme pengelolaan air bersih di Tirta Mandiri, bahwa pengelolaan air bersih di kelembagaan harus dapat memelihara budaya sebagai pedoman bagi pengurus dan anggota sehingga penguatan simbol air bersih menjadi solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan pada pengelolaannya. Budaya sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lembaga yang didalamnya membentuk kehidupan di masyarakat sebagai media yang direproduksi dari kebiasaan adat-istiadat yang terdapat di desa Dadapan.

5.2 Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih

Terbentuknya kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih telah menjadi media yang berkontribusi bagi kegiatan swadaya air bersih. Melalui mekanisme keorganisasian yang tersusun rapi maka perencanaan dalam penyediaan air bersih dapat dilakukan sesuai kaidah yang telah disepakati pengurus dan anggota. Terkait dengan kegiatan penyediaan air bersih melalui swadaya masyarakat yang dikelola oleh Tirta Mandiri, maka butuh adanya proses pengembangan masyarakat pada penyediaan air bersih sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Proses pengembangan masyarakat di desa Dadapan bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya pola pikir atau cara pandang untuk saling bekerjasama pada kegiatan pengembangan air bersih. Sehingga interaksi antar masyarakat (anggota) dan aktor (pengurus) dapat terjalin guna meningkatkan pengalaman bersama, memaksimalkan potensi lokal agar tercapai keberdayaan melalui proses pengalaman masyarakat.

Kegiatan pengembangan masyarakat pada penyediaan air bersih di desa Dadapan yang dilakukan oleh aktor sebagai *community worker* dengan cara mendalami permasalahan kondisi air bersih, merumuskan bentuk kegiatan dalam menanggulangi masalah tersebut dan mengatur langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih. Tujuan kegiatan ini berusaha untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat sehingga memunculkan kesadaran kritis terkait usaha dalam swadaya air bersih. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ife bahwa bahwa prinsip dasar pengembangan masyarakat membutuhkan keterlibatan secara aktif dalam kegiatan sehingga memunculkan kesadaran kritis melalui proses konsientisasi (Bab 2, h. 59). Oleh karena itu, kegiatan pengembangan masyarakat di desa Dadapan dalam penyediaan air bersih dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh anggota paguyuban dan masyarakat Dadapan sehingga memunculkan kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan air bersih yang selama ini menjadi masalah utama di desa Dadapan.

Untuk mencapai peningkatan taraf hidup dengan tersedianya air bersih melalui proses pengembangan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan kesadaran dengan membuka peluang-peluang anggota dan masyarakat untuk bertindak, kerjasama dan konsensus antara anggota dengan pengurus paguyuban.

Dengan demikian anggota dan pengurus yang melibatkan diri pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat saling bekerja sama pada kegiatan pembangunan sarana prasarana air bersih, mengembangkan struktur kelembagaan sehingga individu-individu menjadi lebih tergantung satu sama lain untuk mencapai segala sesuatu, dan aktor di kelembagaan mencari cara dengan memberi pengaruh kepada setiap orang dan menghargai orang lain agar terjadi kesadaran terkait pengelolaan air bersih.

Sebagai upaya dalam penyediaan air bersih dengan swadaya murni dari masyarakat, maka aktor paguyuban sebagai *community worker* mulai menjalin kerjasama dengan anggota dan masyarakat guna melakukan proses pengembangan masyarakat agar dapat menemukan solusi terkait rendahnya akses air bersih di desa Dadapan. Untuk itu upaya kegiatan penyediaan air bersih melalui swadaya masyarakat sebagai bentuk pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri dilakukan melalui lima tahapan dari setiap tahapan akan dianalisa berdasarkan proses pengembangan masyarakat.

5.2.1 Tahap Persiapan

Menurut Wibowo bahwa keberadaan sistem sosial di masyarakat menjadi sumber dalam proses pengembangan masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat untuk memecahkan masalah cukup efektif jika dimobilisasi dalam suatu bentuk kelembagaan (Bab 2, h. 58). Pada tahap persiapan ini, aktor atau pengurus paguyuban Tirta Mandiri sebagai *community worker* melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait akan dilakukannya kegiatan swadaya dalam penyediaan air bersih. *Community worker* yang menjadi bagian sistem sosial di desa Dadapan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangi setiap rumah warga untuk menjelaskan mekanisme mengalirkan sumber mata air bersih ke desa Dadapan. (Bab 4, h. 118) Sehingga terjadi partisipasi dari setiap individu untuk terlibat langsung dan memunculkan kesadaran bahwa permasalahan air bersih yang selama ini dialami masyarakat Dadapan adalah masalah bersama dan dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan difasilitasi oleh kelembagaan lokal. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ife bahwa strategi dalam pengembangan masyarakat harus peningkatan kesadaran kritis agar individu dan kelompok

mampu mengambil tindakan sendiri dalam termasuk didalamnya proses pemecahan masalah untuk kemudian membentuk partisipasi yang aktif dan masyarakat sebagai subyek bukan obyek (Bab 2, h. 62).

5.2.2 Tahap Pengkajian

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat pada kelembagaan lokal sebagai media untuk menyelesaikan masalah air bersih, Adi menjelaskan bahwa proses pengkajian atau *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah seperti kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran (Bab 2, h. 64). Pada tahap pengkajian ini, ketua kelompok sebagai wakil dari anggota paguyuban melakukan identifikasi permasalahan terkait air bersih dengan melihat kelayakan sumber mata air yang akan didistribusikan dan jumlah sarana yang dibutuhkan untuk pendistribusian air bersih. Pengkajian tersebut juga melibatkan seluruh anggota secara langsung untuk mengidentifikasi terkait pengkajian pada sumber mata air dan sarana yang dibutuhkan (Bab 4, h. 121).

Sebagai bentuk penguatan terhadap hasil pengkajian ini, *community worker* menguatkan konsensus pada sistem kekerabat. Sistem ini dapat digunakan sebagai sumber daya yang terdapat di paguyuban untuk menjalin komitmen dengan anggota sehingga memunculkan gerakan yang besar pada kegiatan swadaya penyediaan air bersih (Bab 4, h. 122). Konsensus dari hasil musyawarah di tahap pengkajian ini, butuh sebuah simbol penguat sebagai bentuk gerakan agar dapat memicu anggota untuk berkomitmen terhadap hasil-hasil keputusan yang telah dibuat. Sehingga aktor yang sekaligus sebagai *community worker* menjalin komitmen di tingkat unit sistem sosial terkecil lebih dahulu, yang nantinya dari sistem tersebut akan menjalin konsensus dengan sistem sosial yang luas. Dari pendekatan tersebut menimbulkan partisipasi yang besar di tingkat masyarakat sehingga yang terlibat dalam pengkajian ini juga menyertakan masyarakat di luar keanggotaan untuk membantu mengidentifikasi pada sumber mata air dan sarana yang digunakan. Hal ini seperti yang dijelaskan Wibowo bahwa dasar sebuah kelembagaan lokal dibentuk karena adanya konsensus masyarakat bersama aktor yang berada di kelembagaan (Bab 2, h. 84). Tahap pengkajian ini ini dapat dilakukan melalui pendekatan konsesus untuk merekatkan anggota dan memicu besarnya partisipasi di tingkat masyarakat. Selain itu, pendekatan ini menjadi

media pembelajaran kepada anggota untuk aktif berdiskusi melalui penyampaian pendapat sehingga data dari hasil pengkajian sesuai dengan kondisi yang dirasakan anggota dan masyarakat serta pengurus Tirta Mandiri. Melalui pengkajian terhadap kondisi masalah air bersih maka dapat menentukan besarnya rencana biaya yang akan digunakan pada pembangunan sarana yang digunakan untuk mendistribusikan ke desa Dadapan.

5.2.3 Tahap Perencanaan Kegiatan

Setelah melalui tahapan pengkajian (*assessment*) yang dilakukan di paguyuban Tirta Mandiri, maka tahap berikutnya adalah tahap perencanaan kegiatan. Menurut Adi bahwa tahapan ini merupakan tahapan dimana *community worker* secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang hadapi dan bagaimana cara mengatasinya (Bab 2, h. 65).

Disini keterlibatan aktif anggota untuk mencari solusi terhadap permasalahan penyediaan air bersih dilakukan dengan merumuskan rencana alternatif kegiatan yang telah disepakati bersama. Perencanaan alternatif yang dilakukan oleh anggota dengan *community worker* telah menghasilkan alternatif kegiatan antara lain yaitu penentuan peta wilayah pembangunan sarana air bersih dan menjalin kerjasama dengan pihak luar yang wilayahnya dialiri pipa air bersih Tirta Mandiri. (Bab 4, h. 124).

Dengan demikian solusi alternatif dari perencanaan kegiatan pada penyediaan air bersih sangat dibutuhkan untuk memunculkan partisipasi aktif dalam menganalisa permasalahan terkait kondisi rendahnya air bersih dan mencari solusi pemecahan masalah agar air bersih dapat didistribusikan ke masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan. Sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan dan untuk menyelesaikannya harus dapat di selesaikan secara sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa penjelasan Adi mengenai tahapan perencanaan kegiatan seperti yang dijelaskan diatas memiliki kesamaan dengan tahapan perencanaan di paguyuban Tirta Mandiri, yang intinya memberikan keleluasaan bagi masyarakat yakni anggota paguyuban untuk melatih kemampuan dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah melalui pembuatan sebuah rencana alternatif kegiatan sehingga anggota ikut serta terlibat pada kegiatan tersebut dengan mengacu pada keputusan yang telah ditetapkan bersama.

5.2.4 Tahap Formulasi Rencana Aksi

Menurut Adi bahwa formulasi rencana aksi bertujuan untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada (Bab 2, h. 65). Pada tahapan ini, pengurus Tirta Mandiri dan anggota paguyuban merumuskan bentuk rencana kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan air bersih di desa Dadapan. Rumusan tersebut berasal dari diskusi anggota yang telah dilakukan pada tahapan alternatif kegiatan. Keputusan yang telah diambil oleh seluruh anggota Tirta Mandiri akan dituangkan ke dalam rencana aksi paguyuban. Sehingga tujuan yang akan dibuat dapat terarah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan bersama. (Bab 4, h. 129). Dengan keikutsertaan anggota dalam perencanaan ini kegiatan swadaya air bersih dapat berjalan dengan efektif sehingga tujuan yang dibuat sesuai dengan kebijakan yang telah direncanakan oleh paguyuban. Oleh karena itu penentuan rencana kerja harus dapat menggali aspirasi dan gagasan anggota untuk menentukan langkah selanjutnya dan memprioritaskan rencana apa saja yang sesuai untuk memecahkan masalah yang terjadi dilapangan.

Konsep yang dijelaskan oleh Adi mengenai formulasi rencana aksi diatas sesuai dengan rencana aksi di paguyuban Tirta Mandiri. Formulasi rencana aksi dapat dilakukan jika ada partisipasi dari masyarakat untuk menentukan aksi dari program yang dibuat guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Masalah rendahnya akses air bersih di desa Dadapan dapat diselesaikan jika pemformulasian rencana kerja seperti kegiatan gotong royong dalam pembangunan sarana air bersih dan pembiayaan pembangunan sarana tersebut. Dengan seperti itu, anggota bersama pengurus membuat sebuah perencanaan kegiatan, dan kemudian menyepakati kegiatan yang telah ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dibuat, sehingga memunculkan tindakan untuk membuat langkah-langkah lebih detail pada pelaksanaannya dilapangan.

5.2.5 Tahap Pelaksanaan

Menurut Adi, tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat karena sesuatu yang

sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga (Bab 2, h. 65).

Penyediaan air bersih dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang langsung berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya media yang mengelola air bersih dengan melalui kelembagaan lokal yang berada di masyarakat. Berdasarkan konsep dasar dari pengembangan masyarakat, kegiatan penyediaan air bersih merupakan suatu proses yang didasarkan atas prakarsa masyarakat itu sendiri dengan menggunakan media kelembagaan untuk memperbaiki kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi serta dapat mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Kegiatan penyediaan air bersih yang dikembangkan oleh masyarakat dengan berkolaborasi melalui kelembagaan lokal, diharapkan dapat mendorong kemandirian sehingga memunculkan berkelanjutan dalam pengelolaannya. Kegiatan pengembangan masyarakat pada penyediaan sarana air bersih bukan hanya meliputi penguatan individu, tetapi juga pranata-pranata yang ada di kelembagaan lokal. Menanamkan tradisi adat-istiadat dan nilai budaya masyarakat, seperti kerjasama, gotong royong, saling membantu, keterbukaan, sikap bertanggung jawab, adalah kunci pokok dalam pengelolaan air bersih melalui kelembagaan lokal yang dilakukan pada masyarakat desa Dadapan.

Menurut Sanim (Bab 2, h. 79) bahwa implementasi penyediaan air bersih melalui kelembagaan lokal yaitu paguyuban Tirta Mandiri pada hakikatnya adalah usaha yang dilakukan sengaja oleh masyarakat desa Dadapan melalui kerjasama dengan kelembagaan lokal sebagai pengelola air bersih dalam membuat kebijakan dan strategi pengembangan air bersih yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan implementasi, proses yang dilakukan dengan menggunakan teknik untuk mengembangkan air guna membantu masyarakat dalam pelaksanaan dilapangan. Teknik pelaksanaan pada penyediaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri antara lain melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembangunan Hidran Induk dan Hidran Umum

Pertama pengurus paguyuban bersama anggota melakukan pembangunan Hidran Induk yang berada di sumber mata air dan Hidran Umum di masyarakat. Pembangunan ini menjadi kunci awal pembagian air yang akan di distribusikan ke seluruh desa Dadapan. Sehingga keadilan dan pemerataan debit air yang didapat masyarakat berada di Hidran Induk sumber mata air. Pembangunan hidran ini yang memunculkan teknologi pembagian air bersih yang menggunakan pendekatan *Sistem Gravitasi Model Sekat* (lihat lampiran 3). Menurut Kamaludin teknologi tepat guna dapat dirumuskan menjadi dua hal. Pertama, bagaimana teknologi dikembangkan dan dikendalikan untuk menjangkau kesejahteraan hidup manusia. Kedua, bagaimana teknologi itu digunakan dalam penggalian dan pengembangan kekayaan lama yang membawa manfaat bagi manusia secara terus menerus dengan mengamankan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang (Bab 2, h. 72).

Terkait dengan penjelasan diatas, teknologi pembagian air melalui model Sekat ini, merupakan teknologi baru di bidang penyediaan air bersih yang berkontribusi meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaa air bersih di masyarakat. Pada dasarnya sistem gravitasi merupakan teknologi lama yang digunakan pada penyediaan air bersih. Namun seiring tidak efektifnya sistem tersebut karena pembagian air yang tidak merata di tiap rumah warga, maka pengurus berupa memunculkan inovasi baru dengan menggunakan pendekatan model Sekat. Hal ini karena model Sekat dapat mengefektifkan penggunaan air bersih dengan membagi air secara merata dan air yang telah selesai digunakan tidak akan meluber akibat ditutupnya kran di masing-masing rumah karena akan mengalir ke rumah warga lainnya. Melalui sistem Seket tersebut air dapat lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya sehingga penggunaanya dapat melestarikan lingkungan disekitar hulu sumber mata air yang dapat dinikmati oleh generasi berikutnya di desa Dadapan.

2. Gotong Royong Penggalian Pipa Air Bersih

Menurut Ife bahwa pengembangan masyarakat membutuhkan partisipasi yang aktif dari setiap individu untuk saling bekerja dan pembentukan cara berfikir

yang menghargai saling interaksi di diantara masyarakat, menghargai kualitas pengalaman kolektif, dan memaksimalkan potensi mereka dan mencapai kemanusiaan mereka secara utuh melalui pengalaman proses masyarakat. (Bab 2, h. 61).

Partisipasi masyarakat pada kegiatan gotong royong sangat besar dan memicu masyarakat lain yang tidak tergabung di paguyuban untuk ikut membantu menggali pipa (Bab 4, h. 134). Interaksi antar individu yang berada di dalam sistem kelembagaan lokal dengan individu di dalam sistem sosial desa Dadapan memunculkan pengalaman kolektif untuk membentuk kekuatan dengan memaksimalkan potensi dari setiap sistem dari kedua belah pihak dalam mempercepat penyelesaian air bersih melalui penggalian pipa. Hal ini disadari bahwa air bersih juga menjadi pengikat atau simbol dari masyarakat sebagai bentuk ikatan sosial antar mereka. Sehingga kedua kelompok yang berada di sistem sosial yang berbeda (anggota paguyuban dan buka anggota paguyuban) berupaya untuk menyamakan persepsi atas simbol air sehingga mengkonstruksi pengetahuan kedalam budaya gotong royong. Konstruksi itu tersebut memunculkan modal sosial dalam masyarakat yang menjadi perekat antar kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya.

Menurut Adi bahwa modal sosial adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat (Bab 2, h.73).

Terkait pendapat diatas, norma dan aturan menjadi pedoman di masyarakat dalam berperilaku dan bertindak yang berkontribusi pada kegiatan gotong royong di desa Dadapan. Norma saling tolong menolong pada kelompok, dan aturan paguyuban pada pembuatan jadwal kegiatan penggalian pipa menjadi faktor pendorong cepatnya kegiatan penyediaan air bersih. Sehingga kelompok yang terbentuk untuk mengoordinasi kegiatan mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien pada kegiatan tersebut. Sedangkan kepercayaan (*trust*) antar masyarakat Dadapan merupakan bentuk manifestasi dari norma sosial melalui hubungan sosial dalam masyarakat. Dari hubungan sosial tersebut memunculkan

bentuk kepedulian sosial yang tinggi antar masyarakat Dadapan untuk membantu penggalan pipa.

Munculnya solidaritas sosial yang kuat antara masyarakat desa Dadapan akan membentuk suatu jaringan sosial diluar desa Dadapan yang lebih luas. Dengan demikian akan memunculkan kerjasama yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak terkait swadaya air bersih. Karena masyarakat yang terlibat pada kegiatan penyediaan air bersih mudah mendapatkan air dengan keberadaan kegiatan Tirta Mandiri (Bab 4, h. 136).

3. Pembangunan Unit Hidran Kelompok

Menurut Rubin bahwa pendekatan pengembangan masyarakat lebih berdaya jika diorganisasikan atau dilembagakan melalui kegiatan kolektif yang dapat mengontrol pengambilan keputusan, proyek, program, dan kebijakan (Bab 2, h. 59).

Kegiatan pembangunan Unit Hidran Kelompok dilakukan berdasarkan atas keputusan ketua kelompok yang berkoordinasi dengan pengurus paguyuban Tirta Mandiri. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan hidran yang diinginkan oleh masing-masing kelompok. Artinya kelompok diberikan kebebasan untuk membangun sarana tersebut karena berfungsi sebagai tempat penampungan air yang membagi air ke rumah-rumah warga sesuai dengan sistem paket yang telah ditentukan. Namun usulan untuk membangun hidran tersebut berdasarkan hasil musyawarah dari tiap anggota kelompok sehingga pengambilan keputusan bukan atas prakarsa dari ketua kelompok (Bab 4, h. 136). Melalui kegiatan pembangunan hidran kelompok yang dibangun secara kolektif di masing-masing kelompok dapat mengontrol kebijakan pembangunan sarana air bersih yang dilakukan oleh pengurus dan juga mempermudah monitoring jika terjadi kerusakan fasilitas air bersih.

4. Pemasangan Pipa Distribusi ke Rumah Masyarakat

Menurut Adi bahwa dalam pelaksanaan perencanaan partisipatoris, pengenalan terhadap modal sosial biasanya akan mempermudah agen perubahan untuk melakukan program pengembangan masyarakat. Disamping itu, agen perubah (fasilitator ataupun *community worker*) harus pula dapat mengadaptasi

modal sosial yang ada, sehingga agen perubahan dapat diterima oleh warga masyarakat dimana mereka akan melakukan perubahan (Bab 2, h. 76).

Pada pelaksanaan proses pemasangan pipa distribusi air, kegiatannya tidak jauh berbeda dengan penggalian pipa yaitu dilakukan dengan sistem gotong royong. Penggunaan aset komunitas berupa modal sosial ini cukup efektif untuk mempercepat kegiatan dilapangan dan menekan biaya kegiatan dari pemasangan pipa dari Hidran Unit Hidran Kelompok ke masing-masing rumah warga (Bab 4, h. 139). Kegiatan perencanaan yang telah dibuat oleh pengurus bersama anggota pada pelaksanaannya dilapangan anggota diberikan kebebasan menentukan wilayah yang akan dipasang pipa distribusi sesuai dengan kondisi wilayah di tiap masing-masing kelompok. Dengan demikian *community worker* hanya memfasilitasi masyarakat dalam proses kegiatan dipangan. Keberadaan agen perubahan dapat mempermudah kerja masyarakat untuk mempercepat kegiatan di setiap masing-masing wilayah sehingga perubahan dapat dilakukan secara cepat sesuai prosedur yang telah disepakati bersama.

5.2.6 Tahap Evaluasi

Menurut Adi bahwa evaluasi sendiri dilakukan pada input, proses (pemantauan atau *monitoring*) dan juga pada hasil. Pada tahap evaluasi, proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaliknya dilakukan dengan melibatkan warga karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri (Bab 2, h. 66).

Pendekatan model evaluasi yang dilakukan pada kegiatan penyediaan air bersih oleh paguyuban Tirta Mandiri bersifat sederhana dengan melibatkan seluruh anggota paguyuban sebanyak-banyaknya melalui musyawarah anggota dan diskusi setelah pelaksanaan swadaya. Adapun kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk melihat efektif atau tidaknya kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat dari tiga aspek:

1. Mengevaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Dari kegiatan penyediaan air bersih yang telah dilakukan oleh pengurus dan anggota paguyuban Tirta Mandiri dapat dilihat bahwa pembangunan sarana dan prasarana sudah cukup efektif karena telah memenuhi target jumlah yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah pengurus dan anggota paguyuban Tirta Mandiri (Bab 4, h. 141). Efektifnya pembangunan fasilitas tersebut dipengaruhi oleh faktor pengendorong yaitu semangat gotong royong dalam membangun sarana dan adanya kerjasama dengan pihak luar untuk membantu kegiatan dilapangan. Namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut yaitu tidak standartnya pipa yang digunakan dalam mengalirkan air bersih akibatnya pipa sering meletus karena tekanan air yang besar dan tidak bisa ditampung oleh pipa.

2. Mengevaluasi Tingkat Kelancaran Debit Air

Kelancaran debit air bersih yang terdistribusi ke masing-masing rumah berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dari kegiatan penyediaan air bersih yang telah difasilitasi oleh paguyuban Tirta Mandiri menunjukkan adanya kelancaran debit air bersih di setiap rumah warga, sehingga masyarakat yang telah ikut serta pada kegiatan swadaya air bersih dapat menikmati air secara langsung. Tingkat kelancaran dan besarnya debit air cukup mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam swadaya air bersih sebab berpengaruh terhadap besarnya jumlah antrian warga yang mengambil air (Bab 4, h. 141). Apabila air di masing-masing rumah lancar maka masyarakat tidak akan kesulitan mengakses air bersih bahkan warga yang belum memiliki akses air bisa memperoleh layanan tersebut. Efektifitas kegiatan ini dipengaruhi oleh penggunaan teknologi tepat guna dengan *Sistem Seket* karena meratanya debit air bersih di setiap rumah warga.

3. Evaluasi Kinerja Pengurus Paguyuban Tirta Mandiri

Tirta Mandiri sebagai kelembagaan lokal yang memiliki mekanisme keorganisasian modern pada penyediaan air bersih memerlukan instrument untuk melihat keberhasilan dari pengelolaan air bersih yang telah dilakukan. Guna mengukur keberhasilan yang telah dicapai melalui penyediaan air bersih di desa Dadapan, maka perlu melihat kinerja yang telah dilakukan pengurus dan ketua kelompok selama kegiatan penyediaan air bersih tersebut.

Apabila ditinjau dari aspek peran kinerja dibidang keorganisasian, pengurus paguyuban telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati di paguyuban Tirta Mandiri. (Bab 4, h. 142) Dalam hal ini jika terjadi kerusakan pada fasilitas air bersih, pengurus bertugas membenahi fasilitas yang rusak tersebut. Selain itu, kegiatan internal organisasi juga dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada anggota terkait kebijakan pengembangan sarana air bersih, dan jugapelaporan kegiatan paguyuban yang dilakukan setiap satu bulan lagi pada rapat anggota bulanan. Dari tugas dan kewajiban yang telah dilakukan oleh pengurus menunjukkan adanya efektifitas kinerja pengelolaan air bersih di Tirta Mandiri dengan indikator masih tetap dijalankannya pertemuan rutin anggota setiap bulan sekali dan jika terjadi kerusakan (bocornya pipa dan rusaknya HU), pengurus beserta ketua kelompok bekerjasama membenahi kerusakan tersebut.

Dari ketiga aspek diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyediaan air bersih melalui swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Paguyuban Tirta Mandiri telah berjalan secara efektif dan terpadu. Bahkan efektifnya kegiatan paguyuban dalam mengelola air bersih dapat dilihat dari jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi, lancaranya debit air bersih ke rumah warga yang menerima layanan dari paguyuban Tirta Mandiri dan meningkatnya performa kinerja pengurus dalam menjalankan dan mengelola organisasi.

Untuk melihat seberapa besar efektifitas kegiatan peyediaan air bersih melalui swadaya masyarakat dan penyediaan sarana sanitasi melalui program Jamban Sehat yang dikelola oleh paguyuban Tirta Mandiri dapat dilihat dari hasil observasi lapangan terhadap fasilitas air bersih yang telah dibangun dan dikelola pengurus yang tertera pada lampiran 5.

5.2.7 Tahap Terminasi

Menurut Adi bahwa terminasi tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran (Bab 2, h. 66). Ada beberapa faktor yang membuat kegiatan program perlu dilakukan terminasi yaitu habisnya waktu dan dana untuk kegiatan program. Namun hakikatnya terminasi dilakukan jika masyarakat telah mandiri dan berdaya dalam mengelola program yang telah dilakukukan bersama *community worker*. Berkaitan dengan penyediaan air bersih

di desa Dadapan yang difasilitasi oleh Tirta Mandiri. Kegiatan terminasi dilakukan oleh pengurus 3 hari setelah selesainya pembangunan fasilitas air bersih. Hal ini dikarenakan dari kegiatan musyawarah anggota pada evaluasi pembangunan air bersih tidak mengalami hambatan pada pendistribusiannya di masing-masing rumah (Bab 4, h. 144). Berdasarkan konsep Adi dan kenyataan dilapangan menyimpulkan bahwa terminasi yang terjadi pada kegiatan penyediaan air bersih ini telah memunculkan kemandirian masyarakat untuk terus menjaga kesinambungan dari kegiatan yang telah dilakukan dengan ikut terlibat menjadi anggota paguyuban Tirta Mandiri pada agenda kegiatan lembaga. Sehingga kegiatan penyediaan air bersih dengan membangun sarana yang telah dibuat dapat dipelihara dengan baik dan di kontrol sesuai mekanisme yang terdapat di paguyuban Tirta Mandiri.

Untuk memperjelas proses dari tahapan pengembangan masyarakat pada penyediaan air bersih melalui swadaya yang difasilitasi oleh Paguyuban Tirta Mandiri dibandingkan dengan konsep pengembangan masyarakat pada Bab 2, akan disajikan dalam rangkuman pada tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih Di Paguyuban Tirta Mandiri

No	Konsep Tahapan Pengembangan Masyarakat menurut Adi (Bab 2, h. 66-70)	Tahapan Pengembangan Masyarakat dalam Penyediaan Air Bersih Di Paguyuban Tirta Mandiri
1	<u>Persiapan (<i>engagement</i>)</u> merupakan tahapan yang dilakukan oleh <i>community worker</i> dan tahap persiapan lapangan (Adi, Bab 2, h.67). Sehingga untuk mengefektifkan di kegiatan di tahapan ini perlu dimobilisasi dalam suatu bentuk kelembagaan (Wibowo, Bab 2, h. 61).	<u>Pada tahap awal</u> kegiatan yang dilakukan terdiri dari: 1. Persiapan aktor di kelembagaan untuk melakukan sosialisasi di masyarakat dan menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat. 2. <i>Community worker</i> melakukan persiapan lapangan dengan mempersiapkan sumber mata air dan mempersiapkan sumber daya lokal yang membantu kegiatan di lapangan
2	<u>Pengkajian (<i>Assessment</i>)</u> adalah tahapan yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah seperti kebutuhan yang dirasakan dan juga	<u>Pada tahap kedua</u> kegiatan yang dilakukan terdiri dari: 1. Identifikasi permasalahan terkait kelayakan sumber air bersih dan

Tabel 5.1: Lanjutan

	sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran (Adi, Bab 2, h. 67). Untuk menguatkan hasil identifikasi perlu konsensus masyarakat bersama aktor yang berada di kelembagaan (Wibowo, Bab 2, h. 83).	jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibutuhkan 2. Kegiatan identifikasi masalah (assassment) melalui partisipasi langsung dari masyarakat dengan kegiatan musyawarah dan konsesus di sistem sosial.
3	<u>Perencanaan Kegiatan (<i>Planning</i>)</u> merupakan tahapan dimana <i>community worker</i> secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang hadapi dan bagaimana cara mengatasinya (Bab 2, h. 68)	<u>Pada tahap ketiga</u> kegiatan yang dilakukan 1. Kemampuan masyarakat untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah melalui pembuatan sebuah rencana alternatif berupa gambaran peta wilayah pembangunan fasilitas air bersih dan kerjasama dengan pihak luar dengan mengacu pada keputusan yang telah ditetapkan bersama
4	<u>Formulasi Rencana Aksi (<i>Formulation action plan</i>)</u> yaitu tahap di mana <i>community worker</i> dan anggota kelompok merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mengatasi masalah yang ada (Adi, Bab 2, h. 68)	<u>Pada tahap keempat</u> kegiatan yang dilakukan terdiri dari: 1. Partisipasi masyarakat dan aktor untuk menentukan aksi dari kegiatan yang akan dilakukan seperti pembuatan formulasi kerja kelembagaan dan kelompok unit kerja pada penyediaan air bersih. 2. Pembuatan formulasi kerja kelembagaan seperti rencana jadwal kerja gotong royong pembangunan fasilitas air bersih dan pembiayaanya. Selain itu juga dibentuk kelompok unit kerja yang mengkoordinir masyarakat dilapangan.
5	<u>Pelaksanaan Kegiatan (<i>Implementation</i>)</u> yaitu tahapan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan menjalin kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga untuk melaksanakan program kegiatan (Adi, Bab 2, h. 68).	<u>Pada tahap kelima</u> atau implementasi program diwujudkan dalam bentuk kegiatan antara lain: a. Pembangunan hidran induk dan hidran umum b. Gotong royong penggalian pipa air bersih c. Pembangunan unit hidran kelompok d. Pemasangan pipa distribusi ke rumah masyarakat

Tabel 5.1: Lanjutan

6	<p><u>Tahap evaluasi (Evaluation)</u> merupakan tahap dari proses pengawasan dari warga dan <i>community worker</i> terhadap program yang sedang berjalan, dengan melibatkan anggota komunitas secara aktif (Adi, Bab 2, h. 69).</p>	<p>Pada tahap keenam kegiatan yang dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota paguyuban sebanyak-banyaknya melalui musyawarah anggota dan diskusi setelah pelaksanaan swadaya. Aspek yang dievaluasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih b. Tingkat kelancaran debit air c. Kinerja pengurus paguyuban Tirta Mandiri
7	<p><u>Tahap Terminasi</u> merupakan tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. (Adi, Bab 2, h. 66)</p>	<p><u>Tahap ketujuh kegiatan yang dilakukan:</u> Penghentian kegiatan swadaya air bersih 3 hari setelah final kegiatan berdasarkan hasil musyawarah evaluasi antara pengurus dan anggota.</p>

Sumber: Hasil penelitian diolah

5.3 Manfaat Menggunakan Paguyuban Tirta Mandiri

Keberadaan kelembagaan lokal yang telah menjadi bagian dari sistem sosial di masyarakat memiliki manfaat yang cukup besar. Kelembagaan lokal dapat menjadi wadah dalam membentuk pola perilaku, pengutaan norma dan aturan, pemeliharaan tradisi dan budaya, dan pemenuhan kebutuhan yang menyangkut kehidupan sehari-hari di masyarakat. Menurut Esman and Uphoff seperti yang dijelaskan Wibowo bahwa beberapa efisiensi yang akan didapat jika memanfaatkan peran kelembagaan lokal dalam pembangunan (Bab 2, h. 58).

5.3.1 Manfaat di bidang Pendidikan

Menurut Wibowo bahwa lembaga lokal dapat memfasilitasi kemampuan adaptasi program-program pembangunan (*adaptation of program*) terhadap variasi lingkungan fisik dan sosial yang beragam dan dengan demikian membantu meningkatkan efisiensi program (Bab 2, h.55).

Keberadaan paguyuban Tirta Mandiri yang telah memfasilitasi pengelolaan air bersih melalui swadaya murni dari masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan individu terkait tata kelola kelembagaan yang modern. Mekanisme tata kelola kelembagaan di Tirta Mandiri diadopsi kedalam

kelembagaan pendidikan dengan membentuk sekolah bagi anak usia dini (Bab 4, h. 145). Inisiatif warga membuat program pendidikan ini tidak lepas dari kurang efektifnya program pemerintah di masyarakat dan juga sudah terpenuhinya kebutuhan dasar khususnya akses air bersih. Sehingga kelembagaan lokal melalui anggotanya mencoba untuk mengadaptasi program pemerintah dengan membentuk lembaga pendidikan bagi anak-anak guna meningkatkan efisiensi dari program pemerintah yang kurang berjalan kurang efektif dilapangan. Namun program pembentukan lembaga pendidikan tidak hanya sebatas hanya memberikan pendidikan formal yang biasanya diberikan di sekolah umum. Akan tetapi nilai-nilai yang ada di Tirta Mandiri mencoba untuk disikronkan kedalam kelembagaan pendidikan tersebut seperti pendidikan kesehatan berbentuk kegiatan cuci tangan pakai sabun oleh siswa. Dengan demikian nilai-nilai kesehatan yang menjadi kebijakan paguyuban Tirta Mandiri diinstitutionalisasi kedalam kurikulum pendidikan di sekolah.

5.3.2 Manfaat di bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan pilar yang penting bagi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesejahteraan. Tanpa ada sarana penunjang untuk kesehatan dapat dipastikan kesehatan masyarakat akan terganggu akibat kurang maksimalnya sarana yang dibutuhkan.

Menurut Wibowo bahwa lembaga lokal dapat meningkatkan efisiensi pembangunan karena kelembagaan dapat membantu menyediakan informasi yang akurat dan representatif (*accurate and representatif information*) tentang kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat serta umpan balik terhadap inisiatif dan pelayanan pemerintah (Bab 2, h. 55).

Keberadaan paguyuban Tirta Mandiri berkontribusi besar dalam bidang kesehatan. Upaya untuk mewujudkan kondisi kesehatan dibutuhkan perubahan pola perilaku dengan ditunjang fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Untuk itu, kelembagaan lokal berupaya menciptakan kondisi lingkungan sehat dengan cara menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kesehatan berupa penyediaan sarana sanitasi dasarmelalui program Jamban Sehat. Agar keberadaan program tersebut dapat diterima dan dipahami masyarakat bahwa jamban merupakan sarana yang penting pada upaya mewujudkan kondisi

kesehatan masyarakat, maka pengurus menjalin koordinasi dengan pemerintah (Puskemas) dalam mempromosikan atau mensosialisasikan program kepada seluruh masyarakat (Bab 4, h. 147).

Program-program pembangunan yang digagas pemerintah dapat berjalan efektif melalui kerjasama dengan lembaga untuk menyediakan informasi terkait kondisi kesehatan dan pemecahan masalahnya. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi akurat dan representatif sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam menerima program yang didapat. Dengan demikian usaha untuk menciptakan kondisi yang sehat dapat tercapai melalui kelembagaan lokal dengan program yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Program akan berjalan efektif jika terjadi perubahan perilaku menuju kondisi yang sehat yang disertai dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan yang kesehatan.

5.3.3 Manfaat di bidang Ekonomi

Menurut Wibowo bahwa lembaga lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi program melalui sumber daya (*resource mobilization*) melalui kegiatan gotong royong (Bab 2, h. 56).

Penyediaan air bersih yang difasilitasi oleh paguyuban Tirta Mandiri dilakukan secara swadaya murni dari masyarakat. Walaupun dana yang dikeluarkan pada kegiatan tersebut cukup besar namun masyarakat tidak menyurutkan semangat untuk mendapatkan air melalui penggunaan sumber daya lokal yang berasal dari budaya desa Dadapan yaitu budaya gotong royong. Sumber daya yang digunakan disini lebih mengarah pada pemanfaatan modal-modal sosial yang sudah terbentuk untuk mendukung kegiatan pembangunan sarana air bersih. Melalui sistem kerja pembangunan fasilitas air bersih secara gotong royong dapat mengurangi beban biaya yang besar dan juga sistem pembiayaan yang ditanggung secara berkelompok dapat memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat lain yang berpendapat rendah untuk ikut serta terlibat di kegiatan tersebut. Sehingga beban pembiayaan ditanggung oleh seluruh masyarakat yang terlibat didalam kelembagaan. Selain itu, dengan keberadaan air yang sudah dinikmati oleh warga dapat digunakan sebagai sarana kegiatan usaha

seperti budidaya ikan dan ayam, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Dadapan (Bab 4, h. 148).

5.3.4 Manfaat di bidang Sosial Budaya

Menurut Wibowo bahwa lembaga lokal dapat dikembangkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan program yang melibatkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan teknologi (Bab 2, h. 56).

Partisipasi yang besar dalam penyediaan sarana air bersih di masyarakat menunjukkan bahwa masih kuatnya nilai solidaritas sosial. Nilai tersebut merupakan cerminan dari budaya gotong royong di desa Dadapan yang telah menjadi kebiasaan selama puluhan tahun (Bab 4, h. 149). Dengan adanya pengelolaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri, nilai-nilai sosial pada masyarakat Dadapan telah terlembaga dengan baik. Bahkan nilai sosial sebagai pendukung keberadaan budaya dan adat-istiadat di desa Dadapan menjadi cara pandang kelembagaan untuk memahami makna entitas air bersih sebagai *common property*. Sehingga keberadaan air bersih dapat mendukung kegiatan budaya dan adat istiadat yang berada di desa Dadapan. Pemaknaan pada nilai air bersih di masyarakat menjadi lebih terbuka sehingga masyarakat di luar sistem sosial desa Dadapan mencoba memaknai entitas air bersih sebagai budaya kebersamaan. Menyatunya persamaan budaya terkait pengetahuan makna dari air bersih menggugah pengetahuan (kognitif) masyarakat diluar desa Dadapan ikut berpartisipasi di Tirta Mandiri untuk mendapatkan air sebagai dasar perekat budaya guna mewujudkan perubahan-perubahan sosial di masing-masing desa.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini diuraikan rangkuman dari hasil penelitian tentang pengelolaan air bersih melalui kelembagaan lokal berbasis masyarakat yang menjadi kesimpulan penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, upaya lain untuk meningkatkan mekanisme pengelolanya kedepan perlu masukan berupa saran atau rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan lokal dalam mengelola air bersih bagi masyarakat.

6.1. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Pengelolaan Air Bersih Melalui Kelembagaan Lokal Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Paguyuban Tirta Mandiri di desa Dadapan Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur) ini bertujuan untuk menggambarkan proses mekanisme yang dijalankan kelembagaan dalam pengelolaan air bersih, menggambarkan tahapan pengembangan masyarakat yang dilakukan kelembagaan lokal pada penyediaan air bersih, dan menjelaskan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan kelembagaan lokal dalam penyediaan air bersih di desa Dadapan.

Rendahnya akses air bersih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat Dadapan. Untuk menangani kompleksitas masalah tersebut perlu adanya wadah yang dapat menjembatani masyarakat dalam menyelesaikan rendahnya akses air bersih melalui mekanisme pengelolaan kelembagaan dan memfasilitasi pada penyediaan air dengan swadaya masyarakat. Selain itu, kelembagaan lokal juga berperan menjadi wadah pelestarian nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat sebagai pendukung pengelolaan air bersih, sehingga keberadaanya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri dilakukan melalui tiga bentuk yaitu:

1. Pilar regulatif. Pada pilar ini lebih menfokuskan pada pembentukan peraturan dan tata aturan terkait mekanisme pembuatan struktur

organisasi yang berfungsi untuk menjalankan roda organisasi dalam bentuk struktur kepengurusan. Dari pembentukan peraturan tersebut memunculkan tata aturan dalam mekanisme keanggotaan berdasarkan peraturan yang telah dibentuk. Selain itu, tata aturan juga dibuat pada mekanisme sistem keuangan dengan bentuk iuran bulanan yang bertujuan untuk perawatan sarana dan prasarana air bersih. Dengan demikian mekanisme yang telah dibuat dan disahkan melalui peraturan di lembaga memberikan sanksi formal dan informal bagi anggota yang melanggar.

2. Pilar Normatif. Di pilar ini memfokuskan pada kewajiban atau mandat kelembagaan dalam mengevaluasi kinerja dan kewajiban sosial berdasarkan pedoman atas norma yang ada. Musyawarah anggota bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh anggota agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Sedangkan musyawarah khusus dilakukan untuk mengevaluasi terhadap penyelewengan yang dilakukan pengurus dan anggota yang menyebabkan kerugian bagi paguyuban. Kegiatan musyawarah dilakukan berdasarkan norma yang ada di lembaga. Disamping itu, lembaga juga harus memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dan kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses air bersih dengan berpedoman pada norma di masyarakat.
3. Pilar Kultural-Kognitif. Pilar ini menjadi pendorong penggunaan nilai lokal di masyarakat sebagai bagian dari mekanisme di lembaga. Nilai lokal menjadi sangat penting dalam lembaga karena menjadi penguat kebersamaan dan kekompakan antara anggota dan pengurus dalam mengelola air bersih. Nilai lokal tersebut didukung oleh budaya dan adat istiadat sebagai pedoman dalam mengelola air yang bertujuan untuk bertindak dan berperilaku seluruh anggota. Dengan demikian keberadaan lembaga menjadi media pelestarian kebudayaan sekaligus menjadi simbol atas keberadaan air bersih yang memiliki *intrinsic values* di masyarakat.

Setelah melalui mekanisme kelembagaan dalam mengelola air bersih di Tirta Mandiri, maka dibutuhkan upaya penyediaan air bersih melalui swadaya masyarakat dengan proses tahapan pengembangan masyarakat. Untuk itu, tahapan pengembangan masyarakat pada penyediaan air bersih dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini seorang aktor kelembagaan yang berperan sebagai *community worker* mempersiapkan kegiatan penyediaan air bersih dengan cara sosialisasi di masyarakat dan menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat. Selain itu, *community worker* juga melakukan persiapan lapangan terkait persiapan sumber mata air dan mempersiapkan sumberdaya lokal yang dapat membantu pelaksanaan di lapangan.
2. Tahap Pengkajian. Di tahapan pengkajian ini kegiatan yang dilakukan berupa identifikasi masalah terkait kelayakan sumber air bersih yang meliputi jumlah sumber mata air dan jumlah fasilitas air bersih yang dibutuhkan. Selain itu, pengkajian dilakukan pada penduduk yang ikut pada penyediaan air bersih. Proses pengkajian masalah ini dilakukan dengan melibatkan langsung masyarakat melalui musyawarah guna memunculkan konsensus.
3. Tahap Perencanaan Kegiatan. Pada tahapan ini *community worker* bersama masyarakat mencari solusi terkait permasalahan penyediaan air bersih dengan cara merumuskan rencana alternatif kegiatan. Adapun rencana alternatif kegiatan berupa penentuan wilayah fasilitas air bersih dan jumlahnya, identifikasi lokasi pembangunan HU di masyarakat, pemilihan jenis sarana air bersih, pembentukan kelompok kecil, penjalinan kerjasama dengan pihak luar.
4. Tahap Formulasi Rencana Aksi. Di tahapan ini masyarakat dan *community worker* dengan masyarakat melakukan perumusan dan penentuan program kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan air bersih di desa Dadapan. Formulasi rencana aksi yang dibuat berupa kerja lembaga seperti rencana jadwal kerja jagotongroyong pembangunan fasilitas air bersih dan pembiayaannya, serta dibentuk kelompok unit kerja yang mengkoordinir masyarakat.
5. Tahap Pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada penggunaan teknik untuk mengembangkan fasilitas air

guna membantu masyarakat dalam pelaksanaan dilapangan. Kegiatan pelaksanaan antara lain mencakup (a) pembangunan hidran induk dan hidran umum; (b) gotong royong penggalian pipa air bersih; (c) pembangunan unit hidran kelompok; (d) pemasangan pipa distribusi ke rumah masyarakat.

6. Evaluasi. Pada tahap ini pengurus dan anggota paguyuban melakukan evaluasi dengan cara berdiskusi dan musyawarah terkait kegiatan penyediaan air bersih. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat efektifitas kegiatan yang telah dilakukan dilapangan pada penyediaan air bersih. Evaluasi kegiatan penyediaan air bersih ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana air bersih, tingkat kelancaran debit air, dan kinerja pengurus paguyuban Tirta Mandiri.
7. Terminasi. Pada tahap ini pengurus melakukan penghentian kegiatan pembangunan fasilitas air bersih dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk melihat kondisi distribusi air yang merata di masyarakat.

Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan kelembagaan lokal pada pengelolaan dan penyediaan air bersih antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang pendidikan. Keberadaan kelembagaan lokal menggugah kesadaran masyarakat untuk membentuk lembaga pendidikan yaitu sekolah yang diperuntukkan pada anak usia dini. Selain itu, program pendidikan ini dapat mengefesiesikan program pendidikan yang telah dibuat pemerintah dengan memaksimalkan potensi lokal yang terdapat di masyarakat.
2. Manfaat di bidang Kesehatan. Tersedianya akses air bersih dan sarana sanitasi jamban yang dikelola paguyuban Tirta Mandiri berkontribusi pada upaya menciptakan kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku sehat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan di masyarakat dan menjalin kerjasama dengan pemerintah pada menyediakan informasi terkait permasalahan kesehatan dan pemecahan masalahnya.
3. Manfaat di bidang Ekonomi. Kegiatan penyediaan air bersih melalui kelembagaan lokal dapat mengefektifkan biaya yang besar melalui penggunaan sumber daya lokal seperti kegiatan gotong royong pada pelaksanaan dilapangan. Dengan demikian, keberadaan air bersih dapat dimanfaatkan untuk

kegiatan usaha seperti budidaya ikan dan perternakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Manfaat di bidang Sosial Budaya. Pengelolaan air bersih melalui kelembagaan lokal berguna untuk pelestarian nilai-nilai lokal berupa budaya dan adat-istiadat yang terdapat. Keberadaan air bersih yang bertali temali dengan nilai tersebut dapat dipertahankan kedalam wadah kelembagaan sehingga memunculkan pedoman dalam kehidupan di masyarakat.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengelolaan air bersih melalui kelembagaan lokal berbasis masyarakat yang dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri di masyarakat desa Dadapan, disampaikan beberapa saran atau rekomendasi peneliti pada beberapa pihak antara lain:

1. Untuk Paguyuban Tirta Mandiri, sebagaimana yang telah diuraikan dari hasil penelitian ini terdapat beberapa ketidakmaksimalan dan tumpang tindihnya peranyang dijalankan oleh pengurus dalam pembagian kerja dipaguyuban Tirta Mandiri yaitu:
 - a. Untuk bagian administrasi keuangan dan adminitrasi umum seharusnya tidak dibebankan pada seorang sekretaris saja. Bendahara harus ikut terlibat dalam penyusunan administrasi keuangan melalui model pembukuan formal untuk mengetahui besarnya pemasukan dan pengeluaran pada pengelolaan air bersih. Tujuannya untuk mempermudah anggota mengetahui kondisi keuangan guna mencipatakan akuntabilitas kinerja kelembagaan lokal.
 - b. Untuk tenaga teknis perlu adanya penambahan personil di bidang pembenahan agar kegiatan pembenahan pada fasilitas air bersih yang rusak dapat diselesaikan dengan cepat.
 - c. Pengurus perlu membuat terobosan kebijakan yang tidak hanya berfokus program yang telah ada tetapi mengembangkan program baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa Dadapan untuk kemajuan masyarakat.

2. Untuk anggota paguyuban dan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan dari hasil penelitian ini perlu adanya pemahaman dan pembelajaran terkait manajemen keorganisasian pada kelembagaan lokal sehingga pada saat pemilihan pengurus, anggota telah dipilih melalui musyawarah anggota dapat menjalankan perannya sesuai dengan tertera di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga paguyuban Tirta Mandiri.
3. Untuk pemerintah, sebagai pemangku kebijakan di era otonomi daerah, disarankan dapat memberikan dukungan berupa pemberian fasilitas sarana air bersih seperti pipa air yang standar dan juga mendukung pengembangan program yang dibuat oleh pengurus Tirta Mandiri di masyarakat. Hal ini bertujuan agar program yang dibuat dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan tidak hanya terfokus di desa Dadapan saja. Mengingat kegiatan penyediaan air oleh paguyuban Tirta Mandiri telah menjangkau tiga kecamatan di wilayah kabupaten Lumajang. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar kesehatan melalui program Gerbangmas dapat tercapai dengan mudah dengan adanya kerjasama melalui kelembagaan lokal di desa Dadapan.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

- Adi, Isbandi Rukmito. (2002). *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sosial*. Jakarta: FE UI.
- Adi, Isbandi Rukmito.(2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Adi, Isbandi Rukmito. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Alston, Margaret and Bowles, Wendy. (1998). *Research For Social Worker, An Introduction to Methodes*. Sidney: Allen and Unwin.
- Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbullah, Jousairi. (2006). *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Hasim dan Remiswal. (2009). *Community Development Berbasis Ekosistem*. Jakarta: Diadit Media.
- Hikmat, Harry. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (edisi revisi). Bandung. Humaniora Utama Press.
- Ife, Jim and Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. (Sastrawan Manulang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (1997). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Krueger, Richard A. (1988). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. USA. Sage Publication.
- Kusnoputranto, H. (1986). *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Marrack, David. (1981). *Water And Health: Environment and Health*. Michigan: Ann Abbror Publ.
- Merriam. (1998). *CaseStudy in Education: A Qualitative approach*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Midgley, James. (1995). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. (Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas, Penerjemah). Jakarta: Diperta Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nee, Victor and Ingram, Paul. (2001). *The New Institutionalism In Sociology*. California: Stanford University Press.
- Neuman, W Lawrence. (2006). *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approach* (Sixth Edition). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Nu'man, Afif, et al, ed. (2008). *Pembangunan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia: Pembelajaran Dari Berbagai Pengalaman*. Jakarta: Pokja AMPL.
- Prastowo. (2008). *Pengelolaan Ekosistem Mata Air: Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purba, Jonny. (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rogers, Everett M. (1995). *Diffusion of Innovations*. New York: The Free Press.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rubin, Allen and Babbie, Earl R. (2008). *Research Methods for Social Work* (6th ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.
- Samin, Bunasor. (2011). *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Bogor: IPB Press.
- Santono, Hanung. (2010). *Air Bersih Dan Sanitasi Sebagai Kebijakan Sosial*. Jakarta: Komunitas Indonesia.
- Scout, Richard. (1995). *Institutions and Organizations Foundations for Organizational Science*. USA. Sage Publication.
- Scout, Richard. (2008). *Institutions And Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.
- Siswanto, Kasjono dan Mantariputra. (2010). *Etika Profesi Sanitarian Dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Smith, Dorothy. (2005). *Intitutional Ethnography A Sociology For People*. UK: Alta Mira Press.
- Soemardjan, Selo dan S. Soemardi. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Susanto, Hari. (2006). *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Historis Era Orde Baru*. Jakarta: Khananta dan Pustaka LP3ES Indonesia Untuk Demokrasi.
- Susilastuti, Darwati. (2011). *System Dynamics Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih*. Jakarta: Cintya Press.
- Uphoff, Norman. (1986). *Local Institution Development: An Analytical Sourcebook with Case*. West Hartford Connecticut: Cumarian Press.
- Uphoff, Norman and Esman, Milton J. (1984). *Local Organization Intermendiaries In Rural Development Development*. USA: Cornell University Press.
- Wibowo, Agung Pramono. (2011). *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Jakarta: Management Studio and Clinic.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Dokumen Lembaga

- Bappenas. (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS. (2009). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Bappeda Lumajang. (2009). *Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang 2009*. Lumajang: Bappeda Kabupaten Lumajang.
- Dinkes Lumajang. (2010). *Peranan Unit Pengelola Sarana (UPS) Tirta Mandiri Potret Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Sanitasi Di Kabupaten Lumajang*. Lumajang: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
- Dinas PU Lumajang. (2010). *Laporan Sistem Informasi SPAM Pedesaan Kabupaten Lumajang*. Lumajang: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang.
- Tirta Mandiri. (2005). *Profil PSAB Tirta Mandiri Desa Dadapan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang*. Lumajang: PSAB Tirta Mandiri.

Tirta Mandiri. (2008). *Profil PSAB Tirta Mandiri Desa Dadapan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang*(revisi). Lumajang: PSAB Tirta Mandiri.

United Nation Development Program. (2011). *Summery Human Development Report 2011*. New York: UNDP.

World Bank. (2006). *Inovasi Pelayanan Pro Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Author Indopov.

Sumber Internet

Pemerintah Kabupaten Lumajang. (2010). *Calon Penerima Penghargaan KBH Dan MKBH*. Diakses Tanggal 4 Maret 2012, dari Web:http://www.lumajang.go.id/info_lihat.php?id=1277.

Syahyuti. (2007). *Kelembagaan Dan Lembaga Dalam Pengembangan Agribisnis Pedesaan*. Diakses Tanggal 04 April 2012, dari Web: <http://websyahyuti.blogspot.com/2007/08/kelembagaan-dan-lembaga-dalam.html>.

Artikel Majalah dan Jurnal

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.(2003, Oktober). Water and Sanitation for Low Income Communities Project.*Majalah Percik Edisi II*, 14-15.

Syahyuti. (2010).Lembaga Dan Organisasi Petani Dalam Pengaruh Negara Dan Pasar. *Majalah Forum Agro Ekonomi Vol. 28 No.1*, 3, 7-8, 34

Masduqi, Ali, Endah, Noor dan Soedjono, Edi S. (2008). Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus HIPPAM Di DAS Brantas Bagian Hilir.*Jurnal Fakultas TeknikLingkungan. InstitutTeknologi Sepuluh November (ITS). Vol. 8*, 6

Skripsi/Tesis

Spenyel, Womsiwor. (1998). *Aspek Kelembagaan Dalam Implemetasi Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Bersih Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Adminstrasi FISIP Universitas Indonesia.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Panduan Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Dadapan

A. Mengetahui Mekanisme yang dijalankan Paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih

1. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mekanisme pengelolaan air bersih yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri di masyarakat? Bagaimana dengan usaha yang dilakukan masyarakat Desa Dadapan?
2. Apa peran anda dalam mendorong masyarakat untuk terlibat pada kegiatan penyediaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri. Apa kendala yang anda rasakan dalam menjalankan peran tersebut.
3. Bagaimana proses penanaman nilai dan norma yang terdapat masyarakat pada paguyuban Tirta Mandiri dalam mekanisme pengaturan, pendistribusian dan penyediaan air bersih di Desa Dadapan.

II. Panduan Wawancara Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa

A. Mengetahui Mekanisme yang dijalankan Paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih

1. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mendukung pengelolaan air bersih yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri di masyarakat? Bagaimana dengan usaha yang dilakukan masyarakat Desa Dadapan?
2. Apa peran anda dalam mendorong masyarakat untuk ikut terlibat kegiatan penyediaan air bersih di paguyuban Tirta Mandiri. Apa kendala yang anda rasakan dalam menjalankan peran tersebut.
3. Pihak-pihak mana saja yang berperan dalam mendukung penyediaan air bersih melalui paguyuban Tirta Mandiri? Apakah ada dari masyarakat desa atau dusun sendiri yang ikut berperan dalam pengelolaan air bersih? Bila ada siapa saja mereka? Apa alasannya mereka mau ikut serta dalam pengelolaan tersebut?
4. Menurut anda keuntungan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan penyediaan air bersih melalui paguyuban Tirta Mandiri?

III. Panduan Wawancara Pengurus Harian, Paguyuban Tirta Mandiri Desa Dadapan

A. Mengetahui Mekanisme yang dijalankan Paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih

1. Terkait dengan keberhasilan Paguyuban Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih di desa dadapan. Bagaimana awal mulanya terbentuknya kelembagaan lokal ini?
2. Prinsip dan nilai apa yang menyemangati paguyuban ini dalam penyediaan air bersih hingga berhasil sampai sekarang
3. Apa tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut

4. Terkait dengan mekanisme pengelolaan air bersih. Seperti apa sistem keanggotaan dalam paguyuban ini
 5. Bagaimana struktur kepengurusan dan tata kerja yang dijalankan pengurus pada paguyuban ini
 6. Bagaimana mekanisme kerja yang dijalankan oleh Paguyuban Tirta Mandiri pada pengambilan keputusan, sistem pembiayaan, keamanan dan kebijakan layanan pendistribusian air bersih.
 7. Seperti apa kegiatan rutin yang dilakukan Paguyuban Tirta Mandiri dalam menjaga program lembaga dapat berjalan lancar.
 8. Bagaimana proses tahapan penyediaan air bersih di tingkat masyarakat yang difasilitasi paguyuban Tirta Mandiri
 9. Selain kegiatan penyediaan air bersih, kegiatan lain apa yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri?. Bagaimana mekanisme yang dijalankan kegiatan tersebut.
 10. Manfaat apa yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan paguyuban Tirta Mandiri
- Lampiran 1: Lanjutan

IV. Panduan wawancara *group interview* dengan masyarakat Desa Dadapan dan kelompok kerja paguyuban Tirta Mandiri .

A. Mengetahui proses pengembangan masyarakat yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri

1. Menurut bapak/ ibu, bagaimana kondisi air bersih di desa dadapan saat ini dibanding sebelumnya.
2. Jika sekarang ini mudah untuk mendapatkan air bersih, siapakah pihak yang menyediakan air tersebut.
3. Bisakah bapak/ ibu menceritakan bagaimana proses tahapan penyediaan air bersih yang dilakukan oleh pihak tersebut bersama bapak/ibu sekalian dari awal sampai akhir
4. Siapakah pihak (orang-orang) yang berperan dalam proses penyediaan air bersih tersebut.
5. Prinsip dan nilai apa yang menyemangati bapak/ibu dalam penyediaan air bersih hingga berhasil sampai sekarang
6. Berapakah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh bapak/ibu dalam penyediaan air bersih. Jika biaya tersebut terlalu mahal, bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh pihak tersebut.
7. Berapakah kontribusi setiap bulan yang bapak/ibu keluarkan untuk kegiatan perawatan sarana air bersih
8. Selain kegiatan penyediaan air bersih, kegiatan lain apa yang dilakukan paguyuban Tirta Mandiri?. Bagaimana mekanisme yang dijalankan kegiatan tersebut.

B. Mengetahui manfaat yang diperoleh masyarakat dalam penyediaan air bersih melalui Paguyuban Tirta Mandiri.

1. Manfaat apa yang dirasakan bapak/ibu dengan keberadaan paguyuban Tirta Mandiri

**Data Pengguna Sarana Air Bersih Tirta Mandiri 1 Dan
Tirta Mandiri 2 (Tirta Tri Tunggal)
Desa Dadapan - Kecamatan Gucialit - Kabupaten Lumajang**

No	Paguyuban Air Bersih	No	Anggota
1	Tirta Mandiri 1	1	Bambang Meiyanto
		2	Sumo
		3	Agus Purnomo Hadi
		4	Suki
		5	Suryo
		6	Tuha
		7	Moh. Isro'i
		8	Janji
		9	Sutowo
		10	Adi Sucipto
		11	Suroto
		12	Munasir
		13	Suliyadi
		14	Jupri
		15	Suli
		16	Andri
		17	Bambang
		18	Supa'at
		19	Ustd Praptono
		20	Sumak
		21	Kusnadi
		22	H. Ridwan
		23	Matrio
		24	Tohir
		25	Sakur
		26	Wiwit
		27	Nur Imam
		28	Agus
		29	Sulimah
		30	Sutila
		31	Parman
		32	Suwari
		33	Sutopo
		34	Matasin
		35	Moh. Nahri
		36	Sugiyanto
		37	Slamet
		38	Banjar
		39	Tarjo
		40	Sahru

Lampiran 2: Lanjutan

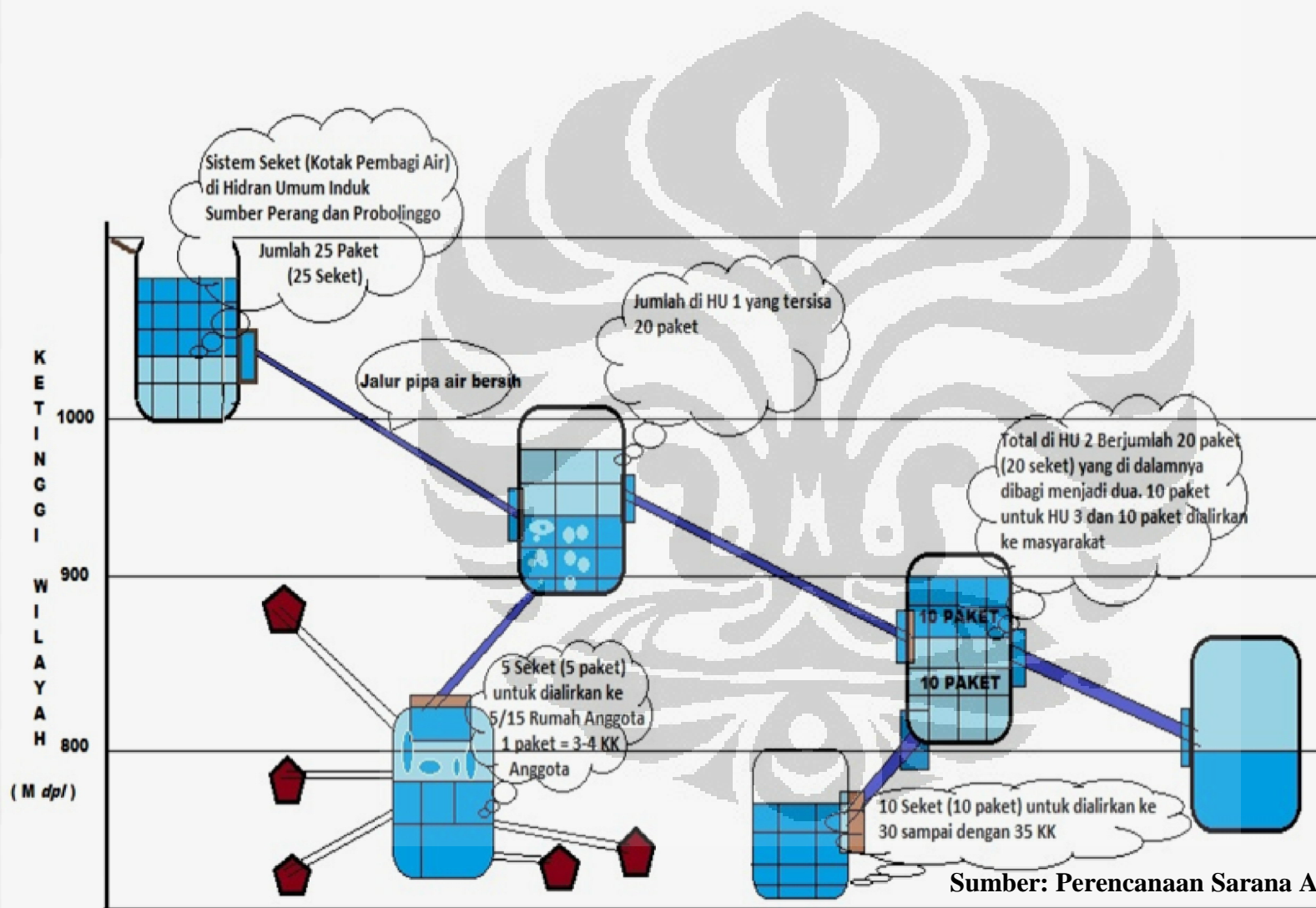
		41	Musjid
		42	Solehudin
		43	Maulana
		44	Subandrio
		45	Sulimah
		46	Sutikno
		47	Tohir
		48	Hendi
		49	Giri 1
		50	Giri
		51	Agus Purnomo
		52	Misnali
		53	Karso
		54	Selamet
		55	Joko
		56	Sulton
		57	Tomo
		59	Rika
		60	Brig. Sopyan
2	Tirta Mandiri 2 (Tirta Tri Tunggal)	61	Buyari
		62	Basir
		63	Ngatari
		64	Maul
		65	Satuat
		66	Sumaah
		67	Ngatino
		68	Suto
		69	Misnar
		70	Slamet
		71	Supri
		72	Sumar
		73	Buamar
		74	Miserat
		75	Bunarto
		76	Jumali
		77	Suroto
		78	Supo'o
		79	Misno
		80	Soli
81	Slamon		
82	Nawin		
83	Siono		
84	Kari		
85	Seneli		
86	Supiani		
87	Tirap		
88	Aliman		
89	Nurrohman		

Lampiran 2: Lanjutan

	90	Muslim
	91	Tomin
	92	Samsi
	93	Juma'in
	94	Marsum
	95	Maryo
	96	Najat
	97	Munarsum
	98	Asi
	99	Sahap
	100	Tojo
	101	Nawarto
	102	Tiono
	103	Toli
	104	Suyit
	105	Nawar
	106	Sawali
	107	Ula
	108	Sunaryam
	109	Awi
	200	Sahut
	201	Suhut
	202	Edi Santoso
	203	Surajak
	204	Tohet
	205	Padri
	206	Sampur 1
	207	Sampur 2
	208	Dikin
	209	Toyo
	300	Wiwit
	301	Sari
	302	Liyanto
	303	Yusup

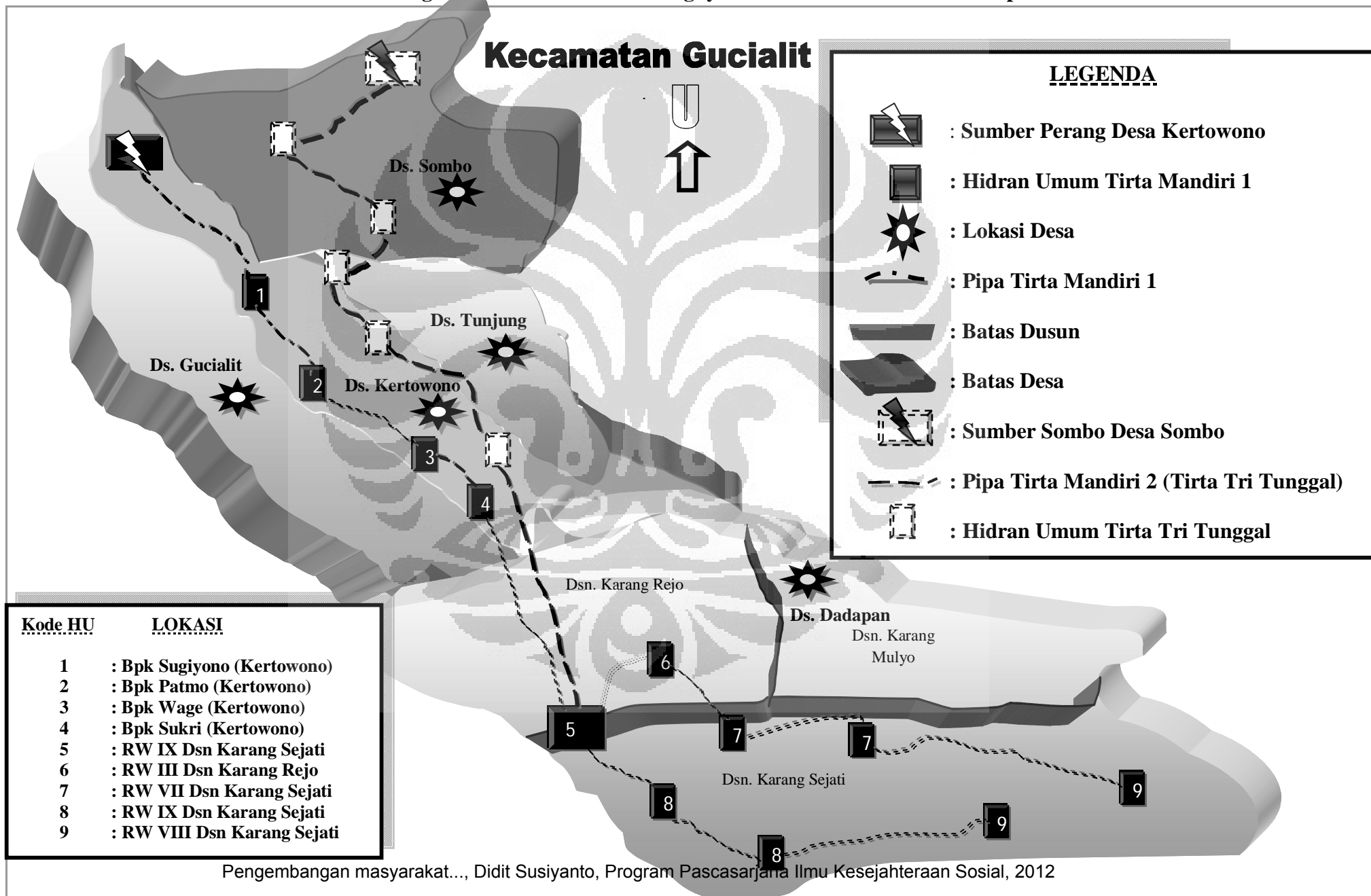
Sumber: Potofolio Paguyuban Sarana Air Bersih Tirta Mandiri Desa Dadapan Tahun 2009

Model Gravitasi Sistem Sekat



Sumber: Perencanaan Sarana Air Bersih Tirta Mandiri

Peta Pembangunan Sarana Air Bersih Paguyuban Tirta Mandiri Desa Dadapan



Hasil Observasi Sarana Air Bersih Paguyuban Tirta Mandiri

No	URAIAN	Jumlah Hidran Umum Yang Diobservasi								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kondisi fisik hidran umum dan pipa air bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tingkat ketidakbocoran di tempat penampungan air dan pipa sambungan pada Hidran Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kualitas standart pembangunan hidran umum dan sambungan pipa air	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kualitas debit air di sumber mata air	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Tingkat kelancaran air dari hidran umum ke rumah warga	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Kondisi sambungan pipa air dari hidran umum ke rumah warga	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Perawatan dan perbaikan hidran umum dan pipa air	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tingkat kebersihan di tiap hidran umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tidak terjadi penyumbatan di saluran Hidran Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Pemantauan tenaga teknis pada tiap Hidran Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Keterangan:

Skor 0 : Buruk/Kurang

Skor 1 : Baik

No	Kode Hidran Umum	Lokasi Hidran Umum
1	1	Dusun Perang Desa Kertowono (Rumah Bpk Sugiyono RT II)
2	2	Desa Kertowono (Rumah Bapak Patmo)
3	3	Desa Kertowono (Rumah Bapak Wage)
4	4	Desa Kertowono (Rumah Bapak Sukri)
5	5	Dusun Karang Sejati RW IX Desa Dadapan
6	6	Dusun Karang Rejo RW III Desa Dadapan
7	7	Dusun Karang Sejati RW VII Desa Dadapan
8	8	Dusun Karang Sejati RW IX Desa Dadapan
9	9	Dusun Karang Sejati RW VIII Desa Dadapan

Transkrip Wawancara
(Kepala Desa Dadapan)

Nama Informan : Bapak Hardi
Kode Informan : HRD
Peran Informan : Kepala Desa Dadapan
Lokasi Wawancara : Kediaman kepala Desa
Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara : 14 Juni 2012
Tema Wawancara : Mengetahui proses pembentukan PSAB Tirta Mandiri dan Mekanisme Paguyuban dalam Mengelola air bersih di Desa Dadapan

No	Tema	Pedoman Wawancara	Pedoman Wawancara
1	Mekanisme yang dijalankan PSAB Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih	<p><i>a. Usaha apa yang anda lakukan dalam mendukung pengelolaan air pada Tirta Mandiri.</i></p> <p><i>- Dan bagaimana dengan masyarakat Dadapan</i></p> <p><i>b. Peran dalam mendorong masyarakat untuk</i></p>	<p>Yaa..saya memberikan kesemangatan berupa keterbukaan dan kejujuran. Keterbukaan masalah uang, karena iurannya cukup besar. Iurannya 5 juta per KK. Jadi butuh keterbukaan diantara ketua dan sekeretaris. Selain itu, kalau ada permintaan bantuan ya saya bantu untuk Tirta Mandiri seperti dukungan tentang keamanan dan ketahanan masyarakat supaya tidak ada permasalahan . Juga saya bantu untuk membuatkan proposal pada Dinas PU untuk meminta bantuan pemeliharaan pipa</p> <p>Ya masyarakat ikut juga. Kalau 1 paket 6 juta/KK, karena terlalu besar jadi di buat 1 paket itu di bagi menjadi 4 KK. Jadi 6 juta di bagi empat KK ada 1.500.000/KK. Bahkan dengan adanya Tirta Mandiri, desa Dadapan mendapat nama atau penghargaan karena swadayanya.</p> <p>Saya kan pembina di tingkat desa dan juga menjaga keamanan. Untuk masalah pipa air bersih tirta mandiri ya aman sampai saat ini tidak ada yang dirusak.</p>

Lampiran 6: Lanjutan

		<p><i>terlibat dalam kegiatan Tirta Mandiri.</i></p> <p>- <i>Kendala apa yang dirasakan</i></p> <p>c. <i>Pihak-pihak mana saja yang berperan dalam mendukung penyediaan air bersih.</i></p> <p>- <i>Apa alasan masyarakat mau ikut serta dalam pengelolaan air bersih</i></p> <p>d. <i>Apa yang dirasakan masyarakat dengan penyediaan air bersih</i></p>	<p>Dukungan lain saya juga malah mencari anggota untuk ikut dalam kegiatan tirta mandiri, bahkan sekarang 80% masyarakat ikut itu. Artinya masyarakat sudah sadar dan mau untuk mendapatkan air bersih</p> <p>Kendalanya ya mungkin terjadi kebocoran pipa dan meletusnya pipa, kalau rusak di ganggu orang saya kira tidak ada. dan juga Masalah sumber air kalau kemarau cukup kecil tapi tetap mengalir.</p> <p>Saya, pengurus desa dan juga tokoh masyarakat beserta pengurus Tirta Mandiri</p> <p>Ya karena masyarakat butuh air untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk pengembangan peternakan warga. Pekerjaan masyarakat disini adalah petani dan juga ternak. Kalau ternak ya ternak sapi itu mas, jadi kalau ingin ikut kelompok air ya masyarakat biasanya jual sapi. Dari jual sapi itu, sudah cukup untuk ikut mengalirkan air. Dengan adanya air masyarakat tidak kesusahan mengembangkan ternak sapinya</p> <p>Dengan adanya air bisa digunakan untuk membuat tambak. Kedua, mudahnya memberikan air bagi ternak masyarakat, minimnya penyakit lingkungan karena masyarakat sudah memiliki WC kloset dan airnya didukung Tirta Mandiri. Selain itu bagi Desa Dadapan, kalau ada program PNPM ngak usah digunakan untuk membangun sarana air karena airnya sudah ada dan di pakai Tirta Mandiri. Jadi program PNPM disa digunakan untuk membangun jalan dan lain-lain</p>
--	--	---	---

Transkrip Wawancara
(Tokoh Masyarakat)

Nama Informan : Bapak Lukman
Kode Informan : LKM
Peran Informan : Tokoh Masyarakat Desa Dadapan Dan Ketua Paguyuban Air Bersih Sekabupaten Lumajang
Lokasi Wawancara : Kantor Desa Dadapan (Dusun Karang Rejo)
Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara : Wawancara Fase 1 (28/11/2011) dan Fase 2 (20/06/2012)
Tema Wawancara : Mengetahui proses pembentukan PSAB Tirta Mandiri dan Mekanisme Paguyuban dalam Mengelola air bersih di Desa Dadapan

No	Tema	Pedoman Wawancara	Pedoman Wawancara
1	Mekanisme yang dijalankan PSAB Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih	<p>a. <i>Terkait dengan kesehatan lingkungan. Permasalahan apa yang paling dominan di desa Dadapan</i></p> <p>b. <i>Bagaimana pengetahuan dan budaya masyarakat terkait kondisi air bersih</i></p>	<p>Permasalahan utamanya itu air bersih. Untuk air bersih di wilayah desa Dadapan air itu ada sumber tapi hanya mencukupi 1 wilayah tepatnya di daerah watu lumpang lor cuma milik pribadi ngk di salurkan ke warga. Tapi untuk wilayah lainnya ya masih ngambil di desa lain. Sedangkan untuk sanitasnya masyarakat itu sudah ODF (20/06/2012). Meskipun ada program WSSLIC dan program lainnya air tetap kurang, karena WSSLIC hanya ada di HU saja jadi harus antri kalau ambil air. (28/11/2011)</p> <p>Untuk saat itu masyarakat masih belum tergugah pemikirannya tentang swadaya air bersih. Karena masih menunggu bantuan pemerintah (20/06/2012). Baru setelah itu ada program WSSLIC-2 di desa Dadapan karena tidak ada kepedulian masyarakat untuk memelihara fasilitas tersebut akhirnya fasilitas HU-nya rusak. (28/11/2011)</p>

Lampiran 6: Lanjutan

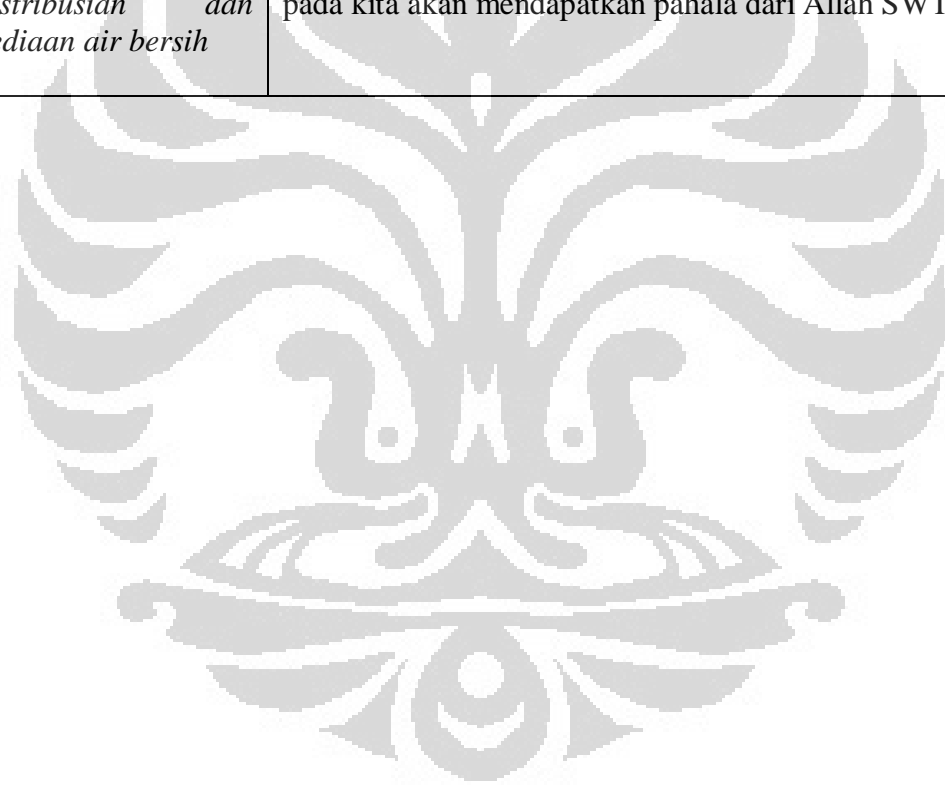
		<p>c. <i>Bagaimana kebiasaan masyarakat menyikapi kebutuhan air bersih di tingkat rumah tangga</i></p> <p>d. <i>Nilai dan budaya apa saja yang terdapat di desa Dadapan dalam upaya pemenuhan air bersih</i></p> <p>e. <i>Bentuk norma dan sanksi masyarakat dalam kegiatan agama, budaya dan sosial dalam penyediaan air bersih</i></p> <p>f. <i>Upaya apa saja untuk mengikat aturan, norma dan budaya terkait pemenuhan air bersih</i></p>	<p>Dulu sebelum ada fasilitas air ya masyarakat biasanya nyewa truk untuk ngambil air.(28/11/2011). Sedangkan untuk musim kemarau ya masyarakat ambil air di sungai mbuat sumur-sumuran atau air sorok. (20/06/2012)</p> <p>Yaa penanaman itu ada ya tergantung komandonya di Desa. Ya seperti kompak dan semangat dalam bergotong royong dan persatuan antar warga itu kuncinya agar berhasil. Bahkan untuk masyarakat desa Dadapan sangat semangat sekali dalam mendapatkan air, sehingga tetangga yang tidak mengambil air dan rumahnya berdekatan dengan pengguna air bersih tirta mandiri ikut terlibat gotong royong penggalian pipa. (20/06/2012)</p> <p>Misalnya ada hajatan, slametan paling tidak kan butuh air untuk masak atau untuk kegiatan sehari-hari kan butuh minum jadi air itu penting. Jadi paling tidak warga ikut gotong royong bantu gali untuk pipa agar nanti tidak malu kalau ambil air. Misalnya kalau tetangga butuh air ya biar ngk sungkan kalau kita ikut kerja bakti.(20/06/2012) Sanksi ya kalau ngk ikut ya sungkan, di ajak ngk mau dan ngk bantu, kalau mau ambil air ya sungkan sendiri nanti. (20/06/2012)</p> <p>Ya dengan melakukan silaturahmi ke warga. Jadi kalau sering kumpul berarti ada kesemangatan bagi anggota. Tiap waktu saya datang ke warga, malah pernah orang ngk pernah datang saya datangi. Kalau ada perselisihan antar warga n anggota saya lebih memberikan saran agar diselesaikan supaya tetap kompak dan bersatu. (20/06/2012)</p>
--	--	---	---

Lampiran 6: Lanjutan

		<p><i>e. Usaha apa yang anda lakukan dalam mekanisme pengelolaan air pada Tirta Mandiri.</i></p> <p>- <i>Dan bagaimana dengan masyarakat Dadapan</i></p> <p><i>f. Peran dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Tirta Mandiri.</i></p> <p>- <i>Kendala apa yang dirasakan</i></p>	<p>Ikut dalam kegiatan paguyuban seperti rapat paguyuban, rapat anggota pada masyarakat. Dengan adanya rapat itu kita bisa menjaga kesatuan atau kompak, silaturahmi dengan adanya air ini. (28/11/2011)</p> <p>Sebelum kita ngomong ke masyarakat, terlebih dulu kita mencari sumber air. Yang mencari sumber saya sama pak Winoto. Baru kalau sudah ketemu sumbernya kita memberi tahu pada masyarakat. Kalau melibatkan warga ke sumber itu warga tidak mau ikut, baru kalau ada warga yang punya minat kita ajak untuk mengelola air itu. Akhirnya masyarakat jadi mau dan ikut. (20/06/2012).</p> <p>Saya hanya membantu sebagai pembina ya mengikuti sosialisasi di masyarakat. Bentuknya ya rapat itu, rapat anggota pada masyarakat seperi saya membina cara-caranya, kendalanya, mengenai masalah cepat dan lambat Selain itu juga mengikuti sosialisasi di masyarakat untuk mempengaruhi orang-orang agar ikut. Untuk tanggung jawab keuangan saya tidak ikut. Saya hanya mendorong agar masyarakat supaya kompak gitu aja. (28/11/2011)</p> <p>Juga kendala masalah fitnah. Karena untuk membangun seperti ini kendalanya besar sekali. Meskipun banyak fitnah di masyarakat seperti sumbernya banyak tulang-tulang, ya saya tetap membrikan motifasi pada anggota agar tetap berjalan untuk melaksanakan itu. (28/11/2011)</p>

Lampiran 6: Lanjutan

		<p><i>g. Bagaimana proses penanaman nilai dan norma masyarakat pada PSAB Tirta Mandiri dalam mekanisme pengaturan, pendistribusian dan penyediaan air bersih</i></p>	<p>Untuk mempengaruhi orang-orang agar ikut dalam paguyuban ini, paguyuban kita anggap sebagai penyalur rizki karena air sendiri itu rezeki dan berkah. Apabila rezeki itu di bagikan pada yang membutuhkan kan sama tetangga sama dengan shodaqoh atau amal ya kan. Dengan itu kita bisa mengatur air agar tidak berebut. Selain itu, ketika air didistribusikan kita harus wajib untuk ikut arisan dan pembayaran iuran air agar air yang kita minum memberikan ilmu yang baik pada kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. (20/06/2012).</p>
--	--	--	--



Transkrip Wawancara
(Pengelola PSAB Tirta Mandiri)

Nama Informan : Bapak Yanto, Isroi, Winoto, Ibu Sumantri
Kode Informan : YNT, ISR, WNT, SMI
Peran Informan : Ketua (YNT), Sekretaris (ISR), Teknisi (WNT).
Lokasi Wawancara : Kediaman masing-masing
Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara : (YNT: 16/06/2012), (ISR: 28/11/2011, 10/06/2012, 11/07/2012),
(WNT: 28/11/2011, 15/06/2012),
Tema Wawancara : Mengetahui proses pembentukan PSAB Tirta Mandiri dan Mekanisme Paguyuban dalam Mengelola air bersih di Desa Dadapan

No	Tema/Pedoman Wawancara	Transkrip Wawancara Informan		
		YNT	ISR	WNT
1	<p>Mekanisme yang dijalankan PSAB Tirta Mandiri dalam pengelolaan air bersih</p> <p>a. <i>Kondisi air bersih di Desa Dadapan.</i></p>	<p>.....”Masyarakat dulunya ya antri untuk nunggu air sampai besok siang atau sore baru dapat. Ada juga ya bawa mobil untuk ambil air. Apalagi kalau ada hajatan itu ya malah besar biayanya untuk mendatangkan air ke rumah”... (16/06/2012).</p>	<p>“....Kalau air itu cuma ada di program WSSLIC-2. Untuk WSSLIC itu hanya menyentuh wilayah dusun Karang Rejo dan Karang Sejati. Namun WSSLIC itu mengalir ke induk air saja jadi ngak mencukupi warga.... Kadang-kadang karena pengurusan</p>	<p>“..Seniyen wonten air tapi angsal bantuan dugi P2LK dugi kecamatan Gucialit tapi masyarakat tasek kekurangan tuyo. Dados masyarakat desa Dadapan sedoyo tasek kekurangan tuyo sedhanten”... (28/11/2011).</p>

Lampiran 6: Lanjutan

	<p><i>b. Bagaimana awal mula terbentuknya PSAB Tirta Mandiri ini</i></p>	<p>“...Pada awalnya itu karena permasalahan air. Nah pinginya kita itu sama orang-orang mencari sumber, dan letaknya sumber cukup jauh sekitar 15 km. Yang penting kita modal semangat, nekat dan bekerja sama dan akhirnya sukses dan akhirnya banyak yang mengambil.... Emmhh terus juga air itu juga ada</p>	<p>WSSLIC masih tidak bisa mengelola air dengan benar jadi kalau ada yang rusak ya di biarkan saja. Berbeda dengan swadaya murni jadi masyarakat memasukkan air ke warga. Jadi ada kerusakan di HU. Dan wilayah selatan desa Dadapan belum dapat air. Dari pemikiran itu, kita sama pak Winoto mulai melakukan sosialisasi untuk swadaya murni..”. (28/11/2011).</p>	<p>“...Setelah wontene P2LK tiang antrian tuyo niku sampek 140 dan 150 jurigen. Kulo niku kaleh mengelola P2LK. Mantun niku wonten WSSLIC-2 masyarakat tasek antrian tuyo 90 jurigen per harine..”. (28/11/2011)</p> <p>“...Malah masyarakat desa Merakkan datang kesaya nanya kalau saya punya sumber air, setelah ngoten kulo ngengken tiang niku kengken ngumpulaken warga supados tumut. Dengan wonten swadaya Tirta Mandiri niku masyarakat mulai mboten antri teng WSSLIC-2. Wontene Tirta Mandiri niku sangat membantu</p>
--	--	---	--	---

Lampiran 6: Lanjutan

		<p>hubungannya dengan kegiatan adat masyarakat kayak Slametan, ibadah, bangun rumah jadi itu motivasi lainnya....” (16/06/2012).</p> <p>Dibentuknya itu akhir tahun 2005 atau awal tahun 2006. Kita namakan Tirta Mandiri karena airnya swadaya masyarakat sendiri bukan dari pihak pemerintah. Yang ngajak saya pertama pak Winoto untuk swadaya air dan dikelola agar bagus. (16/06/2012).</p>		<p>masyarakat, dados masyarakat mboten wonten seng antri..”. (28/11/2011).</p>
<p>c. <i>Prinsip dan nilai apa yang menyemangati PSAB Tirta Mandiri dalam penyediaan air bersih hingga berhasil.</i></p>		<p>“...Diawali semangat kerjasama dan juga tanpa pamrih Tirta Mandiri itu, walaupun capek ya tetap berjalan. Jadi di Tirta Mandiri itu air adalah kekeluargaan, bukan dijadikan bisnis, kalau dibuat bisnis malah</p>	<p>“...”Karena prinsip kita (Tirta Mandiri) sama berat, sama rata, sama kecil, sama besar. Kalau air disini kecil, sana harus kecil, kalau air disini besar, disana juga besar..”. (28/11/2011).</p>	<p>“...Prinsip Tirta Mandiri mempunyai perasaan bahwa dia merasa bisa amal baik, bagi orang yang nggak mampu dan ngak punya biaya bisa ambil air dari Tirta Mandi niku kuncine.”.....”Nggadah tuyo mboten saget</p>

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>memunculkan konflik antar warga. Anggota juga tidak begitu suka dengan sistem bisnis air gitu...”. (16/06/2012).</p>	<p>....”Disisi lain jiwa gotong royong masih tinggi, persaudaraanya juga masih kental dan mudah diajak kerjasama asalkan sudah ada buktinya itu yang menyemangati sampai sekarang..” (10/06/2012).</p>	<p>diampungi, niku untuk pemikiran Tirta Mandiri mboten teng niku. Nek kulo wonten anggota seng nggadah pemikiran niku. Anggota niku kulo pedhalaken. Misale, Awakmu ndak usah njupuk ben dijupuk wong sadar ae, ngantos ngoten kulo. Artine opo masalahe, jenenge banyu, kapan meneh awakmu seng iso ngekei, kate ngekei wong dak duwe iso kapan meneh, kate ono Slametan sek mbeleh sapi. Jenenge banyu kan amal jariah nang tonggo....” (28/11/2011).</p>
<p><i>d. Apa tujuan yang hendak di capai</i></p>	<p>....”ya..biar mudah ambil air dan juga air di masyarakat dapat tercukupi,pokoknya saling berbagai sama tetangga gitu....” (16/06/2012).</p>	<p>“...ya..paling tidak itu ngak susah ambil air, jadi tidak perlu antri-antri ke HU WSSLIC-2 atau ke desa lainnya. Jadi kalau ada acara atau kegiatan rumah tangga mudah untuk</p>	<p>...”Kulo pingin nggadah tuyo seng lebih untuk masyarakat....Nek teng mriki niki mboten wonten perbedaan antar masytarakat. Mboten wonten larangan mundut</p>

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>- <i>Bagaimana mencapai tujuan tersebut</i></p>	<p>“...Dengan swadaya, gotong royong, kompak sama seluruh warga untuk kerjasama mendatangkan air bersih lewat Tirta Mandiri...”. (16/06/2012).</p>	<p>medapatkan air, jadi bisa tenang sekarang...” (10/06/2012).</p> <p>“....ya dengan swadaya itu untuk mendatangkan air dari sumber air ke desa Dadapan. Yang tak ternilai harganya itu kan pekerjaan swadaya, kalau cuma uang 6 juta untuk pembelian pipa, asesoris dan pembuatan jeding itu tidak seberapa. Yang menjadi penting ya Gotong Royongnya itu. (10/06/2012)</p>	<p>tuyo.....” (28/11/2011).</p> <p>“...ya harus swadaya bersama masyarakat yang di himpun Tirta Mandiri....Memang betul-betul Tirta Mandiri itu berusaha sendiri, walaupun kemarau panjang untuk masyarakat Dadapan tidak pernah antri sekarang karena air sudah tercukupi, kalau dulu biasanya 100 jurigen di HU umum WSSLIC. Masyarakat sudah sadar untuk desa Dadapan, bisa gali dana sendiri, gali sendiri sebagai aset...”. (15/06/2012)</p>
--	--	--	--	---

Lampiran 6: Lanjutan

	<p><i>h. Terkait dengan mekanisme PSAB Tirta Mandiri, seperti apa sistem keanggotaan PSAB ini</i></p>	<p>“...Untuk Tirta Mandiri pengembangan sarana air pada tahap 1, anggotanya memang saya batasi karena takut airnya ngk cukup di distribusikan sedangkan untuk masyarakat yang minta air di tiap anggota ya tidak dibatasi. Sekarang saya mampu ambil air tetapi tetangga saya ngak mampu ambil air. Yaa tetangga harus bantu gotong royong itu, sewaktu-waktu butuh air kan tetangga tidak malu.” (16/06/2012).</p> <p>“...Setelah kita berhasil mulai masyarakat minta untuk dialiri air rumahnya dan ikut keanggotaan, baru dikembangkan ke Tirta</p>	<p>“...Kalau Tirta Mandiri 1 itu memang dibatasi, karena memperhitungkan debit air di sumber. Untuk keseluruhan anggota dari Tirta Mandiri 1 jumlahnya 25 paket anggotanya 60-an KK.”.(11/07/2012)</p>	<p>“.....Kalau ada masyarakat yang ingin ikut ya untuk Tirta Mandiri pertama itu tidak bisa, karena terbatas. Nanti tahap ke dua baru dikembangkan ke Tirta Mandiri 2 karena stok debit air cukup banyak....”(15/06/2012)</p>
--	---	--	--	---

Lampiran 6: Lanjutan

		<p>Mandiri 2. Untuk pengembangan air memang Tirta Mandiri 1 tidak ada pengembangan karena sumber mata airnya sudah cukup. Jika mengembangkan lagi butuh sumber lain untuk mengalir ke warga biar airnya cukup. Kalau ambil dari Tirta Mandiri 1 kan tidak cukup..” (16/06/2012).</p>		
	<p><i>i. Bagaimana kepengurusan dan tata kerja yang dijalankan pengurus pada paguyuban ini</i></p> <p>- Struktur kepengurusan</p>	<p>“...Waktu itu pengurus di pilih oleh anggota, semua dikumpulkan dan membahas siapa yang</p>	<p>“...Kalau dalam kepengurusan Tirta Mandiri itu terbagi atas beberapa bagian. Ada</p>	<p>“...Kepengurusanya ya ada ketua, sekretaris, bendahara dan bagian teknisi..” (15/06/2012)</p>

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>-Tanggung jawab pengurus</p>	<p>pantas jadi ketua, sekretaris, bendahara dan teknisi.” (16/06/2012).</p> <p>“...Ketua itu hanya memberikan wawasan saja, kalau ada kendala kan ketua yang menyarankan perbaikan”. Tanpa persetujuan anggota pemilihan pengurus tidak sah, karena yang punya kuasa itu anggota..”. (16/06/2012).</p>	<p>ketua, sekretaris dan bendahara, teknisi serta dibantu seksi-seksi lainnya seperti kesehatan dan pembenahan.... “(28/11/2011).</p> <p>“Sekretaris ya masalah administrasi saja, dan pembukuan itu....Ada seksi kesehatan yang bertugas untuk jamban murah dan promosi kesehatan berupa kebersihan. Kalau seksi teknis ada dua seperti pak Winoto dan seksi teknis di bawah pak Winoto. Kalau ada kerusakan ya bagian teknis. Kalau ada kerusakan besar baru kita dan anggota yang langsung terjun sesuai dengan hasil rapat anggota”. (28/11/2011).</p>	<p>“....Sebagai teknisi itu, pertama, untuk mengadakan perencanaan itu cukup sulit karena jangkauannya jauh. Sebelum direncanakan yaitu harus cari sumber dulu Setelah menemukan sumber, nanti saya konsultasi dengan desa setempat yang memiliki sumber, lha itu saya yang mengurus....” (15/06/2012)</p>
	<p>- Sanksi</p>	<p>“...Kalau ada pengurus yang mengembangkan lagi itu harus persetujuan pengurus dan anggota. Misal kalau ada pengurus</p>	<p>“...Untuk ketua di Tirta Mandi ya bisa ganti, nah untuk persyaratan ya paling anggota sendiri. Malah ketua sekarang</p>	<p>“.....Yang pasti sanksinya harus keluar dari Tirta Mandiri dan akan tidak dipercaya lagi di masyarakat kalau ada</p>

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>- <i>Pendapatan/Gaji Pengurus</i></p>	<p>yang mengembangkan lagi tanpa persetujuan ya otomatis harus keluar karena sudah melanggar kode etik paguyuban” (16/06/2012).</p> <p>“..Untuk pengurus yang dapat uang kan petugas pembenahan, kalau ketua, sekeretaris, bendahara ya ngak dapat gaji. Jadi kalau ada masalah ya ketua dan petugas teknis yang membantu memperbaiki bersama petugas pembenahan. (16/06/2012).</p> <p>Kalau yang kita gaji itu bagian pembenahan, jika ada kerusakan. Kalau tidak rusak ya tidak dibayar jadi disesuaikan kalau ada yang rusak. Penggajiannya itu disesuaikan dengan upah kerja di Dadapan. Kalau disini orang kerja sehari 30 ribu, ya kalau</p>	<p>minta ganti, masalahnya kalau cuma satu orang yang lainnya tidak berkembang karena takut anggota tidak mahir dalam pembenahan pipa...”.(10/06/2012)</p> <p>“..Kalau ada pengurus yang tidak amanah ya harus keluar, karena menyalahi aturan yang telah di sepakati di paguyuban. Bahkan nanti bisa-bisa ngak diorangkan jadi kalau di desa lebih baik ngak punya uang dari pada ngk diorangkan..” (28/11/2011).</p> <p>Kalau menjadi pengurus itu tidak dapat gaji, ya kita bisa diorangkan itu saja. Ketika saya pergi kemana saya diorangkan. Jadi ngak serupiahpun kita dapat keuntungan. (28/11/2011).</p>	<p>kegiatan apa-apa karena wes tercemar namanya....” (15/06/2012)</p> <p>Untuk saya tidak diterima honor dari Tirta Mandiri, intinya saya mengabdikan pada masyarakat. dan yang dapat itu anak buah saya bagian pembenahan (15/06/2012)</p>
--	--	--	---	---

Lampiran 6: Lanjutan

		rusaknya satu hari 30 ribu. Kalau rusaknya 5 atau 7 hari yang tinggal dikali saja 30 ribu dikali 5 atau 7 hari. Nah itu gaji petugas pembehanan (16/06/2012)		
	<p>j. <i>Bagaimana mekanisme kerja PSAB Tirta Mandiri dalam</i></p> <p>- <i>Pengambilan keputusan</i></p>	<p>“..Untuk pengambilan keputusan semua harus hadir baik pengurus dan anggota dalam rapat. Jika ada konflik antar anggota ya harus diselesaikan dalam rapat anggota. Di Tirta Mandiri tidak ada gontok-gontokan apalagi dendam. Semisal ada pengurus yang tidak beres ya anggota langsung minta konfirmasi sama pengurus pada rapat</p>	<p>“..Kalau ada kendala kita musyawarahkan sama anggota, kalau anggota ngengkel (mengeyel) ya kita kasihkan anggota...” (10/06/2012).</p> <p>“di rapat musyawarah juga bisa memberhentikan pengurus. Seperti kemarin ada pengurus tiba-tiba jual air 1 paket ke orang tanpa mengetahui pengurus lain dan anggota. ya pasti</p>	<p>“.... ya di musyawarahkan sama anggota, semisale kalau ada perbaikan, anggota baru yang masuk dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau tanpa rapat musyawarah, pengurus ngak memiliki hak. Karena musyawarah itu rapat tertinggi di paguyuban.” (15/06/2012)</p>

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>- Sistem pembiayaan</p>	<p>bulanan...”.(16/06/2012).</p> <p>Pengambilan keputusan harus musyawarah. Kalau tidak musyawarah, saya sebagai ketua ngak bisa membuat kebijakan karena semua itu atas keputusan rapat anggota dan anggota yang memiliki wewenang, kekuasaan di anggota. (16/06/2012).</p> <p>“...Kalau pembiayaan ya di tanggung warga atau anggota yang ikut dalam paguyuban ini. Pada waktu itu ya nekat, biaya awalnya 2.500.000/paket. 1 paket . setelah dikerjakan biaya ngk nutut. Awal anggota 24 orang. Setelah biaya kurang. Kita rapat lagi dan diputuskan untuk nambah uang 3.500.000 orang...” (16/06/2012).</p>	<p>dirapatkan dulu. Maksudnya jual air itu apa, kok tiba-tiba di jual. Kalau tetap ngeyel ya kita keluarkan karena tidak sesuai dengan prinsip Tirta Mandiri. (10/06/2012).</p> <p>“...Kalau biaya untuk mengalirkan air dari sumber ke rumah warga ya swadaya sendiri secara bersama-sama. Ketika itu kekurangan dana, iuran 3.000.000 dan dana kurang, kita kumpul lagi, kita sepakat menambah dana sebesar 500.000/unit””. (10/06/2012)</p>	<p>Untuk Tirta Mandiri sistem pembiayaanya mengalirkan air ya niku swadaya masyarakat sedhanten seng tumut. Pada tahap pengembangan tahap pertama niku 3.500.000 jumlahnya 25 paket dengan total konsumen 67 KK. Untuk pengembangan ke dua niku 56 paket 197 KK, kontribusi masyarakat per paket sebesar 6.000.000...”</p>
--	----------------------------	---	--	--

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>- Sistem bagi masyarakat yang tidak mampu</p>	<p>“Untuk urunan 1 paket 3.500.000 jadi kalau masyarakat ngk mampu bayar segitu yta harus dibagi 6 orang jadi beban itu agak ringan jadi kita ngk mempersulit anggota.Sekarang saya mampu ambil air tetapi tetangga saya ngak mampu ambil air. Yaa tetangga harus bantu gotong royong itu, sewaktu-waktu butuh air kan tetangga tidak malu.</p> <p>Kalau untuk kerja bakti di Tirta Mandiri lebih mewajibkan pada anggota saja, tetapi dalam pelaksanaanya banyak warga yang ikut membantu menggali pipa. Bahkan kalau tidak diberitahu warga/tetangga</p>	<p>“..Kalau yang butuh air kita siapkan HU umum yang bisa di ambil airnya sama masyarakat. Kalau ada masyarakat tidak ikut atau ambil paket Tirta Mandiri, ya masyarakat membantu gotong royon”(28/11/2011)</p> <p>“..Untuk sosial juga kita membangun tempat wudhu di Musholah dan di pinggir jalan agar mudah di ambil warga yang tidak mampu..” (28/11/2011)</p>	<p>(28/11/2011).</p> <p>“..Untuk warga yang tidak mampu, nanti saya beri aturan jangan ambil 1 paket, jadi 1 paket bisa digunakan 4 KK. Nanti setelah nyampek masyarakat dipecah menjadi 4 rumah.” (15/06/2012)</p>
--	--	--	---	---

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>- <i>Sistem keamanan</i></p>	<p>itu marah, jadi disana untuk kerja bakti memang tidak menuntut orang lain agar ikut.” (16/06/2012).</p> <p>“...Untuk desa Dadapan kan tidak punya sumber mata air yang punya itu kan masyarakat desa lain jadi Tirta Mandiri punya kebijakan pada masyarakat yang punya sumber, dari sumber desa Kertowono. Misalnya masyarakat Kertowono, kan masalahnya butuh air jadi kita perbaiki dulu air masyarakat disana pipanya dan dengan pemberian pemberian HU, setelah itu sisanya kita ambil dan dialirkan ke desa Dadapan. Sehingga keamananya juga dibantu masyarakat Kertowono.”(16/06/2012)</p> <p>“...Kalau pipa melewati lahan warga ya kita minta</p>	<p>“...Kalau keamanan Tirta Mandiri itu sistem kerjasama dengan warga yang memiliki sumber jadi sarana warga yang memiliki sumber kita perbaiki dulu. Dan keamanan sumber diawasi warga yang punya sumber. Apabila ada pipa yang melintasi ladang orang ya orang yang punya itu kita bayar untuk menggali pipa jadi biar aman harus orang itu sendiri yang menggali bukan anggota kita. Jadi kita harus bisa <i>unggah-ungguh</i> atau <i>nunsewu</i> itu nomor satu agar tidak dirusak pipa kita. Apabila ada kerusakan di wilayah sumber kita menghubungi warga sana untuk memperbaiki, jadi kita ngk usah ke sumber...”</p>	<p>“...Mulai perencanaan dulu saya persiapkan, mau lewat pipa minta izin dulu pada yang punya tanah, karena tanpa adanya izin kan kurang menyadari dan tidak menghargai, dalam pelestarian jadi tertanam akan mudah kita menjalin relasi antar orang. Orang akan merasakan sudah aman walaupun uang itu hanya sekedar untuk beli rokok, akan membantu untuk mengawasi...”. (15/06/2012).</p>
--	---------------------------------	--	--	--

Lampiran 6: Lanjutan

	<p>- Kebijakan layanan pendistribusian air bersih.</p>	<p>izin dulu pada yang punya tanah, jadi kita harus menjaga sikap, seperti lemah lembut jadi untuk mengambil air harus sopan agar tidak di benci pada masyarakat yang punya sumber...”(16/06/2012).</p> <p>“Kalau ada yang komplain semisal masalah air kecil, kurang dan mati, ya pengurus yang langsung jalan dan harus diperbaiki namanya sudah tugas pengurus jadi ngk usah diperintah lagi.” (16/06/2012).</p>	<p>(28/11/2011).</p> <p>“Jadi pembangian air itu di wilayah A satu detik per liter dan di wilayah B harus sama. Dalam 1 paket ada yang di pakai 1 KK ada yang 2 KK dan 4 KK..” (10/06/2012).</p> <p>“..Setiap pembagian di masyarakat ada di jeding induk (HU). Jadi setiap (HU) didalamnya dibagi menjadi 2, jadi 6 paket ke masyarakat di wilayah sekitar jedingan, dan sedangkan 6 langsung menuju ke wilayah lain. Meskipun terbagi di induk. Air yang masuk ke wilayah berikutnya itu tidak berkurang malah</p>	<p>“..Sistem Seket itu cukup adil, dados pemikiran kulo langsung muncul dhamel niku. Untuk sistem seket niku, dibentuk paket teng induk sumber, semisal dalam 1 induk pinten paket atau 1 paket induk digunakan 5 konsumen. Dari induk 1 ke induk 2, semisale 24 paket, seng wonten induk 1 niku ngedalekan 5 paket, dan induk 2 ngedalaken 19 paket, la nek wonten induk maleh nggeh di bagi maleh, sisae pinten. Lha nek ngukur dari induk 1 dan 2 semisale induk pertama 1 jam 1 liter di induk 2 ya harus sama...”</p>
--	--	---	--	--

Lampiran 6: Lanjutan

	<p><i>k. Seperti apa kegiatan rutin yang dijalankan PSAB Tirta Mandiri dalam menjaga agar program lancar</i></p>	<p>“Untuk pertemuan itu setiap jumat legi bentuknya yasinan, bulanan dan arisan. Nah dengan adanya arisan kan masyarakat bisa semangat datang ke pertemuan. Nah untuk kontribusi bulanan itu sebesar 10 ribu.” (16/06/2012).</p>	<p>tetap besar. Makanya dalam pembangunan induk memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Misalkan di induk terdapat seratus paket. Seratus itu dibagi menjadi dua, jadi 50 paket, 50 paket. 50 paket itu harus dibagi lagi menjadi beberapa paket lagi semisal di bagi 2 jadi 25 paket. Dari 25 paket dibagi lagi asalkan pembagiannya harus genap tidak boleh ganjil..” (11/07/2012)</p> <p>“Untuk pertemuan di Tirta Mandiri itu satu bulan sekali bahkan sampai sekarang eksis. Kalau pertemuan bergantian tergantung siapa yang dapat arisan nanti. Untuk iuran perbulan 10.000 jadi uang itu nanti di buat menggaji bagian teknis untuk membenahi kerusakan</p>	<p>(28/11/2011).</p> <p>“..Teng Tirta Mandiri niku wonten pertemuan kegiatanepun damel bulanan kaleh arisan. Nek 1 paket bayare 10.000/KK, lha nek satu paket di pundut tiang sekawan (4) nggeh mbayar 2.500/KK...” (28/11/2011).</p>
--	--	--	---	---

Lampiran 6: Lanjutan

	<p><i>Alasan menggunakan hari tertentu</i></p>		<p>(28/11/2011).</p> <p>“..Kalau memakai malam <i>jumat legi</i> kan lebih mudah mengingatnya karena pasti ramai, sebab adatnya banyak orang datang ke makam untuk nyekar/berdoa dan ada yang ke Danyang (tempat makam angker sesepuh desa yang matinya tidak ketemu). Jadi dengan adat itu kita bisa mengingat kalau kita malamnya ada rutinan bulanan Tirta Mandiri...” (10/06/2012).</p>	
	<p><i>Tujuannya apa</i></p>	<p>“..Jika ada konflik antar anggota ya harus diselesaikan dalam rapat anggota. Di Tirta Mandiri tidak ada gontok-gontokan apalagi dendam. Semisal</p>	<p>“..Yaa intinya kita mengadakan pertemuan bulanan itu bukan hanya membahas air bersih itu ada masalah apa saja, tapi ada acara paguyuban itu ada acara tahlilan juga ya</p>	<p>“..Untuk uang perawatan untuk kebutuhan pipa, shock, lem, tenaga teknis yang memperbaiki. Untuk petugas teknis juga ada di desa dadapan dan di desa Kertowono.” (15/06/2012)</p>

Lampiran 6: Lanjutan

		<p>ada pengurus yang tidak beres ya anggota langsung minta konfirmasi sama pengurus pada rapat bulanan...”. (16/06/2012).</p> <p>Kalau ada anggota yang meminta penjelasan masalah uang, ya harus diketahui semua anggota, dan saya menjelaskan dalam rapat. Sebelum uang masuk ke bendahara harus mengetahui saya dulu setelah itu baru ke bendahara. (16/06/2012).</p> <p>“Kuncinya ya komunikasi yang baik sama anggota jadi jangan sampai ada rahasia. Kalau ada anggota yang mau mengembangkan lagi tanpa musyawarah ya pasti akan mengalami gejolak tapi saya menengahi konflik antar pengurus lain dengan anggota”. (16/06/2012).</p>	<p>seperti mengaji. Tujuannya karena pipa kita di tengah hutan supaya tidak dirusak warga, ya kita menjaga juga serta kita minta bantuan Yang Diatas untuk menjaga itu dengan mengaji itu. Yang kedua kalau ada informasi yang baru kita cepat tahu.” (10/06/2012)</p> <p>“Selama 4 bulan tidak ada acara rutin tahlilan sehingga air itu sering mati, pipa sering meledak. Setelah itu mulai ada acara rutinan yaa ngak ada yang rusak sampai sekarang. Antara percaya dan tidak memang kegiatan itu cukup bermanfaat”. (10/06/2012).</p>	
--	--	--	--	--

Lampiran 6: Lanjutan

<p><i>Apa dampaknya dari pertemuan tersebut</i></p>	<p>“Agar Anggota Tirta Mandiri itu rukun dan tahu perkembangan informasinya..” (16/06/2012).</p>	<p>“..Untuk iuran perbulan 10.000 jadi uang itu nanti di buat menggaji bagian teknis untuk membenahi kerusakan...” (28/11/2011).</p> <p>“..Untuk mengantisipasi kekeliruan pembayaran, saya membuat buku iuran berserta stempel dan yang memegang stempel itu bendahara, sehingga tidak bisa di tiru kalau gitu..” (10/06/2012)</p> <p>“..Semua anggota harus ikut kumpul kalau ada acara rutin pada malam <i>jumat legi</i> dan itu adalah aturan paguyuban. Kalau ada yang nitip untuk arisan jika anggota tidak masuk ya di tulis tidak hadir. Dan kalau mau nitip pada kelompok yang dekat untuk iuran ya pasti ditolak. Jadi tidak boleh nitip dan harus hadir.</p>	<p>“..Ya lebih banyak informasi yang didapat anggota pada perkembangan paguyuban air bersih..” (15/06/2012).</p>
<p><i>Sanksi</i></p>			

Lampiran 6: Lanjutan

	<p><i>Manfaat Apa yang dirasakan masyarakat dengan keberaan Tirta Mandiri ini</i></p>	<p>“..Alhamdulillah banyak manfaatnya, misalnya buat tambak ikan ya lumayan lah buat tambahan dan juga sekarang punya air sendiri...” (16/06/2012).</p>	<p>Kalau ngk hadir dalam pertemuan itu tapi ikut minum meskipun dia bayar ya pasti sungkan, apalagi kalau ada arisan tidak hadir pas orang itu dapat arisan di rumahnya yang hadir pasti sedikit. Jadi dia mikir jadi dia ngk diorangkan, jadi kalau di desa lebih baik ngak punya uang dari pada ngk diorangkan...” (28/11/2012)</p> <p>Dengan adanya Tirta Mandiri ini sangat membantu, semisal musim tebang tebu tiba, masyarakat itu masih mikir-mikir nanti pulangny mandi pakai apa, minumnya pakai apa. Tapi sekarang masyarakat habis tebang tebu dan pulang air sudah ada jadi pendapatnya bertambah..” (10/06/2012).</p>	<p>“..Damel kolam semisale pak Yanto buat tambak ikan Mujair. Nambah pendapatan bagi masyarakat dados ngak ngantri tuyo waktune damel nyambut gawe...” (28/11/2011).</p>
--	---	---	--	--

Transkrip Wawancara

(Masyarakat Pemanfaat/Anggota PSAB Tirta Mandiri)

Kegiatan

Jumlah Informan

Lokasi Wawancara

Tanggal/Bulan/Tahun Wawancara

Tambahan Informasi

Tema Wawancara

- : Group Interview (FGD) di hadiri pengurus PSAB Tirta Mandiri dan anggota
- : Dihadiri oleh 18 orang yang terdiri dari 4 ketua kelompok dan 14 anggota
- : Dusun Karang Sejati di rumah Bapak Matrio salah satu anggota Tirta Mandiri yang kediamannya mendapat giliran untuk acara pertemuan rutin PSAB Tirta Mandiri
- : **(05/07/2012)**
- : Dalam kegiatan FGD ini, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pertemuan rutin kelembagaan. Kegiatan *group interview* juga di gunakan untuk menggambarkan pengaruh tingkat kelembagaan di Desa Dadapan yang di buat dengan pendekatan diagram Venn
- : Mengetahui proses pengembangan masyarakat dalam penyediaan air bersih melalui PSAB Tirta Mandiri dan Manfaat dari keberadaan air bersih yang di kelola Tirta Mandiri

No	Ketua Kelompok	Kode Informan	No	Nama Anggota	Kode Informan
1	Mistomo	MSM	1	Suhin	SHN
			2	Wiwit	WIT
			3	Sutikno	STK
			4	Ridwan	RDN
2	Sultan	SLT	5	Rohit	RHT
			6	Agus Purnomo Hadi	APH
			7	Sumo	SMO
3	Sutila	STL	8	Sugiri	SGR
			9	Suli	SLI
			10	Matrio	MRT
			11	Nur Imam	NIM
4	Misnali	MNL	12	Awi	AWI
			13	Rohit	RHT
			14	Suhin	SHN

		<p><i>i. Bagaimana proses penyediaan air bersih pihak tersebut bersama warga hingga sukses sampai sekarang</i></p> <p><i>1. Tahap persiapan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sosialisasi warga</i> - <i>Survey pencarian sumber air</i> 	<p>Saya membantu pak Winoto dan Yanto melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat di desa Dadapan. Datang ke desa untuk mempengaruhi warga yang butuh air. Untuk pembiayaan di pikul bersama. Setelah sosialisasi pada masyarakat yang membutuhkan air bersih baru melakukan tindakan berikutnya. (MSM)</p> <p>Dengan gagasan mengumpulkan teman-teman untuk rembukan bagaimana caranya bisa mengalirkan air dengan jarak 15 km dari sumber ke desa. (STL).</p> <p>Yaa ada yang langsung <i>dor to dor</i> ke rumah-rumah warga untuk menjajaki mau apa tidak kalau mencari air bersih. Baru setelah itu orang-orang itu lihat sumbernya dulu.(APH)</p> <p>Sebelum kita ngomong dulu di masyarakat terlebih dulu kita mencari sumber air. Yang mencari sumber saya sama pak Winoto. Baru kalau sudah ketemu kita memberi tahu pada masyarakat. Kalau melibatkan warga ke sumber itu warga tidak mau, baru kalau ada warga yang punya minat kita ajak.(MNL)</p> <p>Cari sumber, setelah tahu sumber, baru di ajak warga. Di perbatasan hutan lumajang dan hutan probolinggo untuk pengembangan kedua, kalau pertama di Kertowono. Kalau dengan kata-kata masyarakat itu banyak ngak di percaya.</p>
--	--	--	--

Lampiran 6: Lanjutan

		<p><i>Modal Finansial</i></p> <p><i>Modal Lingkungan</i></p> <p><i>Modal Teknologi</i></p> <p><i>Modal Manusia</i></p>	<p>Adatnya masih kuat disini, semisal ada kegiatan pengajian desa ya kita bantu semua, mulai dari pengerjaan kita gotong royong dan juga untuk uang ya iuran bareng-bareng. (APH)</p> <p>Kalau secara ekonomi di sini tidak mampu, tapi kalau urunan ya bisa asalkan di gotong bareng-bareng. Contohnya masalah air Tirta Mandiri itu, ketika di kumpulkan semua bisa gali dana sendiri, gali sendiri sebagai aset. Aset dari desa Dadapan sekitar 500.000.000 untuk swadaya murni ini. (MSM)</p> <p>Lingkungan itu ya pertanian itu tho, kalau pertanian disini tidak petani sawah tapi petani tebu dan pohon sengon. Kadang kala hasilnya di jual di pabrik dan tengkulak. Dari itu juga bisa untuk ikut air bersih Tirta Mandiri. Kalau ada yang punya pohon selain itu ya di kasih warga di sekitar sumber untuk di tanam supaya sumbernya besar. (RHT)</p> <p>Untuk teknologi disini masih tertinggal, tapi nek teng Tirta Mandiri niku teknologi seng di damel lumayan sae, masalahipun ndamel sistem Seket. Sistem Seket niku pembagian air yang terlebih dahulu di bagi melalui HU disesuaikan kaleh jumlah seng mendet tuyo. Sistem niki cukup adil damel pembagian air teng warga. (NIM)</p> <p>Kalau teknologi pengelolaan air Tirta Mandiri itu menggunakan terminal air bukan stok kran. Jadi air itu bisa seimbang. (SLT)</p> <p>Kalau disini rata-rata lulusan SD ya masih rendah pendidikannya, tapi kalau ada kegiatan apa-apa ya ada rasa kesadaran, contohnya masalah kebersihan ya kita ikut kumpul. Asalkan di jelaskan apa tujuane ya kami ikut saja. (APH)</p>
--	--	--	---

Lampiran 6: Lanjutan

		<p>- <i>Mekanisme pembiayaan paket sarana air bersih</i></p> <p>3. <i>Tahap Perencanaan Kegiatan</i></p> <p>- <i>Penentuan peta wilayah penempatan air bersih di masyarakat</i></p>	<p>Strateginya kita ambil dari pihak keluarga dulu biar mudah kekerabatanya, kita mulai ambil 24 paket biar rata pembangian air di desa Dadapan. Kendalanya Dari 24 orang yang mendukung, diantara 24 orang yaa masih ragu karena tidak akan nyampek, karena melihat kondisi jauh sekitar 15 KM. (APH)</p> <p>Dulu itu kan kita kumpul di rumah pak Yanto untuk pertemuan iuranya 2.500.000/paket kemudian setelah pelaksanaan kita kumpul karena kekurangan dana, dan sepakat kita menambah dana. (STL)</p> <p>Setelah mencapi 80% pekerjaan air bersih ini, kita mengalami kendala kekurangan dana. Lalu kita rapat lagi apakah nambah anggota atau nambah biaya, akhirnya orang-orang sepakat untuk nambah biaya menjadi 3.000.000 dalam 1 paket. Itupun setelah 3 juta masih kurang atau belum mencukupi, jadi iuran lagi dan setiap kerjabakti selalu di umumkan karena, kekurangan dana karena itu masa-masa kerja. (STK)</p> <p>Akhirnya urunan 3.500.000 tapi belum nyampek sini, akhirnya urunan lagi biar nyampek. Tapi kalau urunan tetapnya ya 3.500.000 itu, kalau ada urunan lagi itu untuk perbaikan saja (SMO)</p> <p>Untuk pertama, kita bangun HU Utama di wilayah sumber Perang dan Probolinggo. Setelah itu baru kita bangun HU lagi yang nanti sekiranya penempatan HU itu tepat berada di wilayah yang akan di aliri air. Jadi ngak di bangun tiap kilometer HU tapi kalau ada wilayah yang menggunakan air itu ya</p>
--	--	---	--

Lampiran 6: Lanjutan

		<p>- <i>Pemilihan jenis sarana air bersih</i></p> <p>- <i>Pembentukan kelompok unit kerja di masyarakat</i></p>	<p>kita bangun biar hemat biayanya. Semisal di wilayah wilayah Kertowono ada 4 HU dirumah pak Sugiyo, Patmo, Sukri sama Wage. (MSM)</p> <p>Dari jeding induk di Desa itu di sudah di bagi menjadi 2, jadi di tata dulu untuk dibagi jadi 4 kelompok dan otomatis bercabang menjadi 2 wilayah pedukukuan, di dusun Karang Sejati meliputi RW IX, VII, IX, VIII. Kalau di dusun Karang Rejo RW III. Tujuannya agar rata air itu. (SLT)</p> <p>Jenis sarana yang di pakai itu ya model Grafitasi karena wilayahnya kan tinggi jadi cocok, kalau memakai sistem stok kran malah airnya ngak bisa adil. Kalau untuk pipa ya memang tidak pipa yang bagus karena terkendala biaya. (NIM)</p> <p>Untuk sistem seket niku, dibentuk paket teng induk sumber, semisal dalam 1 induk pinten paket atau 1 paket induk digunakan 5 konsumen. Dari induk 1 ke induk 2, semisale 24 paket, seng wonten induk 1 niku ngedalekan 5 paket, dan induk 2 ngedalaken 19 paket, la nek wonten induk maleh nggeh di bagi maleh, sisae pinten. Lha nek ngukur dari induk 1 dan 2 semisale induk pertama 1 jam 1 liter di induk 2 ya harus sama. (APH)</p> <p>Pembentukan kelompok itu tujuannya biar mudah koordinasi kalau sudah mulai kerja. Sebenarnya kan ada 4 kelompok berada yang Karang Sejati 3 kelompok dan 1 kelompok di Karang Rejo atau 4 kelompok jadi total tersebar di 4 RW. (MNL)</p> <p>Biar ditunjuk sebagai ketua kelompok itu intinya agar bisa mengkoordinisr anggota, untuk pekerjaan semua sama-sama. Ketua kelompok di gunakan sebagai koordinator, sebagai ketua kelompok harus berwibawa dan tua biar anggotanya nurut. (STL)</p>
--	--	---	---

Lampiran 6: Lanjutan

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mekanisme kredit pembiayaan dan angsuran sarana dan prasarana</i> - <i>Menentukan wilayah pembangunan sarana air dan masyarakat yang mengambil paket air.</i> - <i>Mekanisme sistem pembiayaan bagi warg</i> 	<p>besoknya RT sini. Jadi sebelum air masuk, kita sudah menggali pipa dan menyiapkan semua. (MNL)</p> <p>Kalau untuk pembiayaan ya harus lunas semua, biar nanti kerjanya mudah ya kalau ada yang utang itu sich biasa, tapi di usahakan agar lunas semua. (APH)</p> <p>Jadi tidak bisa di cicil, karena uang itu dibutuhkan untuk biaya beli pipa, ya kadang ada yang jual perhiasan untuk menutupi itu. (SLT)</p> <p>Jika ada yang ngak mampu mengambil 1 paket harus di kroyok 2 atau 4 KK, jadi lebih kecil bebannya. (MRT)</p> <p>Wilayah yang dialiri kan di dusun Karang Sejati, RW IX, VII, IX, VIII. kalau Karang Rejo RW III. Dari pengelompokan ketua unit seperti di wilayah Mistono atau RW VIII ini di bangun 1 HU ini dipecah lagi menjadi 6 paket atau sesuai dengan jumlah anggota, jadi masyarakat yang mengambil di RW tersebut sudah menyediakan pipa dan pembangunan HU kecil untuk dialirkan ke rumah-rumah anggota. Nanti akan mempermudah anggota untuk mengambil air. (SLT)</p> <p>Intinya itu ya warga yang mengambil paket harus siap nyediakan pipa di masing-masing rumah dan di sambungkan dengan HU. ketika air itu masuk ke HU jadi mengalir semua ke rumah-rumah. (STL)</p> <p>Jadi untuk pembagian paket itu di desa Dadapan di bagi menjadi dua. Yang sebelah utara 12 paket, bagian selatan 12 paket jadi total kan 24 paket. (NIM)</p> <p>Kalau 1 paketnya itu 6 juta itu terlalu besar ya harus dibagi di pecah jadi 6 KK, tapi airnya mencukupi. Kebanyakan 6 KK itu masih saudara, misalnya 6 juta ya</p>
--	--	---	---

Lampiran 6: Lanjutan

		<p><i>kurang mampu agar memperoleh sarana air bersih</i></p> <p>5. Tahap Pelaksanaan</p> <p>- <i>Pelibatan masyarakat dalam Pembangunan Hidran Umum</i></p>	<p>di bagi 6 KK. (SHN)</p> <p>Jadi kalau Cuma ambil 1 paket, ya 6 KK biasanya ikut kerja bhakti semua, biar kalau rusak pipanya cepat terselesaikan, kan cukup membantu sekali (MNL)</p> <p>Kalau ada tetangga minta ya dikasih, tanpa harus bayar iuran, bahkan Dari tirta Mandiri menyiapkan HU khusus untuk sosial tapi ditempatkan di luar rumah jadi kalau ambil air ya di HU itu. (NIM)</p> <p>Meskipun sistem air Tirta Mandiri ini milik pribadi, tapi yang mengambil ya banyak, bahkan untuk air di rumah saya saja pas-pasan karena melayani untuk tetangga. Karena kasihan saya tapi kalau kerja bhakti tetangga mau ikut. (STL)</p> <p>Untuk pembangunan Hidran umum memang kerja bhakti. Berjalan untuk membangun HU itu di lakukan selama 4 jam sambil membawa bahan material seperti semen, batu bata, kapur ke wilayah pembangunan HU di wilayah desa Tengger dan Perang. (MNL)</p> <p>Jadi disana sudah dibuatkan wilayah yang akan dibangun HU, dan juga kita meminta izin masyarakat kalau tanahnya mau di bangun HU lalu kita bangun bersama-sama. (MSM)</p> <p>Untuk pembangunannya bagian teknis ya seperti pak Winoto yang tahu modelnya seperti apa, karena kami juga ikut membantu dalam pembawaan bahan materail. (NIM)</p>
--	--	---	---

Lampiran 6: Lanjutan

		<p>- <i>Gotong Royong penggalian distribusi pipa</i></p> <p>- <i>Pembangunan unit Hidran kelompok</i></p> <p>- <i>Pemasangan pipa distribusi ke rumah anggota</i></p>	<p>Untuk 1 hidran induk dibutuhkan waktu 5 atau 6 hari pembangunanya karena hidran itu yang jadi pembaginya sebelum masuk ke hidran umum (APH)</p> <p>1 HU itu pembangunanya kira-kira membutuhkan waktu 3 sampai 5 Hari tergantung model dan besar kecilnya HU. (STL)</p> <p>Jadi kerja baktinya itu siang malam, yang kerja bakti itu sekitar 64 orang, bahkan waktu hari puasa malamnya kita tidak tarawih. (APH)</p> <p>Untuk wilayah sumber mata air yang menggali juga kerjasama sama masyarakat di sekitar sumber Perang dan Probolinggo karena kita kan menjalin hubungan dengan memperbaiki dahulu pipa masyarakat yang sana, jadi mungkin mereka membantu untuk penggalian di wilayah mereka saja. (STL)</p> <p>Masyarakat dalam pembangunan air bersih ya ikut ikut sendiri, yang punya paket juga ngk ngundang tetangga tapi tetangga ikut. Itulah kekompakan warga bahkan ratusan bahkan ribuan yang ikut. Untuk sistem kerja bhakti itu tidak sistem giliran tapi semua jadi satu biar cepat. (SGR)</p> <p>Untuk pembangunan unit hidran air yang ngaliri ke kelompok ya di buat bersama-sama tapi ketua kelompok yang mengkomandoi anggota kalau di kelompoknya mau di bangun HU. (SLT)</p> <p>Kalau semisal 1 kelompok ada 6 paket ya kita bangun untuk unit Hu-nya sekitar 2 HU di lokasi kita, tujuannya agar air yang masuk ke dari HU umum ke HU unit bisa merata dan mengurangi pipa. (NIM)</p> <p>Pemasangan pipanya kalau di HU ya itu tugas bagian teknis karena kita minim pengetahuan. Kalau dari HU ke rumah, itu sudah tanggung jawab kelompok dan</p>
--	--	---	--

Lampiran 6: Lanjutan

		<p>6. <i>Evaluasi</i></p>	<p>anggota. Semisale, kalau air itu nanti tiba di HU umum jam 6 malam. Jam 4 atau 5 sore kita sudah memasang pipa dan menggantinya untuk di alirkan ke rumah-rumah. (MSM)</p> <p>Masalah penggalian pipa kerumah anggota niku kerjasama kaleh tetanggi. Lha nek di buruhaken malah tambah kathah biayae. Nek mboten kerjasama kaleh tetanggi malah milliaran. (RHT)</p> <p>Ya saya sebagai ketua kelompok tugasnya memerintah mengecek kerusakan, kerjabakti dan mengotrol anggota. Kalau ada kerusakan ya kita gotong royong kalau kerja bakti ya di sepanjang pipa di jalan kalau ada yang rusak. (MSM)</p> <p>Kalau mengevaluasi kegiatan swadaya ini ya mungkin cuma pencapaian yang telah dilakukan selama kegiatan itu. Seperti selama pelaksanaan dilapangan seberapa efektif kerja dari pengurus untuk membangun jumlah fasilitas sarana air dengan target yang telah disepakati bersama waktu musyawarah. Untuk airnya apa sudah bisa lancar atau tidak. Untuk kelompok apa sudah menjalankan kerjanya dengan baik seperti kalau ada kerusakan apa sudah dibenahi. (APH)</p> <p>Untuk pembangunan sarana air seperti HU, Pipa distribusi air dan sarana lain yang dibutuhkan itu wes sesuai kalaeh perencanaan seng diputusaken. Semisale pembangunan HU niku nggeh sesuai perencanaan kaleh jadwale. Cuma seng dereng cocok niku nggeh kualitas pipa, masalahe pun kualitas mboten kualitas pipa air bersih, dados sering meletus. Tapi untuk pipanepun sampun cekap kok. (MNL)</p> <p>Kalau dilihat dari sisi air. Airnya itu ya lancar jarang ada masalah, kadang airnya itu besar banget kadang sampai bak air dirumah saya itu meluber kemana-mana. Kadang tetangga yang belum punya air saya suruh ambil</p>
--	--	---------------------------	---

		<p>7. <i>Terminasi</i></p>	<p>takutnya banjirin rumah saya. (RHT)</p> <p>Untuk pengelolaan air oleh pengurus itu menurut saya sudah efektif buktinya kalau ada kerusakan langsung diperbaiki. Kalau ada informasi mengenai masalah di paguyuban kita dikasih tahu dan diajak musyawarah bareng bareng. Kalau ada kerusakan berat kita gotong royong bareng-bareng memperbaiki. Kalau di kelompok ya sama kalau ada kerusakan di HU atau pipa pecah, pasti ketua kelompok memberi tahu dan langsung kerja. Menurut saya selama ini ya cukup efektif mengelolanya. (AWI)</p> <p>Evaluasinya itu dulu ya 1 minggu setelah pelaksanaan kayak apa air sudah bisa mengalir atau belum di tiap-tiap rumah. Kira-kira airnya sudah bisa mencukupi anggota itu saja. Intinya itu apakah ada kesesuaian pencapaian sesuai dengan target yang jadi keputusan bersama. Tapi kalau sekarang evaluasinya 1 bulan sekali biasanya membahas tentang apa ada kerusakan sarana dalam 1 bulan ini dan penyumbatan saluran pipa air di tiap HU. (STL).</p> <p>Kalau untuk mengevaluasi kan ada faktor ya seberapa efektif pekerjaan swadaya itu. Jadi indikator yang bisa dipakai ya bisa dilihat faktor yang mendorong seberapa efektif pekerjaan kita dan seberapa tidak efektifnya bisa dilihat dari hambatan yang kita dapatkan dilapangan seperti apa (MSM)</p> <p>Kegiatan ngelola air ya masih berjalan tetapi kalau untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air itu dihentikan 3 hari setelah pelaksanaan karena dari musyawarah anggota kalau air sudah masuk ke masing-masing ke rumah penduduk. (SLT)</p> <p>Sebenarnya dalam pelaksanaannya pengurus tidak langsung menghentikan kegiatan tetapi menghentikan kegiatan dilapangan karena pembangunan sarana sudah tidak ada lagi kendala. Nah dari itu kita sudah selesai kegiatannya dan</p>
--	--	----------------------------	--

		<p><u>Faktor pendorong</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Semangat Gotong Royong dan semangat</i> - <i>Menjalin hubungan dengan pihak eksternal</i> - <i>Tingginya nilai kekeluargaan</i> - <i>Penggunaan Teknologi tepat guna</i> 	<p>dialihkan lewat kegiatan di paguyuban. (RHT)</p> <p>Dengan semangat itu kita semakin termotifasi, jadi alhamdulillah kerja kita ada hasilnya, dan akhirnya banyak orang mau ikut. (WIT)</p> <p>Nilai semangat itu yang menjadi kuncinya, meskipun kerja baktinya pas hari-hari puasa kita tetap saja jalan, ngak peduli puasa karena sangking pinginnya ambil air. (RHT)</p> <p>Bahkan kalau mau ambil sumber air disana tinggal ambil tetapi harus ada perjanjian sama pemerintah desa tetangga baik kepala desa maupun yang punya tanah, malah kita yang membayar pajak tanahnya, jadi yang punya sawah itu tanggung jawab. (APH)</p> <p>Untuk tirta mandiri 2 kita tidak punya jadi kita kekuarangan dana untuk beli material kita menghutang dulu ke toko. (AWI)</p> <p>Nilai kekeluargaanya itu yang bagus, bahkan kita bisa kerja sama dengan masyarakat sekitar sumber itu malah menambah saudara. Sampai-sampai dari paguyuban ngasih zakat sama mereka ya supaya persaudaraan itu tidak terputus karena kepentingan air saja. (RDN)</p> <p>Penggunaan sistem Grafitasi Seket ini juga mempermudah penyaluran air jadi ketika air itu masuk ke HU, kita ngk perlu buat kran lagi jadi hemat biayanya karena dari HU air itu langsung ke pipa. (NIM)</p>
--	--	--	--

		<p>Faktor Penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sulitnya wilayah jangkauan</i> - <i>Penggembosan pada masyarakat</i> - <i>Tidak standartnya pipa</i> <p>j. Siapakah orang-orang yang berperan dalam</p>	<p>Kesulitan kita memang di kondisi wilayah, karena sumber itu kan di curah, jadi harus kita ambil keatas. Butuh itung-itungan yang matang. (NIM)</p> <p>Kalau pengembangan Tirta Mandiri 2 itu ya masuk wilayah hutan. Jadi kita itu ketakutan bahkan ada anggota yang sampai mau di makan sama Macan waktu ambil mau bangun HU itu. (AWI)</p> <p>Medannya yang sulit jadi jarak tempuhnya sekitar 4 jam kalau jalan kaki ke lokasi sumber dan daerahnya bukit-bukit gitu. (SHN).</p> <p>Ada yang menyakitkan, misalkan ada orang yang ngomong kalau air ini bisa nyampe atau sukses dadapan itu laiki-laki banget. Saya dengar perkataan itu ya saya berusaha terus, kadang-kadang ada yang mendaftarkan diri, langsung ada yang menolak, karena tidak percaya kalau air nyampe (MNL).</p> <p>Banyak yang mencaci maki orang, ya ada yang menggembosi (SGR)</p> <p>Kendalanya itu dari pipa, pipanya memang bukan pipa yang standar dan murah. Pokoknya pipanya bisa nyampe lah. (MSM)</p> <p>Ketidaklancaran air itu dari pipa, memang pipanya bukan pipa yang standar, pokonya pipanya nbisa nyampe. (NIM)</p> <p>Kendalanya Air kecil dan kadang sumbernya besar sehingga meluber jadi pipa meletus. (NML)</p> <p>Pak Winoto, Yanto, Isroi dan juga pak Lukman sama kepala desa yang banyak membantu. (STL)</p>
--	--	---	--

		<p><i>proses penyediaan air</i></p> <p>k. Prinsip dan nilai apa yang menyemangati dalam penyediaan air bersih</p> <p>l. Berapa kontribusi tiap bulan yang dibayarkan dalam kegiatan perawatan ini</p> <p>m. Selain kegiatan air bersih kegiatan apa lagi yang dilakukan tirta mandiri.</p> <p>- <i>Bagaimana mekanismenya</i></p>	<p>Dengan adanya kesemangatan dari teman-teman termasuk 25 paket dengan kekompakan itu akhirnya air nyampek sini, bahkan kerjabaktinya itu sampai malam bahkan ngak sampai sholat tarawih. Akhirnya 5 hari sebelum hari raya, air sudah nyampek (APH). Intinya itu dalam mengelola air bersih harus telaten dan sabar itu bisa sukses</p> <p>Jadi air itu bentuk ibadah, karena kita bershodaqoh sama semuanya, kalau ada acara hajatan dan istigosah, peran air itu sangat penting sekali, makanya kita semangat untuk mendatangkan air tersebut. (MRT)</p> <p>Kalau bayar iuran air per paketnya ya 10.000, kalau 1 paket 2 KK ya jadi 5.000, kalau 4 KK ya 2.500. sekalian bayar arisan 10.000 buat penyemangat saja dalam acara rutinannya itu. Ada juga yang bayar untuk kas itu 10.000. (RHT)</p> <p>Jadi sistemnya untuk pertemuan itu ya giliran di rumah anggota. untuk bayarnya 10.000/paket. (SLI)</p> <p>Ada program jamban sehat, yang mengelola itu Tirta Mandiri kerjasama dengan Kader Gerbangmas. Kalau jambannya itu ya kloset. Dan harganya bervariasi antara 200.000 sampai 800.000 tapi tergantung masyarakat yang mau. (APH)</p> <p>Kalau mau daftar untuk bangun jamban itu ada yang dibayar setengahnya dulu atau nyecil nanti bulan apa bayar berapa ada juga yang langsung. Tapi rata-rata bayarnya langsung semua ke pengelola. (SMO)</p>
--	--	--	--

<p>2</p>	<p>Manfaat dari keberadaan air bersih yang di kelola Tirta Mandiri</p>	<p><i>l. Manfaat apa saja yang dirasakan dengan keberadaan Tirta Mandiri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kesehatan</i> - <i>Pendidikan</i> 	<p>Sekarang kita tambah sehat, karena bisa mandi teratur. Kita bisa mandi di rumah sekarang di banding di sungai, biasanya mandi 1 kali sehari sekarang bisa 3 kali sehari. (SGR)</p> <p>Kalau ada Tirta Mandiri kan pemerintah bisa mendompleng programnya lewat program Tirta Mandiri. Jadi program pemerintah dapat diterima di masyarakat. contohnya program STBM, Puskesmas Gucialit kerjasama sama pengurus untuk melaksanakan program itu jadi hasilnya ya disini sudah masyarakat bebas penyakit seperti diare, gudiken, muntaber akibat BAB sembarangan karena sudah ada jamban sehat Tirta Mandiri dan mudahnya mendapatkan air untuk cuci tangan setelah BAB. (AWI)</p> <p>Kalau di Tirta Mandiri kan kita banyak dapat informasi yaa intinya paguyuban ini mendidik warga lah bagaimana cara rapat, mengelolanya jadi pengetahuan kita bisa bertambah banyak. Terus lagi dengan adanya air, ibu-ibu berkumpul untuk membuat TK dan dananya dari sisa iuran bulanan air bersih ini. Dulu sebelum ada air bersih tiap pagi sampai siang biasanya ibu-ibu ya mencari air jadi ngak sampai mikir pendidikan anak-anaknya. (MSM)</p> <p>Adanya kesadaran untuk merawat sarana dan prasarana yang sudah dibangun. Jadi rasa pemilikannya itu tinggi sekali terhadap sarana milik Tirta Mandiri. ada juga program PAUD ya kita aktivkan lagi lewat kader dan pengurus Tirta Mandiri, jadi program yang dari pemerintah itu berhenti kita bangun lagi lewat kelompok-kelompok di paguyuban. (APH)</p>
----------	---	--	---

Lampiran 6: Lanjutan

			ikut Soyo. Kalau dulu itu agak susah karena orang mikir sendiri-sendiri. Kalau semisal dia mau Soyo, mikir apa dirumah ada air, jadi males mau bantu untuk Soyo itu, lah wong mikir Cuma gimana ambil airnya. (RHT)
--	--	--	---

